



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin tercapainya tujuan daerah dan agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran.
 - b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan, keberlangsungan, dan konsistensi perencanaan pembangunan dimasa transisi menuju pemilihan bupati tahun 2024, perlu menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum Ketiga huruf c Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 ditetapkan oleh kepala daerah dengan Perkada;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

- (1) Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024-2026 berlaku untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAB V	TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB IX	PENUTUP
- (2) Uraian lebih lanjut RPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan Pejabat Bupati sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2024-2026.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 31 Maret 2023
BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 31 Maret 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 39

Salinan Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BENI RACHMAT. SH.
NIP. 19701207199803 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2024-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah upaya pemerintah daerah yang secara sistematis dan terencana dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki daerah, serta dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, lapangan pekerjaan, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik yang berdaya saing sesuai dengan kewenangan daerah. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah tersebut, pemerintah daerah perlu menyusun perencanaan pembangunan daerah melalui urusan pilihan yang melibatkan berbagai macam unsur pemangku kepentingan, serta sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang substansinya saling berkaitan dan mampu menjadi kerangka acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Hal tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme, dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan di setiap daerah. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Bupati/Walikota yang masa jabatannya Berakhir pada tahun 2023 perlu Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah atau RPD. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026.

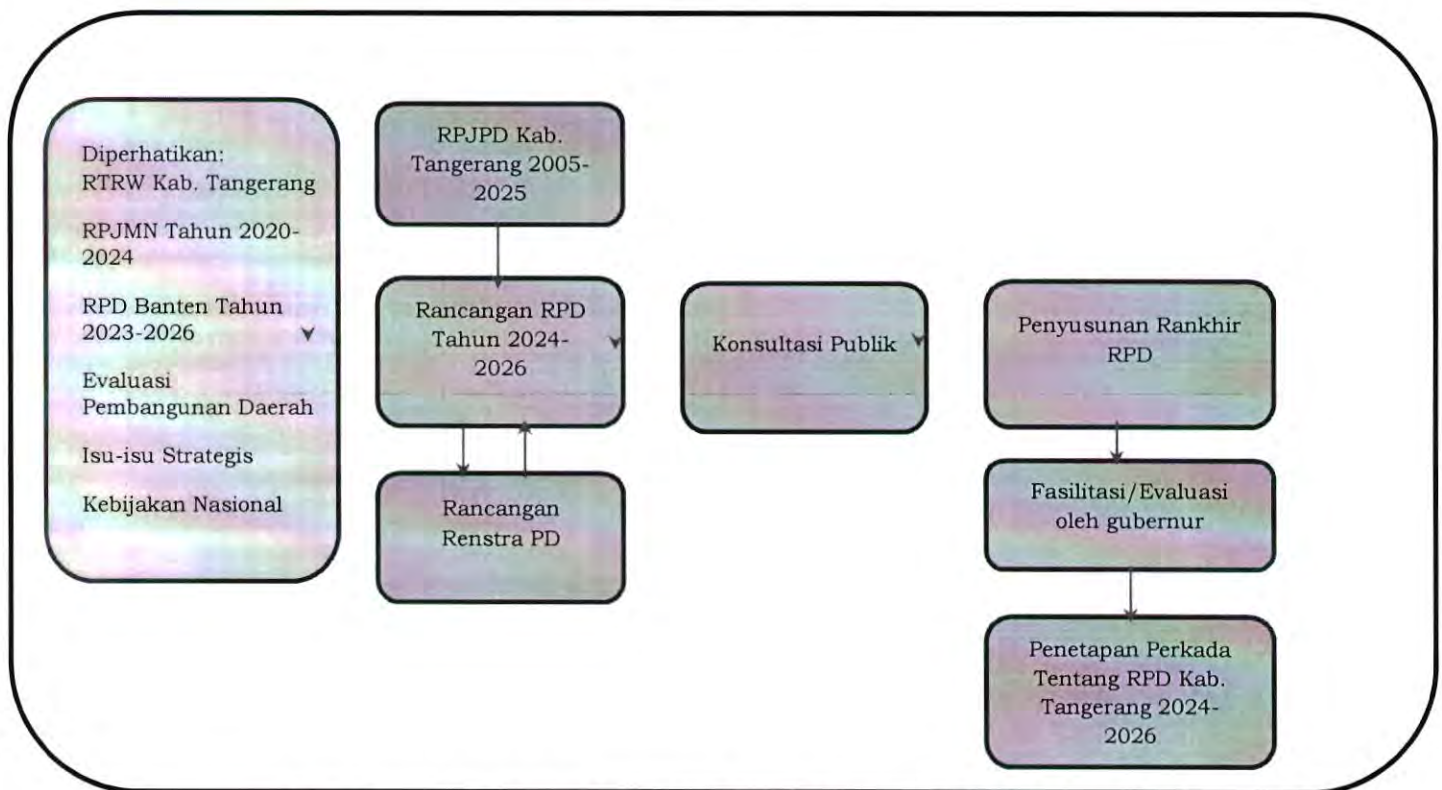
RPD Tahun 2024-2026 tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang selama periode Tahun 2024-2026. RPD Tahun 2024-2026 diharapkan menjadi acuan dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah, RPD tersebut juga sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026, dan juga sebagai pedoman dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai dokumen perencanaan strategis daerah, RPD tahun 2024-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, program prioritas daerah dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kedudukan RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 merupakan pelaksanaan dari Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 khususnya periode keempat yaitu tahun 2021-2025. Dengan begitu tujuan dan sasaran pembangunan RPD Tahun 2024-2026 mengacu pada target RPJPD Kabupaten Tangerang di tahun yang

wilayah sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031.

Dalam rangka menyelaraskan kebijakan dengan pembangunan yang terpadu, dan berkelanjutan, penyusunan RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 ini senantiasa memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025, dan RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 serta hasil evaluasi pembangunan, isu-isu strategis dan berbagai kebijakan yang berlaku. Dalam proses penyusunan RPD ini dilakukan dengan pendekatan Teknokratik, pendekatan ini menggunakan metode, asumsi dan kerangka berpikir untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selain itu juga, penyusunan RPD Tahun 2024-2026 ini senantiasa mengedepankan keterlibatan beberapa pihak seperti pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai upaya mengintegrasikan sumber daya daerah untuk menyelesaikan permasalahan dan isu-isu yang dihadapi. Proses dan tahapan penyusunan RPD Tahun 2024-2026 secara diagram dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1 Alur Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang 2024-2026



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2022

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

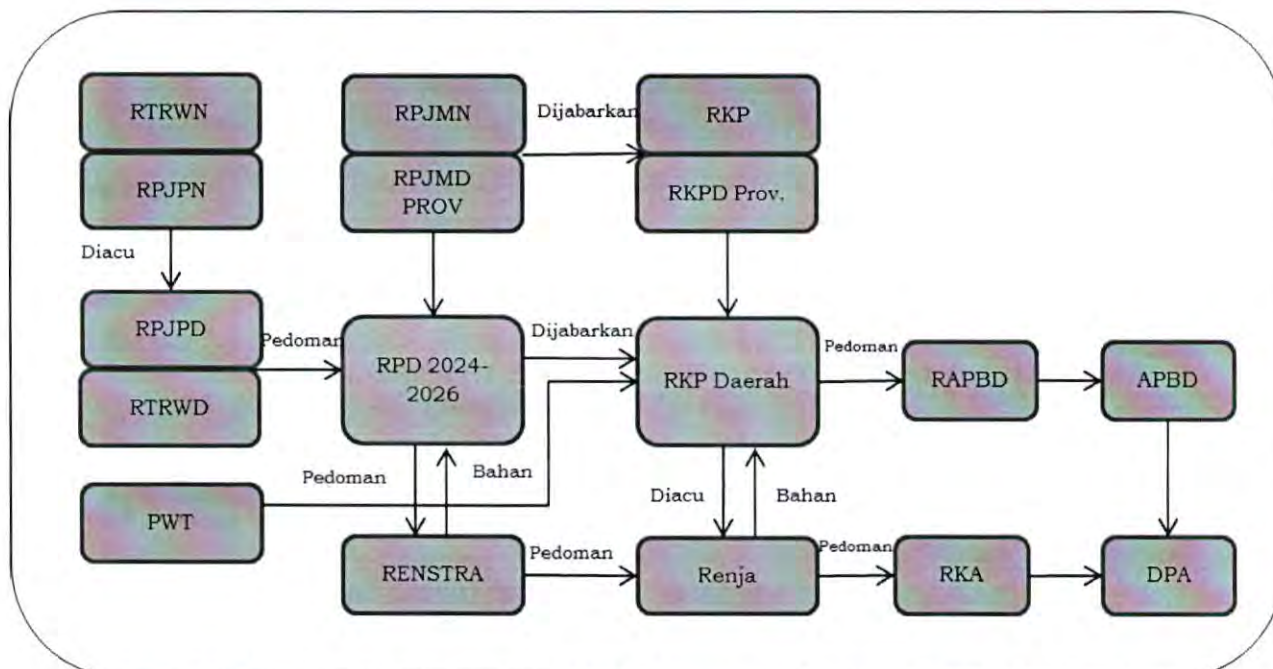
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi

- Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024-2026 sebagai tahun peralihan akibat adanya kebijakan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024, RPD memiliki hubungan dengan dokumen perencanaan yang lain baik vertikal maupun horizontal. Oleh sebab itu penyusunan RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026. RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2024-2026 dan dijabarkan ke dalam RKPD yang lebih lanjut menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keterkaitan RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

Gambar 1.2 Hubungan antara RPD Tahun 2024-2026 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya serta Dokumen Penganggaran



Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 17 Tahun 2003 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 (Hasil Analisis)

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud dalam penyusunan RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah untuk periode tahun 2024-2026 dan selanjutnya dipakai sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 ini adalah:

1. Untuk menetapkan tujuan, sasaran dan program prioritas pembangunan jangka menengah daerah.
2. Menggambarkan tentang kondisi umum daerah dalam konteks regional dan nasional sekaligus sebagai arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan alokasi pendanaan;
4. Sebagai tolak ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap perangkat daerah;
5. Mempermudah seluruh pemangku kepentingan baik jajaran aparatur Pemerintah Daerah serta DPRD maupun lembaga-lembaga swasta dan kelompok masyarakat lainnya dalam upaya mencapai tujuan pembangunan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
6. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD untuk menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional.

1.5 Sistematika Dokumen RPD

Dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RPD.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini menguraikan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dianggap prioritas untuk diselesaikan.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran daerah yang akan dicapai dalam periode jangka menengah daerah.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi dan program prioritas sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran pembangunan.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kerangka pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan program perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah beserta indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode perencanaan pembangunan.

BAB IX PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang arahan Kepala Daerah, penegasan dalam menerapkan RPD, aturan transisi dan perubahan RPD, serta arahan bagi Perangkat Daerah dalam mempedomani RPD sebagai acuan untuk penyusunan/penyempurnaan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah Kabupaten Tangerang yang mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan kabupaten/kota/ kecamatan/desa.

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu kabupaten di wilayah bagian Timur Provinsi Banten. Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Tangerang berdekatan dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat yang strategis bagi perkembangan wilayah. Dengan posisinya yang berbatasan dengan DKI Jakarta menjadi salah satu potensi Kabupaten Tangerang untuk berkembang menjadi daerah penyangga Ibukota Jakarta. Sementara itu, ditinjau dari segi transportasi, Kabupaten Tangerang dilalui oleh Jalan Raya Serang–Jakarta dan Jalan Tol Merak–Jakarta. *Double Track* Kereta Api Jakarta–Rangkas Bitung serta akses alternatif ke Bandara Internasional Soekarno – Hatta. Kebutuhan akses yang sangat cepat bagi industri dan perdagangan membutuhkan kawasan pergudangan dan industri untuk mendistribusikan produk industri dan perdagangan, sehingga kemudahan akses terhadap pelabuhan dan bandara menjadi kebutuhan utama. Selain itu, perkembangan sektor properti semakin meningkat terutama di daerah sekitar Bandara Soekarno-Hatta, seperti daerah Cisauk dan Pagedangan sehingga membutuhkan lahan yang sangat luas bagi Kawasan pemukiman warga *commuter* Jakarta – Tangerang.

Kondisi geografis dan demografi Kabupaten Tangerang menjadi tantangan pembangunan Kabupaten Tangerang terutama untuk mengatasi dampak dari beban wilayah yang sangat besar kedepannya. Perluasan *Runway* Bandara Soekarno – Hatta. pembangunan Tol Serpong – Balaraja. Tol Bandara – Balaraja. penataan Stasiun Kereta Api Cisauk dan Tigaraksa, serta pertumbuhan penduduk yang tinggi berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti kemacetan, banjir, kawasan kumuh, serta pengangguran.

Secara geografis Kabupaten Tangerang berada di antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta, sehingga Kabupaten Tangerang merupakan pintu gerbang di perbatasan Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta. Posisi ini menimbulkan interaksi yang menumbuhkan saling ketergantungan yang kemudian berdampak pada timbulnya pertumbuhan pada suatu wilayah melalui proses *trickle down effect* dan *backwash effect*. Kabupaten Tangerang merupakan daerah dengan wilayah terluas di Provinsi Banten yang perkembangan pembangunannya tergolong cepat dengan tersedianya infrastruktur, pusat perbelanjaan, pertokoan dan pasar, serta pembangunan perumahan di kawasan baru dan prasarana lainya sebagai pendukung.

2.1.1 Karakteristik lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Tangerang terletak di bagian Timur Provinsi Banten pada koordinat 106°20'-106°44' Bujur Timur dan 5°58'-6°21' Lintang Selatan. Kabupaten Tangerang termasuk salah satu daerah yang menjadi bagian dari wilayah Provinsi Banten. Terletak pada posisi geografis cukup strategis dengan batas-batas.

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah timur berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan DKI Jakarta
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Lebak
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak

Luas Kabupaten Tangerang adalah 959.6 Km². Jarak antara Kabupaten Tangerang dengan pusat pemerintahan Republik Indonesia (DKI Jakarta) sekitar 30 km, keduanya dihubungkan dengan lajur lalu lintas darat bebas hambatan Jakarta-Merak yang menjadi jalur utama lalu lintas perekonomian antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera.

Kedudukan geografis yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu potensi Kabupaten Tangerang untuk berkembang menjadi daerah urban. Secara geografis menjadi pintu gerbang untuk hubungan Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta. Kedekatan dengan Ibukota dan sebagai pintu gerbang antara Banten dan DKI Jakarta maka akan menimbulkan interaksi yang menimbulkan fenomena interdependensi yang kemudian berdampak pada timbulnya pertumbuhan pada suatu wilayah. Sebagai bentuk efek pertumbuhan wilayah, *trickling down* dan *backwash effect*, sehingga terjadi bentuk hubungan yang sinergis.

Kabupaten Tangerang merupakan daerah dengan wilayah terluas di Provinsi Banten yang perkembangan pembangunannya tergolong cepat dengan tersedianya infrastruktur, pusat perbelanjaan, pertokoan, pasar, serta pembangunan perumahan di kawasan baru dan prasarana lainya sebagai pendukung. Dalam era otonomi daerah, pembangunan diarahkan kepada tercapainya tatanan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

b. Topografi

Kondisi topografi sebagian besar wilayah Kabupaten Tangerang merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-25 meter diatas permukaan laut yang meliputi Kecamatan Teluknaga, Mauk, Kemiri, Sukadiri, Kresek, Kronjo, Pakuhaji dan Sepatan. Sedangkan dataran tinggi dengan ketinggian lebih dari 25 meter diatas permukaan laut terletak di bagian tengah ke arah selatan. Kemiringan tanah rata-rata 0-3% menurun ke utara sedangkan daerah pesisir pantainya sepanjang kurang lebih 50 km.

c. Geologi /Jenis Tanah

Jenis tanah Kabupaten Tangerang secara keseluruhan terdiri dari aluvial kelabu, aluvial kelabu tua, asosiasi aluvial kelabu tua dan glei humus rendah, asosiasi glei humus. dan planosol, regosol coklat, asosiasi latosol merah dan latosol merah kecoklatan, padsolic kuning, asosiasi padsolic kuning, asosiasi podsolik kuning dan hidromorf kelabu. Dengan jenis tanah demikian memungkinkan untuk pengembangan pertanian dan budidaya. Proses terjadinya tanah aluvial ini berlangsung karena adanya endapan sungai dan danau di daerah dataran dan daerah cekungan. Di wilayah dataran rendah dijumpai pula jenis tanah glei regosol dan sedikit podsolik yaitu asosiasinya. Efektif tanah adalah tebalnya lapisan tanah dari permukaan tanah atau suatu lapisan di mana perakaran tanaman dapat menerobosnya. Kedalaman efektif tanah berpengaruh terhadap erosi dan pemilihan jenis tanaman yang cocok di suatu wilayah. Kabupaten Tangerang terbagi atas 3 kelas kedalaman efektif tanah, meliputi :

1. Kedalaman 30-60 cm seluas 33 Ha (0,03 %) ¹/₃₂₇
2. Kedalaman 60-90 cm seluas 2.598 Ha (2,34 %)
3. Kedalaman > 90 cm seluas 101.777 Ha (91,66 %)

d. Klimatologi

Kabupaten Tangerang merupakan wilayah dengan suhu yang relatif panas dengan kelembaban yang tinggi. Suhu udara berdasarkan penelitian di Stasiun Meteorologi Budiarto Curug rata-rata berkisar antara 26,2 – 27,2°C, suhu maksimum tertinggi pada tahun 2021 bulan April yaitu 34,9°C, sedangkan suhu maksimum pada bulan April 2022 sekitar 35,0°C. dan pada tahun 2021 suhu

minimum terendah pada bulan Juli yaitu 20,1°C, sedangkan pada tahun 2022 suhu minimum terjadi pada bulan Juni sekitar 20,0°C. Rata-rata kelembaban udara. pada tahun 2021 minimum di bulan Agustus sebesar 37%, dan maksimum di bulan Mei, September dan Desember sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2022 kondisi Kelembaban Udara rata-rata antara 99°C - 100°C dengan minimum di bulan Februari-Mei sebesar 99%, dan maksimum di bulan Januari, Juni-Desember sebesar 100%. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 2.1.

Tabel 2.1 Data Iklim Kabupaten Tangerang Tahun 2022, hasil Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Curug

Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)		
	Min	Rata-Rata	Maks	Min	Rata-Rata	Maks
Januari	21,4	26,7	34,8	38,0	83,2	100,0
Februari	22,3	26,3	34,8	47,0	84,8	99,0
Maret	22,6	26,8	34,8	51,0	84,4	99,0
April	22,3	27,2	35,0	44,0	83,1	99,0
Mei	22,22	27,1	34,8	51,0	84,9	99,0
Juni	20,0	26,3	34,0	45,0	85,9	100,0
Juli	21,4	27,2	34,1	40,0	81,8	100,0
Agustus	22,0	27,0	34,6	39,0	82,9	100,0
September	20,9	26,6	34,8	36,0	85	100,0
Oktober	21,7	26,6	34,2	42,0	85,2	100,0
November	22,5	26,6	34,9	43,0	86,0	100,0
Desember	21,9	26,2	34,6	39,0	86,9	100,0

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang. 2022

Tabel 2.2 Kecepatan dan Tekanan Angin di Kabupaten Tangerang Tahun 2022

Bulan	Kecepatan Angin			Tekanan (mbar)		
	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata	Maks
Januari	0	3,9	17,0	1000,7	1004,7	1008,6
Februar	0	3,6	21,0	998,0	1003,8	1008,8
Maret	0	4,4	33,0	995,5	1003,4	1008,0
April	0	3,7	18,0	998,4	1003,7	1007,9
Mei	0	3,0	18,0	999,2	1003,9	1007,6
Juni	0	2,6	17,0	1000,4	1004,5	1007,2
Juli	0	2,6	14,0	1000,3	1004,1	1009,2
Agustus	0	2,7	11,0	1000,8	1004,6	1008,0
September	0	2,9	23,0	999,3	1005,4	1009,9
Oktober	0	3,6	17,0	1000,0	1004,8	1008,5
November	0	4,0	18,0	999,7	1004,3	1008,5
Desember	0	4,1	18,0	998,5	1003,7	1009,4

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2022

Keadaan curah hujan pada tahun 2021, tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 533,5, dengan jumlah hari hujan sebanyak 22 hari, curah hujan pada tahun 2022, tertinggi pada bulan September sebanyak 413,3 curah hujan, dengan Jumlah hari paling lama 21 hari, dengan lama penyinaran selama 9999 jam.

Tabel 2.3 Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Tangerang Tahun 2022

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)
Januari	157,2	18
Februari	240,6	21
Maret	361,9	15
April	131,6	18
Mei	179,6	17
Juni	278,0	16

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)
Juli	150,8	9
Agustus	225,9	12
September	413,3	17
Oktober	164,1	18
November	398,1	16
Desember	251,3	14

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang 2022

e. Hidrogeologi

Potensi sumber daya air di wilayah Kabupaten Tangerang digambarkan melalui kondisi sumber air permukaan dan air tanah. Kuantitas air sungai relatif cukup tinggi meskipun terjadi fluktuasi debit aliran yang cukup besar antara musim hujan dan musim kemarau, sedangkan kualitasnya menunjukkan adanya indikasi pencemaran di beberapa sungai. Kebutuhan air akan meningkat seiring pertumbuhan kegiatan dan jumlah penduduk Kabupaten Tangerang. Kebutuhan air ini harus tetap bisa dipenuhi dari sumber-sumber air yang ada, sehingga diperlukan tindakan pelestarian sumberdaya air, baik air permukaan maupun air tanah.

Air tanah secara umum memiliki potensi yang cukup tinggi. meskipun di beberapa Kecamatan (Kecamatan Mauk, Sukadiri, Kemiri, Kronjo, Pakuhaji, Teluk Naga dan Kecamatan Kosambi) terindikasi intrusi air laut dan terjadinya eksploitasi air tanah yang cukup tinggi untuk kebutuhan industri karena terbatasnya sumber air permukaan.

Berdasarkan hasil penelitian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang dengan Puskom dan IT FMIPA UI (2003) diketahui bahwa di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang (meliputi enam kecamatan yaitu : Mauk, Rajeg, Pasar Kemis, Cikupa, Curug dan Legok) terdapat tiga lapisan akifer meliputi :

1. Akifer dangkal dengan kedalaman < 20 m yang didominasi oleh lapisan pasir;
2. Akifer menengah dengan kedalaman 20 – 70 m yang merupakan lapisan lempung formasi Bantam Atas;
3. Akifer dalam dengan kedalaman > 70 m yang merupakan bagian dari formasi Genteng dan formasi Bojongmanik;
4. Recharge akifer dangkal dan menengah berasal dari air hujan dan sungai/danau. sedang recharge akifer dalam melalui batuan formasi Bojongmanik di sebelah selatan yang tersingkap (outcropped) dengan elevasi yang lebih tinggi dibanding lokasi penelitian.

f. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang pada umumnya digunakan untuk keperluan areal perkampungan dan pemukiman penduduk, areal perkebunan, sawah, ladang tegalan, areal budidaya perikanan darat, semak belukar dan hutan.

Perkembangan penduduk yang cepat serta melimpahnya kegiatan industri dan permukiman di Wilayah Kabupaten Tangerang mengakibatkan banyak terjadi pergeseran lahan. Kecenderungan yang terjadi adalah beralihnya fungsi lahan. untuk itu perlu mendapatkan perhatian mengenai keseimbangan antara fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya serta aspek kesesuaian lahan.

Penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang saat ini meliputi penggunaan untuk kawasan lindung dan penggunaan lahan untuk kawasan budidaya. Penggunaan lahan untuk kegiatan lindung meliputi sempadan pantai, danau/situ dan sempadan sungai. Sedangkan penggunaan lahan untuk kegiatan budidaya meliputi perumahan perkotaan, perumahan perdesaan, perdagangan dan jasa, zona industri, kawasan industri, pertanian irigasi teknis,

pertanian tadah hujan, kebun campuran, tegalan, perikanan (tambak), hutan dan lain-lain.

Karakter perkembangan kawasan terbangun Kabupaten Tangerang tidak lepas dari keberadaan Kabupaten Tangerang yang berada pada perlintasan pergerakan antar wilayah serta jaringan jalan regional yang menghubungkan kota-kota utama di Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Sebagai konsekuensinya kawasan terbangun yang mencakup permukiman perkotaan, permukiman perdesaan, perdagangan dan jasa, zona industri, kawasan industri industri dan fasilitas umum cenderung berkembang mengikuti pola jaringan jalan utama (linier).

Sejalan kondisi tersebut maka perkembangan Kabupaten Tangerang terjadi secara linier dengan titik orientasi perkembangan pada simpul poros jalur Lintas Tengah (poros Serang – Grogol) (terkonsentrasi pada pusat kota), sehingga distribusi kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan tidak merata. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya pelayanan kota (kesenjangan perkembangan kegiatan di bagian Tengah (pusat kabupaten) dan selatan dengan bagian utara. terjadi konflik pemanfaatan ruang terbangun dan sebagainya.

Pola pengembangan fisik/tata guna lahan saat ini berupa pola ekstensifikasi dan intensifikasi. Pola intensifikasi lebih banyak dijumpai pada daerah terbangun di pusat-pusat kegiatan/pusat kota, sedangkan pola ekstensifikasi dijumpai pada daerah-daerah pinggiran kota atau daerah transisi.

Melihat progresivitas pembangunan Kabupaten Tangerang serta fungsi yang berkembang saat ini yang menekankan kepada kegiatan industri akan menimbulkan konsekuensi meningkatnya aktivitas penduduk di Kabupaten Tangerang. Peningkatan kegiatan tanpa diimbangi dengan pelayanan sarana dan prasarana yang memadai akan menimbulkan berbagai permasalahan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya permasalahan transportasi. Hal ini perlu diantisipasi dalam proses revisi RTRW Kabupaten Tangerang.

Perkembangan penduduk yang cepat serta melimpahnya kegiatan industri dan permukiman di wilayah Kabupaten Tangerang mengakibatkan banyak terjadi pergeseran lahan. Kecenderungan yang terjadi adalah beralihnya fungsi lahan, untuk itu perlu mendapatkan perhatian mengenai keseimbangan antara fungsi kawasan lindung dan kawasan budi daya serta aspek kesesuaian lahan.

Penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang saat ini meliputi penggunaan untuk kawasan lindung dan penggunaan lahan untuk kawasan budidaya. Penggunaan lahan untuk kegiatan lindung meliputi sempadan pantai, danau/situ dan sempadan sungai. Sedangkan penggunaan lahan untuk kegiatan budidaya meliputi perumahan perkotaan, perumahan perdesaan, perdagangan dan jasa, zona industri, kawasan industri, pertanian irigasi teknis, pertanian tadah hujan, kebun campuran, tegalan, perikanan (tambak), hutan dan lain-lain.

Penggunaan tanah eksisting di Wilayah Kabupaten Tangerang tahun 2016 menurut hasil Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) yang saat ini merupakan data dasar yang digunakan untuk pemetaan Rupabumi Indonesia (RBI) skala 1:5.000 dan digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan Perubahan RTRW Kabupaten Tangerang 2011-2031. terdiri dari :

Tabel 2.4 Luas Tutupan Lahan Kabupaten Tangerang

NO	TUTUPAN LAHAN	GUNA LAHAN	LUAS (HA)
1	Fasilitas Umum	Hotel/Motel/Hostel/Losmen	9.336
		Kantor Pos Besar	0,382
		Pusat Perdagangan Tradisional	3.614
		Stasiun Pompa Bahan Bakar Gas	0,926
		Tempat Hiburan	1.470
1	Fasilitas Umum	Terminal Bus/Angkutan Kendaraan Lainnya	0,697
		Pelabuhan Udara Non Reguler	559.005
		Pariwisata/Seni/Budaya/Olah Raga Lainnya	18.401
		Pusat Pergudangan/Terminal Peti Kemas/Cargo	271.120
		Pusat Perdagangan dan Niaga Kota (Mal/Toserba)	251.919
		Stasiun Kereta Api	0,464
		2	Industri
Industri Maritim	2.743		
Industri Bahan Dasar Bangunan	5.609		
Industri Elektronik	60.456		
Industri Manufaktur Lainnya	3.744.921		
Pengolahan Air Minum	4.931		
Industri	38.733		
3	Kebun/Perkebunan		
4	Kesehatan	Rumah Sakit Umum	13.991
5	Pasir	Pasir/Bukit Pasir Darat	17.939
		Pasir/Bukit Pasir Laut	2.488
6	Pemukiman	Pemukiman dan Tempat Kegiatan	19.071.920
		Rumah Komplek/Properti Real Estate	2.245.332
7	Pendidikan	Pendidikan Agama Islam	42.630
		Pendidikan Dasar	10.731
		Pendidikan Menengah Pertama	13.869
		Pendidikan Menengah Umum	52.198
		Pendidikan Tinggi	51.612
8	Perairan	Air Danau/Situ	708.909
		Air Empang	217.529
		Air Laut	452.451
		Air Rawa	101.991
		Air Tawar Sungai	5.835.362
9	Perkantoran/ Pemerintahan	Lembaga Masyarakat	2.039
		Kantor Camat	1.229
		Kantor Lembaga Negara	174.868
		Pusat Bisnis Lainnya	574.267

NO	TUTUPAN LAHAN	GUNA LAHAN	LUAS (HA)
		Pusat Perkantoran Bisnis/Komersial Terpadu	49.252
10	Peternakan/ Penangkaran	Peternakan/ Penangkaran	285.480
11	Pusat Listrik	Instalasi TNI (AD/AL/AU)	14.928
		Gardu Induk Listrik Tegangan Tinggi	13.835
		Pembangkit Listrik Tenaga Uap	41.298
12	Rumput/ Tanah Kosong	Tanah Kosong/ Gundul	5.437.083
13	Sawah	Sawah	46.386.978
14	Semak Belukar	Semak Belukar	45.983
		Semak Belukar/Alang-alang	269.826
15	Tegalan/ Ladang	Tegalan/ Ladang	3.589.746
		TOTAL	103.453.711

Sumber : Dokumen KLHS Kabupaten Tangerang, Tahun 2019-2023

2.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Jika dilihat dari kondisi fisik wilayah Kabupaten Tangerang, masih terdapat beberapa jenis bencana yang berpotensi memberikan ancaman diseluruh wilayah Kabupaten Tangerang. Potensi bencana dilihat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan belum terjadi. Untuk bencana yang pernah terjadi berpedoman pada DIBI, sedangkan bencana yang belum terjadi berpedoman pada metodologi pengkajian risiko bencana yaitu berdasarkan Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012 dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional.

Berdasarkan pedoman tersebut, maka dapat ditentukan potensi bencana yang mengancam di Kabupaten Tangerang. Dari DIBI tercatat 4 (empat) jenis bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Tangerang. Bencana yang pernah terjadi tersebut tidak tertutup kemungkinan akan terjadi lagi. Adapun potensi bencana di Kabupaten Tangerang secara keseluruhan berdasarkan DIBI, metodologi pengkajian risiko bencana dan telah disepakati daerah.

Menurut dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tangerang Tahun 2017–2021 pengkajian risiko bencana dilaksanakan dengan mengkaji dan memetakan tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas berdasarkan indeks bahaya, indeks penduduk terpapar, indeks kerugian dan indeks kapasitas. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang melanda. Potensi dampak negatif yang timbul dihitung berdasarkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini dilihat dari potensi luas paparan bahaya, jumlah jiwa yang terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan.

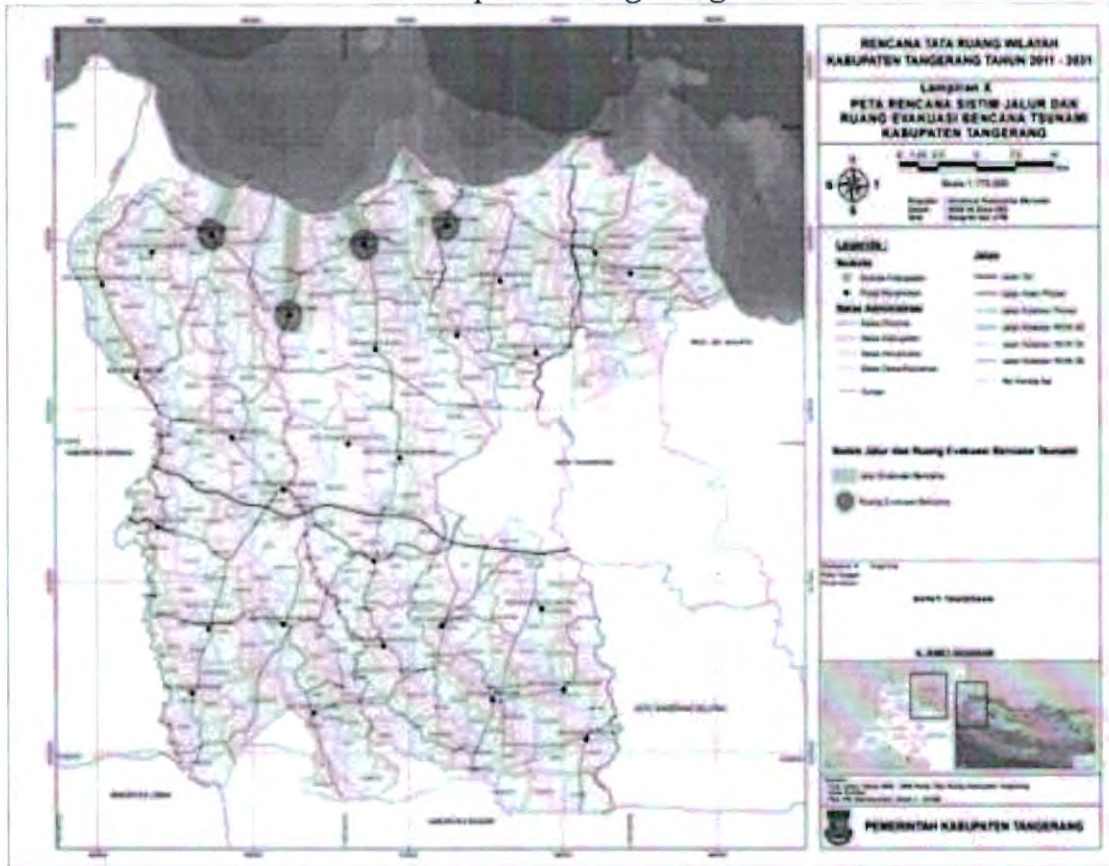
Tabel 2.5 Potensi Bencana Kabupaten Tangerang

POTENSI BENCANA DALAM KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPTEN TANGERANG	
1. CUJACA EKSTRIM	5. BANJIR BANDANG
2. GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	6. GEMPABUMI
3. KEKERINGAN	7. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
4. BANJIR	8. TSUNAMI

Sumber: DIBI dan Hasil Analisa Tahun 2016

Pengkajian risiko bencana di Kabupaten Tangerang meliputi 8 (delapan) jenis bencana yang teridentifikasi memiliki potensi terjadi. Bencana tersebut meliputi bencana cuaca ekstrim, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, banjir dan tsunami.

Gambar 2.1 Peta Rencana Sistem Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Tsunami Kabupaten Tangerang



Tabel 2.6 Tabel Kajian Pra Bencana Kabupaten Tangerang

Jenis Bencana	Potensi							
	Bahaya		Kerentanan		Kapasitas		Risiko	
	Tingkat	Jumlah	Tingkat	Jumlah	Tingkat	Jumlah	Tingkat	Luas
Banjir	Sedang-Tinggi	63.526 Ha	Sedang	99.780 Ha	Sedang	29 Kecamatan	Sedang-Tinggi	89.379
Gempa Bumi	Sedang-Tinggi	42.025	Sedang-Tinggi	11.923 88.429	Sedang	29 Kecamatan	Sedang-Tinggi	94.349
Kekeringan	Sedang-Tinggi	0	Tinggi	708	Sedang	29 Kecamatan	Sedang-Tinggi	0
Tsunami	Sedang-Tinggi	4.461	Sedang	5722	Sedang	8 Kecamatan	Sedang-Tinggi	3.389
Multi bahaya	Sedang-Tinggi	104.061	Sedang-Tinggi	99.780 100.072	Sedang	29 Kecamatan	Sedang-Tinggi	104.042

Sumber : inarisk.go.id

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang ada. Potensi dampak negatif tersebut dihitung juga dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan dan kapasitas Kawasan tersebut. Potensi dari dampak ini

menggambarkan potensi Jumlah jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang terpapar oleh potensi bencana. Dalam kajian tersebut menggunakan pendekatan tiga parameter risiko bencana yaitu ancaman, kerentanan dan kapasitas terkait bencana.

Kajian yang dilakukan oleh BNPB terhadap risiko bencana di Kabupaten Tangerang diperoleh potensi bencana meliputi meliputi bencana dengan hasil kajian diperoleh bahwa total potensi jiwa yang terpapar (Sedang-Tinggi) sebanyak 3.105.042 jiwa, nilai aset terpapar lebih dari Rp. 28.138.521 juta rupiah. dengan nilai ekonomi terpapar sebanyak Rp. 9.495.283 juta rupiah. Potensi Bencana yang dikaji meliputi potensi jiwa yang terpapar sebanyak 3.105.042 jiwa, dengan kerugian aset senilai Rp. 4.209.798 juta rupiah. dengan nilai ekonomi yang terpapar sebesar Rp. 3.453.588 juta rupiah. Potensi banjir yang terpapar sebanyak 1.946.838 jiwa. dengan nilai aset yang terpapar sebesar Rp. 7.881.809 juta rupiah. dengan nilai ekonomi yang terpapar Rp.6.885.114 juta rupiah. Potensi tsunami di Kabupaten Tangerang cukup rendah dengan banyaknya jiwa yang terpapar sebanyak 7.018 jiwa. Potensi kekeringan di Kabupaten Tangerang yang terpapar sebanyak 3.105.042 jiwa, dengan nilai ekonomi yang terpapar sebesar Rp.4.768.500 juta rupiah. Potensi bencana dari Cuaca Ekstrem sebanyak 3.105.043 jiwa yang terpapar, dengan kerugian nilai aset sebesar Rp. 28.131.896 juta rupiah, dengan nilai ekonomi sebesar Rp. 9.489.535 juta rupiah. Potensi gelombang ekstrem di Kabupaten Tangerang yang terpapar sebanyak 7.460 jiwa, sedangkan nilai ekonomi yang terpapar sebesar Rp. 26.014 juta rupiah. Potensi bencana untuk banjir bandang dengan banyaknya jiwa yang terpapar sebanyak 10.340 jiwa, dengan nilai aset sebesar Rp.57.571 juta rupiah, dengan nilai ekonomi yang terpapar sebesar Rp.17.984 juta rupiah. Potensi bencana untuk Likuefaksi atau pencairan tanah sebanyak 4.467.563 jiwa yang terpapar dengan nilai aset sebesar Rp. 30.510.193 juta rupiah, dengan nilai ekonomi yang terpapar sebesar Rp.12.006.444 juta rupiah. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel Matriks kajian risiko bencana Kabupaten Tangerang.

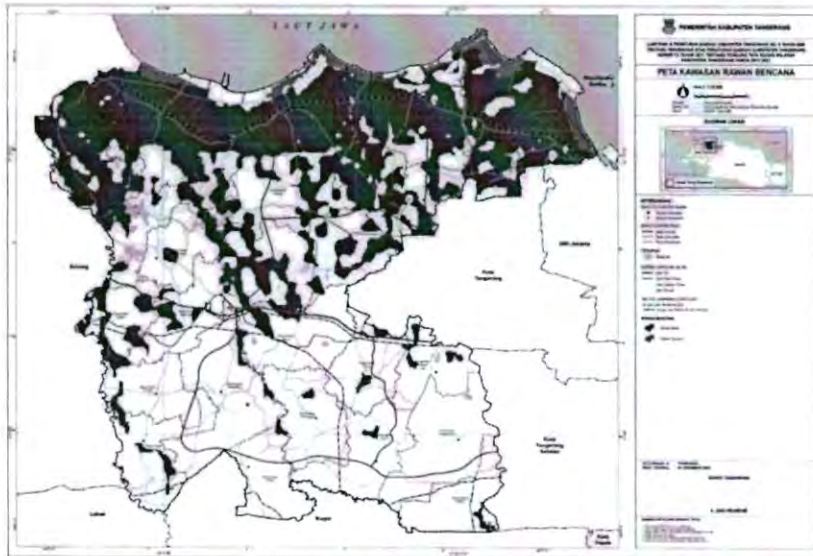
Tabel 2.7 Matriks Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tangerang

Bencana	Rendah	Sedang	Tinggi
1. Multi Bencana			
Sosial (Jiwa)	-	8.198	3.096.844
Fisik (Juta Rupiah)	-	15.644	28.122.877
Ekonomi (Juta Rupiah)	-	41.717	9.453.566
Lingkungan (Ha)	-	-	-
2. Gempa Bumi			
Sosial (Jiwa)	876.437	2.217.164	11.441
Fisik (Juta Rupiah)	-	4.108.789	101.009
Ekonomi (Juta Rupiah)	-	3.371.638	81.950
Lingkungan (Ha)	-	-	-
3. Banjir			
Sosial (Jiwa)	73.691	1.194.513	678.634
Fisik (Juta Rupiah)	-	2.113.524	5.768.285
Ekonomi (Juta Rupiah)	-	1.129.689	5.755.425
Lingkungan (Ha)	-	-	-
4. Tsunami			
Sosial (Jiwa)	7.018	-	-
Fisik (Juta Rupiah)	-	-	-
Ekonomi (Juta Rupiah)	-	-	-
Lingkungan (Ha)	-	-	-

Bencana	Rendah	Sedang	Tinggi
5. Kekeringan			
Sosial (Jiwa)	-	3.105.042	-
Fisik (Juta Rupiah)	-	-	-
Ekonomi (Juta Rupiah)	-	4.768.500	-
Lingkungan (Ha)	-	-	-
6. Cuaca Ekstrim			
Sosial (Jiwa)	-	9.217	3.095.826
Fisik (Juta Rupiah)	-	16.663	28.115.233
Ekonomi (Juta Rupiah)	-	47.464	9.442.071
Lingkungan (Ha)	-	-	-
7. Gelombang Ekstrim			
Sosial (Jiwa)	3.329	966	3.165
Fisik (Juta Rupiah)	-	1.967	24.047
Ekonomi (Juta Rupiah)	-	-	-
Lingkungan (Ha)	-	-	-
8. Banjir Bandang			
Sosial (Jiwa)	1.022	3.617	5.701
Fisik (Juta Rupiah)	-	9.618	47.953
Ekonomi (Juta Rupiah)	-	2.039	15.945
Lingkungan (Ha)	-	-	-
9. Likuefaksi			
Sosial (Jiwa)	517	1.360.690	3.106.356
Fisik (Juta Rupiah)	-	2.311.972	28.198.221
Ekonomi (Juta Rupiah)	-	2.550.653	9.455.791
Lingkungan (Ha)	-	-	-

Sumber : inarisk.bnpp.go.id/BUKU-RBI-2022

Gambar 2.2^[1] Peta Kawasan Rawan Bencana



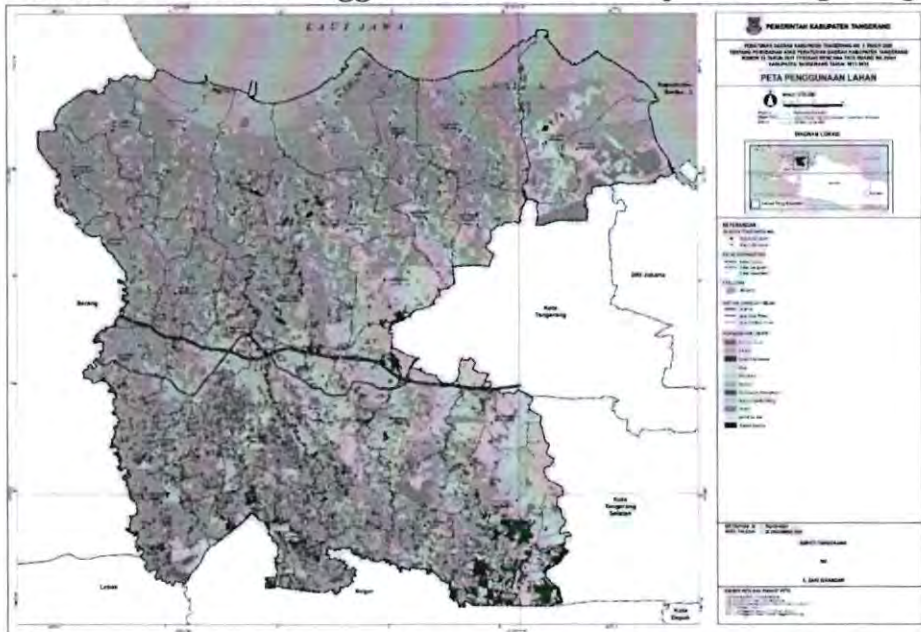
2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Arahan pemanfaatan ruang sesuai Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031, arahan potensi di Kabupaten Tangerang meliputi kawasan peruntuan lindung dan kawasan budidaya.

Guna melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan tetap melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. maka dalam Perubahan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 diatur pola ruang dalam Kabupaten Tangerang sebagaimana tertera pada gambar berikut:

Gambar 2.3 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Tangerang



Sumber : Dokumen KLHS Kabupaten Tangerang. Tahun 2019-2023

Karakter perkembangan kawasan terbangun Kabupaten Tangerang tidak lepas dari keberadaan Kabupaten Tangerang yang berada pada perlintasan pergerakan antar wilayah serta jaringan jalan regional yang menghubungkan kota-kota utama di Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Sebagai konsekuensinya kawasan terbangun yang mencakup permukiman perkotaan, permukiman perdesaan, perdagangan dan jasa, zona industri. kawasan industri dan fasilitas umum cenderung berkembang mengikuti pola jaringan jalan utama (linear).

Sejalan kondisi tersebut maka perkembangan Kabupaten Tangerang terjadi secara linear dengan titik orientasi perkembangan pada simpul poros jalur Lintas Tengah (poros Serang-Grogol) yang terkonsentrasi pada pusat kota, sehingga distribusi kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan tidak merata. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya pelayanan kota (kesenjangan perkembangan kegiatan di bagian Tengah (pusat kabupaten) dan selatan dengan bagian utara, terjadi konflik pemanfaatan ruang terbangun dan sebagainya.

Pola pengembangan fisik/tata guna lahan saat ini berupa pola ekstensifikasi dan intensifikasi. Pola intensifikasi lebih banyak dijumpai pada daerah terbangun di pusat-pusat kegiatan/pusat kota, sedangkan pola ekstensifikasi dijumpai pada daerah-daerah pinggiran kota atau daerah transisi.

Melihat progresivitas pembangunan Kabupaten Tangerang serta fungsi yang berkembang saat ini yang menekankan kepada kegiatan industri akan menimbulkan konsekuensi meningkatnya aktivitas penduduk di Kabupaten Tangerang. Peningkatan kegiatan tanpa diimbangi dengan pelayanan sarana dan prasarana yang memadai akan menimbulkan berbagai permasalahan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya permasalahan transportasi. Hal ini perlu diantisipasi dalam proses revisi RTRW Kabupaten Tangerang.

2.1.4 Demografi

Memberikan deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Menurut BPS Provinsi Banten salah satu sumber data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan 2020.

Keenam sensus penduduk sebelumnya dilaksanakan dengan menggunakan metode tradisional, yaitu mencatat setiap penduduk dari rumah ke rumah. Pertama kalinya dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia, Sensus Penduduk 2020 (SP2020) menggunakan metode kombinasi yaitu dengan memanfaatkan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai data dasar pelaksanaan SP2020. Hal ini dirancang dan dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan "Satu Data Kependudukan Indonesia".

SP 2020 mencakup seluruh penduduk yang tinggal di wilayah teritorial Indonesia, mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah menetap atau berencana menetap di wilayah Indonesia selama minimal satu tahun yang tadinya ditentukan 6 bulan. Untuk tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk yaitu kelahiran, kematian dan migrasi (migrasi internasional dan migrasi risen antar provinsi). Proyeksi penduduk interim 2020-2023 dihitung menggunakan data dasar penduduk hasil perapihan umur dari data Administrasi Kependudukan dan SP 2020 dengan menggunakan asumsi Angka Kelahiran total sejak tahun 2020 konstan 2.1 (sesuai Proyeksi Survei Penduduk antar Sensus (SUPAS) 2015-2045). Angka Kematian Bayi (AKB) meneruskan hasil Proyeksi SUPAS 2015-2045. dan pola migrasi 2020 sama dengan pola migrasi hasil SUPAS 2015. Dalam publikasi ini, data yang disajikan merupakan hasil SP 2020 (September), dan hasil proyeksi penduduk interim 2020-2023 (pertengahan tahun/Juni).

Memberikan deskripsi ukuran, struktur dan distribusi penduduk bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 berjumlah 3.352.472 jiwa yang terdiri dari 1.713.548 jiwa penduduk laki-laki dan 1.638.924 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduknya sebesar 3.493.58 per km².

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang Tahun 2022

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4	146.907	138.435	285.342
2	5 – 9	149.708	142.616	292.324
3	10 – 14	140.576	132.397	272.973
4	15 – 19	137.363	130.074	267.437
5	20 -24	142.795	139.779	282.574
6	25 – 29	153.752	150.618	304.370
7	30 – 34	154.477	146.480	300.957
8	35 – 39	146.091	140.205	286.296
9	40 – 44	134.812	134.507	269.319

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
10	45 – 49	120.403	117.671	238.074
11	50 – 54	99.199	90.820	190.019
12	55 – 59	73.591	66.022	139.613
13	60 – 64	51.186	46.513	97.699
14	65 – 69	33.729	30.432	64.161
15	70 – 74	16.868	17.527	34.395
16	75+	12.091	14.828	26.919
	Jumlah	1.713.548	1.638.924	3.352.472

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, Tahun 2022

Menurut data BPS tahun 2022 dibandingkan sensus sebelumnya, jumlah penduduk Kabupaten Tangerang terus mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Kabupaten Tangerang tahun 2022 mengalami penambahan sekitar 58.939 jiwa, dengan jumlah 3.352.472 jiwa, sedangkan berdasarkan data DKB (Data Konsolidasi Bersih) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semester II tahun 2022, jumlah penduduk yang ber-NIK Kabupaten Tangerang berjumlah Rp. 3.273.321 jiwa, dengan jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 2.359.976 jiwa.

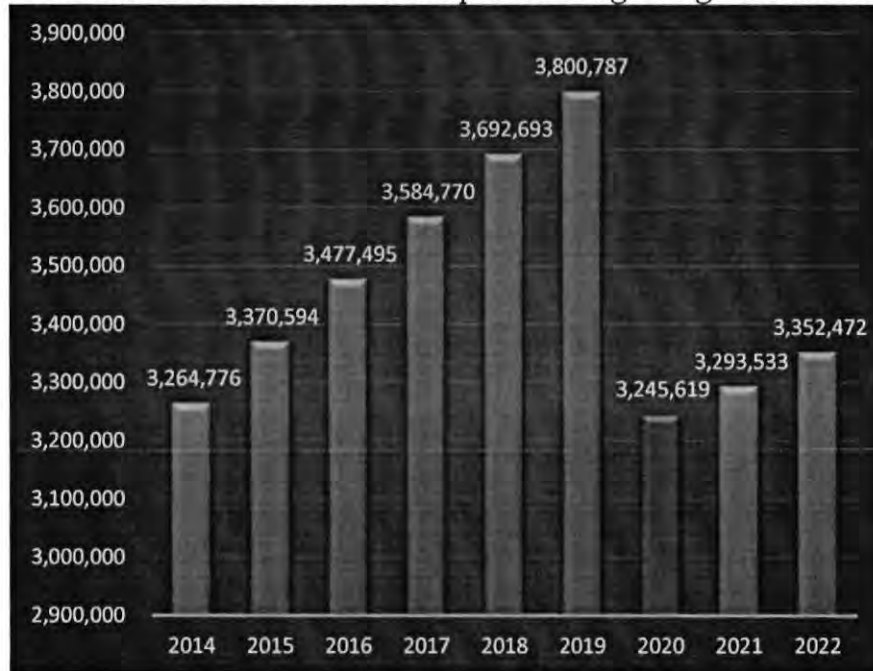
Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Wajib KTP di Kabupaten Tangerang Tahun 2022

No	Kecamatan	Wajib Ktp (Jiwa)		
		Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Total (Jiwa)
1	Balaraja	45.009	44.029	89.038
2	Jayanti	25.255	24.776	50.031
3	Tigaraksa	57.600	56.383	113.983
4	Jambe	19.065	18.736	37.801
5	Cisoka	34.387	33.043	67.430
6	Kresek	25.942	25.706	51.648
7	Kronjo	22.947	23.466	46.413
8	Mauk	32.992	31.937	64.929
9	Kemiri	17.955	17.631	35.586
10	Sukadiri	23.951	23.158	47.109
11	Rajeg	65.760	63.591	129.351
12	Pasar Kemis	96.033	94.514	190.547
13	Teluknaga	60.936	59.210	120.146
14	Kosambi	41.463	40.680	82.143
15	Pakuhaji	46.614	44.396	91.010
16	Sepatan	40.337	38.784	79.121
17	Curug	64.396	63.961	128.357
18	Cikupa	76.699	74.484	151.183
19	Panongan	45.870	45.113	90.983
20	Legok	44.063	42.610	86.673
21	Pagedangan	39.743	39.158	78.901
22	Cisauk	32.325	31.787	64.112
23	Sukamulya	26.667	26.324	52.991
24	Kelapa Dua	62.843	64.742	127.585
25	Sindang Jaya	33.716	32.733	66.449

No	Kecamatan	Wajib Ktp (Jiwa)		
		Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Total (Jiwa)
26	Sepatan Timur	38.619	36.540	75.159
27	Solear	35.675	34.374	70.049
28	Gunung Kaler	20.033	20.012	40.045
29	Mekar Baru	15.546	15.657	31.203
TOTAL		1.192.441	1.167.535	2.359.976

Sumber : Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil semester II Tahun 2022. Disdukcapil Kabupaten Tangerang

Gambar 2.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2022



Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2022

Tabel 2.10 Tabel Rasio Kelamin dan Kepadatan Penduduk berdasarkan Kecamatan Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan
1	Cisoka	100.454	110,93	3.723.28
2	Solear	100.579	107	3.467.05
3	Tigaraksa	164.081	104,08	3.366.45
4	Jambe	53.679	105,56	2.062.99
5	Cikupa	208.948	104,84	4.895.69
6	Panongan	138.632	105,52	3.968.85
7	Curug	177.012	102,56	6.457.94
8	Kelapa Dua	169.866	99,9	6.967.43
9	Legok	122.995	104,36	3.501.14
10	Pagedangan	110.755	104,13	2.424.05
11	Cisauk	97.379	104,59	3.506.63
12	Pasar Kemis	281.603	103,55	10.864.32
13	Sindang Jaya	94.373	102,31	2.540.32
14	Balaraja	121.239	104,56	3.612.60
15	Jayanti	66.075	104,33	2.765.80
16	Sukamulya	71.591	103,41	2.657.42

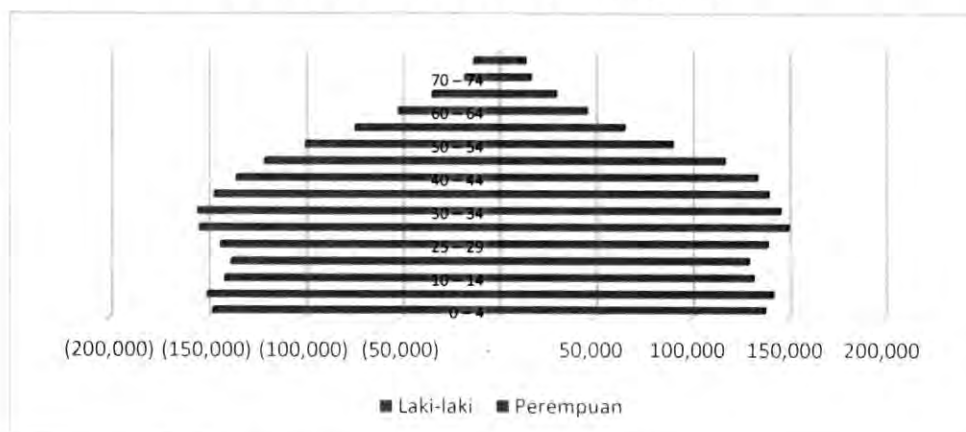
No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan
17	Kresek	69.683	104,06	2.683.21
18	Gunung Kaler	51.887	102,82	1.751.16
19	Kronjo	63.198	9982	1.428.85
20	Mekar Baru	42.663	102,79	1.791.06
21	Mauk	87.374	104,71	1.699.22
22	Kemiri	49.749	103,66	1.521.38
23	Sukadiri	65.848	104,64	2.727.75
24	Rajeg	205.098	106,15	3.819.33
25	Sepatan	122.326	106,52	7.062.70
26	Sepatan Timur	111.169	106,93	6.084.78
27	Pakuhaji	122.550	106,77	2.362.64
28	Teluknaga	166.048	105,46	4.091.87
29	Kosambi	115.618	105,29	3.885.01
Jumlah/Total		3.352.472	104,55	3.493.58

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, tahun 2022

Sex Ratio penduduk Kabupaten Tangerang tahun 2022 adalah 104.55 sedangkan tahun 2021 adalah 105. Sex ratio 104.55 yang artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan, atau setiap 100 perempuan terdapat 104 laki-laki. Sex Ratio terbesar terdapat di Kecamatan Cisoka yakni sebesar 110 dan yang terkecil terdapat di Kecamatan Kecamatan Kronjo yakni sebesar 99.

Berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk terbanyak pada kisaran umur 25-29 tahun yaitu sebesar 304.370 jiwa, meningkat dari tahun 2021 yang berjumlah 301.789 jiwa, usia tersebut terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 153.752 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 150.618 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil berdasarkan kelompok umur terdapat pada kisaran umur 75 tahun keatas yaitu sebanyak 26.919 jiwa bertambah dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 25.457 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 12.091 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 14828 jiwa. Adapun jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 2.5.

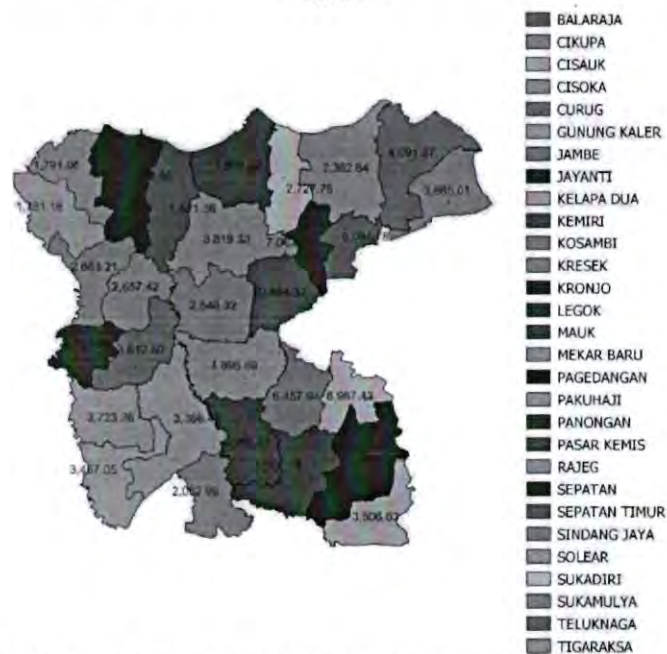
Gambar 2.5 Piramida Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022 (dalam jiwa)



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang tahun 2022

Piramida penduduk Kabupaten Tangerang menurut data tahun 2022 berbentuk piramida ekspansif. Piramida ekspansif memiliki bentuk yang besar pada bagian bawah dan semakin kecil ke bagian puncak. Piramida ini dikenal juga dengan istilah piramida segitiga, kerucut, limas atau piramida penduduk muda. Kondisi ini menunjukkan penduduk di Kabupaten Tangerang berada dalam keadaan tumbuh. Piramida seperti ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia muda lebih besar daripada kelompok usia lain. Berarti angka kelahiran tinggi, dan tingkat kematian bayi rendah. Selain itu, kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk di usia produktif, yaitu golongan usia remaja hingga dewasa mendominasi komposisi penduduk di Kabupaten Tangerang. Komposisi seperti ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebagai kelebihan, kondisi ini dapat menjadi keuntungan bagi Kabupaten Tangerang karena memiliki SDM usia produktif yang melimpah sebagai bonus demografi. Apabila ditinjau dari kecamatan yang tersebar di Kabupaten Tangerang, berikut adalah peta kepadatan penduduk Kabupaten Tangerang.

Gambar 2.6. Peta Sebaran Kepadatan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2022



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2022, diolah

Dari gambar di atas terlihat bahwa kecamatan dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi ada di Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Curug, Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Sepatan dan Kecamatan Sepatan Timur. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk rendah adalah Kecamatan Kronjo, Kecamatan Mauk dan Kecamatan Kemiri.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Terpenuhinya kesejahteraan masyarakat di segala bidang terutama di bidang pendidikan, kesehatan, serta terpenuhinya kebutuhan fasilitas publik menjadi salah satu tolak ukur terwujudnya keberhasilan pembangunan. Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan PDRB

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). Penyajian PDRB ADHK mengalami perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis berubahnya tahun dasar yang digunakan.

Perekonomian Kabupaten Tangerang tahun 2022 mengalami kenaikan setelah pandemic Covid-19 yang tadinya mengalami kontraksi di tahun 2020 sekitar 3,76% tumbuh positif di tahun 2021 menjadi 4,70%. upaya pemulihan ekonomi baik nasional dan daerah berdampak kepada laju pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Tangerang di tahun 2022 yang mencapai 5,47%. angka tersebut berada di atas angka nasional, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang tahun 2022 merupakan angka tertinggi selama dua tahun terakhir (2020-2021). Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2022 dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,34% dan sektor lapangan usaha konstruksi sebesar 8,25%. Dari 17 sektor lapangan usaha yang ada sebanyak 2 sektor lapangan mengalami penurunan yaitu sektor lapangan usaha pertambangan dan penggalian serta sektor lapangan usaha jasa Pendidikan.

Tabel 2.11

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Kategori Lapangan Usaha (persen). Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,98	2,25	2,84	(0,84)	2,28
B	Pertambangan dan Penggalian	5,72	2,30	(5,90)	(9,45)	(12,20)
C	Industri Pengolahan	2,66	3,20	(8,74)	4,26	5,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,82	(4,23)	(12,35)	11,69	5,56
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,19	6,71	8,60	5,81	1,36
F	Konstruksi	8,18	9,44	(3,29)	11,96	8,25
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,69	6,22	(3,70)	1,82	3,27
H	Transportasi dan Pergudangan	9,60	9,55	(5,32)	9,90	7,86
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,62	7,86	(5,63)	4,45	8,34
J	Informasi dan Komunikasi	8,35	9,69	9,12	5,17	6,85
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,16	0,72	1,56	6,07	6,81
L	Real Estat	9,44	9,49	1,96	3,07	5,19
M,N	Jasa Perusahaan	6,02	9,20	(6,00)	(2,25)	4,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,48	8,75	(0,38)	(0,76)	1,09
P	Jasa Pendidikan	8,25	8,30	0,62	(1,10)	(0,02)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,68	11,13	4,41	9,14	2,94
R,S,T, U	Jasa Lainnya	8,69	9,36	(6,11)	1,39	7,77
Total		5,80	5,56	(3,76)	4,70	5,47

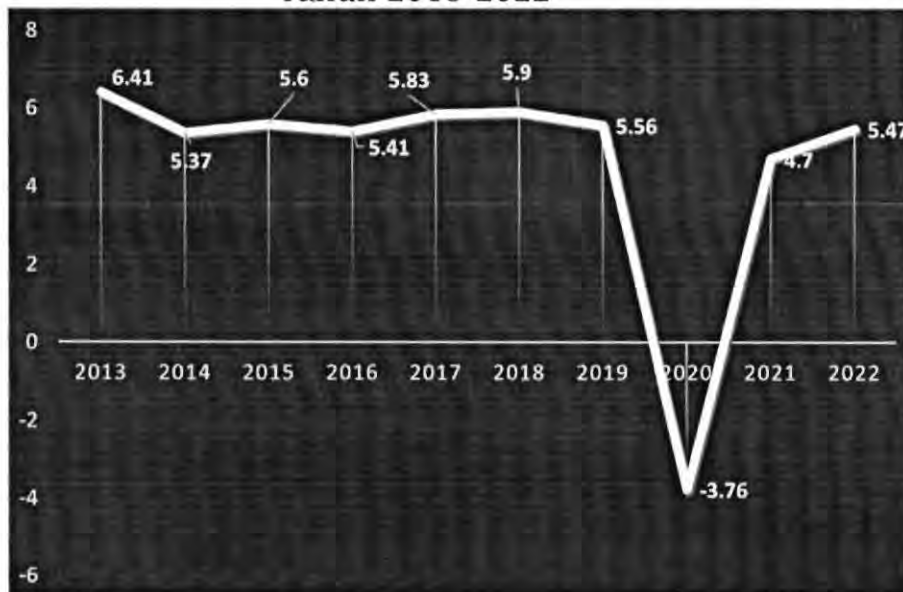
*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber : Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2022

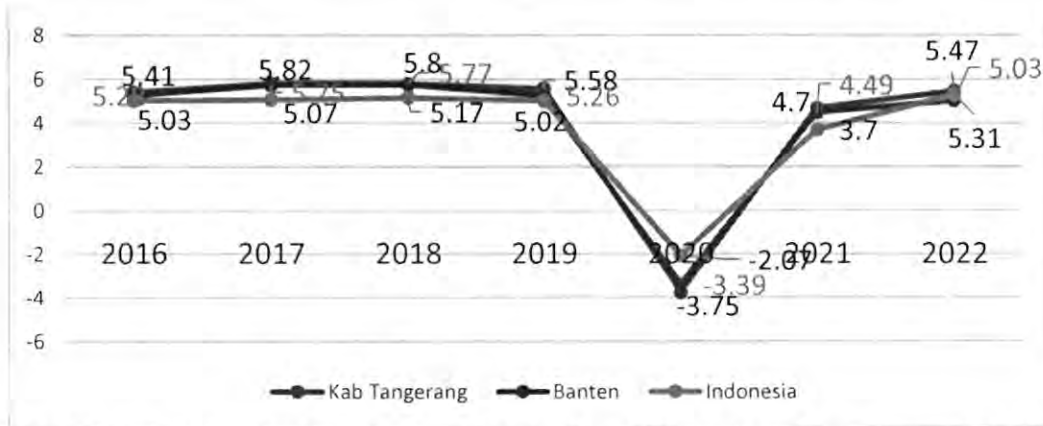
Di tahun 2022, PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga berlaku (nominal) sebesar 160.168,18 miliar rupiah, sedangkan pada tahun yang sama. PDRB atas dasar harga konstan (PDB riil) adalah sebesar 103.221,02 miliar rupiah atau tumbuh sebesar 5,47 persen dari tahun sebelumnya yang nilainya 97.869,38 miliar rupiah. Kondisi tersebut mulai menunjukkan peningkatan setelah tahun 2021 yang merupakan fase pemulihan ekonomi PDRB Kabupaten Tangerang baik ADHB maupun ADK terganggu. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang menurut PDRB harga konstan relatif sedikit berfluktuasi sejak tahun 2016. Pada tahun 2016 sebesar 5,41%. tahun 2017 meningkat menjadi 5,82% yang merupakan titik tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi turun tipis menjadi 5,80% dan kembali menurun di tahun 2019 mencapai 5,56%. Memasuki tahun 2020 gejolak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun drastis ke angka minus 3,76%. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Banten dan nasional. pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang dalam empat tahun terakhir, nilainya berkisar di atas angka 5,00% dan relatif masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten dan nasional dari tahun 2016-2019. Sayangnya. pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang menurun hingga angka yang lebih rendah daripada laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten maupun Nasional. Laju pertumbuhan ekonomi nasional. Banten dan Kabupaten Tangerang mulai pulih dengan ditunjukkan dengan mulai tumbuh positif, pada tahun 2021-2022 Laju Pertumbuhan Ekonomi meningkat di angka 4,70% di tahun 2021, dan meningkat di tahun 2022 di angka 5,47%. begitu juga dengan Provinsi Banten yang mulai tumbuh sekitar 5,03%.

Gambar 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2022



Gambar 2.8 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang.

Provinsi Banten. dan Nasional Tahun 2016-2022



Sumber : BPS Nasional. Provinsi Banten. dan Kabupaten Tangerang. 2022

Apabila dilihat berdasarkan kontribusi PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, pada tahun 2022, kontribusi terbesar pada tahun 2022 dicapai oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 53.176,12 miliar rupiah atau sekitar 33,20% dari PDRB sektor lapangan usaha Konstruksi sebesar 26.926,03 miliar rupiah atau sekitar 16,81% dari PDRB, sektor lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17.698,47 miliar rupiah atau sekitar 11,05% dari PDRB, sektor lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 10.135,98 miliar rupiah atau sekitar 6,33% dari share PDRB.

Menurut PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha pada tahun 2022 kontribusi sektor lapangan usaha yang paling besar dari sektor lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 36. 003,68 miliar rupiah, sektor lapangan usaha Konstruksi sebesar 15.139,01 miliar rupiah, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11.823,97 miliar rupiah.

Tabel 2.12 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tangerang (miliar rupiah) Tahun 2017–2022

Lapangan Usaha/Industry		2017	2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	5.339,40	5.498,45	5.622,08	5.781,50	5.732,64	5.863,37
B	Pertambangan dan Penggalian	35,87	37,92	38,79	36,50	33,05	29,02
C	Industri Pengolahan	33.877,15	34.778,08	35.890,71	32.752,13	34.147,21	36.003,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas/	1.408,41	1.490,37	1.427,30	1.251,07	1.397,36	1.475,50
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	70,53	74,19	79,17	85,98	90,97	92,21
F	Konstruksi	10.909,63	11.802,04	12.916,15	12.491,21	13.985,16	15.139,01
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.113,12	10.991,87	11.675,61	11.244,17	11.449,34	11.823,97
H	Transportasi dan Pergudangan	2.461,27	2.697,43	2.955,03	2.797,73	3.074,77	3.316,51
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.302,58	1.414,83	1.525,99	1.440,15	1.504,19	1.629,58
J	Informasi dan Komunikasi	4.436,55	4.807,00	5.272,80	5.753,68	6.051,14	6.465,40
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.347,71	4.659,19	4.692,76	4.765,93	5.055,38	5.399,42
L	Real Estat	7.019,03	7.681,62	8.410,61	8.575,46	8.838,72	9.297,45
M N	Jasa Perusahaan	823,60	873,19	953,52	896,31	876,14	915,25
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.251,11	1.332,18	1.448,75	1.443,24	1.432,30	1.447,94
P	Jasa Pendidikan	1.982,45	2.146,00	2.324,12	2.338,53	2.312,76	2.312,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	365,41	400,78	445,38	465,03	507,53	522,45
R S T U	Jasa Lainnya	1.220,22	1.326,26	1.450,39	1.361,78	1.380,70	1.487,98
Produk Domestik Regional Bruto		86.964,03	92.011,41	97.129,17	93.480,39	9.7869.38	10.3221,02

*Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, Tahun 2022

Tabel 2.13 PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (miliar Rupiah)

Lapangan Usaha/Industry		2017	2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.151,59	8.678,39	9.045,55	9.435,98	9.473,10	10.135,98
B	Pertambangan dan Penggalian	51,56	56,53	58,54	55,54	50,93	45,88
C	Industri Pengolahan	43.841,07	46.552,10	49.164,34	45.200,55	48.117,52	53.176,12
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.769,27	4.947,79	4.693,53	4.096,16	4.630,76	4.936,40
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	74,50	79,67	85,48	93,49	100,24	102,87
F	Konstruksi	16.202,51	18.448,09	20.797,30	20.159,33	23.459,65	26.926,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.138,61	14.742,54	16.234,31	15.934,12	16.403,33	17.698,47
H	Transportasi dan Pergudangan	3.449,70	3.865,87	4.320,45	4.148,08	4.651,38	5.330,79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.786,71	1.960,20	2.133,60	2.021,19	2.123,07	2.342,57
J	Informasi dan Komunikasi	3.907,54	4.136,44	4.505,50	4.898,70	5.144,75	5.553,03
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.344,54	7.081,15	7.290,26	7.412,07	8.239,97	9.597,07
L	Real Estat	8.688,00	9.698,31	10.957,41	11.392,27	11.859,43	12.706,97
M,N	Jasa Perusahaan	1.240,18	1.357,31	1.537,09	1.470,01	1.454,75	1.569,84
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.027,46	2.200,72	2.469,16	2.571,45	2.618,05	2.742,84
P	Jasa Pendidikan	3.011,68	3.444,99	3.899,57	3.981,03	3.957,24	4.030,36
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	496,31	570,59	656,87	695,57	774,48	811,76
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1.812,85	2.005,27	2.240,33	2.166,13	2.225,00	2.461,19
	Produk Domestik Regional Bruto	118.994,08	129.825,98	140.089,29	135.731,68	145.283,68	160.168,18

*Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang. Tahun 2022

Tabel 2.14 Kontribusi PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2022

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,85	6,68	6,46	6,95	6,52	6,33
B	Pertambangan dan Penggalian	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
C	Industri Pengolahan	36,84	35,86	35,10	33,30	33,12	33,20
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,01	3,81	3,35	3,02	3,19	3,08
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,06
F	Konstruksi	13,62	14,21	14,85	14,85	16,15	16,81
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,04	11,36	11,59	11,74	11,29	11,05
H	Transportasi dan Pergudangan	2,90	2,98	3,08	3,05	3,20	3,33
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,50	1,51	1,52	1,49	1,46	1,46
J	Informasi dan Komunikasi	3,28	3,19	3,22	3,61	3,54	3,47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,33	5,45	5,20	5,46	5,67	5,99
L	Real Estat	7,30	7,47	7,82	8,39	8,16	7,93
M,N	Jasa Perusahaan	1,04	1,05	1,10	1,08	1,00	0,98
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,70	1,70	1,76	1,89	1,80	1,71
P	Jasa Pendidikan	2,53	2,65	2,78	2,93	2,72	2,52
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,42	0,44	0,47	0,51	0,53	0,51
R,S,T, U	Jasa Lainnya	1,52	1,54	1,60	1,60	1,53	1,54
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100

Catatan / Note: * Angka sementara / Preliminary figures

** Angka sangat sementara / Very preliminary figures

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, 2022

Tabel 2.15 Penentuan Sektor Basis dan Non Basis Sektor Unggulan di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2022

No.	URAIAN	Rata-Rata	Keterangan
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,0748	BASIS
2	Pertambangan dan Penggalian	0,0617	Non Basis
3	Industri Pengolahan	1,0772	BASIS
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,5706	BASIS
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,8504	Non Basis
6	Konstruksi	1,3203	BASIS
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,8727	Non Basis
8	Transportasi dan Pergudangan	0,5135	Non Basis
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,6241	Non Basis
10	Informasi dan Komunikasi	0,9068	Non Basis
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,6880	BASIS
12	Real Estate	0,9700	Non Basis
13	Jasa Perusahaan	0,9188	Non Basis
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,8340	Non Basis
15	Jasa Pendidikan	0,7710	Non Basis
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,3560	Non Basis
17	Jasa lainnya	0,6825	Non Basis

Sumber : Analisis LQ PDRB Kabupaten Tangerang, 2016-2022

Analisis PDRB dalam penentuan sektor basis maupun non basis berdasarkan PDRB Menurut Harga Konstan tahun 2015-2022 diperoleh bahwa sektor lapangan usaha PDRB yang menjadi sektor basis di Kabupaten Tangerang adalah :

1. Jasa Keuangan dan Asuransi
2. Pengadaan Listrik dan Gas
3. Konstruksi
4. Industri Pengolahan
5. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kelima (5) sektor tersebut mampu melayani kebutuhan masyarakat Kabupaten Tangerang dan juga mampu melayani masyarakat di luar Kabupaten Tangerang,

Analisis Shift Share PDRB Kabupaten Tangerang tahun 2015-2022 diperoleh hasil analisis terhadap lapangan usaha sebanyak 17 sektor yaitu bahwa :

- a. Sektor lapangan usaha yang ada di Kabupaten Tangerang seluruh sektor (17) tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan rata-rata Provinsi Banten.
- b. Sektor yang tumbuh secara lambat, meliputi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.
- c. Sektor yang maju dan sektor tersebut tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan meliputi sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa

Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa lainnya.

- d. Sektor tidak memiliki daya saing di Kabupaten Tangerang. sektor ini meliputi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Perusahaan dan Jasa Pendidikan.

2. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Berdasarkan pemantauan Badan Pusat Statistik terhadap 416 jenis barang dan jasa serta hasil Survei Biaya Hidup (SBH) di Kota Serang, Tangerang dan Cilegon baik secara mingguan, dua mingguan maupun bulanan.

Pada Desember 2022, Tangerang mengalami inflasi yoy (*year on year*) sebesar 4,56 persen. atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,94 pada Desember 2021 menjadi 111,82 pada Desember 2022. Tingkat inflasi mtm (*month to month*) sebesar 0,43 persen dan tingkat inflasi ytd (*Year to date*) sebesar 4,56 persen. Komoditas yang memberikan andil inflasi yoy di Kota Tangerang adalah bensin sebesar 1,36 persen. mobil sebesar 0,27 persen, angkutan udara sebesar 0,15 persen, bawang merah sebesar 0,14 persen, bahan bakar rumah tangga sebesar 0,13 persen.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2022 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Banten di 3 kota, pada Desember 2022 terjadi inflasi yoy sebesar 7,22 persen untuk kota Serang 5,86 persen untuk Kota Cilegon dan 4,56 persen untuk Kota Tangerang.

Inflasi di Tangerang terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks 10 kelompok pengeluaran. yaitu kelompok transportasi sebesar 18,80 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 7,87 persen; kelompok kesehatan sebesar 6,31 persen; kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,49 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,31 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,51 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,33 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,63 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,33 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,03 persen; Sementara itu kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 0,06 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy di kota Tangerang pada Desember 2022 antara lain bensin, mobil, angkutan udara, bawang merah, bahan bakar rumah tangga, upah asisten rumah tangga, tukang bukan mandor, telur ayam ras, tahu menta dan daging ayam ras. Sementara itu komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi yoy, antara lain: cabai merah, minyak goreng, kangkung, pisang, udang basah, bawang putih, cabai rawit, shampo, daun bawang dan baju muslim wanita.

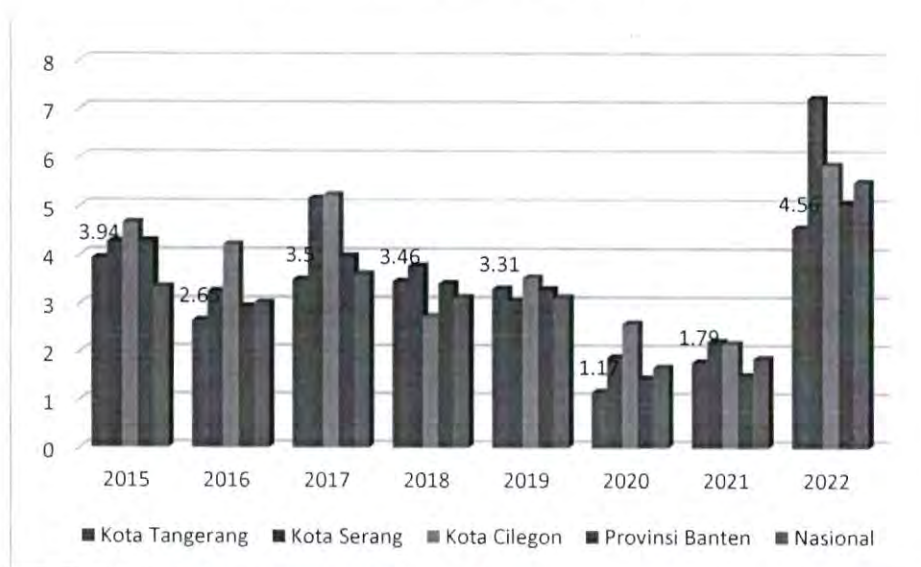
Tabel 2.16 Perkembangan Inflasi di Kota Tangerang. Kota Serang. Kota Cilegon. Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2015-2022

inflasi YoY (%)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Tangerang	3,94	2,65	3,50	3,46	3,31	1,17	1,81	4,56
Kota Serang	4,28	3,26	5,17	3,78	3,06	1,89	2,23	7,22
Kota Cilegon	4,67	4,22	5,24	2,73	3,54	2,59	2,19	5,86
Provinsi Banten	4,29	2,94	3,98	3,42	3,30	1,45	1,51	5,08
Nasional	3,35	3,02	3,61	3,13	3,13	1,68	1,87	5,51

Sumber: Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Provinsi Banten, 2015 – 2022 (Inflasi Kota Tangerang)

Inflasi Kabupaten Kabupaten Tangerang sampai saat ini masih mengacu pada Inflasi Kota Tangerang, hal tersebut karena Kabupaten Tangerang belum dipilih oleh BPS RI sebagai acuan penghitungan inflasi pada kota-kota di Indonesia. Pada periode tahun 2015-2022, laju inflasi di Kabupaten Tangerang sekitar 4,56% tahun 2022. Inflasi di Tangerang terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks 11 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok transportasi sebesar 18,80 persen. kenaikan pada transportasi merupakan dampak secara nasional pemerintah menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak) pada September 2022. Beberapa komoditas yang dominan menyumbang inflasi pada bulan September ini adalah komoditas: bensin. angkutan dalam kota, angkutan tarif rumah sakit, tarif kendaraan roda 2 online, beras, tarif kendaraan roda 4 online, lemari pakaian, akademi/perguruan tinggi, mainan anak. Sementara komoditas yang dominan menyumbang deflasi pada bulan September ini adalah komoditas: bawang merah, cabai merah, cabai rawit, angkutan udara, susu bubuk untuk balita, tomat, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng dan bawang putih.

Gambar 2.9 Perkembangan Inflasi di Tangerang. Provinsi Banten. dan Nasional Tahun 2015-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Perkembangan tingkat inflasi Tangerang, Kota Serang, dan Kota Cilegon dari tahun 2015-2022 relatif berfluktuasi. Inflasi Kabupaten Tangerang sampai saat ini masih mengacu pada Inflasi Kota Tangerang, hal tersebut karena Kabupaten Tangerang belum dipilih oleh BPS RI sebagai acuan penghitungan inflasi pada kota-kota di Indonesia. Pada periode tahun 2015-2022. Nilai inflasi tertinggi Kota Tangerang adalah pada tahun 2022, yaitu sebesar 4,56%, sementara nilai inflasi pada tahun 2020 adalah yang terendah yaitu sebesar 1,17%.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan dengan nilai inflasi Provinsi Banten, nilai inflasi di Kota Tangerang pada tahun 2019 adalah sebesar 3,31% sama jika dibandingkan Provinsi Banten yang juga sebesar 3,30% memasuki tahun 2022 inflasi kota Tangerang naik manjadi mencapai nilai 4,56% yang nilainya lebih tinggi dari inflasi Provinsi Banten sebesar 5,08%. Sementara itu, jika dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional pada tahun 2019-2022, inflasi Kota Tangerang pada tahun 2019 mencatat nilai yang lebih tinggi yaitu 3,30% dibandingkan inflasi Nasional sebesar 2,72% dan tahun 2022 inflasi Kota Tangerang sebesar 4,56% tercatat lebih rendah daripada inflasi nasional tahun 2022 sebesar 5,51%.

3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan setiap penduduk rata-rata, sehingga bisa dijadikan salah satu indikator bagi keberhasilan pembangunan terutama pembangunan terutama pembangunan bidang ekonomi. Meskipun demikian PDRB per kapita belum dapat menggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebenarnya. Indikator tersebut hanya dapat dipakai untuk menggambarkan apakah ada peningkatan produktivitas pembangunan setiap orangnya. PDRB per kapita sebagai salah satu indikator produktivitas penduduk dapat dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. Untuk memacu peningkatan PDRB per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus jauh lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk.

Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini, PDRB per kapita menurut harga berlaku mengalami peningkatan dari tahun 2017-2022. PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku mencapai titik tertinggi di tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 47.776 (000 rupiah). PDRB per kapita Kabupaten Tangerang menurut Harga Konstan tahun 2022 sebesar Rp. 30.789,52 (000 rupiah).

Gambar 2.10 Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Harga Berlaku di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten 2017-2022 (000 rupiah)

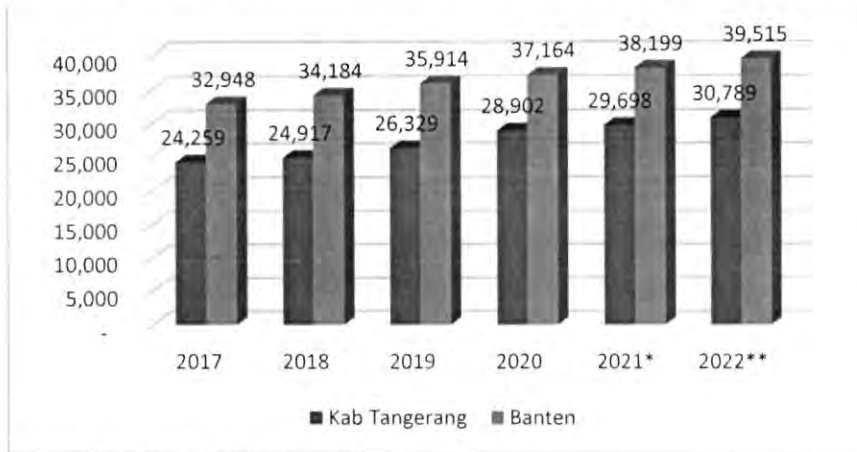


Sumber: BPS Provinsi Banten, 2022

* Angka Sementara

** Angka sangat sementara

Gambar 2.11 Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Harga Konstan di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten 2017-2022 (000 rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Banten. 2022

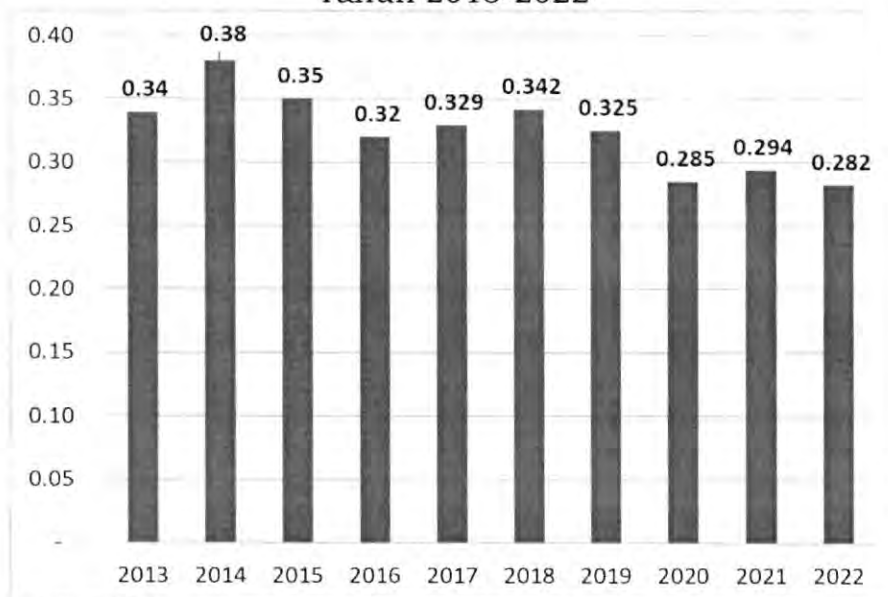
* Angka Sementara

** Angka sangat sementara

4. Indeks Gini

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Adanya penurunan tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat yang diukur oleh Gini Ratio. Gini Ratio dibagi atas tiga level. Level pertama, menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah, yaitu berada pada kisaran 0 sampai 0,3. Level kedua ketimpangan menengah yaitu antara 0,3 hingga 0,5. Level ketiga ketimpangan tinggi yaitu berada di atas 0,5. Gini Rasio Kabupaten Tangerang tahun 2022 sebesar 0,282 angka ini menurun dibandingkan dengan Gini Ratio 2021 yang sebesar 0,294. Ini menandakan level ketimpangan Pendapatan penduduk di Kabupaten Tangerang masih tergolong pada level rendah.

Gambar 2.12 Gini Rasio Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022



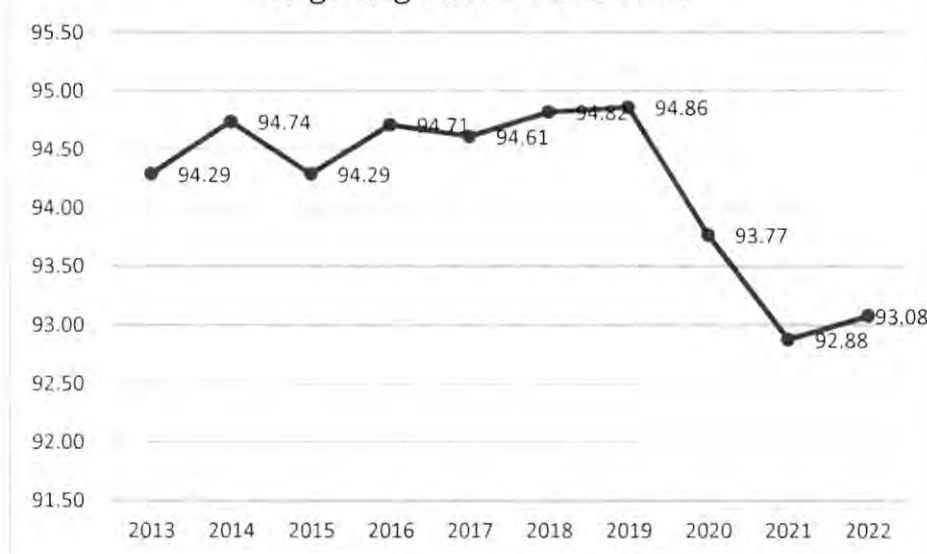
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022, diolah.

5. Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan

Kemiskinan didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemiskinan absolut yang mana pengukuran tingkat kemiskinan didasarkan pada satu garis yang disebut sebagai Garis Kemiskinan (GK). Garis kemiskinan ini terdiri dari 2 komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Masalah kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang menjadi pusat perhatian Pemerintah Daerah. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.13 Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022



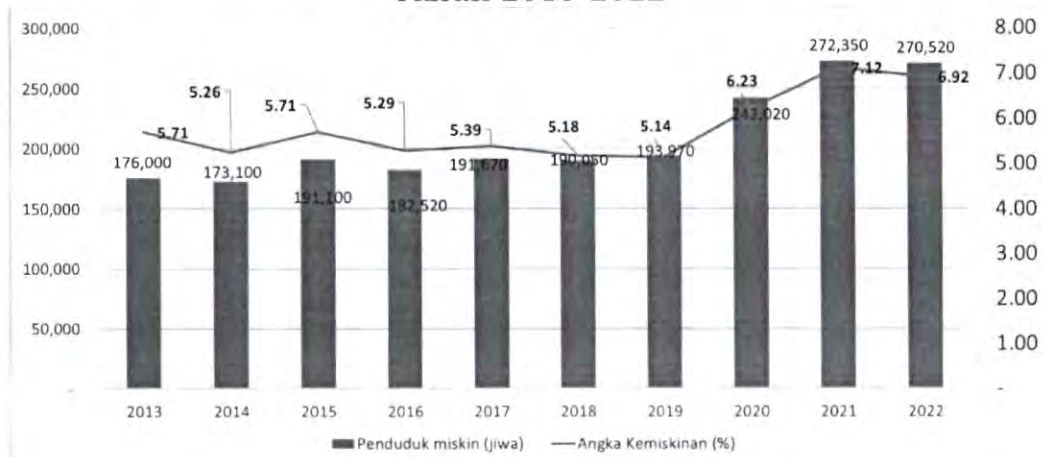
Sumber: BPS RI. diolah.

Dari gambar grafik diatas dapat diketahui bahwa terdapat kenaikan terhadap persentase penduduk diatas garis kemiskinan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019 capaian Penduduk di atas garis kemiskinan adalah sebesar 94,86%. kemudian capaian ini pada tahun 2020 menjadi 93,77% dan kembali menurun pada tahun 2021 menjadi 92,88%. Capaian ini kemudian kembali meningkat di tahun 2022 mencapai 93,08%.

6. Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan. baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Masalah kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang menjadi pusat perhatian Pemerintah Daerah. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Tangerang Tahun 2016- 2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.14 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022



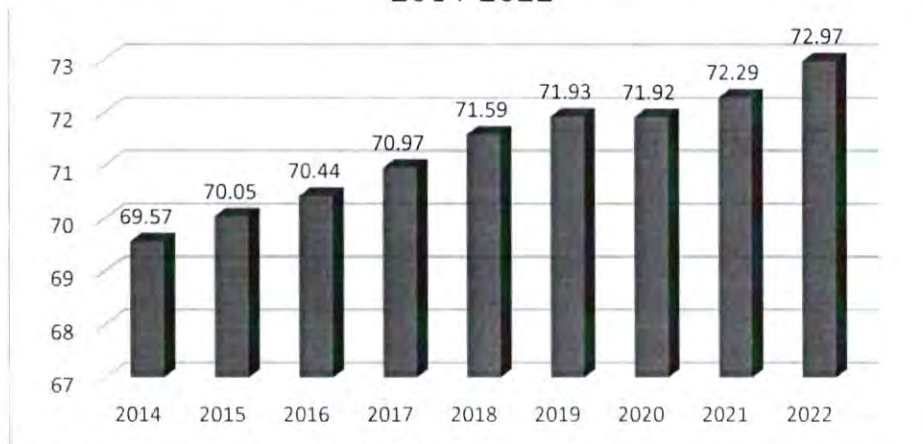
Sumber: BPS RI. diolah.

Dari data diatas menunjukkan bahwa persentase penduduk diatas garis kemiskinan Kabupaten Tangerang berfluktuasi nilainya. pada tahun 2018 mencapai nilai sebesar 5.18% kemudian persentase penduduk miskin tahun 2019 kembali menurun hingga mencapai 5.14%. Untuk di tahun 2020 mengalami kenaikan . persentase penduduk diatas garis kemiskinan sebesar 6.23%. tahun 2021 kembali naik menjadi 7.12%, serta tahun 2022 turun menjadi sekitar 6.92% hal ini mengindikasikan keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka penanganan pandemi covid-19.

7. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Gambar 2.15 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2022



Sumber : BPS Provinsi Banten. 2022

Dari data dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerang relatif mengalami peningkatan

Tabel 2.17 Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2022

Komponen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umur Harapan Hidup Saat lahir (UHH.Tahun)	69,37	69,47	69,61	69,79	69,89	69,93	70,28
Harapan Lama Sekolah (HLS, Tahun)	12,11	12,51	12,8	12,81	12,82	12,84	12,85
Rata-rata Lama Sekolah (RLS, Tahun)	8,23	8,27	8,27	8,28	8,39	8,61	8,92
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP, Ribuan Rupiah)	11,863	11,914	12,179	12,476	12,203	12,273	12,427
IPM	70,44	70,97	71,59	71,93	71,92	72, 29	72,97

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Kemampuan membaca dan menulis tercermin dari indikator angka melek huruf. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan salah satu indikator pencapaian program pendidikan di Indonesia.

Gambar 2.16 Angka Melek Huruf Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022



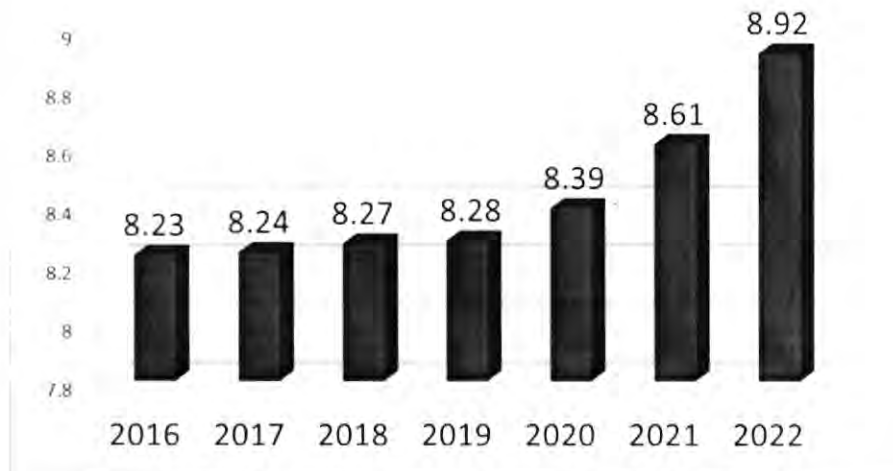
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang. 2022. diolah.

Pendidikan merupakan salah satu penentu kualitas penduduk. Indikator atau ukuran yang bisa digunakan untuk melihat tingkat kemajuan pendidikan di suatu daerah antara lain adalah dengan melihat persentase harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Kualitas sumber daya manusia sangatlah bergantung dari pembangunan di bidang pendidikan. Data diatas menunjukkan bahwa terdapat penurunan persentase Angka Melek huruf mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, hal ini disebabkan penduduk yang berusia 15 tahun keatas makin banyak yang belum mengenyam pendidikan dasar, dikarenakan belum terakses secara optimal pendidikan kesetaraan untuk masyarakat yang berumur lebih dari 15 tahun keatas yang belum mengikuti wajib belajar pendidikan dasar.

2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah merupakan Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tangerang meningkat dalam kurun waktu 5 tahun. Pada tahun 2021. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tangerang mencapai 8,61 tahun. Sedangkan di tahun 2022 angka rata-rata lama sekolah mencapai 8,92 tahun. Walaupun meningkat setiap tahun akan tetapi belum memenuhi Wajardikdas 9 tahun yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Terdapat beberapa akar masalah yang perlu menjadi perhatian dalam peningkatan rata-rata lama sekolah, antara lain belum maksimalnya pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Tangerang sehingga masih terdapat masyarakat yang putus sekolah sebelum menamatkan jenjang pendidikan menengah pertama, demikian pula dengan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana pendidikan belum optimal.

Gambar 2.17 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2022

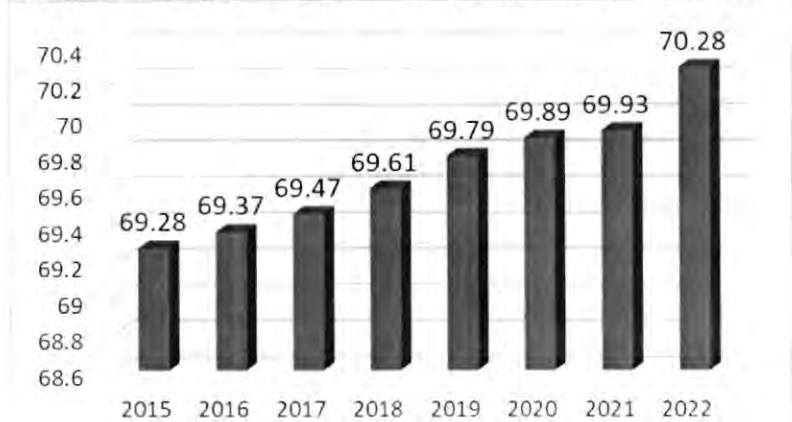


Sumber: BPS Kabupaten Tangerang. 2022 diolah.

3. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup digunakan untuk mengukur indeks kesehatan, sementara indeks kesehatan merupakan salah satu komponen dasar dalam pengukuran IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 adalah 70,28 tahun. Sedangkan dari data tahun 2021 menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tangerang sekitar 69,93 tahun.

Gambar 2.18 Angka Harapan Hidup Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2022

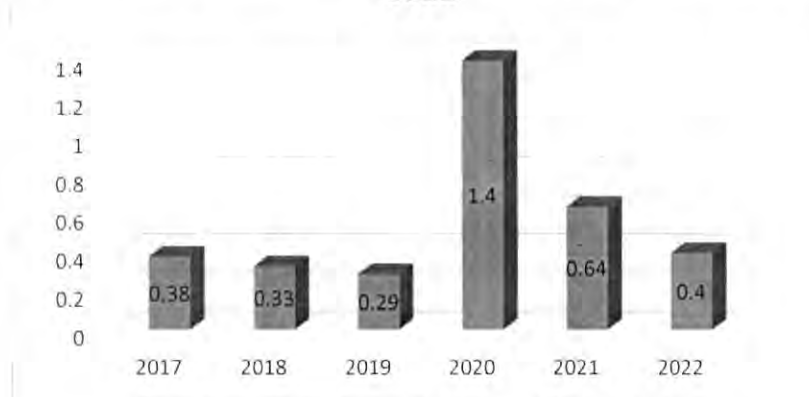


Sumber: BPS Provinsi Banten, 2022, diolah.

4. Persentase balita gizi buruk

Gizi buruk pada balita merupakan kondisi ketika berat badan balita terlalu rendah bila dibandingkan dengan tinggi badannya. Anak dengan gizi buruk atau *severe wasting* biasanya memiliki daya tahan tubuh yang sangat lemah sehingga berisiko terkena penyakit parah, bahkan berisiko meninggal.

Gambar 2.19 Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2022



Sumber: *Sumber: Dinkes, 2021, diolah*

Data persentase balita gizi buruk menunjukkan bahwa persentase balita gizi buruk tertinggi pada tahun 2020 sebesar 1,4 persen, hal ini menunjukkan bahwa pandemi covid-19 berdampak pada kondisi kesehatan karena terhalangnya akses pada sarana kesehatan dan juga dipengaruhi kondisi perekonomian masyarakat, akan tetapi seiring dengan keadaan yang makin kondusif, kondisi kesehatan pun terlihat makin membaik. Data yg digunakan hingga 2019 adalah data BPB dengan interpretasi gizi buruk menggunakan indikator BB/U. Data 2020 saat ini menggunakan data EPPGBM dengan interpretasi gizi buruk menggunakan indikator BB/TB sesuai dengan Permenkes No 2 Tahun 2020 terkait standar antropometri

Diperlukan adanya komitmen secara menyeluruh dari lintas sektor dalam menanggulangi masalah gizi di Kabupaten Tangerang melalui advokasi dan kegiatan gizi bersumberdaya masyarakat melalui Pos Gizi, KP ASI dan KERAMAS, karena sektor kesehatan saja tidak akan dapat secara maksimal menurunkan angka gizi buruk. Agar terus dapat meningkatkan kinerja daerah dalam penanggulangan masalah gizi, perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat. Gambaran status gizi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.18 Status Gizi Pada Balita Di Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2021

Tahun	Jumlah Balita							
	Gizi Buruk		Gizi Kurang		Gizi Baik		Gizi Lebih	
	N	%	N	%	N	%	N	%
2014	1.172	0,45	8.583	3,28	249.877	95,55	1.892	0,72
2015	1.091	0,39	8.099	2,86	271.407	95,89	2.227	0,79
2016	1.164	0,41	8.935	3,17	268.339	95,32	2.880	1,03
2017	1.161	0,38	9.644	3,14	294.027	95,68	2.479	0,81
2018	1.040	0,33	7.863	2,51	296.092	94,66	2.134	0,68
2019	932	0,29	7.234	2,28	305.893	96,22	2.131	0,67
2020	2.553	1,4	6.375	3,52	154.325	85,2	17.857	9,86
2021	1.368	0,64	4.992	2,34	187.040	87,59	20.136	9,43

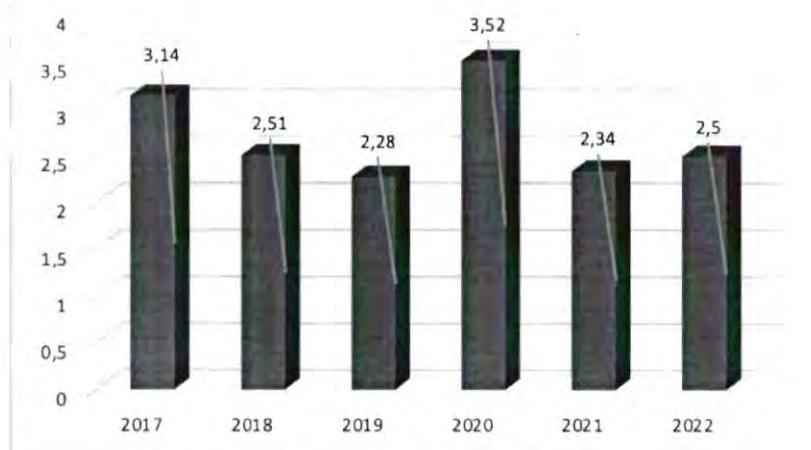
Sumber: Dinkes 2014-2021, diolah

5. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Pada gambar dibawah ini menunjukkan bahwa prevalensi gizi kurang mengalami penurunan dari tahun 2020 yaitu sebesar 3,52% menjadi 2,34% di tahun 2021, akan tetapi pada tahun 2022 terjadi kenaikan kembali prevalensi balita gizi kurang,

Data yang digunakan hingga 2019 adalah data Bulan Penimbangan Bayi (BPB) dengan interpreatsi gizi kurang menggunakan indikator BB/U. Sdangkan data 2020 saat ini menggunakan data ePPGBM dengan interpretasi gizi kurang menggunakan indikator BB/TB sesuai dengan Permenkes No 2 Tahun 2020 terkait Standar Antropometri. Peningkatan prevalensi gizi kurang di tahun 2022 karena balita dengan gizi buruk kondisinya membaik menjadi gizi kurang

Gambar 2.20 Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2022



Sumber: Dinkes, 2022

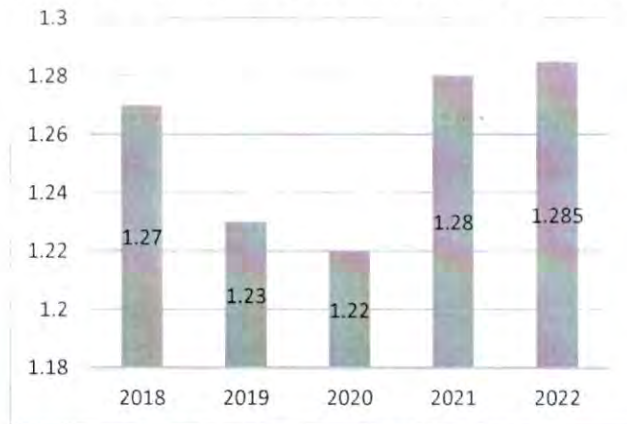
2.3 Aspek Daya Saing Daerah

1. Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB (indikator keterbukaan ekonomi)

Transaksi ekspor barang didefinisikan sebagai transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi (baik berupa penjualan, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dari residen suatu wilayah Provinsi terhadap pelaku ekonomi luar negeri (*non-resident*). Sebaliknya, impor barang didefinisikan sebagai transaksi

perpindahan kepemilikan ekonomi (mencakup pembelian, barter hadiah ataupun hibah) atas barang dari pelaku ekonomi luar negeri (*non-resident*) terhadap resident suatu wilayah.

Gambar 2.21 Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB

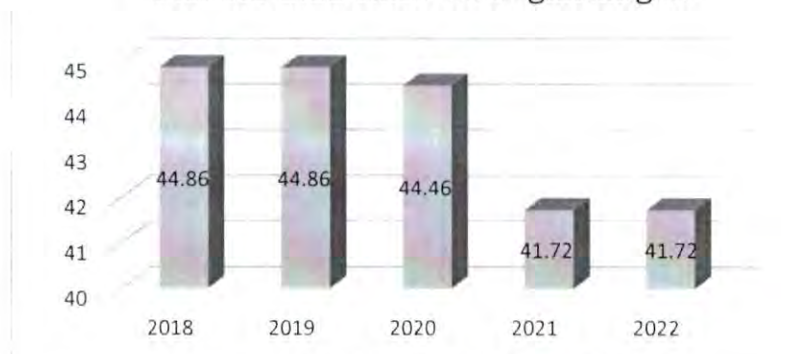


Sumber : BPS. 2022 diolah

2. Rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan penduduk diatas 65 tahun) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 – 64 tahun)

Gambar 2.22 Rasio Ketergantungan



Sumber : BPS. 2022 (diolah)

Rasio ketergantungan dapat dilihat menurut usia yakni Rasio Ketergantungan Muda dan Rasio Ketergantungan Tua. Secara Keseluruhan Kabupaten Tangerang memiliki rasio ketergantungan di tahun 2022 sebesar 41,72% yang dapat diartikan setiap 100 penduduk Kabupaten Tangerang yang produktif memiliki tanggungan 42 orang penduduk yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

2.4 Aspek Pelayanan Umum^[1]

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

2.4.1 Urusan Pemerintahan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

1. Bidang Urusan Pendidikan

a. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Secara

umum nilai APM akan lebih rendah dari APK, karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang tertentu. APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu yang dibagi dalam dua kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun dan SMP untuk penduduk usia 13-15 tahun.

Tabel 2.19 Angka Partisipasi Murni (APM)
Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2022

Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
SD/Sederajat	94.12	96.6	96.3	95.84	95.61	95.86	94.78	94.61
SMP/Sederajat	84.31	78.4	78.95	79.06	76.54	84.39	74.20	74.02

Sumber : Dinas Pendidikan 2022

APM SD mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan demikian pula APM SMP yang sejak tahun 2020 sampai dengan 2022 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi jumlah anak yang bersekolah sesuai dengan kelompok usianya semakin menurun. hal ini kemungkinan disebabkan makin banyaknya anak berusia diluar kelompok usianya yang bersekolah pada jenjang SD dan SMP karena bersekolah lebih dini dibandingkan usia yang semestinya.

b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa. berapapun usianya. yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Pada tahun 2022 APK di Kabupaten Tangerang untuk tingkat SD/MI sebesar 104,8 naik bila dibandingkan tahun 2021 sebesar 103,69. APK tingkat SMP/MTs sebesar 103,56 meningkat dari tahun 2021. APK setiap tahunnya menunjukan fluktuasi akan tetapi selalu diatas 100, hal ini menunjukkan bahwa jumlah anak yang bersekolah dijenjang SD dan SMP lebih banyak daripada kelompok usia yang seharusnya ini menunjukkan bahwa terdapat siswa yang belum memasuki usia sekolah tapi sudah sekolah lebih awal. Secara lebih lengkap data Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tangerang Tahun 2015 – 2022 dapat dilihat pada tabel 2.21.

Tabel 2.20 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tangerang Tahun 2015 – 2022

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI	109.64	110.92	111.02	86.8 1	107.8 7	103.3	103.6 9	104.8
2	SMP/MTs	104.06	105.09	105.29	96.2 7	103.1 4	103.3 3	102.5 7	103.5 6

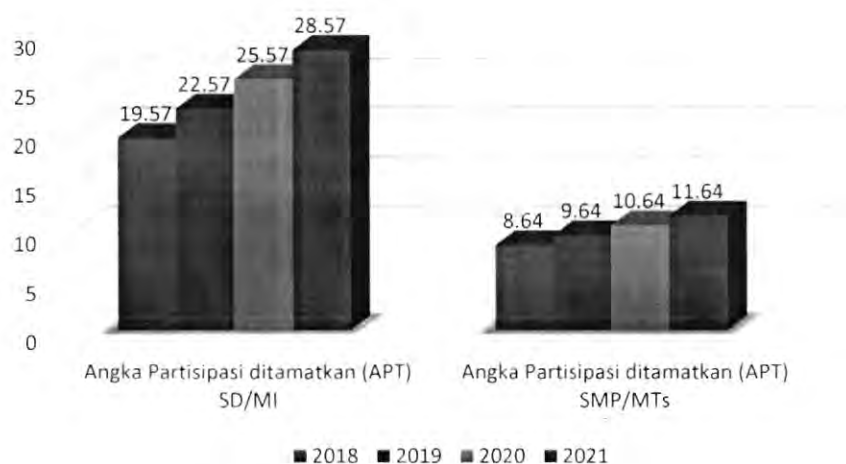
Sumber : Dinas Pendidikan 2022

c. Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)

Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Indikator pendidikan ini bermanfaat untuk menunjukkan capaian hasil pembangunan pendidikan di suatu daerah

selain itu berguna pula untuk menyusun perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk mengetahui kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah.

Gambar 2.23 Angka Partisipasi Ditamatkan SD dan SMP di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2021



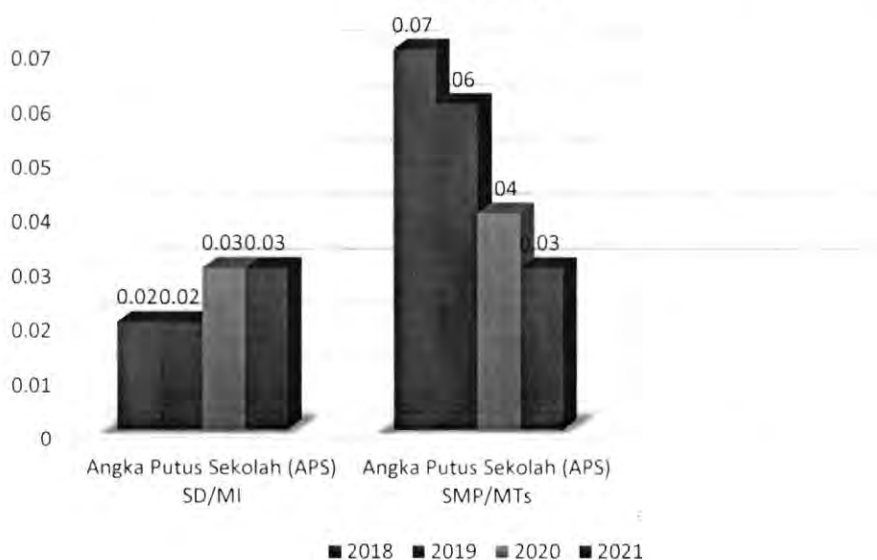
Sumber: Dinas Pendidikan 2022

Dari data diatas menunjukkan bahwa tingkat APT di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik tingkat SD/MI maupun SMP/MTs

e. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen. Berikut merupakan data Angka Putus Sekolah (APS) di tingkat SD/MI dan Angka Putus Sekolah (APS)

Gambar 2.24 Angka Putus Sekolah (APS) tingkat SD/MI dan SMP/Mts Tahun 2018-2021



Sumber: Dinas Pendidikan 2022

Dari data diatas menunjukkan bahwa untuk Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI dari tahun mengalami kenaikan sebesar 0.01% dari tahun 2019 ke 2020. Dimana di tahun 2020 dan 2021 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI sebesar 0,03%. Sedangkan untuk Angka Putus Sekolah (APS) Angka Putus Sekolah (APS) relatif menurun yaitu dari 0,07 di tahun 2018 hingga menjadi 0,03%.

f. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah ditingkat SD dan SMP baik secara kualitas dan kuantitas sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Tangerang. Rincian tingkat kerusakan ruang kelas SD dan SMP dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 2.21 Tingkat Kerusakan Sarana dan Prasarana SD dan SMP Kabupaten Tangerang Tahun 2022

Jenis Sarpras	SD		SMP		Jumlah
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
1. Ruang Kelas					
a. Baik	4.055	2.289	1.292	1.663	9.299
b. Rusak Ringan	2.313	850	647	1.167	4.977
c. Rusak Sedang	1.022	-	123	-	1.145
d. Rusak Berat	455	-	37	-	492
TOTAL	7.845	3.139	2.099	2.830	15.913

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. 2022

Ruang kelas SD Negeri dengan kondisi rusak berat 5,79 persen dan kondisi rusak sedang sebesar 13,03 persen sedangkan untuk tingkat SMP Negeri kondisi ruang kelasnya masih lebih baik, akan tetapi masih terdapat ruang kelas dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat.

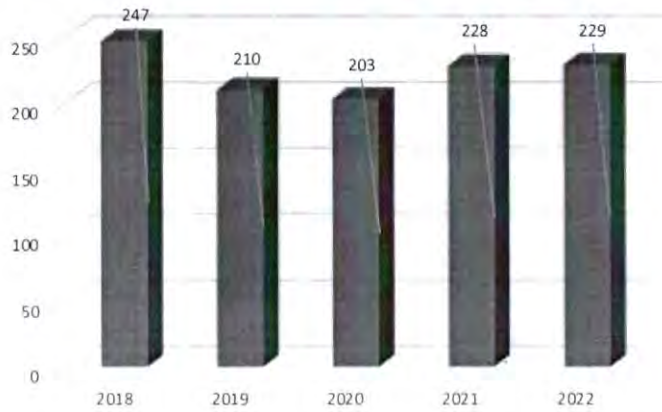
2. Bidang Urusan Kesehatan

a. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi atau *Infant Mortality Rate* (IMR) merupakan jumlah kematian bayi dibawah satu tahun. Pada gambar 2.23 terlihat angka kematian bayi di Kabupaten Tangerang menurun sejak Tahun 2018 sebesar 247 orang menjadi 210 orang pada tahun 2019 dan terus menurun pada tahun 2020 sebesar 203 orang. Tahun 2020 jumlah kematian bayi menurun menjadi 203 jiwa sedangkan pada tahun 2022 mencapai 229 jiwa, akan tetapi data ini masih perlu divalidasi

Hal ini disebabkan antara lain karena meningkatnya angka kelahiran yang terjadi pada saat pandemi covid 19 di tahun 2020, sedangkan kesejahteraan keluarga mengalami penurunan sehingga menyebabkan kurangnya perhatian ibu dalam merawat anaknya dan ini menjadi salah satu penyebab kematian bayi pada tahun 2021.

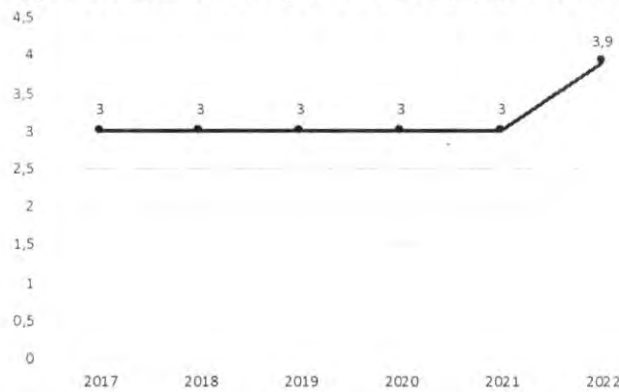
Gambar 2.25 Angka Kematian Bayi Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinkes. 2022. diolah

Apabila Satuan Angka Kematian Bayi (AKB) adalah 1.000/Kelahiran Hidup. AKB Tahun 2022 meningkat karena jumlah kelahiran hidup menurun di tahun 2022 (tahun 2021 sejumlah 71.324 dan tahun 2022 sejumlah 57.511). Untuk jumlah absolut kematian bayi di tahun 2021 adalah 251 dan tahun 2022 adalah 226.

Gambar 2.26 Angka Kematian Bayi 100.000/Kelahiran Hidup



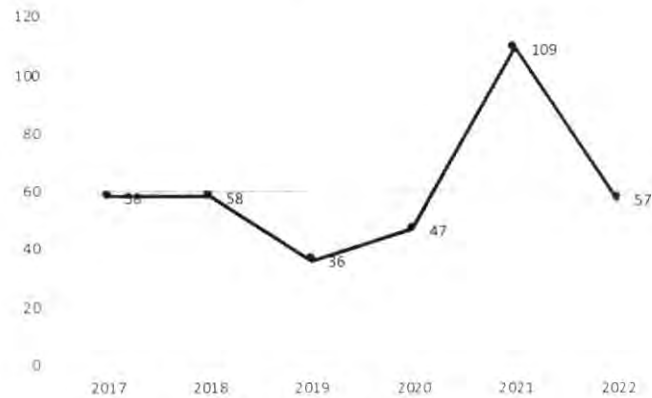
Sumber: Dinkes. 2022. Diolah

b. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu/KI dapat didefinisikan sebagai jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh.

Satuan Angka Kematian Ibu (AKI) adalah 100.000/KH. AKI Tahun 2020 meningkat karena adanya pandemi Covid-19 dan meningkat tajam di tahun 2021 oleh karena pandemi Covid-19 (dimana penyebab kematian ibu karena Covid-19 tahun 2021 sebesar 42%) ditahun 2022 AKI 57 per 100.000 KH meningkat dibanding tahun 2019 AKI 36 per 100.000 KH karena jumlah kelahiran hidup menurun di tahun 2022 dibandingkan tahun 2019 (tahun 2019 sejumlah 81.203 dan tahun 2022 sejumlah). Untuk jumlah absolut kematian ibu di tahun 2019 adalah 29 dan tahun 2022 adalah 33.

Gambar 2.27 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2022

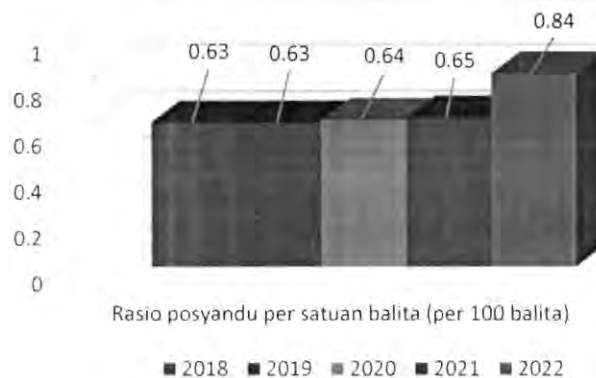


Sumber: Dinkes. 2022. diolah

c. Rasio posyandu per satuan balita (per 100 balita)

Rasio posyandu per satuan balita merupakan jumlah posyandu untuk setiap 100 orang balita.

Gambar 2.28 Rasio posyandu per satuan balita (per 100 balita) di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022



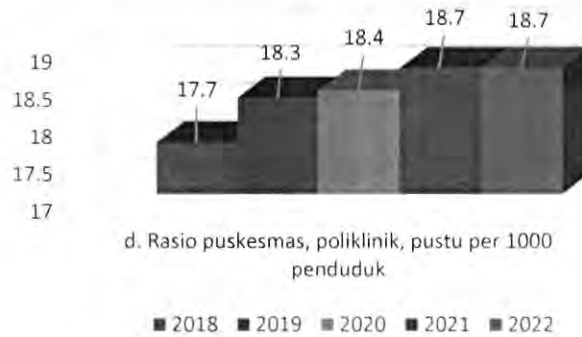
Sumber: Dinkes. 2022. diolah

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan rasio pelayanan posyandu di tahun 2022 sebesar 0.84 yang menunjukkan bahwa pelayanan posyandu berjalan dengan baik dari tahun ke tahun. Ditunjukkan oleh kenaikan rasio posyandu dalam kurun waktu 5 tahun.

d. Rasio puskesmas. poliklinik. pustu per 1000 penduduk

Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Tangerang saat ini sudah semakin meningkat terutama fasilitas pelayanan kesehatan dasar (puskesmas. polindes dan puskesmas pembantu/pustu). Seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang sudah memiliki puskesmas. bahkan di beberapa kecamatan memiliki 2 puskesmas dengan total sebanyak 44 unit. Jumlah ini terdiri dari puskesmas rawat inap 37 unit dan non rawat inap 46 .

Gambar 2.29 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk



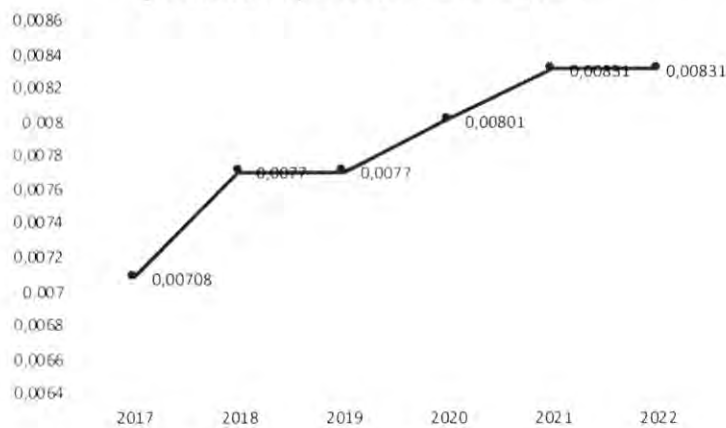
Sumber: Dinkes, 2022. diolah

Angka rasio jumlah puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu (pustu) per jumlah penduduk mengalami perubahan seiring dengan jumlah penduduk. hal ini ditunjukkan oleh data diatas dimana rasio jumlah puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu (pustu) di Kabupaten Tangerang naik di tahun 2021 dan 2022 sebesar 18,7%, pada tahun 2022 jumlah puskesmas, poliklinik dan pustu sebanyak 570 unit.

e. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100.000 penduduk)

Rumah Sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan; asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rasio Rumah sakit per satuan penduduk adalah perbandingan antara jumlah rumah sakit dengan jumlah penduduk untuk 100.000 penduduk. Angka rasio Rumah Sakit mencapai 0,00831 di tahun 2022. Dalam penyelenggaraan fungsi rumah sakit perlu dilakukan upaya peningkatan peran rumah sakit dalam pelaksanaan program prioritas.

Gambar 2.30 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100.000 penduduk) Tahun 2017-2022



Sumber: Dinkes, 2022. diolah

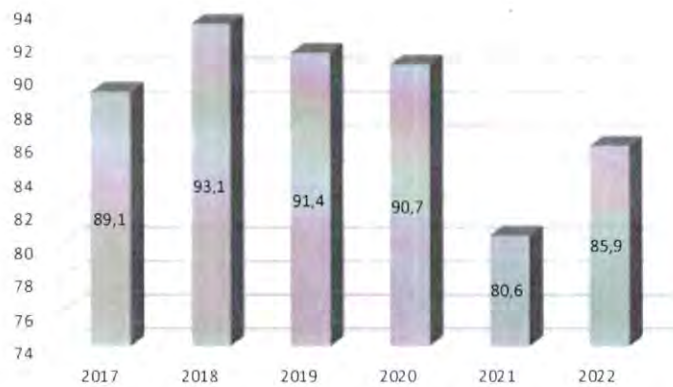
f. Rasio dokter per satuan penduduk (per 1000 penduduk)

Rasio Dokter per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan Dokter baik dokter umum ataupun spesialis dan cakupan pelayanan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk. Pada tahun 2022 rasio dokter per 1000 penduduk adalah 1,307 artinya satu dokter menangani 1.307 penduduk Kabupaten Tangerang, rasio ini dirasakan masih sangat jauh dari kecukupan.

g. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dapat didefinisikan sebagai ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Cakupan penanganan komplikasi kebidanan di wilayah Kabupaten Tangerang pada tahun 2018-2022 digambarkan pada grafik dibawah ini :

Gambar 2.31 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Tahun 2017-2022



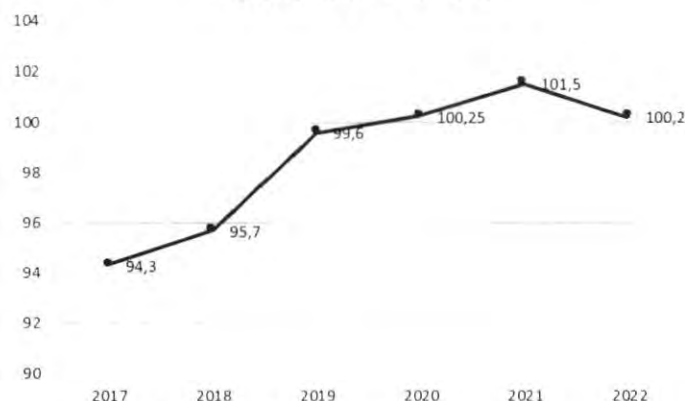
Sumber: Dinkes. 2022. diolah

Dari data diatas menunjukkan bahwa persentase cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari diagram diatas yang menunjukkan penurunan dari tahun 2020 yang awalnya sebesar 90,7% pada tahun 2021 dan turun menjadi 80,6% di tahun 2021 dan mengalami kenaikan tahun 2022 sebesar 85,9 persen. Sehubungan dengan hal tersebut puskesmas harus meningkatkan tindakan promotif dan preventif terhadap komplikasi kebidanan, sehingga akan lebih cepat dalam penanganannya

h. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Meningkatnya cakupan pertolongan ibu bersalin dengan bantuan tenaga kesehatan yang kompeten merupakan salah satu upaya untuk menurunkan AKI dan AKB. Dari data dibawah ini menunjukkan bahwa cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Gambar 2.32 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Tahun 2017-2022



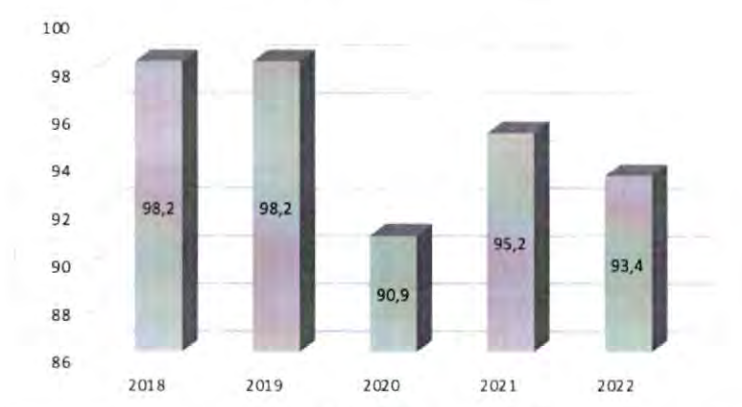
Sumber: Dinkes. 2022. diolah

Dimana persentase di tahun 2018 sebesar 95,7%. Kemudian naik menjadi 99,6% di tahun 2019 dan terus naik sampai dengan tahun 2021 dan kembali menurun pada tahun 2022 sebesar 100,2%. Hal ini harus segera ditindaklanjuti melihat tren penurunan cakupan pertolongan peraslinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

i. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

UCI (*Universal Child Immunization*) adalah indikator lain, selain dari imunisasi dasar lengkap, untuk mengukur keberhasilan pemberian imunisasi. UCI desa/kelurahan adalah gambaran suatu desa/kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi yang ada di desa/kelurahan tersebut telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap.

Gambar 2.33 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2018-2022



Sumber: Dinkes. 2022

Upaya imunisasi perlu terus ditingkatkan untuk mencapai tingkat kekebalan masyarakat yang tinggi (*herd immunity*) sehingga Penyakit-penyakit yang dapat di imunisasi (PD3I) dapat dibasmi, dieliminasi atau dikendalikan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan upaya imunisasi dapat semakin efektif bermutu dan efisien.

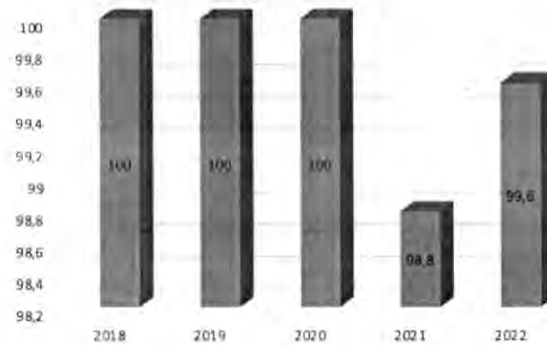
Universal Child Immunization (UCI) sudah tidak dipakai sejak tahun 2020 berdasarkan Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan

Tahun 2020-2024. Indikator yang dipakai saat ini adalah persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

j. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Dari data dibawah ini dapat diketahui bahwa di tahun 2018-2020 cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan sebesar 100%. Kemudian di tahun 2021 mengalami penurunan 98,8 persen dan tahun 2022 mencapai 99,6 persen.

Gambar 2.34 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Tahun 2018-2022



Sumber: Dinkes. 2022. diolah

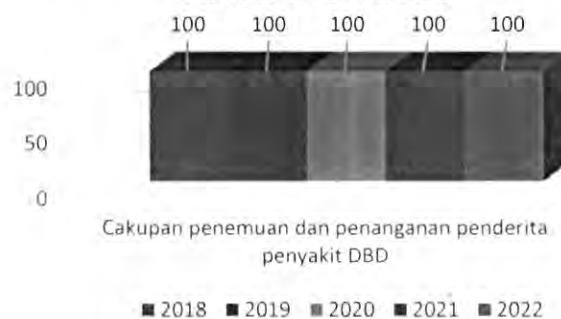
Untuk meningkatkan cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan perlunya komitmen dari Kabupaten Tangerang melalui instansi terkait untuk melakukan upaya seperti upaya penyuluhan gizi, peningkatan cakupan penimbangan balita, pemberian makanan tambahan (PMT) pemulihan bagi balita dengan gizi kurang, peningkatan kapasitas petugas dalam tata laksana balita gizi buruk, pembentukan *Therapeutic Feeding Centre* (TFC) dan *Community Feeding Centre* (CFC) sebagai pusat-pusat pemulihan gizi di faskes serta upaya lain untuk mendukung peningkatan balita gizi buruk yang mendapat perawatan.

Penanganan balita gizi buruk dilakukan pada balita gizi buruk yang dilaporkan pada bulan sebelumnya. Pada tahun 2021 terdapat 6 balita dan tahun 2022 terdapat 2 balita yang sesuai hasil pengukuran, ditemukan gizi buruk, namun balita ini pindah domisili keluar Kabupaten Tangerang sebelum sempat dilakukan intervensi/ditangani.

k. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Pada gambar 2.33 menunjukkan bahwa cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD mencapai 100% di tahun 2018 hingga 2022. Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui instansi terkait telah melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD dititik beratkan pada kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di semua wilayah dan pemantauan jentik berkala untuk mencapai angka bebas jentik sesuai target (>95%). kegiatannya dilakukan dengan melakukan Sosialisasi dan Pembinaan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik khususnya di wilayah-wilayah endemis DBD, melakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) dan melaksanakan Fogging Fokus sesuai kriteria dari hasil penyelidikan Epidemiologi sebagai upaya untuk memutus rantai penularan DBD yang didahului dengan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat.

Gambar 2.35 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Tahun 2018-2022



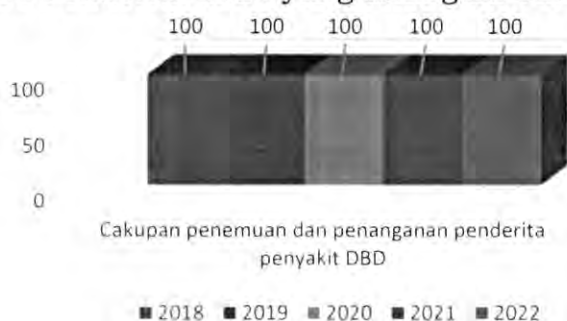
Sumber: Dinkes. 2022. Diolah

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), Larvasidasi (pemberian abate untuk membunuh jentik nyamuk pada tempat-tempat penampungan air) dan dilanjutkan fogging fokus dengan radius 200 m.

l. Penderita diare yang ditangani

Berdasarkan hasil kegiatan Rapid Survei Diare yang dilaksanakan pada tahun 2015. diketahui bahwa angka kesakitan diare pada semua umur adalah 270 per 1000 penduduk. angka kesakitan diare pada balita adalah 843 per 1000 penduduk. Selain itu diare juga merupakan penyakit yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) sehingga perlu dilakukan upaya untuk penanganan penyakit diare. Persentase penderita diare yang ditangani di Kabupaten Tangerang relatif mengalami kenaikan dan penurunan selama kurun waktu 5 tahun . Hal ini terlihat dari grafik di bawah:

Gambar 2.36 Penderita diare yang ditangani Tahun 2018-2022



Sumber: Dinkes. 2022. diolah

m. Angka kejadian Malaria

Penyakit Malaria merupakan *penyakit* infeksi menular yang menyebar melalui gigitan nyamuk. Berdasarkan data diagram di bawah dapat diketahui bahwa dalam kurun lima tahun terakhir. di Kabupaten Tangerang tidak memiliki kasus penyakit malaria yang mana ditunjukkan oleh data angka kejadian Malaria dari tahun 2018 hingga 2022.

Gambar 2.37 Angka kejadian Malaria Tahun 2018-2022



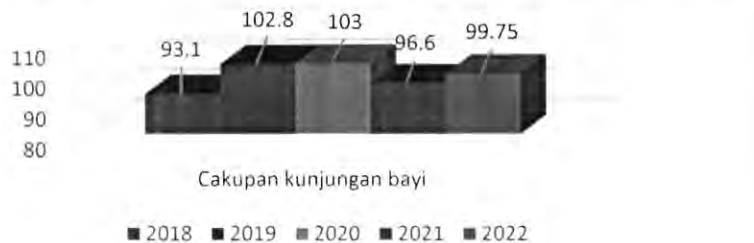
Sumber: Dinkes. 2022. diolah

n. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Kunjungan bayi tersebut dapat pelayanan kesehatan rutin mulai dari pelayanan kesehatan neonatal dasar yang meliputi tindakan resusitasi, pencegahan hipotermia, pemberian ASI dini dan eksklusif.

pengecahan infeksi berupa perawatan mata, tali pusat, kulit dan pemberian imunisasi.

Gambar 2.38 Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2018-2022



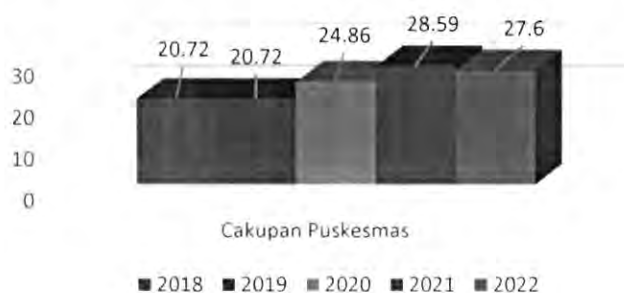
Sumber: Dinkes. 2022. diolah

Cakupan kunjungan bayi adalah Cakupan kunjungan bayi umur 29 hari-11 bulan di sarana pelayanan kesehatan (polindes, pustu, puskesmas, rumah bersalin dan rumah sakit) maupun di rumah, posyandu, tempat penitipan anak, panti asuhan dan sebagainya melalui kunjungan petugas. Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2018 sebesar 93.1% menurun dibandingkan tahun 2017 sebesar 94.7%, namun cakupan tersebut sudah mencapai target Renstra tahun 2018 sebesar 90%. Kemudian pada tahun 2020 cakupan kunjungan Bayi mulai meningkat, yaitu 99.9%. Berdasarkan data diatas dapat terlihat bahwasanya capaian kunjungan bayi di kabupaten Tangerang bersifat fluktuatif. Pada tahun Angka ini mengalami penurunan menjadi 96.6% pada tahun 2021 dan kembali meningkat menjadi 99.75% pada tahun 2022.

o. Cakupan Puskesmas

Cakupan puskesmas adalah jumlah puskesmas dibandingkan dengan jumlah seluruh kecamatan dikalikan dengan 100%. Capaian pada tahun 2018 adalah 20,72%. capaian ini bertahan hingga tahun 2019. Tahun 2020 capaian ini mengalami peningkatan menjadi 24,86% dan kembali meningkat menjadi 28,59% pada tahun 2021 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2022 menjadi 27.6%. Berikut grafik yang menggambarkan ketercapaian tersebut:

Gambar 2.39 Cakupan Puskesmas Tahun 2018-2022



Sumber: Dinkes. 2022. diolah

p. Cakupan Pembantu Puskesmas

Cakupan pembantu puskesmas adalah jumlah populasi atau wilayah yang dilayani oleh seorang pembantu puskesmas. Pembantu puskesmas adalah tenaga kesehatan yang bertugas untuk membantu dokter dalam melaksanakan tugas-tugas medis di puskesmas. Cakupan pembantu puskesmas biasanya ditentukan berdasarkan jumlah populasi atau luas wilayah yang harus dilayani oleh pembantu tersebut. Tujuan dari menentukan cakupan pembantu puskesmas adalah untuk memastikan bahwa seluruh wilayah yang dilayani oleh puskesmas memiliki akses yang sama dan cukup terhadap pelayanan kesehatan. Hal ini juga membantu dalam menentukan jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan di setiap puskesmas untuk memastikan bahwa semua pasien dapat mendapatkan pelayanan yang tepat dan efektif.

Cakupan Pembantu puskesmas adalah cakupan pembantu atau tenaga kesehatan yang ada dalam puskesmas yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang. Capaian pada tahun 2018 adalah 18.78%, capaian ini menurun pada tahun 2019 menjadi 16.79%. Capaian ini bertahan hingga tahun 2021. Tahun 2022 capaian ini mengalami peningkatan menjadi 16.8%. Berikut grafik yang menggambarkan ketercapaian tersebut:

Gambar 2.40 Cakupan Pembantu Puskesmas Tahun 2018-2022



Sumber: Dinkes. 2022. diolah

q. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 adalah persentase atau proporsi ibu hamil yang melakukan kunjungan ke dokter atau tenaga kesehatan sebanyak 4 kali atau lebih selama masa kehamilannya. Kunjungan ibu hamil K4 adalah bagian dari program perawatan ibu hamil yang berfokus pada peningkatan kesehatan ibu dan janin selama masa kehamilan. Tujuan dari kunjungan ibu hamil K4 adalah untuk memastikan bahwa ibu hamil menerima perawatan yang tepat dan dapat mengatasi masalah kesehatan yang muncul selama masa kehamilan. Ini juga membantu dalam memantau perkembangan janin dan memastikan bahwa ibu dan janin menerima nutrisi dan vitamin yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Capaian Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 adalah 96,1% dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 98,33% dan menurun pada tahun 2020 menjadi 97.72%. Angka ini kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 menjadi 95%. Kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 100%. Berikut gambaran grafik capaian tersebut:

Gambar 2.41 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2018-2022



Sumber: Dinkes. 2022. diolah

r. Cakupan Pelayanan Nifas

Cakupan pelayanan nifas adalah persentase atau proporsi ibu bersalin yang menerima pelayanan nifas setelah melahirkan. Pelayanan nifas adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk ibu bersalin selama masa pasca melahirkan. Tujuan dari pelayanan nifas adalah untuk memastikan bahwa ibu bersalin memiliki akses yang cukup terhadap pelayanan kesehatan yang tepat dan efektif setelah melahirkan. Ini juga membantu dalam memantau perkembangan ibu dan memastikan bahwa ibu menerima perawatan yang dibutuhkan untuk memulihkan kondisi kesehatannya setelah melahirkan.

Capaian Pelayanan di Kabupaten Tangerang selama periode 2018-2022 mengalami tren peningkatan yang cukup positif. Tahun 2018 cakupan pelayanan ini mencapai 93.4% dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 97.78%. capaian ini kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 99.41% kemudian pada tahun 2021 dan 2022 capaian ini menurun menjadi 99%. Berikut grafik yang menggambarkan capaian tersebut:

Gambar 2.42 Cakupan Pelayanan Nifas Tahun 2018-2022



Sumber: Dinkes. 2022. diolah.

s. Cakupan Neonatus Komplikasi

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah persentase atau proporsi neonatus yang menderita komplikasi kesehatan dan menerima perawatan yang tepat dan efektif. Komplikasi kesehatan pada neonatus dapat berupa masalah pernapasan, masalah pada jantung, infeksi, dan lain-lain. Tujuan dari perawatan neonatus dengan komplikasi adalah untuk memastikan bahwa neonatus memiliki akses yang cukup terhadap pelayanan kesehatan yang tepat dan efektif untuk mengatasi masalah kesehatannya. Ini juga membantu dalam memastikan bahwa neonatus memperoleh perawatan yang dibutuhkan untuk memulihkan kondisi kesehatannya dan menghindari komplikasi yang lebih serius.

Cakupan Neonatus ini mengalami tren peningkatan yang cukup baik. Capaian pada tahun 2018 adalah 76.9%, kemudian meningkat menjadi 78.95%

pada tahun 2019. Pada tahun 2020 capaian ini kembali meningkat menjadi 80.03%. Kemudian tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 76.1% dan kembali meningkat menjadi 90.48%. Untuk lebih jelasnya lihat gambar 2.41 berikut.

Gambar 2.43 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Tahun 2018-2022



Sumber: Dinkes, 2022 diolah.

t. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Cakupan anak balita adalah persentase atau proporsi anak usia 1 sampai 5 tahun yang menerima pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, termasuk imunisasi, skrining kesehatan, dan perawatan untuk masalah kesehatan. Anak balita membutuhkan perawatan kesehatan yang konsisten dan tepat waktu untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat dan untuk mencegah masalah kesehatan di masa depan. Tujuan dari cakupan anak balita adalah untuk memastikan bahwa anak balita memiliki akses yang cukup terhadap pelayanan kesehatan yang tepat dan efektif dan membantu dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan anak balita. Ini juga membantu dalam menentukan kebutuhan untuk tenaga kesehatan dan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang tepat dan efektif bagi anak balita.

Gambar 2.44 Cakupan Pelayanan Anak Balita Tahun 2018-2022



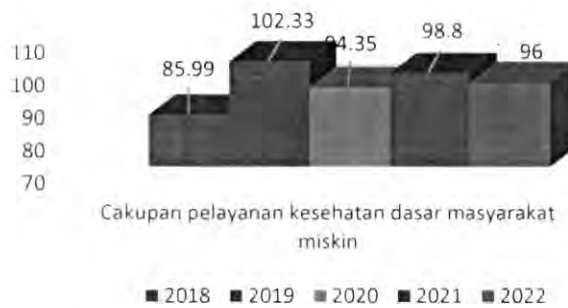
Sumber: Dinkes, 2022, diolah.

Capaian Pelayanan Anak Balita di Kabupaten Tangerang termasuk kategori tinggi dan memuaskan, hal ini dilihat dari capaian yang terlihat dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018 angka capaian ini adalah 98.2%, kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 100%. Pada tahun 2020 capaian ini mengalami penurunan menjadi 94.3% dan pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 98.2% dan kembali mengalami peningkatan menjadi 99.35% pada tahun 2022.

u. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin adalah persentase atau proporsi masyarakat miskin yang memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang tepat dan efektif. Pelayanan kesehatan dasar meliputi perawatan dasar untuk masalah kesehatan seperti penyakit menular, masalah gizi, dan masalah kesehatan reproduksi. Tujuan dari cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin adalah untuk memastikan bahwa masyarakat miskin memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan dasar yang dibutuhkan. Ini juga membantu dalam mengatasi masalah kesehatan yang berkembang dan memastikan bahwa masyarakat miskin memperoleh perawatan yang dibutuhkan untuk memulihkan dan memelihara kondisi kesehatannya.

Gambar 2.45 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Tahun 2018-2022



Sumber: Sumber Dinkes 2022. Diolah.

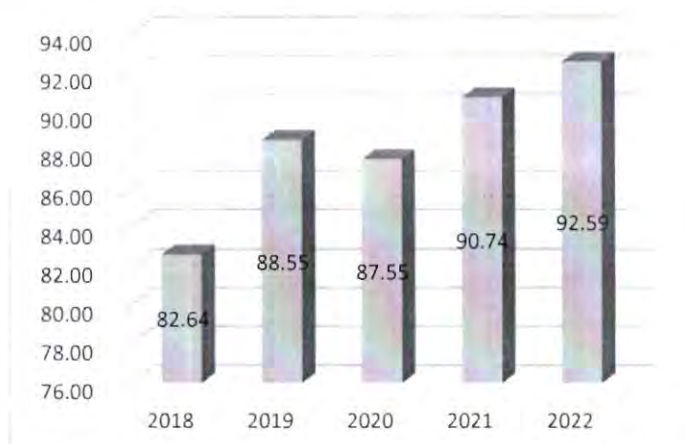
Capaian dari cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin di Kabupaten Tangerang terbilang cukup tinggi dan memuaskan. hal ini terlihat dari capaian sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018 cakupan pelayanan ini mencapai angka 85.99% kemudian meningkat drastis pada tahun 2019 menjadi 102,33%. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 94,35% dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 98.8% dan pada tahun 2022 menjadi 96%.

3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Kondisi mantap jalan (%) merupakan proporsi dari panjang jalan yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan. Kategori kondisi baik dan sedang yaitu kondisi jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman, dengan dimana angka *Roughness Index* (IRI), di bawah 4 untuk kondisi baik dan di bawah 8 untuk kondisi sedang. Pengukuran kondisi jalan ini menggunakan alat *roughometer* dengan satuan *Internasional Roughness Indeks* (IRI) yang menyatakan akumulasi naik turunnya muka jalan sepanjang 1 kilometer jalan (m/km).

Gambar 2.46 Proporsi Panjang jaringan jalan dalam Kondisi Baik Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Bina Marga dan SDA. diolah.

Proporsi Panjang jaringan jalan dalam Kondisi Baik pada tahun 2018 sebesar 82.64% dan pada tahun 2019 menjadi 88.55% dan pada tahun 2020 menjadi 87.55% dan pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 90.74% dan tahun 2022 menjadi 92.59. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas jaringan jalan yang ada di Kabupaten Tangerang.

b. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah Tinggal Bersanitasi adalah rumah yang memiliki fasilitas air bersih, buang air, dan fasilitas pembuangan sampah yang baik. Rumah ini memenuhi standar kebersihan dan kesehatan, sehingga membantu untuk mencegah penyebaran penyakit dan memastikan kualitas hidup yang baik bagi penghuninya. Fasilitas air bersih harus memenuhi standar kualitas air minum dan terjamin keamanannya. Fasilitas buang air harus memiliki sistem pembuangan yang baik dan tidak menimbulkan masalah lingkungan. Fasilitas pembuangan sampah harus memiliki sistem yang efisien dan tidak membahayakan lingkungan. Dengan memiliki rumah tinggal bersanitasi, penghuni akan merasa lebih nyaman dan aman, serta memiliki akses yang mudah dan terjamin untuk fasilitas-fasilitas yang penting bagi kesehatan dan kebersihan. Oleh karena itu, upaya untuk memperluas akses terhadap rumah tinggal bersanitasi harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan pihak terkait.

Cakupan rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Tangerang memiliki capaian yang cukup memuaskan. Hal ini terlihat dari capaian yang ada. Pada tahun 2018 persentase rumah tangga di Kabupaten Tangerang yang bersanitasi adalah 92.6% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 100%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 95.1% dan kembali meningkat menjadi 100% pada tahun 2021.

Gambar 2.47 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2018-2021



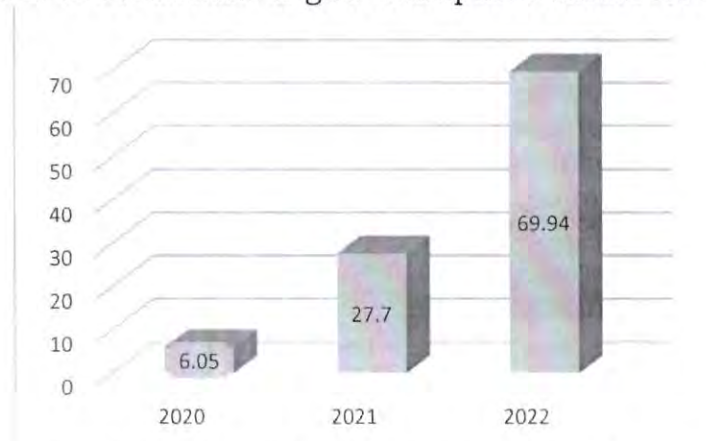
Sumber: Dinas Perkim. Diolah.

c. Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Irigasi dalam kondisi baik adalah sistem irigasi yang berfungsi dengan baik dan memenuhi standar kualitas air dan teknis. Irigasi yang baik akan memastikan bahwa tanaman memiliki cukup air untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga membantu untuk meningkatkan hasil pertanian dan produktivitas lahan. Sistem irigasi yang baik harus memenuhi berbagai kriteria, seperti: Aliran air yang stabil dan cukup Sumber air yang terjamin dan memenuhi standar kualitas air Sistem pengendalian air yang efisien dan akurat Infrastruktur irigasi yang terawat dan dalam kondisi baik Ketersediaan irigasi yang baik sangat penting bagi pertanian dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas sistem irigasi harus menjadi prioritas bagi pemerintah.

Capaian Persentase irigasi di Kabupaten Tangerang memiliki capaian yang perlu ditingkatkan dari tahun ke tahun. Capaian pada tahun 2020 adalah 6.05% dan meningkat menjadi 27.7%. Angka ini kemudian kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 69.94%. Berikut grafik penggambarannya:

Gambar 2.48 Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik



Sumber: Dinas Bina Marga dan SDA. Diolah

d. Persentase Areal Kawasan Kumuh

Areal Kawasan Kumuh adalah daerah atau wilayah yang memiliki tingkat pembangunan rendah dan kualitas lingkungan yang buruk. Kawasan ini biasanya ditandai dengan tingginya tingkat kepadatan penduduk, kekurangan fasilitas umum, sanitasi yang buruk, dan lingkungan yang tidak sehat. Kawasan kumuh sering menjadi fokus perhatian pemerintah dan masyarakat karena memiliki berbagai masalah sosial dan lingkungan. Penduduk kawasan kumuh sering memiliki akses yang terbatas terhadap fasilitas umum dan layanan kesehatan, serta rentan terhadap masalah kesehatan dan lingkungan.

Capaian Persentase areal kawasan kumuh di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 adalah 13.3% dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 30.71% dan menurun pada tahun 2020 menjadi 30.16%. Angka ini kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 menjadi 29.66%. Berikut gambaran grafik capaian tersebut:

Gambar 2.49 Persentase Areal Kawasan Kumuh



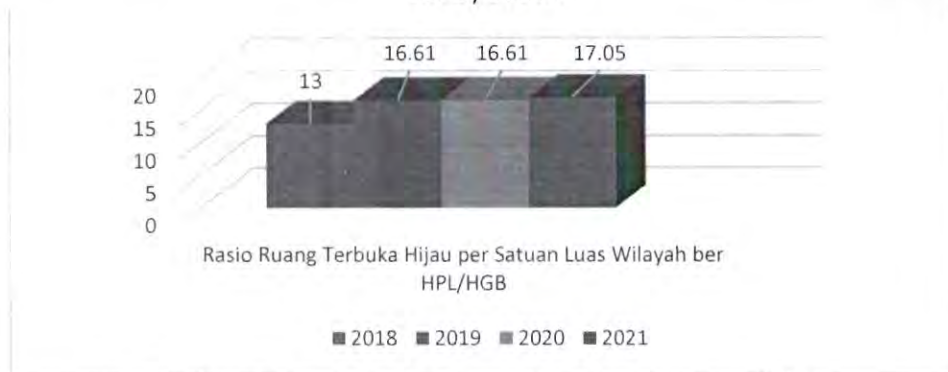
Sumber: Dinas Perkim. diolah

e. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yang ditetapkan dengan kriteria diantaranya adalah lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi, berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur dan terakhir adalah Didominasi komunitas tumbuhan

Capaian Ruang terbuka hijau di Kabupaten Tangerang selama periode 2018-2022 mengalami tren peningkatan yang cukup positif. Tahun 2018 cakupan pelayanan ini mencapai 13 % dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 16,61%. capaian ini kembali bertahan hingga tahun 2020 menjadi, kemudian pada tahun 2021 meningkat drastis hingga 97,61%. Untuk lebih jelasnya lihat gambar 2.48.

Gambar 2.50 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB



Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan. diolah.

f. Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu fungsi yang wajib ada di Rencana Tata Ruang Wilayah terutama di perkotaan. Dalam amanat UU No.26/2007 disebutkan bahwa luasan RTH minimum 30 persen, meliputi 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH privat. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas RTH. Pertama, konsisten dalam mengkonservasi alam di perkotaan. RTH sebagai bagian dari kawasan lindung memiliki kontribusi besar untuk mensuplai ketahanan dan keseimbangan lingkungan perkotaan. “Kegiatan menanam pohon pun bisa menjadi salah satu bagian kecil mewujudkan RTH

Capaian Ruang terbuka hijau di Kabupaten Tangerang selama periode 2018-2022 mengalami tren peningkatan yang cukup positif. Tahun 2018 cakupan pelayanan ini mencapai 13 % dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 16.61%. capaian ini kembali bertahan hingga tahun 2020 menjadi. kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 17.05%. Berikut grafik yang menggambarkan capaian tersebut:

Gambar 2.51 Luasan RTH Publik dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan



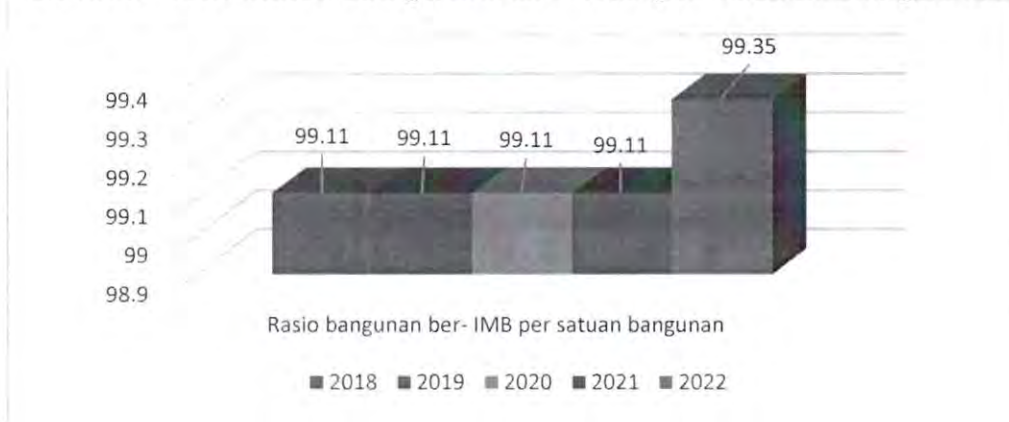
Sumber: Dinas LH. diolah

g. Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

Bangunan Ber IMB (Izin Mendirikan Bangunan) adalah bangunan yang memiliki izin resmi untuk dibangun dan ditempati. IMB adalah suatu bukti bahwa bangunan tersebut sudah memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan oleh pemerintah.

Capaian Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan di Kabupaten Tangerang termasuk kategori tinggi dan memuaskan. hal ini dilihat dari capaian yang terlihat dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018 angka capaian ini adalah 99,11% kemudian angka ini bertahan hingga tahun 2021. Berikut grafik penggambarannya:

Gambar 2.52 Rasio Bangunan Ber-IMB per satuan Bangunan



Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan. diolah.

h. Rasio rumah layak huni

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan antara jumlah rumah yang layak huni dengan jumlah rumah yang ada dalam suatu wilayah. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi standar kualitas dan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti: Struktur bangunan yang kuat dan stabil Ventilasi dan pencahayaan yang memadai Akses air bersih dan sanitasi yang memenuhi standar Ketersediaan fasilitas umum seperti listrik dan jalan akses Rasio rumah layak huni yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses yang baik terhadap rumah yang layak huni dan memenuhi standar kesehatan dan kualitas hidup yang baik. Peningkatan rasio rumah layak huni dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pembangunan rumah baru yang layak huni, perbaikan rumah yang tidak layak huni, dan peningkatan akses terhadap fasilitas umum seperti air bersih, sanitasi, dan listrik. Upaya ini harus dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait untuk memastikan bahwa setiap warga memiliki akses yang baik terhadap rumah layak huni.

Capaian dari Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Tangerang terbilang cukup tinggi dan memuaskan, hal ini terlihat dari capaian sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018 cakupan rasio ini mencapai angka 92.6% kemudian meningkat drastis pada tahun 2019 menjadi 98.17%. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 90.6% dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 94.1%. Untuk lebih jelasnya lihat gambar 2.51.

Gambar 2.53 Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2018-2021



Sumber: Dinas Perkim. diolah.

4. Sosial

a. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Persentase PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang memperoleh bantuan sosial adalah persentase dari total jumlah PMKS yang menerima bantuan sosial dari pemerintah atau lembaga swasta. Bantuan sosial adalah bantuan finansial atau non-finansial yang diberikan kepada PMKS untuk membantu mereka mengatasi kesulitan ekonomi dan memperbaiki kualitas hidup mereka.

Capaian dari Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Tangerang terbilang cukup tinggi dan memuaskan. Hal ini terlihat dari capaian sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018 cakupan rasio ini mencapai angka 94,89% kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 96,8%. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 72,43% dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 99,35% dan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 99,46%. Untuk lebih jelasnya lihat gambar 2.52.

Gambar 2.54 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial



Sumber: Dinsos. diolah.

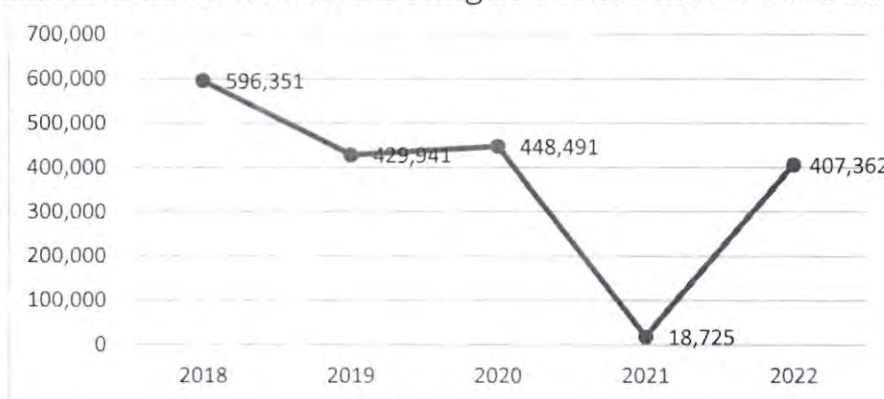
2.4.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pangan

a. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Kabupaten Tangerang telah memastikan ketersediaan pangan daerah dalam kondisi yang optimal, sehingga setiap masyarakat dapat menikmati pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam kehidupannya.

Gambar 2.55 Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2018-2022

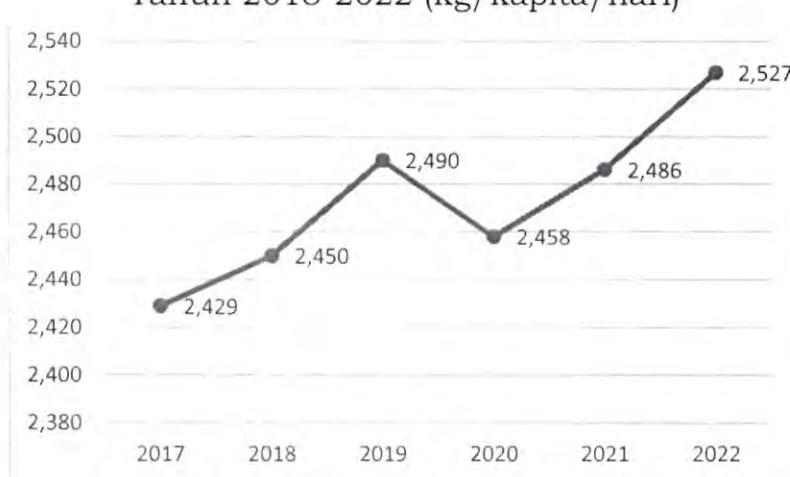


Berdasarkan grafik diatas ketersediaan pangan utama Kabupaten Tangerang mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2021 sebesar 18.725 ton dimana pada tahun 2018 kondisi pangan di Kabupaten Tangerang mencapai 596.351 ton. Hal tersebut disebabkan karena anomali musim yang berubah-ubah mengakibatkan menurunnya produktivitas pangan di Kabupaten Tangerang. harga bahan baku pakan yang tidak stabil untuk produksi unggas. skala pemeliharaan ternak rakyat masih rendah. belum optimalnya sistem pengelolaan cadangan pangan. Masih rendahnya tata kelola. pendampingan pengelolaan dan jumlah Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang aktif. Belum berkembangnya kelembagaan dan jaringan distribusi pangan. Masih rendahnya penanganan daerah dan efisiensi serta efektivitas rentan rawan pangan yang terprogram melalui penumbuhan dan pengembangan desa mandiri pangan. Berbagai hal diatas mengakibatkan penurunan produktivitas pangan di Kabupaten Tangerang, dimana penurunan produktivitas merupakan angka yang paling berkontribusi besar dalam menurunnya ketersediaan pangan utama di Kabupaten Tangerang.

b. Ketersediaan Energi dan Protein

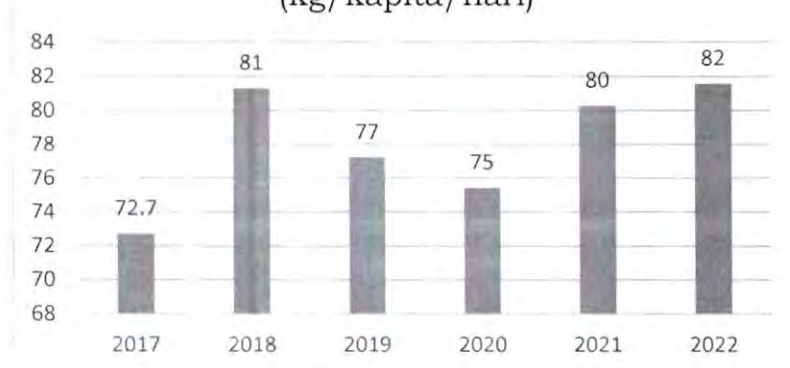
Ketersediaan energi dan protein merupakan jumlah pangan yang tersedia di pasar untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per kg/kapita/hari, protein per g/kapita/hari dan lemak per g/kapita/hari. Ketersediaan energi dan protein menggambarkan konsumsi energi dan protein oleh masyarakat.

Gambar 2.56 Ketersediaan Energi Masyarakat Tahun 2018-2022 (kg/kapita/hari)



Sumber : DPKP. 2022

Gambar 2.57 Ketersediaan Protein per g/kapita/hari 2018-2022 (kg/kapita/hari)



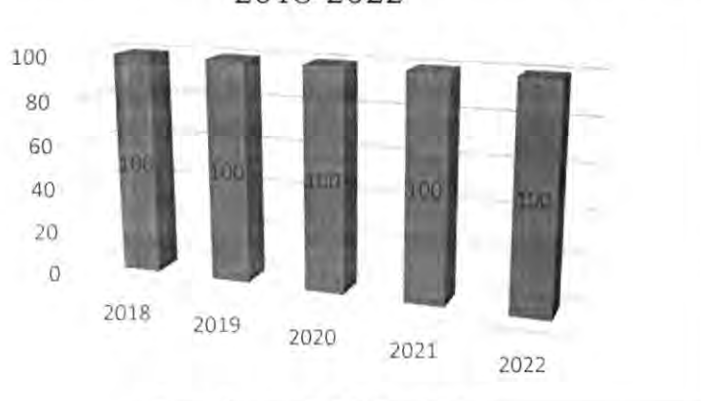
Sumber : DPKP. 2022

Berdasarkan grafik diatas konsumsi energi dan protein mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Peningkatan terjadi tidak lain karena akses masyarakat terhadap pangan dapat dipastikan mudah atau terjangkau. Kemudahan akses merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong peningkatan konsumsi di suatu daerah. Selain akses, peningkatan tersebut juga dipengaruhi oleh produksi pertaniannya, utamanya tanaman pangan dan ternak.

c. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan ditujukan untuk menjamin tersedianya pangan segar yang aman untuk dikonsumsi agar masyarakat terhindar dari bahaya, baik karena cemaran kimia maupun mikroba yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi dan mendukung terjaminnya pertumbuhan/perkembangan kesehatan dan kecerdasan manusia. Pengawasan keamanan pangan dilakukan secara insidental, apabila ada informasi kasus keamanan pangan yang perlu ditindak lanjuti. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam bentuk inspeksi ke tempat kejadian, penelusuran terhadap asal produk, pengambilan contoh dan pengujian keamanan pangan.

Gambar 2.58 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Tahun 2018-2022



Sumber : DPKP. 2022

Berdasarkan grafik diatas, kegiatan pengawasan dan pembinaan keamanan mencapai 100% dalam setiap tahunnya. Hal tersebut menggambarkan bahwa pengawasan dan pembinaan keamanan pangan telah dilakukan secara optimal untuk menjaga kualitas dari bahan pangan yang telah dihasilkan, serta mencegah tercemarnya bahan pangan dari campuran kimia yang mengganggu, berbahaya dan merugikan. Sehingga tercapainya sumberdaya manusia yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

2. Pertanahan

a. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Luas lahan bersertifikat adalah luas lahan yang sudah disahkan dengan ditandai surat bukti yang sudah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Sertifikat yang dimaksud adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Pengukuran luas lahan bersertifikat ditujukan untuk melihat luas lahan yang sudah di legalisasi secara hukum oleh BPN.

Gambar 2.59 Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2018-2021

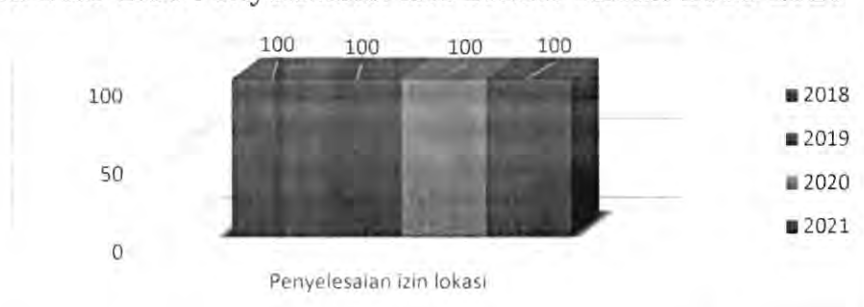


Berdasarkan grafik diatas. persentase luas lahan yang bersertifikat pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga 11,35%. Capaian dua tahun sebelumnya yaitu 2018 dan 2019 mencapai 75%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 merupakan masa puncak pandemic covid-19. sehingga untuk mendapatkan data pada tahun tersebut sangatlah terbatas. Pada tahun 2020 menunjukkan bahwa hanya 11,35% dari keseluruhan sampling luas lahan yang sudah disahkan dengan ditandai surat bukti yang sudah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Hal tersebut menunjukkan masih belum optimalnya pelaksanaan luas lahan bersertifikat di Kabupaten Tangerang.

b. Penyelesaian Izin Lokasi

Izin lokasi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam hal suatu perusahaan akan memperoleh tanah dalam rangka penanaman modal. Pemberian izin lokasi mempertimbangkan agar terciptanya Rencana Tata Ruang Wilayah yang serasi, harmonis dan berkelanjutan. Dalam hal ini fungsi pemberian izin lokasi bermaksud untuk mengarahkan dan mengendalikan badan usaha dalam memperoleh tanah. mengingat pemberian izin lokasi juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Penyelesaian izin lokasi adalah berapa banyak izin lokasi yang diajukan yang kemudian diterbitkan izinnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Gambar 2.60 Penyelesaian Izin Lokasi Tahun 2018-2021



Berdasarkan grafik diatas. tingkat penyelesaian izin lokasi mencapai 100% setiap tahun nya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa seluruh izin lokasi yang diajukan telah diberikan izin atas lokasi yang dikehendaki. Dalam artian lain Kabupaten Tangerang telah mengalokasikan izin lokasi diberikan untuk kepentingan masyarakat banyak. dibuktikan dengan izin lokasi yang telah diselesaikan yang diberikan atas dasar kebermanfaatn bagi orang banyak yang diharapkan mampu meningkatkan derajat hidup dan masyarakat yang ada disekitarnya.

3. Lingkungan Hidup

a. Timbunan Sampah yang Ditangani

Timbunan sampah merupakan tempat penumpukan sampah yang ditangani oleh pemerintah atau perusahaan swasta. Timbunan sampah ini dapat terdiri dari beberapa tipe seperti timbunan sampah terbuka atau tertutup. Pengelolaan timbunan sampah harus memenuhi standar lingkungan yang ketat untuk memastikan bahwa sampah tidak membahayakan lingkungan dan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Tangerang telah berupaya optimal untuk menangani masalah sampah agar dapat tertangani dengan baik dan berdampak baik bagi lingkungan secara berkelanjutan.

Gambar 2.61 Timbunan Sampah yang Ditangani Tahun 2018-2021



Grafik diatas menunjukkan capaian timbunan sampah yang ditangani. Berdasarkan data tersebut pada tahun 2021 persentase timbunan sampah yang dapat ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang mencapai 31%. terdapat peningkatan sekitar 15% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut mengindikasikan adanya keseriusan pemerintah dalam menangani timbunan sampah. Sehingga lingkungan dapat dikondisikan tetap asri dan nyaman dihuni oleh masyarakatserta perlunya dukungan dari masyarakat untuk terus meningkatkan kesadarannya akan pengelolaan sampah dan akan didukung oleh pemerintah melalui pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai.

4. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk adalah rasio antara jumlah penduduk yang memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) terhadap jumlah penduduk total dalam suatu wilayah. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penetrasi KTP di suatu wilayah. Tingkat penetrasi yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah sukses dalam memfasilitasi penerbitan KTP dan memastikan bahwa masyarakat memilikinya.

Gambar 2.62 Rasio Penduduk Ber-KTP Tahun 2018-2021



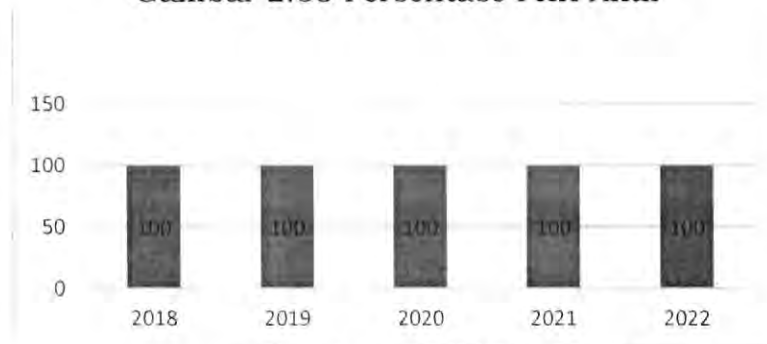
Grafik diatas menunjukkan tingkat penetrasi KTP di suatu wilayah yang diambil dari rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk. Dapat dilihat dari grafik diatas. capaian Kabupaten Tangerang dalam memfasilitasi penerbitan KTP dan memastikan bahwa masyarakat dapat memiliki KTP sangat tinggi, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat besar kemungkinan dipengaruhi oleh pandemic covid-19. Namun pada tahun 2021 angka penetrasi kembali membaik diangkat 91,21% yang mengindikasikan lebih banyak penduduk yang dapat difasilitasi untuk membuat KTP. Dalam hal ini. Kabupaten Tangerang akan mengoptimalkan inovasi pada pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil agar menjamin setiap warganya agar bisa mendapatkan dan memiliki akses membuat KTP dengan mudah dan terjangkau.

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Persentase PKK Aktif

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Persentase PKK aktif mengukur efektivitas program PKK. Angka yang tinggi menunjukkan bahwa program PKK efektif dan masyarakat memanfaatkan PKK sebagai suatu organisasi yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan agar turut serta dalam pembangunan. sedangkan angka yang rendah menunjukkan bahwa ada hambatan dalam program atau kendala yang menghalangi masyarakat dari memanfaatkan layanannya.

Gambar 2.63 Persentase PKK Aktif



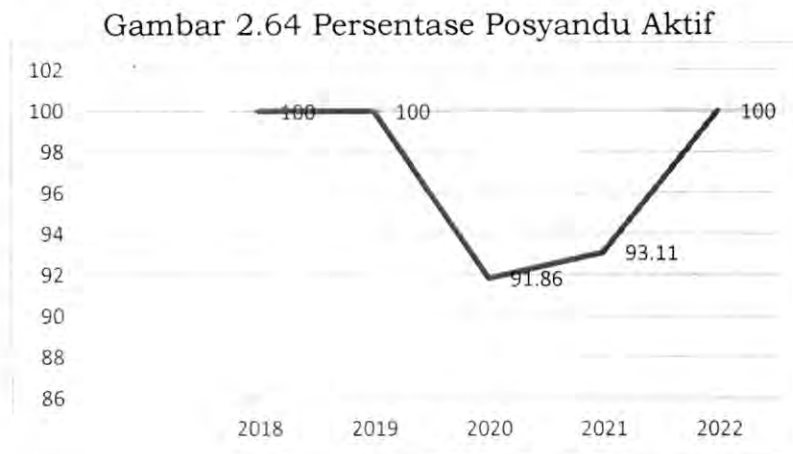
Sumber : DPMPD. 2022

Dari grafik diatas menunjukkan capaian PKK aktif yang ada di Kabupaten Tangerang adalah 100% dari tahun ke tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh organisasi PKK yang ada seluruhnya aktif dan melaksanakan program dan kegiatan yang ada dan turut serta dalam program pembangunan. Melihat angka tersebut partisipasi masyarakat terhadap program PKK juga sangat tinggi dan bisa dikatakan bahwa masyarakat memiliki kesadaran akan berkontribusi dalam pembangunan melalui program PKK yang kemudian mendekatkan pada tercapainya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. berakhlak mulia dan berbudi luhur. sehat sejahtera. maju dan mandiri. kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

b. Persentase Posyandu Aktif

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pusat pelayanan kesehatan primer yang berfokus pada upaya promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat terkhusus bagi ibu, anak dan lansia. Persentase posyandu aktif mengukur efektivitas program posyandu dalam melayani masyarakat. Angka yang tinggi menunjukkan bahwa posyandu efektif dan masyarakat memanfaatkan layanan didalamnya. sedangkan angka yang rendah menunjukkan bahwa ada hambatan dalam program atau kendala

lain yang dihadapi dalam pelaksanaan posyandu dalam memberikan layanan Kesehatan bagi masyarakat.



Sumber : DPMPD. 2022

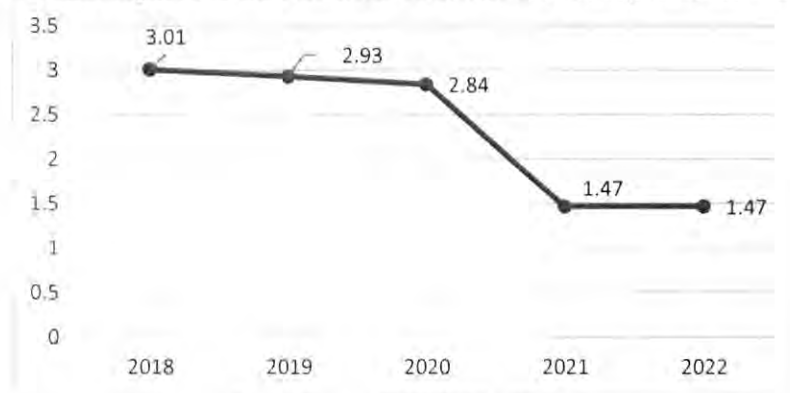
Grafik diatas menunjukkan tingkat persentase Posyandu yang aktif dibandingkan dengan seluruh Posyandu yang ada. Berdasarkan data diatas, persentase posyandu yang aktif berada pada angka yang tinggi. Pada tahun 2018 dan 2019 mencapai angka 100%. sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan di angka 91,86% dan 93,11%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada tahun 2020 dan 2021 terdapat kendala dalam melaksanakan kegiatan posyandu atau ada beberapa posyandu yang kemudian tidak aktif yang diakibatkan juga oleh adanya pandemic covid-19. Dilain sisi pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam hal memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui program posyandu yang dikhususkan bagi ibu, anak dan lansia. Capaian tersebut juga memastikan bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang dapat menikmati dan mendapatkan akses fasilitas kesehatan.

6. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

a. Laju pertumbuhan penduduk (LPP)

Laju pertumbuhan penduduk adalah tingkat perubahan jumlah penduduk suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Ini diukur sebagai persentase perubahan jumlah penduduk dari periode sebelumnya. Laju pertumbuhan penduduk memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan pemerintah dan memahami dinamika populasi. Laju pertumbuhan penduduk bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan tingkat migrasi. Jika tingkat kelahiran lebih tinggi daripada tingkat kematian, maka laju pertumbuhan penduduk akan meningkat. Sebaliknya, jika tingkat kematian lebih tinggi daripada tingkat kelahiran, maka laju pertumbuhan penduduk akan menurun.

Gambar 2.65 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Tahun 2018-2022



Sumber : DPPKB, 2022

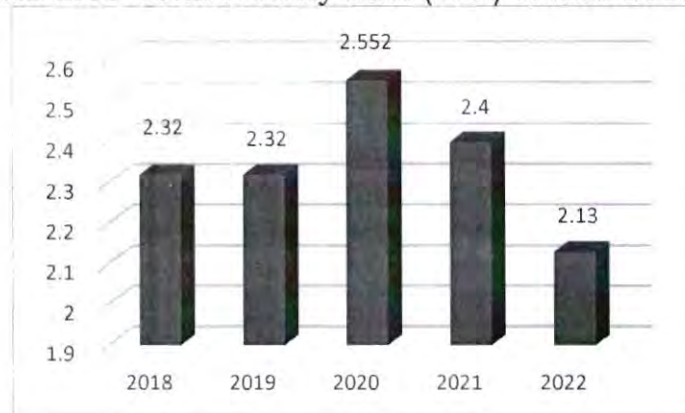
Grafik diatas menunjukkan tingkat laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data diatas, pertumbuhan laju penduduk selalu mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 mencapai angka 3,01%, kemudian menurun pada tahun 2021 hingga mencapai angka 1,47% demikian pula tahun 2022. Menurunnya LPP ini karena terdapat perbedaan perhitungan jumlah penduduk yang sebelum tahun 2020 menggunakan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, sedangkan jumlah penduduk tahun 2020 sampai dengan 2022 menggunakan hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 dimana dalam perhitungan jumlah penduduk telah memperhatikan penduduk ber-NIK. Pertumbuhan penduduk yang relatif stabil menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk tidak begitu menjadi isu yang serius karena masih dapat dikondisikan dan dapat ditangani dengan kebijakan yang ada.

b. Total Fertility Rate (TFR)

Total fertility rate (TFR) adalah jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa produktifnya (umumnya didefinisikan sebagai usia antara 15-49 tahun) jika tingkat kelahiran dan kematian tetap stabil. Total fertility rate (TFR) adalah jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa produktifnya (umumnya didefinisikan sebagai usia antara 15-49 tahun) jika tingkat kelahiran dan kematian tetap stabil. Ini adalah ukuran kunci dari tingkat reproduksi suatu populasi.

TFR digunakan untuk mengukur tingkat kelahiran dalam suatu populasi dan membantu memahami dinamika populasi dan proyeksi pertumbuhan penduduk. Nilai TFR yang tinggi menunjukkan tingkat reproduksi yang tinggi dan pertumbuhan penduduk yang cepat, sementara nilai TFR yang rendah menunjukkan tingkat reproduksi yang rendah dan pertumbuhan penduduk yang lambat.

Gambar 2.66 Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2018-2022



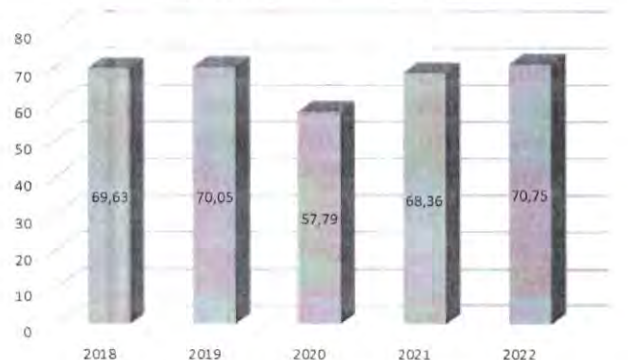
Sumber : DPPKB, 2022

Grafik diatas menunjukkan jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa produktifnya. Berdasarkan data diatas, angka pertumbuhan penduduk berada pada kondisi yang stabil, tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020 angka TFR mencapai 2,552%, terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut disebabkan oleh tingginya usia perkawinan masyarakat Kabupaten Tangerang yang berada dalam masa produktifnya, sehingga dapat mempengaruhi jumlah rata-rata kelahiran.

c. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49

Angka pemakaian kontrasepsi adalah persentase perempuan menikah yang menggunakan metode kontrasepsi untuk membatasi atau memperlambat kehamilan. Angka ini berguna untuk mengukur tingkat kesadaran dan akses masyarakat terhadap layanan keluarga berencana. Di Indonesia, angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah pada tahun 2020 sekitar 56%. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan menikah di Indonesia sudah memiliki akses dan memahami pentingnya layanan keluarga berencana. Namun, masih ada beberapa faktor seperti keterbatasan akses, stigma, dan kendala ekonomi yang mempengaruhi pemakaian kontrasepsi bagi sebagian kecil dari masyarakat.

Gambar 2.67 Angka Pemakaian Kontrasepsi bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun



Sumber : DPPKB, 2022

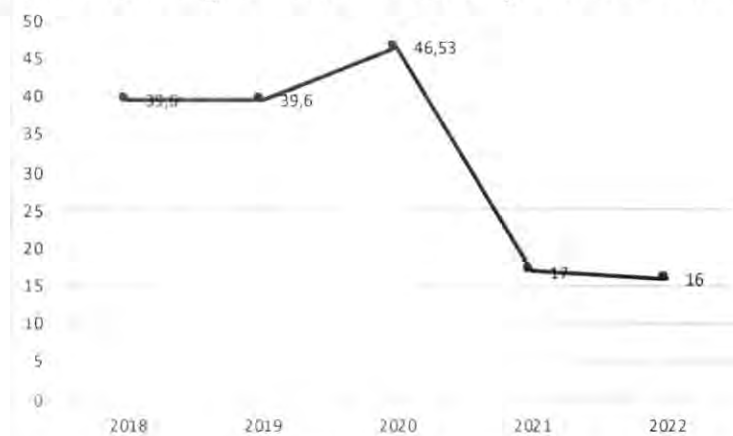
Grafik diatas menunjukkan tingkat angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49. Berdasarkan data diatas, angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15-49 pada tahun 2020 mencapai 57,59% dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan mencapai angka 70,75%.

Angka tersebut menunjukkan bahwa perempuan menikah di Kabupaten Tangerang makin menaruh perhatian terhadap pemakaian kontrasepsi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perempuan menikah telah memiliki akses dan kesadaran akan pentingnya keluarga berencana.

d. Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)

Angka kelahiran remaja adalah jumlah bayi yang dilahirkan oleh wanita berusia 15-19 tahun. Angka ini menjadi salah satu indikator penting kesehatan reproduksi dan memberikan informasi tentang tingkat pemahaman dan akses layanan kesehatan reproduksi bagi remaja. Di Indonesia, angka kelahiran remaja masih cukup tinggi. Menurut data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pada tahun 2020 sekitar 27% dari total kelahiran adalah pada remaja. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa kendala seperti keterbatasan akses layanan kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, dan stigma yang mempengaruhi tingkat kehamilan pada remaja.

Gambar 2.68 Angka Kelahiran Remaja Tahun 2018-2022



Sumber : DPPKB, 2022

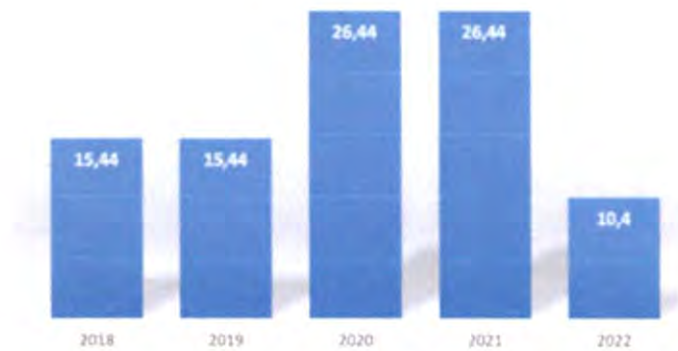
Grafik diatas menunjukkan angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun. Berdasarkan data diatas, persentase kelahiran pada usia remaja 15-19 tahun masih tergolong tinggi pada tahun 2020 yang mencapai 46,53 persen, akan tetapi mengalami penurunan menjadi 16 persen pada tahun 2022. Dalam pelaksanaan masih ada kendala seperti keterbatasan akses layanan kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, dan stigma yang mempengaruhi tingkat kehamilan pada remaja. Kurangnya optimalnya promosi akan keluarga berencana yang mampu diterima dan dipahami oleh perempuan remaja juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk mengurangi dan mengatasi permasalahan tingginya angka kelahiran remaja.

e. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) adalah persentase pasangan usia subur (wanita dan pria berusia 15-49 tahun) yang ingin membatasi atau memutuskan kehamilan, tetapi belum memiliki akses atau belum menggunakan layanan keluarga berencana. Unmet need merupakan indikator penting untuk mengukur keterbatasan akses layanan keluarga berencana dan memahami kebutuhan dan permintaan masyarakat. Di Indonesia, unmet need pada tahun 2020 sekitar 10%. Ini berarti masih ada sekitar 10% dari pasangan usia subur yang ingin membatasi kehamilan, tetapi

belum memiliki akses atau belum menggunakan layanan keluarga berencana. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan akses layanan, stigma, dan kendala ekonomi.

Gambar 2.69 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*)



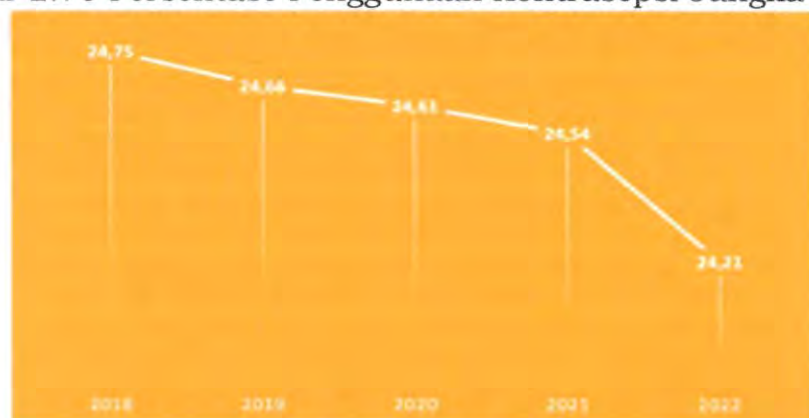
Sumber : DPPKB, 2022

Grafik diatas menunjukkan angka cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*). Berdasarkan data diatas, persentase PUS yang ingin ber-KB pada tahun 2020 dan 2022 mencapai 10,4%. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih ada sekitar 10,4% PUS yang ingin ber-KB namun tidak terpenuhi karena keterbatasan akan akses layanan Kesehatan reproduksi. Angka tersebut menjadikan indicator bahwa program keluarga berencana belum sepenuhnya menyentuh seluruh lini masyarakat, diharapkan pemerintah dapat memfasilitasi kebutuhan pasangan usia subur yang ingin membatasi kehamilan di Kabupaten Tangerang.

f. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalah pemakaian alat kontrasepsi yang bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, seperti suntik, implan, dan IUD (Intra Uterine Device). MKJP memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dan memerlukan pemasangan yang hanya dilakukan sekali saja, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pasangan usia subur untuk membatasi kehamilan tanpa harus khawatir dan memikirkan penggunaan setiap hari. Di Indonesia, pemakaian MKJP masih terbilang rendah, sekitar 20% dari seluruh pengguna kontrasepsi. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya informasi, keterbatasan akses, dan stigma yang terkait dengan pemakaian kontrasepsi jangka panjang.

Gambar 2.70 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang



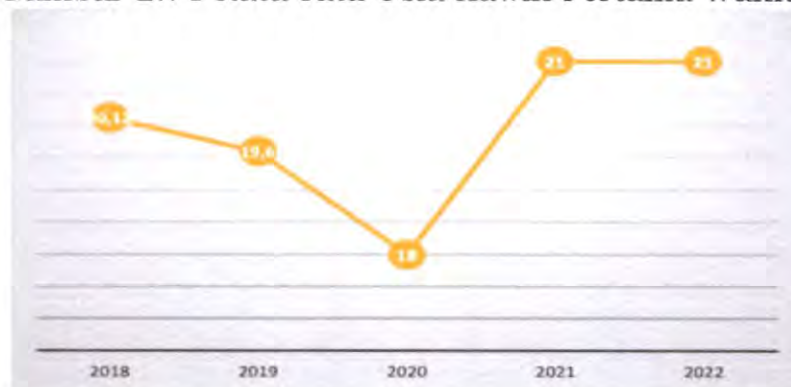
Sumber : DPPKB, 2022

Grafik diatas menunjukkan persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data diatas, persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) di Kabupaten Tangerang berada pada angka yang stabil yaitu sepanjang 2018 hingga 2021 berkutat pada angka 24%. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat akan penggunaan kontrasepsi jangka panjang. Tantangan yang muncul dari hal ini adalah upaya pemerintah dalam mempromosikan kontrasepsi jangka panjang melalui program keluarga berencana. Sehingga dapat meningkatkan persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang di Kabupaten Tangerang.

g. Rata-rata usia kawin pertama Wanita

Berdasarkan data World Bank pada tahun 2020, rata-rata usia kawin pertama wanita di Indonesia adalah 22.7 tahun. Namun, perlu dicatat bahwa data ini dapat berubah dari waktu ke waktu dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan ekonomi di suatu negara atau wilayah.

Gambar 2.71 Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita



Sumber : DPPKB, 2022

Grafik diatas menunjukkan rata-rata usia kawin pertama wanita di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data diatas, rata-rata usia kawin pertama wanita di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 rata-rata usia kawin pertama wanita berada pada usia 21 tahun. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor diantaranya, semakin banyak wanita yang mengejar Pendidikan tinggi, yang memungkinkan semakin tinggi keinginan mereka untuk menunda pernikahan. Banyak wanita yang ingin membangun karir mereka sebelum menikah dan perubahan nilai social yang membuat mereka mengambil keputusan untuk tidak menikah hingga usia yang matang. Factor lain adalah ketidakpastian kondisi ekonomi sehingga mereka lebih aman memilih menunda atau tidak menikah ditengah kondisi ekonomi yang tidak stabil.

7. Perhubungan

Data kendaraan umum yang melakukan uji KIR di Kabupaten Tangerang melalui Dinas Perhubungan pada tahun 2022 mencapai 58.304 unit kendaraan umum dengan jenis kendaraan meliputi mobil penumpang sebanyak 1.752 unit, mobil barang sebanyak 56.103 unit, kondisi uji KIR di Kabupaten Tangerang meningkat dari tahun 2020-2022, kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat keselamatan berkendara bagi kendaraan umum menjadi prioritas utama dalam keselamatan transportasi.

Tabel 2.22 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Kendaraan	2018	2019	2020	2021	2022
Mobil Barang :	51,505	27,562	48,956	54,154	56,103
-Truck	6,732	25,661	22,302	23,464	23,960
-Pick Up	27,112	1,129	19,065	23,485	25,020
-Light Truck	17,661	772	7,426	7,018	7,107
-TR. HEAD			163	187	16
Mobil Penumpang:	3,346	206	1,916	1,612	1,752
-Angkutan Kota			1,113	913	102
-Bis	266	86	536	103	216
-Micro	554	87	209	562	788
-Mini	2,379	32			
-Taxi	147	1	58	34	646
Tempelean	202	12	261	371	431
Kendaraan Khusus			6	11	18
Total	55,053	27,780	51,139	56,148	58,304

Sumber : Dinas Perhubungan, Kabupaten Tangerang, Tahun 2022

Rasio Rasio Panjang jalan per Jumlah kendaraan di Kabupaten Tangerang menghitung pelayanan panjang jalan dengan Jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Tangerang. Panjang Jalan yang diperhitungkan adalah jalan nasional (belum termasuk jalan tol), jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan kota. Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan di sini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor. Nilai rasio panjang jalan dengan kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan.

Tabel 2.23 Jumlah Kendaraan dan Panjang Jalan di Kabupaten Tangerang

Kendaraan	2018	2019	2020	2021	2022
Mobil Penumpang	168,626	192,302	189,087	189,647	189,087
Bus	245	400	310	1,648	310
Truk	50,043	55,246	53,669	52,844	53,669
Sepeda Motor	1,216,558	1,339,870	1,253,300	1,203,050	1,253,300
Jumlah	1,435,472	1,587,818	1,496,366	1,447,189	1,496,366
Panjang Jalan	1,128.29	1,128.29	1,128.61	1,128.64	1,128.64
Rasio (unit/Km)	1,272.25	1,407.28	1,325.85	1,282.24	1,325.81

Sumber : BPS Provinsi Banten, diolah.

Pada tahun 2022 di Kabupaten Tangerang per 1 km Panjang jalan melayani sekitar 1.325 unit kendaraan bermotor, tahun 2022 per 1 Km Panjang jalan melayani sekitar 1.282 unit kendaraan. Kepemilikan KIR di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 mencapai 23,99 persen dari 243.066 unit kendaraan yang ada di Kabupaten Tangerang.

Tabel 2.24 Kepemilikan KIR di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kendaraan	218,914	247,948	243,066	244,139	243,066
2	Uji KIR	55,053	27,780	51,139	56,148	58,304
3	Persentase Kepemilikan KIR	25.15	11.20	21.04	23.00	23.99

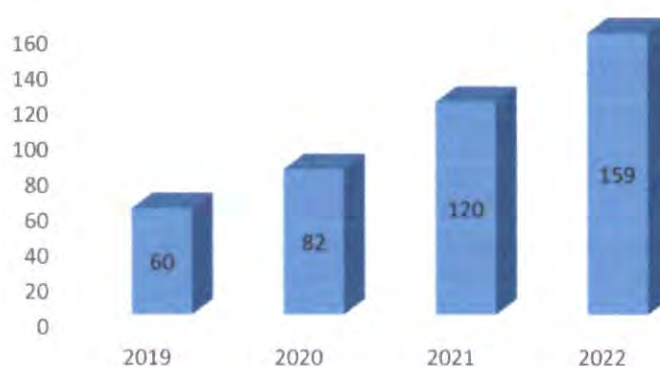
Sumber : Dinas Perhubungan

8. Koperasi. Usaha Kecil. Dan Menengah

a. Koperasi

Peran koperasi dalam pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat di sekitarnya melalui partisipasi aktif dalam ekonomi. Koperasi dapat menjadi alat yang efektif dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Gambar 2.72 Jumlah Koperasi Aktif 2018-2022



Sumber : DKUM. 2022

Jumlah koperasi yang aktif di Kabupaten Tangerang. setiap tahun mengalami peningkatan Hal ini memperlihatkan bahwa peran Pemerintah Daerah bukan hanya meningkatkan jumlah koperasi akan tetapi juga koperasi yang senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan kapasitasnya. Dibawah ini disajikan data koperasi yang meningkat kualitasnya

Tabel 2.25. Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022
Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset	Koperasi	60	82	120	159

Sumber : DUKM. 2022

b. Usaha Mikro Kecil

Usaha Mikro Kecil (UMK) adalah bentuk usaha skala kecil yang dimiliki oleh individu atau kelompok kecil yang memiliki aset atau modal terbatas. UMK dapat bergerak di berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, perdagangan, jasa atau manufaktur. UMK memiliki peran penting dalam perekonomian. karena dapat membantu menciptakan lapangan kerja. meningkatkan pendapatan. dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu. UMK juga dapat mempromosikan kemandirian dan kewirausahaan dalam masyarakat.

Gambar 2.73 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2018-2022



Sumber : DUKM. 2022

Dari grafik tersebut menggambarkan bagaimana geliat perekonomian di Kabupaten Tangerang sangatlah dinamis. Banyaknya UMK yang ada adalah representasi dari sehatnya kegiatan ekonomi di Kabupaten Tangerang.

Tabel 2.26 Jumlah Produk UM yang Dipasarkan

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022
Jumlah produk usaha mikro yang dipasarkan	Produk	231	250	300	336

Sumber : DUKM. 2022

Tabel 2.27 Fasilitas UPDB pada Koperasi dan UM

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Dana bergulir yang telah disalurkan	RP.	10.380.000.000	39.840.000.000	29.790.000.000	25.940.000.000	18.780.000.000
Dana bergulir yang ada	RP.	39.093.740.348	26.969.527.671	14.008.834.135	19.954.901.883	35.395.123.101
Jumlah umkm yang mendapatkan pembiayaan UPDB	Usaha Mikro	5303	5067	4655	3275	1698
Jumlah koperasi yang mendapatkan pembiayaan UPDB	Koperasi	13	17	11	14	13

Sumber : DUKM. 2022

9. Penanaman Modal

a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Investor berskala nasional adalah investor yang beroperasi dalam skala yang cukup besar di tingkat nasional, yaitu investor yang melakukan investasi di berbagai wilayah atau sektor ekonomi dalam suatu negara. Investor berskala nasional biasanya mencakup institusi keuangan seperti bank, perusahaan asuransi dan dana pensiun, serta perusahaan investasi swasta. Investor berskala nasional memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi suatu negara. karena mereka dapat memberikan sumber daya keuangan yang signifikan untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan proyek-proyek infrastruktur.

Gambar 2.78 menunjukkan jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan grafik diatas. terjadi peningkatan jumlah investor pada tahun 2022 mencapai angka 7.247 investor. Angka tersebut menunjukkan Kabupaten Tangerang sebagai daerah dengan lingkungan investasi yang aman dan kondusif, sehingga para investor mau untuk berinvestasi di Kabupaten Tangerang.

Gambar 2.74 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

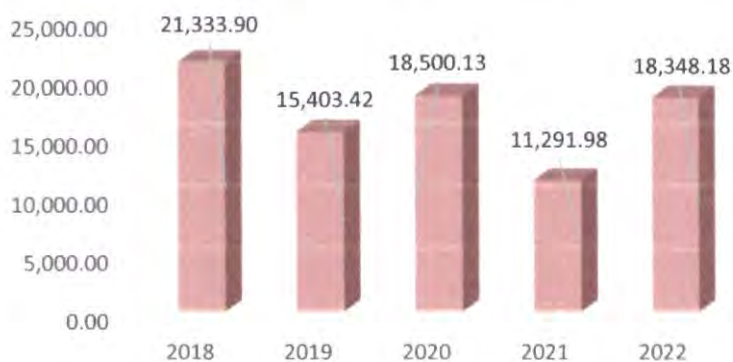


Sumber : DPMPTSP. 2022

a. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Investasi berskala nasional adalah investasi yang dilakukan dalam skala besar di tingkat nasional, yang melibatkan dana yang cukup besar dan memiliki dampak yang signifikan pada ekonomi suatu negara. Investasi berskala nasional dapat dilakukan oleh berbagai jenis investor, termasuk perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah. Investasi berskala nasional memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Namun, investasi semacam itu juga memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah dan sektor swasta, serta regulasi dan pengawasan yang memadai untuk memastikan investasi tersebut dilakukan dengan transparan, adil dan bertanggung jawab. Berdasarkan gambar 2.79 menunjukkan jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan grafik diatas jumlah nilai investasi mencapai angka yang cukup tinggi pada tahun 2022 mencapai angka 18.348.18 Milyar Rupiah.

Gambar 2.75 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)



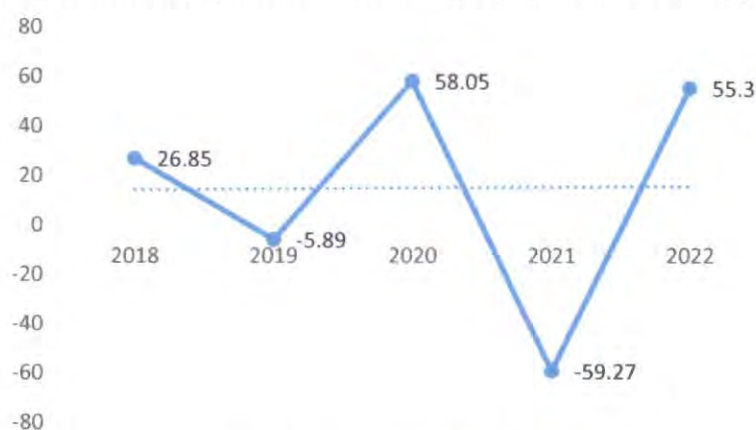
Sumber : DPMPTSP. 2022

Angka tersebut menunjukkan pada tahun 2022 banyak investor yang mulai berinvestasi di Kabupaten Tangerang. Hal tersebut tidak lepas dari kondisi iklim investasi yang baik dan kondusif di Kabupaten Tangerang itu sendiri.

b. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

Nilai Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengacu pada total nilai investasi yang diinvestasikan oleh perusahaan domestik di dalam negeri dalam bentuk modal dan aset. Jika terjadi kenaikan nilai realisasi PMDN, artinya terdapat peningkatan jumlah investasi yang dilakukan oleh perusahaan domestik, yang dapat diindikasikan sebagai peningkatan minat investasi dalam negeri. Sebaliknya, jika terjadi penurunan nilai realisasi PMDN, artinya terdapat penurunan jumlah investasi yang dilakukan oleh perusahaan domestik. Kenaikan atau penurunan nilai realisasi PMDN dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi makro, perubahan kebijakan pemerintah, stabilitas politik dan iklim investasi.

Gambar 2.76 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)



Sumber : DPMPTSP. 2022

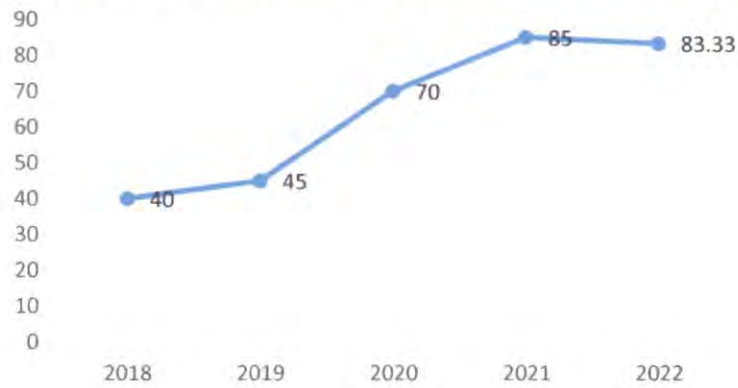
Grafik diatas menunjukkan kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah). Terlihat bahwa nilai realisasi PMDN sempat mengalami penurunan hingga minus. Pada tahun 2020 nilai realisasi mencapai 58.05 milyar rupiah dan tahun 2022 telah kembali mencapai 55.3 milyar rupiah. Angka tersebut menunjukkan adanya minat investasi yang cukup baik di Kabupaten Tangerang. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan iklim investasi agar realisasi investasi daerah dapat meningkat.

10. Kepemudaan dan Olahraga

a. Persentase organisasi pemuda yang aktif

Indikator organisasi pemuda yang aktif penting untuk mengevaluasi kinerja dan dampak dari organisasi pemuda tersebut dalam mencapai tujuannya. Indikator-indikator tersebut dapat memberikan gambaran tentang seberapa aktif organisasi pemuda tersebut dalam melakukan kegiatan, seberapa besar dampak yang telah dicapai, serta seberapa besar kontribusinya terhadap pengembangan dan kesejahteraan masyarakat. Indikator organisasi pemuda yang aktif juga dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi kekurangan atau potensi perbaikan dalam kinerja organisasi pemuda tersebut dan membantu mengembangkan rencana strategis untuk meningkatkan kinerja dan dampaknya.

Gambar 2.77 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif



Sumber : Disporabudpar. 2022

Grafik diatas menunjukkan persentase organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan grafik diatas angka persentase selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 mencapai angka 85% organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Tangerang. Angka tersebut menunjukkan keaktifan pemuda di Kabupaten Tangerang yang juga turut serta berkontribusi dalam pembangunan kepemudaan melalui tujuan masing-masing organisasi pemuda yang ada. Pada tahun 2022 persentase organisasi pemuda yang aktif sedikit menurun menjadi 83.33 persen. hal ini disebabkan pertumbuhan organisasi pemuda baru senantiasa bertambah sehingga dibutuhkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

a. Persentase wirausaha muda

Wirausaha muda adalah satu bentuk representasi kesehatan ekonomi di suatu daerah. Dalam hal ini Kabupaten Tangerang menganalisis melalui pertumbuhan wirausaha muda yang turut berperan aktif dalam pembangunan ekonomi. Indikator ini digunakan untuk berbagai tujuan seperti, menilai kesehatan ekonomi suatu negara atau wilayah dengan melihat seberapa besar kontribusi dari sektor usaha kecil dan menengah yang banyak dijalankan oleh wirausaha muda dan Melihat tingkat partisipasi generasi muda dalam perekonomian dan membantu memotivasi lebih banyak orang muda untuk menjadi wirausaha.

Gambar 2.78 Persentase Wirausaha Muda



Sumber : Disporabudpar. 2022

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan persentase wirausaha muda yang ada di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan grafik diatas angka persentase wirausaha muda selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022 angka persentase wirausaha muda mencapai 87.7%. Angka tersebut menunjukkan Kesehatan ekonomi Kabupaten Tangerang masih dalam kondisi sehat. dilihat

dari banyaknya wirausaha muda yang mulai menjalankan usaha kecil dan menengah yang dijalankan oleh pemuda di Kabupaten Tangerang.

b. Cakupan pembinaan olahraga

Cakupan pembinaan olahraga mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk mengembangkan bakat dan potensi atlet muda, serta mendukung peningkatan prestasi olahraga di tingkat nasional. Dalam pengembangan olahraga, cakupan pembinaan olahraga ini penting untuk mengembangkan atlet muda yang berprestasi dan menciptakan iklim yang sehat bagi pengembangan olahraga di tingkat nasional. Cakupan pembinaan olahraga mencakup beberapa aspek seperti, pelatihan atlet muda, pengembangan program pelatihan fisik, hingga pemberian fasilitas olahraga yang memadai dan dukungan finansial.



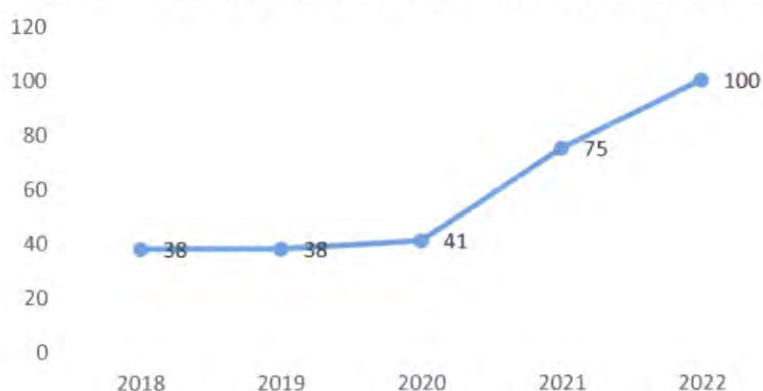
Sumber : Disporabudpar

Grafik diatas menunjukkan cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan grafik diatas cakupan pembinaan olahraga mengalami peningkatan drastis pada tahun 2022 yang mencapai angka 100%. Angka tersebut dikarenakan beberapa faktor seperti mulai dilaksanakannya berbagai pelatihan pembentukan atlet, penyediaan sarana dan prasarana serta pelaksanaan berbagai kompetisi lokal. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai serius menangani permasalahan pembinaan olahraga di Kabupaten Tangerang agar terciptanya masyarakat yang bugar dan sehat jasmaninya.

c. Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Cakupan pembinaan atlet muda meliputi berbagai hal yang bertujuan untuk mengembangkan bakat dan potensi atlet muda serta mendukung peningkatan prestasi olahraga di tingkat daerah. Dalam pengembangan olahraga, cakupan pembinaan atlet muda ini sangat penting untuk menciptakan iklim yang sehat bagi pengembangan olahraga di tingkat daerah serta mencetak atlet muda yang berprestasi.

Gambar 2.80 Cakupan Pembinaan Atlet Muda



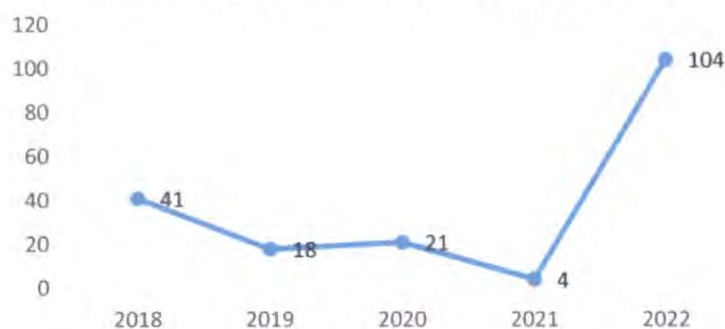
Sumber : Disporabudpar

Grafik diatas menunjukkan angka cakupan pembinaan atlet muda di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data diatas cakupan pembinaan atlet muda mengalami peningkatan pada tahun 2022. Pada tahun 2022 angka cakupan pembinaan atlet muda mencapai 100%. angka tersebut menunjukkan bahwa pembinaan atlet muda mulai diperhatikan oleh pemerintah. Pembinaan atlet muda yang bermuara pada terciptanya atlet berbakat daerah yang berprestasi.

d. Jumlah Atlet Berprestasi

Atlet berprestasi diciptakan dari iklim keolahragaan yang baik serta dukungan dari berbagai pihak. Kabupaten Tangerang telah melakukan berbagai upaya dalam hal pembentukan atlet berprestasi salah satunya melalui berbagai program kepemudaan dan olah raga yang diampu oleh Dinas pemuda dan olahraga. Atlet berprestasi menunjukkan keberhasilan program pembinaan olahraga di Kabupaten Tangerang.

Gambar 2.81 Jumlah Atlet Berprestasi



Sumber : Disporabudpar. 2022

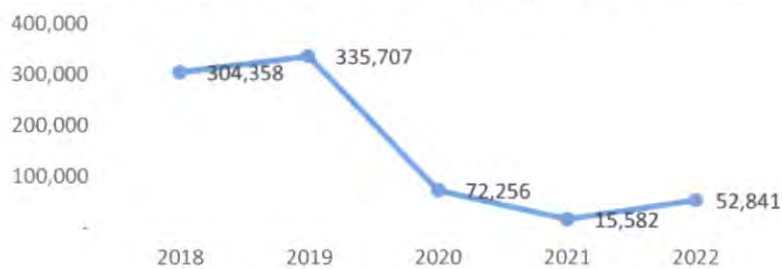
Grafik diatas menunjukkan jumlah atlet berprestasi di Kabupaten Tangerang. Jumlah atlet yang berprestasi menurut grafik diatas mengalami penurunan pada tahun 2021 capaian jumlah atlet berprestasi menurun drastis hanya pada angka 4 orang saja. Hal tersebut dikarenakan banyak kegiatan pembinaan olahraga yang mulai dirintis kembali setelah terjadinya pandemi Covid-19 yang lalu. Pada tahun 2022 telah banyak prestasi yang diraih seiring dengan mulai normalnya berbagai kompetisi olahraga yaitu 104 atlet berprestasi. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan pembinaan olahraga sehingga tercipta atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama harum daerah di kancah nasional hingga internasional.

11. Perpustakaan

a. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Kunjungan ke perpustakaan bisa menjadi salah satu indikator untuk mengevaluasi kinerja perpustakaan, namun tidak satu-satunya indikator untuk menilai kualitas perpustakaan. Beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan untuk menilai kualitas perpustakaan antara lain koleksi buku dan materi lainnya, ketersediaan dan kemudahan akses ke sumber daya digital, kualitas layanan dan program yang ditawarkan, kecukupan dan keterampilan staf, ketersediaan dan kualitas fasilitas dan lingkungan perpustakaan, serta sejauh mana perpustakaan dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan penggunaannya. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi yang holistik untuk menilai kualitas perpustakaan yang mencakup beberapa aspek tersebut.

Gambar 2.82 Jumlah Pengunjung Perpustakaan



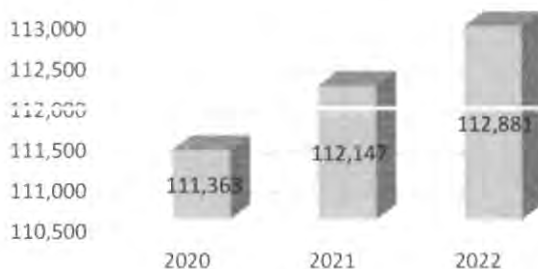
Sumber : Disperpusip. 2022

Grafik diatas menunjukkan jumlah pengunjung ke perpustakaan daerah Kabupaten Tangerang setiap tahunnya. Berdasarkan grafik diatas, terjadi penurunan jumlah pengunjung perpustakaan. Pada tahun 2021 mencapai angka 15.582 orang. sedangkan pada tahun 2019 angka kunjungan perpustakaan sangat tinggi berada pada angka 335.707 orang. Angka tersebut memperlihatkan penurunan minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan, dimungkinkan perkembangan teknologi yang sangat cepat mempengaruhi jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan, karena informasi telah dapat diakses dengan mudah melalui media digital diperlukan upaya promosi lebih lanjut untuk meningkatkan jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Kabupaten Tangerang. Walaupun pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah kunjungan sebanyak 52.841 kunjungan akan tetapi jumlah kunjungan belum bisa melewati capaian tahun 2019. Selain itu terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan kunjungan di perpustakaan relatif menurun seperti sarana dan prasarana belum optimal sesuai standar, Kompetensi SDM Perpustakaan masih terbatas serta Promosi layanan perpustakaan masih belum masif.

b. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah bisa menjadi salah satu indikator untuk mengevaluasi kinerja perpustakaan. Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah semakin meningkat, kondisi ini harus diimbangi dengan promosi terhadap layanan Perpustakaan sehingga bisa dimanfaatkan secara lebih luas oleh masyarakat.

Gambar 2.83 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah



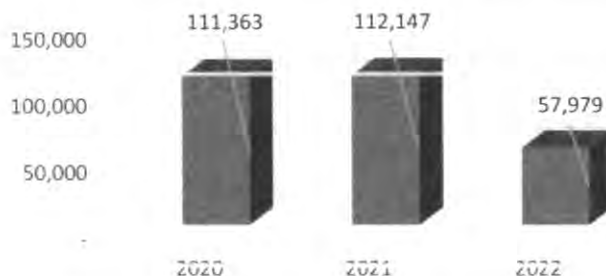
Sumber : Disperpusip. 2022

Grafik diatas menunjukkan jumlah koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Tangerang setiap tahunnya. Berdasarkan grafik diatas, koleksi buku di perpustakaan daerah cukup mumpuni untuk perpustakaan sekelas perpustakaan daerah. Angka tersebut memperlihatkan kuantitas buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah. Dilihat dari jumlah yang tidak sedikit, perpustakaan daerah juga menyediakan berbagai macam buku sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Tangerang untuk bisa memanfaatkan layanan perpustakaan tersebut.

c. Jumlah koleksi judul buku perpustakaan

Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kabupaten Tangerang setiap tahunnya, grafik dibawah ini menunjukkan koleksi judul buku di perpustakaan daerah cukup mumpuni untuk perpustakaan sekelas perpustakaan daerah.

Gambar 2.84 Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan



Sumber : Disperpusip. 2022

Data diatas menunjukkan jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Tangerang setiap tahunnya. Angka tersebut memperlihatkan kuantitas judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Dilihat dari jumlah koleksi judul yang tidak sedikit, memperlihatkan perpustakaan daerah juga menyediakan berbagai macam judul buku sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Tangerang untuk bisa memanfaatkan layanan perpustakaan tersebut. Meskipun apabila dilihat dari data yang tersedia, terdapat penurunan jumlah judul buku dari 112.147 judul pada tahun 2021 menjadi 57.979 buku di Tahun 2022.

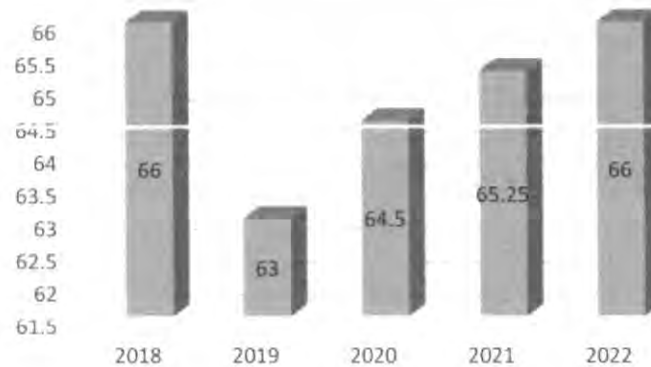
12. Kearsipan

a. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku

Pengelolaan arsip secara baku merujuk pada proses atau sistematisasi yang konsisten dalam pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip dengan mengikuti standar atau pedoman yang telah

ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan integritas, keamanan dan aksesibilitas arsip dalam jangka waktu yang lama. Standar-standar tersebut dapat bervariasi tergantung pada jenis arsip dan kebutuhan organisasi atau instansi yang melakukan pengelolaan arsip.

Gambar 2.85 Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku



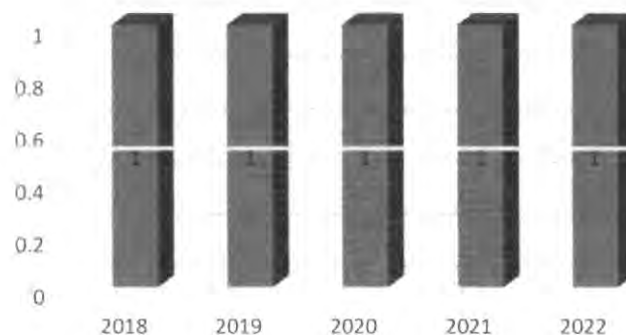
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tangerang, 2022

Grafik di atas menunjukkan persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku. Berdasarkan grafik di atas, angka persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku pada tahun 2022 mencapai angka 66% yang artinya sebanyak 66% perangkat daerah telah mengelola arsip sesuai dengan standar pengelolaan arsip. Namun masih terdapat beberapa permasalahan sehingga pengelolaan kearsipan di tingkat perangkat daerah masih belum optimal yaitu Pelaksanaan akuisisi dan penyerahan arsip statis masih belum maksimal dan belum terkelolanya arsip sesuai NSPK.

b. Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Sumber Daya manusia pengelola kearsipan perlu untuk ditingkatkan agar menunjang dan meningkatkan kualitas kinerja. Tidak tersedianya sumber daya kearsipan yang kompeten menjadi salah satu permasalahan yang ada di bidang urusan kearsipan Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM dilaksanakan melalui program pelatihan SDM pengelola kearsipan agar mampu mengelola arsip sesuai standar dan berkualitas

Gambar 2.86 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan



Sumber : Disperpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tangerang, 2022

Grafik di atas menunjukkan kegiatan yang diikuti oleh SDM pengelola kearsipan. Berdasarkan grafik di atas kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan selalu diadakan minimal sekali dalam satu tahun untuk meningkatkan kualitas SDM pengelola kearsipan. Hal tersebut dilakukan guna

menunjang pengelolaan kearsipan yang berkualitas dilingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang.

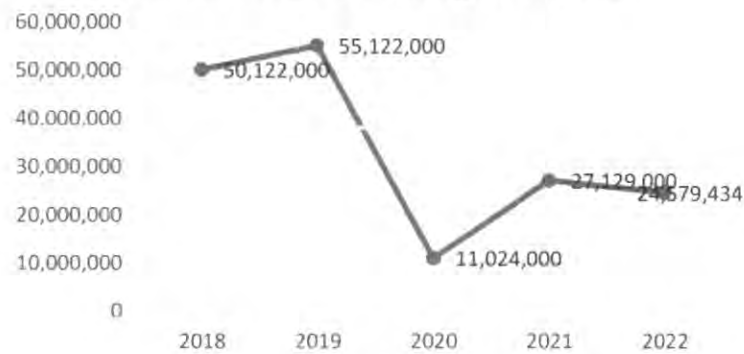
2.4.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Pariwisata

a. Kunjungan Wisata

Kunjungan wisata adalah suatu kegiatan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata atau destinasi wisata baik di dalam maupun di luar negeri. Tujuan utama dari kunjungan wisata adalah untuk berlibur dan menikmati berbagai keindahan alam, budaya, sejarah atau kegiatan rekreasi lainnya.

Gambar 2.87 Kunjungan Wisata



Sumber : Disporabudpar. 2022

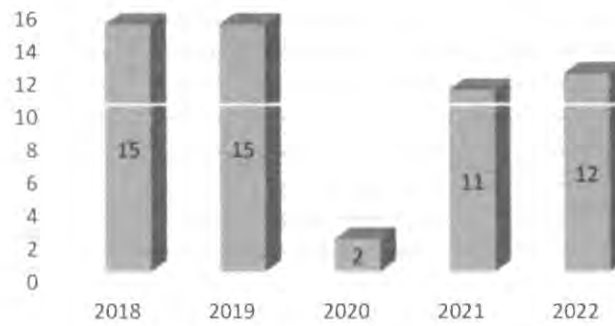
Berdasarkan grafik diatas kunjungan wisata di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2022 capaian fluktuatif, dimana pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 meningkat, akan tetapi pada tahun 2020 karena pandemi covid-19 maka kunjungan wisata menurun drastis karena pembatasan aktivitas ekonomi. Mulai Tahun 2021 kembali meningkat di angka 27.129.000 pengunjung dan di tahun 2022 menurun menjadi 24.579.000 pengunjung. Penurunan angka tersebut karena kurangnya rencana aksi dan pengembangan kawasan strategis pariwisata, serta minimnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata.

b. Penyelenggara Festival Seni dan Budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya merupakan salah satu cara untuk mempromosikan dan mengapresiasi kebudayaan dan tradisi suatu daerah Festival budaya yang dimaksudkan di sini adalah festival yang mengangkat tradisi sebagai bagian dari kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Festival dalam kategori ini adalah peristiwa yang dikelola baik oleh komunitasnya, atau dengan peran Pemerintah yang telah memasukkannya ke dalam program kerjanya.

Berdasarkan grafik diatas Penyelenggara Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2022 capaian fluktuatif. dimana pada tahun 2018 Penyelenggara Festival Seni dan Budaya sebanyak 15 kali, lalu tahun 2019 tetap di angka 15, kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan dikarenakan kondisi pandemic Covid-19.

Gambar 2.88 Penyelenggaraan Seni Budaya



Sumber: Disporabudpar. 2022

Lalu di tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 11 kali dan tahun 2022 sebanyak 12 kali. Selain itu terdapat beberapa hal yang menyebabkan penurunan tingkat penyelenggaraan budaya apabila dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019 yaitu:

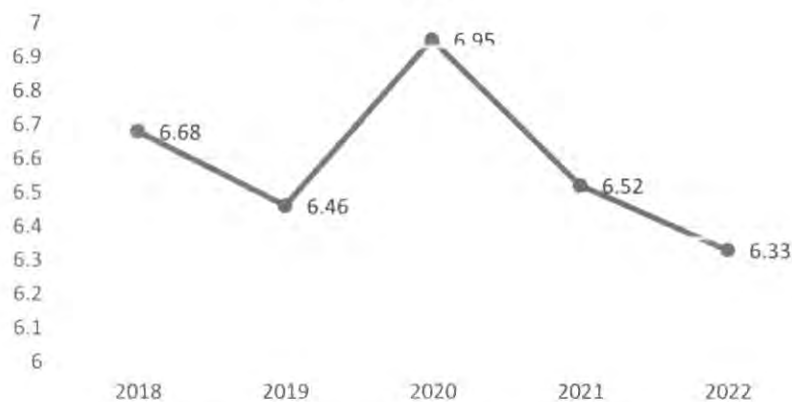
1. Minimnya pelaku seni tradisional untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya;
2. Minimnya sarana prasarana kesenian tradisional yang dimiliki oleh sanggar seni;
3. Rendahnya antusiasme masyarakat terhadap penyelenggaraan kesenian dan kebudayaan;
4. Kurangnya kontribusi pemerintah akan penghargaan terhadap pelaku seni budaya.

2. Pertanian

a. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Sektor pertanian dan perkebunan memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. termasuk dalam menentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu negara. Berikut adalah beberapa kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB:

Gambar 2.89 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang. 2022.

Berdasarkan grafik diatas Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2022 capaian fluktuatif, dimana pada tahun 2018 sebesar 6.68 persen. lalu tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar 6.46 persen. kemudian di tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 6.95 persen. lalu di tahun 2021 mengalami

penurunan kembali menjadi 6.52 persen dan kembali turun pada tahun 2022 menjadi 6.33 persen.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi di sektor pertanian yang terjadi di Kabupaten Tangerang:

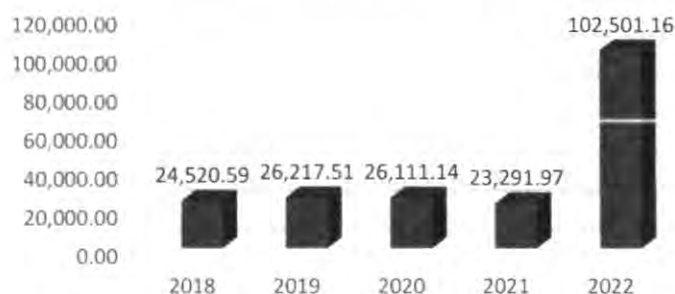
1. Masih rendahnya sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang pengolahan pangan berbahan baku palawija serta tepung umbi-umbian lokal;
2. Masih rendahnya kesediaan benih unggul;
3. Masih rendahnya ketersediaan sarana produksi pertanian dan peternakan;
4. Kurangnya ketersediaan air dan lahan pertanian;
5. Masih tingginya risiko serangan hama dan penyakit tanaman;
6. Masih rendahnya kualitas serta daya saing produk pertanian;
7. Masih rendahnya surveilans penyakit hewan, jumlah medik veteriner dan paramedik veteriner, serta pelayanan kesehatan hewan;
8. Masih rendahnya kualitas produk hewan;
9. Masih rendahnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha sektor pertanian;
10. Masih rendahnya manajemen pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian.

3. Perdagangan

a. Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor Bersih Perdagangan dalam bahasa Indonesia adalah selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu negara. Ekspor bersih perdagangan mengukur seberapa banyak barang dan jasa yang diekspor oleh negara tersebut ke negara lain dan seberapa sedikit barang dan jasa yang diimpor dari negara lain.

Gambar 2.90 Ekspor Perdagangan Kabupaten Tangerang



Sumber : BPS Kabupaten Tangerang. 2022

Berdasarkan grafik diatas Ekspor Bersih Perdagangan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2021 capaian fluktuatif, dimana pada tahun 2018 sebesar Rp. 24.520.59 Miliar lalu meningkat tahun 2019 Rp.26.217.5 Milyar dan meningkat kembali tahun 2020, akan tetapi tahun 2021 sedikit menurun disebabkan kondisi perekonomian global yang tidak menentu. Selain itu, menurunnya tingkat ekspor juga disebabkan oleh kurang optimalnya promosi dan informasi potensi produk IKM dan masih minimnya penggunaan Gerai Tangerang Gemilang yang ditujukan sebagai sarana promosi produk UMKM lokal.

4. Perindustrian

a. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Bina kelompok pengrajin atau "artisan *group building*" dalam bahasa Indonesia merupakan suatu upaya untuk membentuk atau membina kelompok pengrajin atau pekerja seni untuk bekerja sama dan meningkatkan

keterampilan dan produktivitas mereka. Secara umum, cakupan dari bina kelompok pengrajin adalah untuk membantu para anggotanya dalam meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan pendapatan mereka melalui kerjasama dan akses ke berbagai sumber daya yang berkualitas.

Gambar 2.91 Cakupan Bina Kelompok Perajin



Sumber: Disperindag, 2021, diolah.

Berdasarkan grafik diatas Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2021 capaian fluktuatif, dimana pada tahun 2018 sebesar 18.33, lalu tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 20, kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 4.94. Lalu di tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 12.92. Namun pembinaan pelaku Kelompok Pengrajin ini juga harus masih dikembangkan sehingga dapat mendorong tingkat cakupan bina kelompok Pengrajin

5. Kelautan dan Perikanan

a. Produksi Perikanan

Produksi perikanan merupakan segmen industri yang memperoleh dan memproses hasil laut dan air tawar, termasuk ikan, udang, kerang, dan makanan laut lainnya. Produksi perikanan meliputi aktivitas penangkapan ikan dan budidaya perikanan. Produksi perikanan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan protein hewani bagi masyarakat dunia. Selain itu, sektor ini juga memberikan lapangan pekerjaan bagi ribuan orang di seluruh dunia dan membantu perekonomian negara-negara yang bergantung pada sektor perikanan.

Apabila produksi perikanan yang dihasilkan oleh para nelayan dan pembudidaya ikan meningkat, diikuti dengan daya beli masyarakat untuk mengkonsumsi ikan meningkat maka diharapkan pendapatan nelayan/pembudidaya ikan pun akan meningkat. Dikarenakan ikan merupakan produk yang mudah sekali mengalami penurunan mutu dan kualitas akibat proses pembusukan maka perlu disiasati dengan meningkatkan nilai tambah produk perikanan agar harga ikan tidak turun.

Tabel 2.25 Produksi Perikanan Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Produksi perikanan	Ton	90.03	207.9850	209.0221	210.3067	422.3700

Sumber : Dinas Perikanan, 2022

Berdasarkan tabel 2.96 diatas Produksi Perikanan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2021 selalu mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2018 sebanyak 90.03 ton, lalu tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan sebanyak 20.799 ton kemudian di tahun 2020 mengalami

kenaikan kembali sebanyak 209,02. Lalu di tahun 2021 sebesar 210,31 ton dan tahun 2022 sebanyak 42 ton.

b. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan adalah bagian dari diet manusia yang mencakup asupan ikan dan produk olahan ikan seperti tahu, tempe, dan sushi. Ikan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, seperti mengandung asam lemak omega-3 yang berguna untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah, serta protein berkualitas tinggi yang sangat penting bagi pertumbuhan dan pemulihan.

Tabel 2.26 Konsumsi Ikan Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Konsumsi ikan	Persen	101.8	34.62	36.08	37.44	100.05

Sumber : Dinas Perikanan. 2022

Berdasarkan tabel 2.23 di atas Konsumsi di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2021 selalu mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2018 sebanyak 101,8, lalu tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan sebanyak 34.62 kemudian di tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 36.08. Lalu di tahun 2021 sebesar 37.44 dan tahun 2022 sebesar 100.05. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan yang signifikan di tahun 2022 untuk Konsumsi Ikan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan hasil produksi perikanan yang disertai dengan peningkatan daya beli masyarakat untuk mengkonsumsi ikan turut meningkat. Sehingga hubungan antara suplai dan permintaan akan ikan meningkat secara signifikan di tahun 2022.

c. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Bina Kelompok Nelayan (BKN) adalah suatu upaya pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat untuk membantu dan memfasilitasi pengembangan kelompok-kelompok nelayan, seperti kelompok nelayan tradisional atau modern, dalam memperoleh manfaat dan memperkuat posisi mereka di pasar.

Tabel 2.27 Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	38.47	37.5	24.07	28.35	29.17

Sumber : Dinas Perikanan. 2022

Berdasarkan tabel diatas cakupan bina kelompok nelayan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan, posisi terakhir pada angka 29.17 persen.

d. Produksi perikanan budidaya kelompok nelayan

Produksi perikanan budidaya adalah proses memelihara atau mengendalikan pertumbuhan spesies ikan dalam kondisi terkendali, seperti kolam, tambak, atau waduk. Dalam konteks kelompok nelayan, produksi perikanan budidaya bisa menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi para nelayan, yang biasanya berkolaborasi dengan ahli budidaya ikan untuk memelihara spesies ikan yang cocok untuk lingkungan setempat dan memenuhi permintaan pasar.

Tabel 2.28 Produksi perikanan budidaya kelompok nelayan

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Produksi perikanan budidaya kelompok nelayan	Persen	23.47	5.56	7.18	4.398	21.00

Sumber : Dinas Perikanan. 2022

Berdasarkan grafik diatas Proporsi tangkapan ikan Produksi perikanan budidaya kelompok nelayan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2021 capaian fluktuatif. dimana pada tahun 2018 sebanyak 23.47. lalu tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan sebanyak 5.56 kemudian di tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 7.18. Lalu di tahun 2021 sebanyak 4.398 dan tahun 2022 meningkat 21. Kondisi yang fluktuatif ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1. Sistem produksi di nelayan dan pembudidaya masih tradisional;
2. Rendahnya nilai tambah produk perikanan yang disebabkan oleh kapasitas kelembagaan perikanan masih rendah dan pola pembinaan untuk peningkatan nilai tambah produk perikanan belum maksimal.
3. Belum adanya rantai pemasaran produk perikanan yang terintegrasi;
4. Kapasitas kelembagaan perikanan masih rendah,
5. Pengetahuan nelayan dan pembudidaya masih rendah;
6. Pembinaan dan fasilitasi dalam peningkatan konsumsi ikan belum maksimal.

e. Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman

Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman bervariasi tergantung pada jenis ikan dan daerah perikanan. Batasan biologis yang aman adalah tingkat tangkapan ikan yang dapat diterima secara biologis dan ekonomis. yang memastikan bahwa populasi ikan tetap stabil dan terpelihara dalam jangka panjang.

Tabel 2.29 Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Persen	99.78	95.29	96.73	97.73	98.71

Sumber: Dinas Perikanan. 2021

Berdasarkan grafik diatas Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2021 capaian fluktuatif. dimana pada tahun 2018 sebanyak 99.78. lalu tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 95.29 kemudian di tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 96.73. Lalu di tahun 2021 sebanyak 97.73 dan tahun 2022 sebanyak 98.71

f. Nilai tukar nelayan

Nilai tukar nelayan adalah seberapa besar upah atau penghasilan yang diterima oleh seorang nelayan per satuan produksi ikan atau per satuan waktu. Nilai tukar nelayan yang rendah dapat menjadi indikasi bahwa sektor perikanan belum menjadi sumber penghasilan yang adil dan berkelanjutan bagi nelayan. Oleh karena itu, penting untuk memfokuskan pada upaya untuk meningkatkan

nilai tukar nelayan melalui peningkatan akses ke pasar, peningkatan keterampilan dan teknologi, dan peningkatan kualitas produk.

Tabel 2.30 Nilai Tukar Nelayan

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai tukar nelayan	Persen	121.68	109.65	98.73	110.21	106.45

Sumber: Dinas Perikanan. 2022

Berdasarkan grafik diatas Nilai tukar nelayan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2021 capaian fluktuatif, dimana pada tahun 2018 sebanyak 121.68, lalu tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 109.65 kemudian di tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 98.73. Lalu di tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 110,21.

2.4.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan

a. Dokumen Perencanaan Jangka Panjang dan Jangka Menengah

Tersedianya dokumen RPJPD dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda merupakan hal yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Dokumen RPJPD dan RPJMD yang ditetapkan dengan Perda memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan cara yang terencana, sistematis dan berkesinambungan. Ini juga membantu pemerintah daerah dalam memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa RPJPD dan RPJMD tersebut tersedia bagi masyarakat dan mudah diakses. Ini membantu masyarakat dalam memahami visi dan misi pembangunan daerah, dan memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

RPJPD 2025-2045 Kabupaten Tangerang akan berakhir tahun 2025, dalam rangka penyusunan RPJPD 2025-2045 berbagai langkah harus ditempuh mulai dari penyusunan Evaluasi RPJPD, KLHS RPJPD, tahapan penyusunan dokumen RPJPD yang akan di-Perdakan pada tahun 2024.

RPJMD Kabupaten Tangerang yang berakhir tahun 2023 akan ditetapkan menjadi Perda pada Tahun 2025 seiring dengan ditetapkannya Kepala Daerah melalui Pilkada Serentak tahun 2024.

b. Dokumen Perencanaan Tahunan

Tersedianya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada adalah hal yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Kewajiban setiap daerah untuk menetapkan RKPD menjadi Peraturan Kepala Daerah. Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD setiap tahun. Setiap tahun disusun Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk perencanaan tahun yang akan datang dan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk perencanaan tahun berjalan

c. Dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah

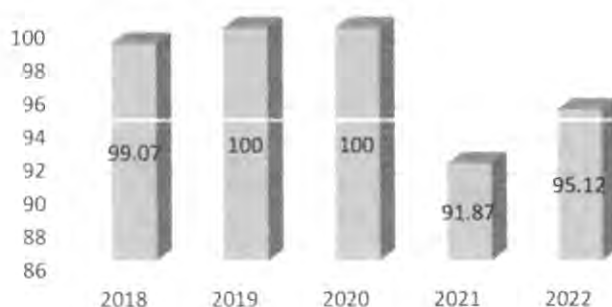
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA adalah hal yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Dokumen RTRW yang ditetapkan dengan Perda memastikan bahwa perencanaan pemanfaatan dan pengelolaan ruang wilayah dilakukan dengan cara yang terencana, sistematis dan berkesinambungan. Ini juga membantu pemerintah daerah dalam memastikan bahwa pemanfaatan dan pengelolaan ruang wilayah dipedomani

dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Dokumen RTRW telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031

d. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dalam RKPD

Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam jangka pendek sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam jangka menengah. Ini juga membantu pemerintah daerah dalam memastikan bahwa pembangunan daerah berlangsung secara berkesinambungan dan sesuai dengan visi, misi dan tujuan RPJMD.

Gambar 2.92 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dalam RKPD



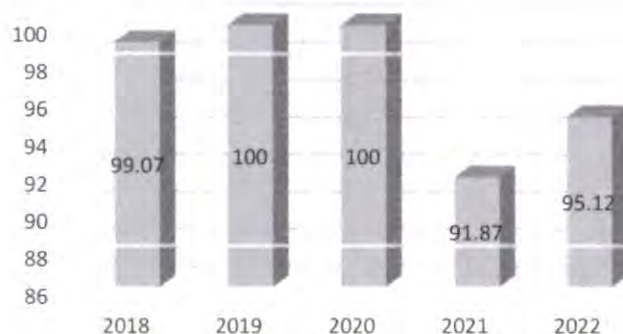
Sumber : Bappeda. 2022

Berdasarkan grafik diatas Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2021 capaian fluktuatif, akan tetapi capaiannya selalu diatas 90 persen, ketidaksinkronan antara Program dalam RPJMD dan RKPD terutama disebabkan karena terdapat kegiatan mandatori seperti DAK yang banyak menggunakan program diluar yang sudah dialokasikan pada RKPD.

e. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD

Konsistensi program antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat penting untuk memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah dilakukan secara terintegrasi dan efektif. Konsistensi ini memastikan bahwa program yang dicanangkan dalam RKPD sejalan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD.

Gambar 2.93 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD



Sumber : Bappeda. 2022

Berdasarkan grafik diatas Penjabaran Konsistensi Program RKPD dengan APBD mencapai diatas 90 persen. Ketidaksesuaian program dalam RKPD dan APBD disebabkan karena adanya kebijakan dalam penganggaran yang baru muncul pada saat terbitnya Pedoman Penyusunan APBD tahun bersangkutan dan terdapat kegiatan mandatori seperti DAK yang sudah ditentukan sub kegiatan, kegiatan dan programnya sehingga menyesuaikan dengan yang telah disusun dalam RKPD..

2. Keuangan

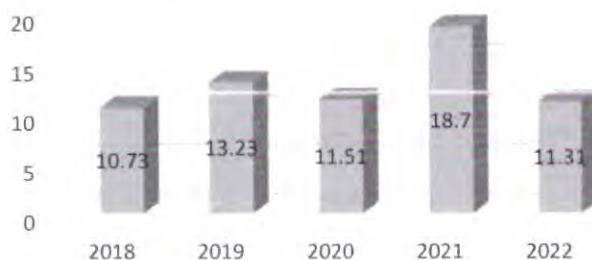
a. Opini BPK terhadap laporan keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran penting dalam menilai dan memberikan opini terhadap laporan keuangan pemerintah. BPK memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Opini BPK sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat, karena memberikan informasi tentang keandalan dan keakuratan laporan keuangan pemerintah. Opini BPK juga memberikan dasar bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem akuntansi dan memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Berdasarkan capaian indikator opini BPK terhadap laporan keuangan pada tahun 2018 hingga 2022 selalu WTP.

b. Persentase SILPA terhadap APBD

SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) adalah selisih antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang tercantum dalam anggaran. Persentase SILPA terhadap APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah rasio antara SILPA dan APBD, yang menunjukkan seberapa besar sisa anggaran pemerintah setelah penerimaan dan pengeluaran dikurangi.

Gambar 2.94 Persentase SILPA terhadap APBD



Sumber: BPKAD. 2022

Berdasarkan grafik diatas Persentase SILPA terhadap APBD di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2022 capaian fluktuatif, Silpa terbesar terlihat pada tahun 2021 sebesar 18,7 persen, hal ini disebabkan makin membaiknya kondisi pasca pandemi sehingga terdapat kegiatan penanganan pandemi Covid-19 yang dari BTT yang tidak dimanfaatkan, besarnya Silpa juga disebabkan oleh pendapatan yang melebihi dari target. Silpa sebagian juga berasal dari Silpa BLUD terutama dari pelampauan target pendapatan BLUD RSUD, Puskesmas dan UPDB yang dapat dimanfaatkan kembali oleh BLUD. Besarnya silpa juga dapat memperlihatkan efektivitas dan efisiensi dalam penatausahaan keuangan.

c. Belanja pendidikan (20%)

Belanja pendidikan adalah pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Dalam hal ini, persentase belanja pendidikan sebesar 20% adalah rasio antara belanja pendidikan dan total belanja pemerintah. Angka ini menunjukkan seberapa besar prioritas pemerintah dalam mengelola pengeluaran untuk pendidikan. Semakin besar angka ini, menunjukkan bahwa pemerintah memberikan prioritas yang tinggi terhadap pendidikan dan memperhatikan peran pendidikan dalam pembangunan suatu daerah.

Gambar 2.97 Proporsi Belanja pendidikan



Sumber: BPKAD. 2021

Berdasarkan grafik diatas Belanja Pendidikan (20%) di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2020 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2018 sebanyak 872.472.58 juta. lalu tahun 2019 di angka 744.540.23. kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 653.110.62 Juta.

d. Belanja Kesehatan (10%)

Belanja kesehatan merupakan salah satu kategori belanja dalam APBD yang memiliki andil 10% dalam total belanja pemerintah. Belanja kesehatan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan kesehatan, seperti penyediaan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan lain-lain.

Gambar 2.98 Proporsi Belanja Kesehatan



Sumber: BPKAD. 2022

Berdasarkan grafik diatas Belanja Kesehatan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2021 capaian fluktuatif. dimana pada tahun 2018 sebanyak 436.236.29 juta. lalu tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 372.270.12 juta. kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan Kembali sebanyak 326.555.31 Juta. lalu di tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 614.192.02 Juta. Penyebab kenaikan tersebut dikarenakan adanya pemulihan pasca kejadian covid-19.

4. Pengawasan

a. Persentase tindak lanjut temuan

Tindak lanjut temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) merupakan proses untuk mengatasi masalah yang ditemukan selama proses pemeriksaan. Tujuan utama tindak lanjut temuan BPK adalah untuk memastikan bahwa masalah yang ditemukan sudah teratasi dan pencegahan masalah serupa dapat dilakukan di masa yang akan datang.

Gambar 2.103 Persentase Tindak Lanjut Temuan



Sumber: Inspektorat. 2022

Berdasarkan grafik diatas Persentase tindak lanjut temuan di kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2021 capaian fluktuatif. dimana pada tahun 2018 sebanyak 77,54 lalu tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 90, kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 81,54, lalu di tahun 2021 mengalami kenaikan yang sebesar 83,54. Hal tersebut dikarenakan peran APIP sudah optimal dalam menjalankan tugasnya.

5. Kepegawaian

Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah senantiasa ditingkatkan dalam sisi kualitas dan kuantitas. Gambaran kondisi pegawai Kabupaten Tangerang dapat diperlihatkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.31 Jumlah Seluruh PNS Kabupaten Tangerang Non Nakes dan Guru

No.	UNIT KERJA	JUMLAH SELURUH		
		L	P	JML
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	40	27	67
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7	5	12
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	86	5	91
4	Badan Pendapatan Daerah	104	43	147
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	46	29	75
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	32	16	48
7	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	114	40	154
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	36	23	59
9	Dinas Kesehatan	108	217	325
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	39	22	61
11	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	19	15	34
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	67	23	90
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	30	9	39
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12	16	28
15	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	31	10	41
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	54	24	78
17	Dinas Pendidikan	84	26	110
18	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7	29	36
19	Dinas Perhubungan	43	2	45
20	Dinas Perikanan	20	18	38
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	34	15	49
22	Dinas Perpustakaan dan Arsip	23	43	66
23	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	60	40	100
24	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman	51	15	66
25	Dinas Sosial	23	19	42
26	Dinas Tata Ruang dan Bangunan	63	27	90
27	Dinas Tenaga Kerja	29	10	39
28	Inspektorat	50	35	85
29	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	5	1	6
30	Kecamatan Balaraja	14	8	22
31	Kecamatan Cikupa	23	8	31
32	Kecamatan Cisauk	21	6	27
33	Kecamatan Cisoka	19	3	22
34	Kecamatan Curug	24	18	42
35	Kecamatan Gunung Kaler	16	3	19
36	Kecamatan Jambe	24	3	27
37	Kecamatan Jayanti	17	2	19
38	Kecamatan Kelapa Dua	33	19	52

No.	UNIT KERJA	JUMLAH SELURUH		
		L	P	JML
39	Kecamatan Kemiri	21	1	22
40	Kecamatan Kosambi	40	7	47
41	Kecamatan Kresek	19	4	23
42	Kecamatan Kronjo	25	3	28
43	Kecamatan Legok	25	5	30
44	Kecamatan Mauk	26	6	32
45	Kecamatan Mekar Baru	22	1	23
46	Kecamatan Pagedangan	25	11	36
47	Kecamatan Pakuhaji	25	5	30
48	Kecamatan Panongan	25	8	33
49	Kecamatan Pasar Kemis	32	15	47
50	Kecamatan Rajeg	20	5	25
51	Kecamatan Sepatan	25	6	31
52	Kecamatan Sepatan Timur	18	6	24
53	Kecamatan Sindang Jaya	15	4	19
54	Kecamatan Solear	18	4	22
55	Kecamatan Sukadiri	20	6	26
56	Kecamatan Sukamulya	17	4	21
57	Kecamatan Teluk Naga	29	3	32
58	Kecamatan Tigaraksa	27	11	38
59	Satuan Polisi Pamong Praja	65	7	72
60	Sekretariat Daerah	109	50	159
61	Sekretariat DPRD	40	10	50
	TOTAL	2196	1056	3252

Sumber : BKPSDM Kab. Tangerang, 2022.

Tabel 2.32 Jumlah Pns Fungsional Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi (Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan) Kabupaten Tangerang

No.	Perangkat Daerah	Jumlah PNS	
		Total	Bersertifikat
1	Sekretariat Daerah	55	50
2	Sekretariat DPRD	2	2
3	Inspektorat	68	47
4	Satuan Polisi Pamong Praja	14	4
5	Dinas Sosial	5	5
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	1
7	Dinas Pendidikan	52	52
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	2
9	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	1	1
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	1
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	1	1

No.	Perangkat Daerah	Jumlah PNS	
		Total	Bersertifikat
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4	4
13	Dinas Kesehatan	4	1
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	21	5
15	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	4	2
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	45	45
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	14
18	Dinas Perhubungan	4	4
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	3	3
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12	12
21	Dinas Perpustakaan dan Arsip	26	15
22	Dinas Tata Ruang dan Bangunan	10	9
23	Dinas Tenaga Kerja	12	12
24	Dinas Perikanan	1	0
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	5
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4	4
27	Badan Pendapatan Daerah	5	5
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14	8
29	Kecamatan Balaraja	1	1
30	Kecamatan Cikupa	1	1
31	Kecamatan Cisauk	2	2
32	Kecamatan Cisoka	1	1
33	Kecamatan Curug	1	1
34	Kecamatan Gunung Kaler	1	1
35	Kecamatan Jambe	2	2
36	Kecamatan Jayanti	1	1
37	Kecamatan Kelapa Dua	2	2
38	Kecamatan Kemiri	1	1
39	Kecamatan Kosambi	2	2
40	Kecamatan Kresek	1	1
41	Kecamatan Kronjo	1	1
42	Kecamatan Legok	1	1

No.	Perangkat Daerah	Jumlah PNS	
		Total	Bersertifikat
43	Kecamatan Mauk	1	1
44	Kecamatan Mekar Baru	1	1
45	Kecamatan Pagedangan	1	1
46	Kecamatan Pakuhaji	2	2
47	Kecamatan Panongan	2	2
48	Kecamatan Pasar Kemis	1	1
49	Kecamatan Sepatan	1	1
50	Kecamatan Sepatan Timur	1	1
51	Kecamatan Sindang Jaya	1	1
52	Kecamatan Solear	2	2
53	Kecamatan Sukadiri	2	2
54	Kecamatan Sukamulya	2	2
55	Kecamatan Teluk Naga	1	1
56	Kecamatan Tigaraksa	1	1
TOTAL		428	351

Sumber : BKPSDM Kab. Tangerang, 2022.

Tabel 2.33 Pemerintah Kabupaten Tangerang Jumlah Pns Menurut Tingkat Pendidikan (Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)

NO	INSTANSI	STRATA PENDIDIKAN										JUMLAH TOTAL
		SD	SLTP	SLTA	D-I	D-II	D-III	D-IV	S1	S2	S3	
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			10			9	2	35	11		67
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik								6	6		12
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			47					31	13		91
4	Badan Pendapatan Daerah			43	1		26	2	48	27		147
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			22			11		32	10		75
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			7	1		3		11	25	1	48
7	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air			31			10	6	82	25		154
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			7			10	1	26	15		59
9	Dinas Kesehatan	6	6	45	3		50	13	115	86	1	325
10	Dinas Komunikasi dan Informatika			8			5		39	9		61

NO	INSTANSI	STRATA PENDIDIKAN										JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	D-I	D-II	D-III	D-IV	S1	S2	S3	TOTAL
11	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro			5					20	9		34
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1		22			6		37	24		90
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa			9				2	20	8		39
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			6			4	1	7	10		28
15	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata			11			3		17	10		41
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		2	17			1	1	31	26		78
17	Dinas Pendidikan			13		4	2		67	23	1	110
18	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			3	1		4		9	19		36
19	Dinas Perhubungan			9		1	1		18	16		45
20	Dinas Perikanan			7			3	2	12	14		38
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			5				2	1	29	12	49
22	Dinas Perpustakaan dan Arsip			11				19	22	14		66
23	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			17				7	2	52	22	100
24	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman		2	16			1	1	35	11		66
25	Dinas Sosial			10		1	2	2	19	7	1	42
26	Dinas Tata Ruang dan Bangunan	1		15				3	2	50	19	90
27	Dinas Tenaga Kerja			3				4		20	11	39
28	Inspektorat			3				1	1	60	20	85
29	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik			3					1	2		6
30	Kecamatan Balaraja			2					13	7		22
31	Kecamatan Cikupa			10				2	14	5		31
32	Kecamatan Cisauk		1	9					12	5		27
33	Kecamatan Cisoka			10				2	2	5	3	22
34	Kecamatan Curug		2	7				1	1	20	11	42
35	Kecamatan Gunung Kaler			4					11	4		19
36	Kecamatan Jambe			13				2	1	8	3	27
37	Kecamatan Jayanti		1	4					1	10	3	19

NO	INSTANSI	STRATA PENDIDIKAN										JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	D-I	D-II	D-III	D-IV	S1	S2	S3	TOTAL
38	Kecamatan Kelapa Dua			6			2	2	31	11		52
39	Kecamatan Kemiri		1	5					13	3		22
40	Kecamatan Kosambi		1	14		2			21	9		47
41	Kecamatan Kresek			3					15	5		23
42	Kecamatan Kronjo		1	8			3		10	6		28
43	Kecamatan Legok			11					11	8		30
44	Kecamatan Mauk		1	12			1	1	14	3		32
45	Kecamatan Mekar Baru			6			2	1	8	6		23
46	Kecamatan Pagedangan		1	12		1	2	1	11	8		36
47	Kecamatan Pakuhaji			10					12	8		30
48	Kecamatan Panongan		1	9			3		14	6		33
49	Kecamatan Pasar Kemis		1	10		1	3	1	19	12		47
50	Kecamatan Rajeg			7			1		9	8		25
51	Kecamatan Sepatan	1		11			1	1	9	8		31
52	Kecamatan Sepatan Timur			8					12	4		24
53	Kecamatan Sindang Jaya			4			2		10	3		19
54	Kecamatan Solear			8			2	2	6	4		22
55	Kecamatan Sukadiri			8			1		12	5		26
56	Kecamatan Sukamulya			6					13	2		21
57	Kecamatan Teiuk Naga		1	12			1	1	13	4		32
58	Kecamatan Tigaraksa			10			1		18	9		38
59	Satuan Polisi Pamong Praja	1		31					32	8		72
60	Sekretariat Daerah			21			8	3	87	40		159
61	Sekretariat DPRD			17			2		23	8		50
Grand Total		10	22	713	6	10	229	58	1468	731	5	3252
Total PNS Berdasarkan Pendidikan		745			2507							3252

Sumber : BKPSDM Kab. Tangerang, 2022.

6. Sekretariat Dewan

a. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota

Penyediaan RKT ini penting untuk memastikan bahwa Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota memiliki perencanaan yang jelas dan terstruktur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. RKT juga akan membantu Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota dalam melakukan evaluasi kinerja dan memastikan bahwa tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berdasarkan capaian pada tahun 2018 hingga 2022 adalah ada.

- b. Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Penyusunan dan integrasi program-program kerja DPRD dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) dan Rencana Tahunan (RKPD) merupakan hal yang penting agar program-program kerja DPRD memiliki perencanaan yang jelas dan terstruktur. RPJM dan RKPD membantu DPRD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta memastikan bahwa program-program kerja DPRD dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan efektif. Berdasarkan capaian pada tahun 2018 hingga 2022 adalah ada

- c. Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Dokumen perencanaan dan anggaran setwan DPRD membantu DPRD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan memastikan bahwa program-program yang akan dilaksanakan sudah terintegrasi dan terukur. Hal ini akan membantu DPRD dalam melakukan evaluasi kinerja dan memastikan bahwa tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam hal adanya temuan bahwa program-program DPRD belum terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran setwan DPRD, maka hal tersebut dapat ditindak lanjuti dengan memastikan bahwa program-program DPRD sudah terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran setwan DPRD. Tindak lanjut ini akan membantu DPRD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih baik dan bertanggung jawab.

2.5 Evaluasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Capaian Indikator Kinerja Utama ditentukan atas target yang akan dicapai dengan cara pengukuran atau formulasi yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.34
Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase penanganan kasus ketentraman dan ketertiban	Persentase	100	100	100.00
2	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka	70.08	72.97	104.12

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
3	Prevalensi stunting	Persen	16	3.7	23.13
4	Cakupan Jaminan Kesehatan (UHC)	Persen	87	97.44	112.00
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	62.05	0	0.00
6	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Dalam Tahun)	Angka	8.45	8.92	105.56
7	Laju Pertumbuhan ekonomi sektor Pertanian (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan)	Persen	5.27	0	0.00
8	Penambahan Kunjungan wisatawan	Persen	30	30	100.00
9	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	Persen	5.12	68	1.328.13
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	68	67.05	98.60
11	Persentase koperasi aktif	Persen	73.66	71.34	96.85
12	Jumlah Industri kecil dan Menengah di Kabupaten	Jumlah	16.866	1.325	7.86
13	Nilai AKIP	Nilai	71.99	0	0.00
14	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	83	85.18	102.63
15	Survei Eksternal Persepsi Korupsi/Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Skala	70.56	75.07	106.29
16	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3.15	2.66	84.44
17	Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik	Persen	93	92.95	99.95
18	Persentase Sumber Air Minum Rumah Tangga	Persen	50.00	84.52	169.04
19	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak	Indeks	88.89	95.12	107.01
20	IKA (Indeks Kualitas Air)	Indeks	57	58.89	103.32
21	Persentase timbulan sampah yang ditangani	Persen	39.5	56.76	143.70
22	Indeks Risiko Bencana	Indeks	130	130.45	99.65
23	Persentase inovasi yang diimplementasikan	Persentase	68	100.00	147.06

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada:
 - a. Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan capaian kinerja sebesar 104.12%;
 - b. Indikator Cakupan Jaminan Kesehatan (UHC) menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan capaian kinerja sebesar 112.00%;
 - c. Indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Dalam Tahun) menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan capaian kinerja sebesar 105.56%;
 - d. Indikator Persentase peningkatan investasi di Kabupaten menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan capaian kinerja sebesar 1.328.13%;
 - e. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan capaian kinerja sebesar 102.63%;
 - f. Indikator Survei Eksternal Persepsi Korupsi/Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan capaian kinerja sebesar 106.39%;
 - g. Indikator Persentase Sumber Air Minum Rumah Tangga menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan capaian kinerja sebesar 169.04%;
 - h. Indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan capaian kinerja sebesar 107.01%;
 - i. Indikator IKA (Indeks Kualitas Air) menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan capaian kinerja sebesar 103.32%;
 - j. Indikator Persentase timbulan sampah yang ditangani menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan capaian kinerja sebesar 143.70%;
 - k. Indikator Persentase inovasi yang diimplementasikan menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan capaian kinerja sebesar 147.06%;
2. Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100%.
 - a. Indikator Persentase penanganan kasus ketentraman dan ketertiban mencapai kinerja yang telah ditetapkan dengan capaian target sebesar 100.00%;
 - b. Indikator Penambahan Kunjungan wisatawan mencapai kinerja yang telah ditetapkan dengan capaian target sebesar 100.00%;
3. Capaian kinerja yang tidak mencapai target ditunjukkan pada:
 - a. Indikator Prevalensi Stunting belum mencapai kinerja yang telah ditetapkan namun masih dalam rentang nilai baik dengan capaian target sebesar 23.13%;
 - b. Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja belum mencapai kinerja yang telah ditetapkan namun masih dalam rentang nilai sangat memuaskan dengan capaian target sebesar 97.06%;
 - c. Indikator Persentase koperasi aktif belum mencapai kinerja yang telah ditetapkan namun masih dalam rentang nilai baik dengan capaian target sebesar 96.85%;
 - d. Indikator Jumlah Industri kecil dan Menengah di Kabupaten belum mencapai kinerja yang telah ditetapkan namun masih dalam rentang nilai baik dengan capaian target sebesar 7.86%;
 - e. Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum mencapai kinerja yang telah ditetapkan namun

masih dalam rentang nilai baik dengan capaian target sebesar 84.44%;

- f. Indikator persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik belum mencapai kinerja yang telah ditetapkan namun masih dalam rentang nilai baik dengan capaian target sebesar 99.95%;
- g. Indikator Indeks Risiko Bencana belum mencapai kinerja yang telah ditetapkan namun masih dalam rentang nilai baik dengan capaian target sebesar 99.65%.

Adapun pencapaian kinerja sasaran dari sebanyak 17 Sasaran Strategis. pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.35
Pencapaian Sasaran Strategis Kabupaten Tangerang
Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Tingkat Capaian Kinerja					
			Sasaran Strategis		Sasaran Operasional		Sasaran Monev	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Dan Kehidupan Beragama	Persentase Penanganan Kasus Ketentraman Dan Ketertiban	-	-	1	100	-	-
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	1	100	-	-	-	-
		Prevalensi stunting	-	-	-	-	1	100
		Cakupan Jaminan Kesehatan (UHC)	1	100	-	-	-	-
3	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	-	-	-	-	-
4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Dalam Tahun)	1	100	-	-	-	-
5	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dan sektor pariwisata	Laju Pertumbuhan ekonomi sektor Pertanian (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan)	-	-	-	-	-	-
		Penambahan Kunjungan wisatawan	-	-	1	100	-	-
6	Meningkatnya jumlah investasi	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	1	100	-	-	-	-
7	Meningkatnya kualitas SDM yang memiliki kompetensi/skill	Tingkat Partispasi Angkatan Kerja	-	-	-	-	1	100
8	Meningkatnya produk hasil UMKM dan IKM	Persentase koperasi aktif	-	-	-	-	1	100
		Jumlah Industri kecil dan Menengah di Kabupaten Tangerang	-	-	-	-	1	100
9	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas	Nilai AKIP	-	-	-	-	-	-

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Tingkat Capaian Kinerja						
			Realisasi		Target		Berkas Monev (Tahun)		
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
	Pemrintah Daerah								
10	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1	100	-	-	-	-	-
11	Meningkatnya Integritas Aparatur	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	1	100	-	-	-	-	-
12	Meningkatnya cakupan dan pelaksanaan e-government	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	-	-	-	1	100	
13	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik	-	-	-	-	1	100	
		Persentase Sumber Air Minum Rumah Tangga	1	100	-	-	-	-	
		Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak	1	100	-	-	-	-	
14	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	IKA (Indeks Kualitas Air)	1	100	-	-	-	-	
15	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah yang ditangani	1	100	-	-	-	-	
16	Menurunnya Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tangerang	Indeks Risiko Bencana	-	-	-	-	1	100	
17	Meningkatnya Kinerja Inovasi Daerah	Persentase inovasi yang diimplementasikan	1	100	-	-	-	-	
Total Indikator		23	11		2		7		

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian sasaran, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
2. Kinerja nyata dengan target akhir RPJMD.
3. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
4. Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2022 dengan membandingkan antara target dan realisasi

pada 17 sasaran strategis dengan 23 indikator kinerja akan dilakukan analisis kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui rencana aksi kedepan sebagai upaya nyata pelaksanaan peningkatan dan perbaikan.

2.6 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tangerang

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. APBD dialokasikan secara tegas dan jelas untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut, maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat. Capaian SPM Kabupaten Tangerang meliputi SPM pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Pemerintah daerah menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima menuju *Good Governance* dan SPM sebagai usaha pemerintah daerah untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin SPM dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah daerah, maka penerapannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Penyelenggaraan pelayanan bidang urusan pendidikan di Kabupaten Tangerang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan yang mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal urusan pendidikan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Jenis pelayanan dasar bidang urusan pendidikan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) meliputi :

- a. Pendidikan dasar
- b. Pendidikan kesetaraan
- c. Pendidikan anak usia dini

Penyelenggaraan pelayanan bidang urusan kesehatan di Kabupaten Tangerang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan kesehatan mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Jenis pelayanan dasar bidang urusan kesehatan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) meliputi :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;

- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang dengan TB;
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

Penyelenggaraan pelayanan bidang urusan pekerjaan umum di Kabupaten Tangerang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan, permukiman dan pemakaman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal urusan pekerjaan umum mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jenis pelayanan dasar bidang urusan pekerjaan umum pada Standar Pelayanan Minimal meliputi:

- a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari,
- b. Penyediaan pengolahan air limbah domestic

Penyelenggaraan pelayanan bidang urusan perumahan rakyat di Kabupaten Tangerang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan, permukiman dan pemakaman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal urusan pekerjaan umum mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jenis pelayanan dasar bidang urusan perumahan rakyat pada Standar Pelayanan Minimal meliputi :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kabupaten;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.

Penyelenggaraan pelayanan bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Tangerang secara teknis dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, yang mengampu SPM sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengampu SPM sub urusan bencana dan kebakaran. Penyelenggaraan pelayanan bidang urusan sosial di Kabupaten Tangerang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang mempunyai tugas membantu

Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tangerang.

Tabel 2.36 Capaian SPM Kabupaten Tangerang Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target SPM	Realisasi 2022	Capaian Kinerja	Kesenjangan
A	SPM PENDIDIKAN				
1	Pendidikan Anak Usia Dini	100	67.72	67.72	32.28
2	Pendidikan Dasar	100	98.07	98.07	1.93
3	Pendidikan Kesetaraan	100	96.63	96.63	3.37
B	SPM KESEHATAN				
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100.00	100.00	0
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	100.00	100.00	0
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	99.77	99.77	0.23
4	Pelayanan kesehatan balita	100	98.07	98.07	1.93
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	95.08	95.08	4.92
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	98.61	98.61	1.39
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	97.27	97.27	2.73
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	100.00	100.00	0
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100	100.00	100.00	0
10	Pelayanan kesehatan ODGJ	100	96.45	96.45	3.55
11	Pelayanan kesehatan orang dengan tuberculosis	100	98.75	98.75	1.25
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	100	100.00	100.00	0
C	SPM PEKERJAAN UMUM DAN PR				

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target SPM	Realisasi 2022	Capaian Kinerja	Kesenjangan
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	72.43	72.43	27.57
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	100	91.89	91.89	8.11
D	SPM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dikabupaten	30	100.00	333.33	0
2	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	60	100.00	166.67	0
E	SPM KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS				
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	100	92.91	92.91	7.09
2	Pelayanan informasi rawan bencana	100	93.6	93.6	6.40
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	92.8	92.8	7.20
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	88	88	12
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	96.95	96.95	3.05
F	SPM SOSIAL				
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100	97.33	97.33	2.67

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target SPM	Realisasi 2022	Capaian Kinerja	Kesenjangan
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar terlantar di luar panti	100	97.33	97.33	2.67
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100	97.33	97.33	2.67
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100	93.33	93.33	6.67
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	88.37	88.37	11.63

2.7 Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat memainkan peranan yang penting bagi pembangunan daerah khususnya dan nasional pada umumnya. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah atau PAD disamping pajak dan retribusi, sehingga pengelolaan BUMD membutuhkan penanganan yang serius dan profesional berdasarkan prinsip *Good Corporate Government* (GCG) yang meliputi: *iransparency, accountability, responsibility, independency, fairness.*

Secara regulasi, keberadaan BUMD diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara teknis diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang kehadirannya didasarkan melalui analisa kebutuhan daerah dan analisa kelayakan usaha. Saat ini Pemerintah Provinsi Banten memiliki 3 (tiga) BUMD, yaitu: PT. Banten Global Development, PT Jamkrida Banten, dan PT Agrobisnis Banten Mandiri.

2.7.1 PT. Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang (Perseroda)

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kerta Raharja didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 06 Tahun 2007, tanggal 6 Juni 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Kabupaten Tangerang dan telah mendapat izin operasional dari Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/3/Kep.GBI/DpG/2008, tanggal 22 Januari 2008 serta mulai melaksanakan kegiatan operasional sejak tanggal 08 Februari 2008.

Berdasarkan pendiriannya PD. BPR Kerta Raharja merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah di bidang Keuangan/Perbankan dan penggerak serta pendorong laju pertumbuhan ekonomi kerakyatan. PD. BPR Kerta Raharja berkedudukan di Jalan Raya Serang KM. 15 No. 1 Cikupa Kabupaten Tangerang dan melakukan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Tangerang dan sekitarnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang, nomor 9 Tahun 2019, Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta

Raharja, mengubah bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Daerah. Telah mendapatkan keputusan dari Kementrian Hukum dan Ham dengan nomor AHU- 0069155.AH.01.01.TAHUN 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang Perseroda Pada Tahun 2019 PD. BPR Kerta Raharja melakukan perubahan Badan Hukum menjadi PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) dan telah mendapatkan izin dari OJK dengan Nomor KEP-22/KR.01/2021 Tentang Pengalihan Izin Usaha atas Perubahan Badan Hukum PD Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang (Perseroda).

2.7.2 PT. LKM. Artha Kerta Raharja

PT. LKM. Artha Kerta Raharja merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang, yang merupakan hasil penggabungan/peleburan 10 Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) di Kabupaten Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Lembaga Perkreditan Kecamatan menjadi Perseroan Terbatas berdiri tahun 2015 dan berdasarkan Akta Pendirian No. 32 Tanggal 21 Desember 2015 yang diaktakan oleh Notaris Syahrudin, SH. Notaris di wilayah Pandeglang, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-2473998.AH.01.01. tahun 2015. Dan berdasarkan Perda No 8 Tahun 2019, terdapat perubahan badan hukum dari Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, dan diaktekan dalam akta notaris No. 10 tanggal 30 Juli 2020 oleh Notaris Nur Aziz Hakim, SH, MM, MKn. Notaris di Tangerang serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-0054385.AH.01.02. tahun 2020.

Maksud pendirian PT LKM Artha Kerta Raharja (Perseroda) yaitu memenuhi kebutuhan layanan keuangan terhadap masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah serta mendorong usaha mikro kecil dan menengah.

Tujuan dari Pendirian PT. LKM. Artha Kerta Raharja adalah:

- a. meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat;
- b. membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat;
- c. membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah;
- d. meningkatkan kualitas pengelolaan investasi Daerah;
- e. mengoptimalkan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah; dan
- f. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk membantu penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat.

2.7.3 PT. Mitra Kerta Raharja (Perseroda)

PT Mitra Kerta Raharja adalah sebuah Ao/Jw.og compaoy yang didirikan dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Mitra Kerta Raharja Kabupaten Tangerang dan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perseroda Daerah Mitra Kerta Raharja Kabupaten Tangerang . PT Mitra Kerta Raharja didirikan berdasarkan Akta Notaris Yasmine Achmad Djawadi, S.H, notaris di Tangerang dengan Nomor 14 tanggal 11 September 2007. PT Mitra Kerta Raharja berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan melakukan usaha di bidang pertanian dan agrobisnis, farmasi, pelabuhan, keuangan dan permodalan, pembangunan konstruksi gedung, jembatan, bandara, dan dermaga, multi media, pasar, air bersih, pengelolaan air limbah, perbengkelan, persampahan, jasa konsultasi, pariwisata, pemrakarsa jalan tol.

Secara pengelompokan/kluster usaha, PT Mitra Kerta Raharja berencana untuk fokus mengembangkan 6 (enam) bidang usaha yaitu:

1. Property
2. Advertising
3. Agrobisnis/hortikultura.
4. Perparkiran
5. Persampahan
6. Pipanisasi gas rumah tangga.

Untuk arah usaha jangka pendek sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahun 2021, & Business Plan 2018/2023, PT Mitra Kerta Raharja akan fokus pada bidang usaha Perparkiran sebagai modal untuk langkah penyehatan perusahaan.

2.7.4 Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja

Perubahan Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja Kabupaten Tangerang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2019 memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Perusahaan Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja Kabupaten Tangerang adalah melaksanakan analisis terhadap potensi perpasaran, perencanaan pengembangan pembangunan sarana pasar, mengevaluasi pendapatan pasar, melakukan pembinaan terhadap pedagang sebagai pelaku usaha dan masyarakat pengguna pasar, pemberian fasilitas dalam rangka penciptaan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang serta melakukan fungsi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
- b. Perusahaan Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja Kabupaten Tangerang bertugas melaksanakan misi pelayanan publik dengan mengupayakan peningkatan mutu pelayanan yang berkualitas baik yang terjangkau oleh masyarakat pengguna pasar dan disisi lain diharapkan dapat memperoleh keuntungan melalui kegiatan-kegiatan serta usaha-usaha perencanaan dan pengembangan, pembangunan pasar
- c. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pencapaian tujuan Perusahaan Umum Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja melakukan proses dan tahapan-tahapan kegiatan, secara periodik sebagai dasar kerja dan membangun sistem pengelolaan perpasaran dengan pola management perusahaan daerah yang berorientasi kepada pelayanan pada masyarakat (Public Service) yang diarahkan kepada peningkatan pendapatan (Profit Oriented). Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja mengelola 19 pasar antara lain :
 1. Pasar Balaraja Sentiong Jl. Raya Adi - Desa Tobat Kec. Balaraja
 2. Pasar Segitiga Balaraja Jl. Raya Serang - Desa Balaraja Kec. Balaraja
 3. Pasar Cisoka Jl. Raya Sukatani -Desa Cisoka Kec. Cisoka
 4. Pasar Tigaraksa Jl. Aria Wangsakara Kelurahan Tigaraksa Kec. Tigaraksa
 5. Pasar Curug Jl. PLP Curug - Desa Curug Kulon Kec. Curug
 6. Pasar Korelet .Jl. Raya Ranca Iyuh - Desa Panongan Kec. Panongan
 7. Pasar Bayam Jl. Empu Barada Perumnas II - Desa Bencongan Kec. Kelapa Dua
 8. Pasar Bojong Nangka Jl. Satria VII Perum Dasana Indah - Desa Bojong Nangka
 9. Pasar Kutabumi Jl. Raya Kutabumi - Desa Kutabumi Kec. Pasarkemis
 10. Pasar Sepatan Jl. Raya Mauk - Desa Sepatan Kec. Sepatan
 11. Pasar Cituis Desa Pakuhaji Keca. Pakuhaji
 12. Pasar Kampung Melayu Jl. Raya Kampung Melayu - Desa Kp. Melayu Timur

13. Pasar Mauk Jl. Ir. Sutami - Desa Mauk Barat Kec. Mauk
14. Pasar kemiri Jl. Raya Kemeri - Desa Kemeri Kec. Kemiri
15. Pasar Kronjo Jl. Raya Kronjo - Desa Pasilian Kec. Kronjo
16. Pasar Kemis Jl. Raya Pasar Kemis - Desa Sindang Panon Kec. Pasarkemis
17. Pasar Ex Mekarsari (tematik) Jl. Raya Kresek - Desa Tobat Kec. Balaraja
18. Pasar kelapa Dua Jl. Dayung Raya - Kelurahan Kelapa Dua Kec. Kelapa Dua
19. Pasar Karawaci Jl. Raya Rorojongrang Perumnas II - Kec. Kelapa Dua
20. Pasar Pelangi Jl. Raya Mauk - Desa Pondok Jaya Kec. Sepatan

2.7.5 Perusahaan Umum Daerah Umum Air Minum Tirta Kerta Raharja

Perusahaan Umum Daerah Umum Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (Perumdam TKR) pertama kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10/Huk/1976 tanggal 13 April 1976 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Dati II Kabupaten Tangerang, yang beberapa kali diubah dan terakhir kali dengan Peraturan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang.

Maksud pendirian Perumdam TKR yaitu melakukan Penyelenggaraan SPAM bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Tangerang. Pendirian Perumdam TKR bertujuan untuk :

- a. menyediakan air minum bagi masyarakat, khususnya di daerah berdasarkan tata Kelola perusahaan yang baik.
- b. Mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.
- c. Tercapainya kepentingan yang seimbang antara Pemerintah Daerah, Perumdam TKR dan masyarakat.
- d. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah melalui dividen, dan
- e. Memperoleh laba dan /atau keuntungan.

2.8 Kerjasama Daerah

Pembangunan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 yang mengamatkan bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat melakukan Kerja sama daerah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas layanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama tersebut diharapkan dapat mengatasi keterbatasan pembiayaan bagi pemerintah disebabkan pembangunan membutuhkan porsi Anggaran yang besar, untuk itu skema pembiayaan perlu dirancang sedemikian rupa sehingga target pembangunan pemerintah dapat tercapai dengan baik sesuai dengan perencanaan.

Tabel 2.37 Rekapitulasi kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang

NO	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	TEMA KERJASAMA
1	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	NOTA KESEPATAN: SINERGI PEMANFAATAN BERSAMA DATA DAN INFORMASI SERTA PENGUATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK DALAM PELAKSANAAN HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

NO	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	TEMA KERJASAMA
2	PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	KERJA SAMA ANTAR DAERAH
3	POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	NOTA KESEPATAN: PENGEMBANGAN POTENSI WISATA EDUKASI DIRGANTARA DI KABUPATEN TANGERANG
4	PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	OPTIMALISASI PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH
5	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	KANTOR PENGACARA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TANGERANG	BANTUAN PENANGANAN PERMASALAHAN DI BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
6	PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN, FASILITASI PERPINDAHAN DAN PENEMPATAN, SERTA PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN UETANGKO SP1 DI KAWASAN TRANSMIGRASI PADAULOYO DESA UEMATOPA KECAMATAN ULUBONGKA KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH
7	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANGERANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BANTEN	LAYANAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM SECARA BERLANGGANAN BAGI KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH KABUPATEN TANGERANG PADA UNIT PELAKSANAAN TENIS DAERAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BANTEN
8	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA	TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
9	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	UNIVERSITAS TERBUKA	TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
10	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. META COLOR CONTINENTAL	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN TANGERANG
11	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. ROSALINA JAYA	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN TANGERANG
12	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. ARTHANINDO CEMERLANG	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN TANGERANG
13	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. BERKAH TIGA BRILIAN	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN TANGERANG
14	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. ANUGRAH CAHAYA TERANG	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN TANGERANG
15	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. KIKORA INDONESIA PERSADA	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN TANGERANG
16	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. GLOBAL KURNIA INDOTAMA	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN TANGERANG
17	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. NOOR ANNISA KEMIKAL	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN TANGERANG

NO	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	TEMA KERJASAMA
18	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. SURYA SUKSES MANDIRI	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN TANGERANG
19	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. HANAN MEKAR JAYA KARYA	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN TANGERANG
20	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. UNIVERSAL FURINTECH INDUSTRI	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN TANGERANG
21	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI PIK-2	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN TANGERANG
22	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. INDONESIA POWER	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DI KABUPATEN TANGERANG
23	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. ANEKA SARIVITA	PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN KABUPATEN TANGERANG
24	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	KOMITE MUDA PEREMPUAN INDONESIA	PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN TANGERANG
25	POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
26	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	YAYASAN PENDIDIKAN INSAN PEMBANGUNAN	TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
27	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	YAYASAN HABITAT KEMANUSIAAN INDONESIA	PENINGKATAN KUALITAS HIDUP BAGI MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI DAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN TANGERANG
28	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG BALARAJA	PEMANFAATAN JASA DAN LAYANAN PERBANKAN DI KABUPATEN TANGERANG
29	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	AKADEMI KEBIDANAN ASSYIFA	TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
30	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN CABANG TIGARAKSA	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
31	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KABUPATEN TANGERANG	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
32	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. CITRA RAYA MEDIKA	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
33	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	SILAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
34	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	RUMAH SAKIT SINT CAROLUS SUMMARECON SERPONG	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
35	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	RUMAH SAKIT QADR	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG

NO	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	TEMA KERJASAMA
36	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	RUMAH SAKIT MITRA HUSADA	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
37	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	RUMAH SAKIT KELUARGA KITA	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
38	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK BUNDA SEJAHTERA	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
39	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SELARAS	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
40	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	RSIA HARAPAN MULIA	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
41	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	METRO HOSPITALS CIKUPA	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
42	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK (RSIA) TIARA	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
43	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	RUMAH SAKIT MURNI ASIH	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
44	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	RUMAH SAKIT SELARAS	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
45	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	RUMAH SAKIT PERMATA HATI	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
46	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. BETHSAIDA HOSPITAL INTERNATIONAL (BETHSAIDA HOSPITAL)	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
47	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	RUMAH SAKIT BUN	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
48	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	RUMAH SAKIT SUCI PARAMITA	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
49	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	SILOAM HOSPITALS KELAPA DUA	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
50	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA GADING SERPONG	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
51	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. MEDIKA LOKA BITUNG	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
52	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK PLANIR	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
53	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SEPATAN MULIA	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
54	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	RUMAH SAKIT PRIMAYA PASAR KEMIS	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
55	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	IKATAN DOKTER INDONESIA (IDI) CABANG TANGERANG	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
56	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PERSATUAN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI INDONESIA (POGI) CABANG BANTEN	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
57	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	IKATAN DOKTER ANAK INDONESIA (IDAI) CABANG BANTEN	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG

NO	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	TEMA KERJASAMA
58	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	ASOSIASI KLINIK INDONESIA (ASKLIN) CABANG KABUPATEN TANGERANG	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
59	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	FORUM PEDULI KESEHATAN IBU DAN ANAK (POFKIA) KABUPATEN TANGERANG	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
60	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	IKATAN BIDAN INDONESIA (IBI) CABANG KABUPATEN TANGERANG	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
61	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. NIAGA MAKMUR SEJATI	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN TANGERANG
62	PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PENGEMBANGAN TANGERANG MANGROVE CENTER DAN EKOWISATA DI KABUPATEN TANGERANG
63	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
64	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. TRIAS INDRA SAPUTRA	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN TANGERANG
65	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. EKAWIJAYA AGUNGPERKASA	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN TANGERANG
66	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG	TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
67	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI PIK-2	PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN KABUPATEN TANGERANG
68	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. ADIS DIMENSION FOOTWEAR	PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN KABUPATEN TANGERANG
69	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk	LAYANAN JASA PERBANKAN DI KABUPATEN TANGERANG
70	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	UNIVERSITAS INSAN PEMBANGUNAN INDONESIA	TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
71	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. BERDIKARI JAYA PLASTIK	PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN KABUPATEN TANGERANG
72	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. MILWATER PRATAMA MANDIRI	PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN KABUPATEN TANGERANG
73	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	UNIVERSITAS TANGERANG RAYA	TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
74	DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945	PRAKTEK KERJA PROPESI APOTEKER (PKPA)
75	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN TANGERANG	PT. OMIKRON VITA NATURA	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK LUMPUR TINJA
76	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.	PEMANFAATAN LAYANAN KEUANGAN DESA ONLINE DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN TANGERANG

NO	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	TEMA KERJASAMA
	KABUPATEN TANGERANG	KANTOR CABANG BALARAJA	
77	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN TANGERANG	PT. INDAH JAYA TEXTILE INDUSTRY	ADDENDUM PERTAMA: PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK LUMPUR TINJA
78	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN TANGERANG	PT. TUNTEX GARMENT INDONESIA	ADDENDUM: PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK LUMPUR TINJA
79	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN TANGERANG	PT. ROSALINA JAYA	PELAKSANAAN UJI LABORATORIUM PADA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
80	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN TANGERANG	PT. ARTHANINDO CEMERLANG	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK LUMPUR TINJA
81	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN TANGERANG	PT. GLOBAL KURNIA INDOTAMA	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK LUMPUR TINJA
82	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN TANGERANG	PT. KIKORA INDONESIA	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK LUMPUR TINJA
83	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN TANGERANG	PT. BERKAH TIGA BRILIAN	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK LUMPUR TINJA
84	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN TANGERANG	PT. NOOR ANNISA KEMIKAL	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK LUMPUR TINJA
85	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN TANGERANG	PT. ANUGRAH CAHAYA TERANG	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK LUMPUR TINJA
86	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN TANGERANG	PT. SURYA SUKSES MANDIRI	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK LUMPUR TINJA
87	DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG	FAKULTAS KEDOKTERAN UIVERSITAS PELITA HARAPAN	PEMBELAJARAN PRAKTIK KEDOKTERAN KOMUNITAS, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN TANGERANG
88	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN TANGERANG	PT. META COLOR CONTINENTAL	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK LUMPUR TINJA
89	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN TANGERANG	PT. HANAN MEKAR JAYA	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK LUMPUR TINJA
90	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN	PT. TORABIKA EKA SEMESTA DIVISI INSTANT CREAMER	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK LUMPUR TINJA

Secara pengelompokan/kluster usaha, PT Mitra Kerta Raharja berencana untuk fokus mengembangkan 6 (enam) bidang usaha yaitu:

1. Property
2. Advertising
3. Agrobisnis/hortikultura.
4. Perparkiran
5. Persampahan
6. Pisanisasi gas rumah tangga.

Untuk arah usaha jangka pendek sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahun 2021, & Bussines Plan 2018/2023, PT Mitra Kerta Raharja akan fokus pada bidang usaha Perparkiran sebagai modal untuk langkah penyehatan perusahaan.

2.7.4 Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja

Perubahan Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja Kabupaten Tangerang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2019 memiliki tugas dan fungsi

13. Pasar Mauk Jl. Ir. Sutami - Desa Mauk Barat Kec. Mauk
14. Pasar kemiri Jl. Raya Kemeri - Desa Kemeri Kec. Kemiri
15. Pasar Kronjo Jl. Raya Kronjo - Desa Pasilian Kec. Kronjo
16. Pasar Kemis Jl. Raya Pasar Kemis - Desa Sindang Panon Kec. Pasarkemis
17. Pasar Ex Mekarsari (tematik) Jl. Raya Kresek - Desa Tobat Kec. Balaraja
18. Pasar kelapa Dua Jl. Dayung Raya - Kelurahan Kelapa Dua Kec. Kelapa Dua
19. Pasar Karawaci Jl. Raya Rorojongrang Perumnas II - Kec. Kelapa Dua
20. Pasar Pelangi Jl. Raya Mauk - Desa Pondok Jaya Kec. Sepatan

2.7.5 Perusahaan Umum Daerah Umum Air Minum Tirta Kerta Raharja

Perusahaan Umum Daerah Umum Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (Perumdam TKR) pertama kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10/Huk/1976 tanggal 13 April 1976 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Dati II Kabupaten Tangerang, yang beberapa kali diubah dan terakhir kali dengan Peraturan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang.

Maksud pendirian Perumdam TKR yaitu melakukan Penyelenggaraan SPAM bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Tangerang. Pendirian Perumdam TKR bertujuan untuk :

- a. menyediakan air minum bagi masyarakat, khususnya di daerah berdasarkan tata Kelola perusahaan yang baik.
- b. Mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.
- c. Tercapainya kepentingan yang seimbang antara Pemerintah Daerah, Perumdam TKR dan masyarakat.
- d. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah melalui dividen, dan
- e. Memperoleh laba dan /atau keuntungan.

2.8 Kerjasama Daerah

Pembangunan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 yang mengamatkan bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat melakukan Kerja sama daerah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas layanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama tersebut diharapkan dapat mengatasi keterbatasan pembiayaan bagi pemerintah disebabkan pembangunan membutuhkan porsi Anggaran yang besar, untuk itu skema pembiayaan perlu dirancang sedemikian rupa sehingga target pembangunan pemerintah dapat tercapai dengan baik sesuai dengan perencanaan.

Tabel 2.37 Rekapitulasi kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang

NO	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	TEMA KERJASAMA
1	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	NOTA KESEPATAN: SINERGI PEMANFAATAN BERSAMA DATA DAN INFORMASI SERTA PENGUATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK DALAM PELAKSANAAN HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

NO	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	TEMA KERJASAMA
2	PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	KERJA SAMA ANTAR DAERAH
3	POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	NOTA KESEPATAN: PENGEMBANGAN POTENSI WISATA EDUKASI DIRGANTARA DI KABUPATEN TANGERANG
4	PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	OPTIMALISASI PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH
5	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	KANTOR PENGACARA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TANGERANG	BANTUAN PENANGANAN PERMASALAHAN DI BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
6	PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN, FASILITASI PERPINDAHAN DAN PENEMPATAN, SERTA PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN UETANGKO SP1 DI KAWASAN TRANSMIGRASI PADAULOYO DESA UEMATOPA KECAMATAN ULUBONGKA KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH
7	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANGERANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BANTEN	LAYANAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM SECARA BERLANGGANAN BAGI KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH KABUPATEN TANGERANG PADA UNIT PELAKSANAAN TENIS DAERAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BANTEN
8	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA	TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
9	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	UNIVERSITAS TERBUKA	TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
10	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. META COLOR CONTINENTAL	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN TANGERANG
11	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. ROSALINA JAYA	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN TANGERANG
12	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. ARTHANINDO CEMERLANG	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN TANGERANG
13	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. BERKAH TIGA BRILIAN	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN TANGERANG
14	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. ANUGRAH CAHAYA TERANG	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN TANGERANG
15	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. KIKORA INDONESIA PERSADA	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN TANGERANG
16	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. GLOBAL KURNIA INDOTAMA	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN TANGERANG
17	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. NOOR ANNISA KEMIKAL	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN TANGERANG

NO	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	TEMA KERJASAMA
18	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. SURYA SUKSES MANDIRI	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN TANGERANG
19	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. HANAN MEKAR JAYA KARYA	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN TANGERANG
20	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. UNIVERSAL FURINTECH INDUSTRI	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN TANGERANG
21	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI PIK-2	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN TANGERANG
22	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. INDONESIA POWER	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DI KABUPATEN TANGERANG
23	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. ANEKA SARIVITA	PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN KABUPATEN TANGERANG
24	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	KOMITE MUDA PEREMPUAN INDONESIA	PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN TANGERANG
25	POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
26	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	YAYASAN PENDIDIKAN INSAN PEMBANGUNAN	TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
27	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	YAYASAN HABITAT KEMANUSIAAN INDONESIA	PENINGKATAN KUALITAS HIDUP BAGI MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI DAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN TANGERANG
28	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG BALARAJA	PEMANFAATAN JASA DAN LAYANAN PERBANKAN DI KABUPATEN TANGERANG
29	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	AKADEMI KEBIDANAN ASSYIFA	TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
30	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN CABANG TIGARAKSA	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
31	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KABUPATEN TANGERANG	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
32	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. CITRA RAYA MEDIKA	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
33	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	SILAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
34	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	RUMAH SAKIT SINT CAROLUS SUMMARECON SERPONG	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
35	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	RUMAH SAKIT QADR	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG

NO	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	TEMA KERJASAMA
36	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	RUMAH SAKIT MITRA HUSADA	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
37	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	RUMAH SAKIT KELUARGA KITA	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
38	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK BUNDA SEJAHTERA	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
39	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SELARAS	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
40	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	RSIA HARAPAN MULIA	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
41	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	METRO HOSPITALS CIKUPA	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
42	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK (RSIA) TIARA	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
43	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	RUMAH SAKIT MURNI ASIH	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
44	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	RUMAH SAKIT SELARAS	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
45	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	RUMAH SAKIT PERMATA HATI	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
46	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. BETHSAIDA HOSPITAL INTERNATIONAL (BETHSAIDA HOSPITAL)	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
47	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	RUMAH SAKIT BUN	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
48	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	RUMAH SAKIT SUCI PARAMITA	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
49	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	SILAM HOSPITALS KELAPA DUA	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
50	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA GADING SERPONG	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
51	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. MEDIKA LOKA BITUNG	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
52	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK ILANIR	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
53	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SEPATAN MULIA	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
54	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	RUMAH SAKIT PRIMAYA PASAR KEMIS	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
55	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	IKATAN DOKTER INDONESIA (IDI) CABANG TANGERANG	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
56	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PERSATUAN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI INDONESIA (POGI) CABANG BANTEN	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
57	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	IKATAN DOKTER ANAK INDONESIA (IDAI) CABANG BANTEN	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG

NO	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	TEMA KERJASAMA
58	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	ASOSIASI KLINIK INDONESIA (ASKLIN) CABANG KABUPATEN TANGERANG	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
59	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	FORUM PEDULI KESEHATAN IBU DAN ANAK (POFKIA) KABUPATEN TANGERANG	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
60	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	IKATAN BIDAN INDONESIA (IBI) CABANG KABUPATEN TANGERANG	PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANGERANG
61	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. NIAGA MAKMUR SEJATI	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN TANGERANG
62	PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PENGEMBANGAN TANGERANG MANGROVE CENTER DAN EKOWISATA DI KABUPATEN TANGERANG
63	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
64	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. TRIAS INDRA SAPUTRA	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN TANGERANG
65	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. EKAWIJAYA AGUNGPERKASA	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN TANGERANG
66	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG	TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
67	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI PIK-2	PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN KABUPATEN TANGERANG
68	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. ADIS DIMENSION FOOTWEAR	PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN KABUPATEN TANGERANG
69	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk	LAYANAN JASA PERBANKAN DI KABUPATEN TANGERANG
70	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	UNIVERSITAS INSAN PEMBANGUNAN INDONESIA	TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
71	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. BERDIKARI JAYA PLASTIK	PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN KABUPATEN TANGERANG
72	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. MILWATER PRATAMA MANDIRI	PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN KABUPATEN TANGERANG
73	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	UNIVERSITAS TANGERANG RAYA	TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
74	DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945	PRAKTEK KERJA PROPESI APOTEKER (PKPA)
75	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN TANGERANG	PT. OMIKRON VITA NATURA	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK LUMPUR TINJA
76	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.	PEMANFAATAN LAYANAN KEUANGAN DESA ONLINE DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN TANGERANG

NO	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	TEMA KERJASAMA
	KABUPATEN TANGERANG	KANTOR CABANG BALARAJA	
77	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN TANGERANG	PT. INDAH JAYA TEXTILE INDUSTRY	ADDENDUM PERTAMA: PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK LUMPUR TINJA
78	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN TANGERANG	PT. TUNTEX GARMENT INDONESIA	ADDENDUM: PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK LUMPUR TINJA
79	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN TANGERANG	PT. ROSALINA JAYA	PELAKSANAAN UJI LABORATORIUM PADA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
80	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN TANGERANG	PT. ARTHANINDO CEMERLANG	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK LUMPUR TINJA
81	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN TANGERANG	PT. GLOBAL KURNIA INDOTAMA	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK LUMPUR TINJA
82	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN TANGERANG	PT. KIKORA INDONESIA	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK LUMPUR TINJA
83	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN TANGERANG	PT. BERKAH TIGA BRILIAN	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK LUMPUR TINJA
84	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN TANGERANG	PT. NOOR ANNISA KEMIKAL	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK LUMPUR TINJA
85	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN TANGERANG	PT. ANUGRAH CAHAYA TERANG	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK LUMPUR TINJA
86	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN TANGERANG	PT. SURYA SUKSES MANDIRI	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK LUMPUR TINJA
87	DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG	FAKULTAS KEDOKTERAN UIVERSITAS PELITA HARAPAN	PEMBELAJARAN PRAKTIK KEDOKTERAN KOMUNITAS, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN TANGERANG
88	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN TANGERANG	PT. META COLOR CONTINENTAL	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK LUMPUR TINJA
89	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN TANGERANG	PT. HANAN MEKAR JAYA	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK LUMPUR TINJA
90	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN	PT. TORABIKA EKA SEMESTA DIVISI INSTANT CREAMER	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK LUMPUR TINJA

NO	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	TEMA KERJASAMA
	KABUPATEN TANGERANG		
91	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN TANGERANG	PT. UNIVERSAL FURINTECH INDUSTRI	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK LUMPUR TINJA
92	DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI - PIK 2	PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING DI KECAMATAN TELUKANGNAGA KABUPATEN TANGERANG
93	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN TANGERANG	PT. THE UNIVENUS	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK LUMPUR TINJA
94	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG	UNIVERSITAS ISLAM SYEKH YUSUF (UNIS)	PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI KABUPATEN TANGERANG
95	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TANGERANG	KOMITE MUDA PEREMPUAN INDONESIA	PELAKSANAAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DI KABUPATEN TANGERANG
96	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN TANGERANG	POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA ASET DESA DAN PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) KABUPATEN TANGERANG
97	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN TANGERANG	YAYASAN HABITAT KEMANUSIAAN INDONESIA	PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN TANGERANG
98	DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG	AKADEMI KEBIDANAN ASSYIFA TANGERANG	MENINGKATKAN KEMAMPUAN MAHASISWA DALAM PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN DAN KEBIDANAN KOMUNITAS
99	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN TANGERANG	PT. NIAGA MAKMUR SEJATI	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK LUMPUR TINJA
100	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN TANGERANG	PT. TRIAS INDRA SAPUTRA	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK LUMPUR TINJA
101	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN TANGERANG	PT. EKAWIJAYA AGUNGPERKASA	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK LUMPUR TINJA
102	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PT. BUMI SERPONG DAMAI	PENGAWASAN PEMBANGUNAN, PENGOPERSIAN, PENGENDALIAN, PEMELIHARAAN DAN PENYERAHAN TERMINAL DALAM KAWASAN PERKOTAAN SERTA PENGENDALIAN SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI TERPADU DI BSD CITY
103	PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN DAN REHABILITASI HUTAN DI TANGERANG MANGROVE CENTER KPH BANTEN
104	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TANGERANG	PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG CABANG TANGERANG	PENGELOLAAN BERAS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Penyelenggaraan pemerintahan daerah didukung oleh adanya pendanaan yang memadai. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Berdasarkan pernyataan tersebut, diharapkan dalam pendanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah atau pendanaan pada suatu urusan pemerintahan tidak terjadi adanya tumpang tindih ataupun ketidakterselesaiannya pendanaan. Wujud pengelolaan keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga dalam melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD tahun sebelumnya, yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Postur APBD terdiri dari komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam proses analisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu perlu memahami jenis objek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Tangerang dapat diketahui dari realisasi APBD, perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah, permasalahan yang muncul serta potensi tantangan ke depan.

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Akun pendapatan daerah terdiri atas 3 kelompok, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang komponennya dijelaskan sebagai berikut.

- a. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
 1. Penerimaan pajak daerah
 2. Penerimaan retribusi daerah
 3. Penerimaan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan
 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- b. Pendapatan Transfer, terdiri dari
 1. Transfer pemerintah pusat
 2. Transfer antar daerah
- c. Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, bersumber dari:
 1. Hibah
 2. Dana darurat

3. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Gambaran umum tentang Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022. Target Pendapatan tahun 2018 sebesar Rp. 5.183.337.186.385, dengan realisasi Rp. 5.460.376.741.305 atau sekitar 105,34%, dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 2.494.578.526.844 tercapai Rp. 2.870.834.840.001 atau sekitar 115,08%, tahun 2019 target Pendapatan Rp. 5,674,547,500,908, tercapai Rp. 5,843,397,646,281 (102,98%), dengan target PAD Rp. 2,613,744,369,343 tercapai Rp. 2,812,901,903,974 atau sekitar 107,62%, target Pendapatan untuk tahun 2020 sekitar Rp. 5.122.731.328.379, tercapai Rp. 5.283.259.300.737 atau sekitar 103,13%, dengan target PAD Rp. 2.152.099.764.621 dengan realisasi Rp. 2.465.364.759.567 atau sekitar 114,56%, kondisi tahun 2020 target Pendapatan baik PAD mengalami penurunan target dibandingkan tahun 2019 karena adanya pandemic Covid-19, yang berimbas pemerintah Kabupaten Tangerang meralokasi maupun merrefocusing anggaran termasuk pendapatan. Kondisi penurunan Pendapatan diakibatkan seluruh sumber Pendapatan Pajak mengalami penurunan, penurunan target yang terbesar bersumber dari Pajak Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hiburan dan BPHTB. Hal ini disebabkan dengan diberlakukannya PSBB dan adaptasi kebiasaan baru, yang membatasi aktivitas pergerakan orang dipusat keramaian dan lesunya perekonomian masyarakat. Sumber Pendapatan dari Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu mengalami penurunan target. Pada retribusi jasa umum penurunan target terbesar pada Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Retribusi jasa usaha penurunan target hanya pada retribusi pelayanan Pelabuhan, sedangkan untuk Retribusi Perijinan Tertentu penurunan target terbesar pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Penurunan retribusi tersebut antara lain disebabkan lesunya perekonomian masyarakat.

Tahun 2021 target Pendapatan sekitar Rp. 5,736,671,084,317, tercapai Rp. 6,149,143,629,405 atau sekitar 107,19%, target PAD Rp. 2,451,382,599,948 dengan realisasi Rp. 2,869,928,724,492 sekitar 117,07%, tahun 2021 merupakan fase pemulihan ekonomi daerah sehingga Pendapatan mulai Kembali naik. Target Pendapatan tahun 2022 sekitar Rp. 6,415,749,114,721 tercapai Rp. 6,818,283,797,728 atau sekitar 106,27%, target PAD sekitar Rp. 3,129,813,506,589, tercapai Rp. 3.665.704.373.870 atau sekitar 117,12%.

Tabel 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang
Tahun Anggaran 2018-2022

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN	5.483.110.413.991,00	5.843.672.646.281,00	5.283.259.300.737,00	6.149.143.629.405,00	6,818,283,797,728	5,52
1.1	Pendapatan Asli Daerah	2.872.568.512.687,00	2.812.933.124.762,00	2.465.364.759.567,00	2.869.928.724.492,00	2,886,076,753,678	7,80
1.1.1	Pajak Daerah	1.915.261.073.035,00	2.153.661.721.883,00	1.701.900.649.848,00	2.056.962.543.593,00	61,861,114,298	13,18
1.1.2	Retribusi Daerah	122.418.520.065,00	112.593.677.767,00	136.547.373.492,00	100.548.519.872,00	61,764,968,006	(12,90)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan daerah yang dipisahkan	57.137.623.310,00	57.766.074.188,00	56.606.567.271,00	55.167.387.998,00	656.001.537.888	2,13
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	777.751.296.277,00	488.911.650.924,00	570.310.168.956,00	657.250.273.029,00	3.665.704.373.870	0,21
1.2	Pendapatan Transfer	2.540.541.901.304,00	2.682.123.916.519,00	2.364.554.056.170,00	2.970.840.235.913,00	3.152.027.594.557	4,89
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.008.610.577.217,00	2.053.608.209.764,00	2.038.372.310.490,00	2.126.906.818.356,00	2,390,083,789,837	2,98
1.2.2	Transfer antar - daerah	531.931.324.087,00	628.515.706.755,00	326.181.745.680,00	806.177.824.517,00	761.943.804.720	26,64
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	70.000.000.000,00	348.615.605.000,00	453.340.485.000,00	308.374.669.000,00	551,829,301	74,02
1.3.1	Hibah	70.000.000.000,00	348.615.605.000,00	453.340.485.000,00	308.374.669.000,00	551,829,301	74,02
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	556.850.985	

3.1.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2018-2022 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Realisasi Belanja Daerah juga akan disajikan untuk menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan/penurunan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tangerang yang dijabarkan sebagai berikut. Kondisi Belanja daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan target Belanja karena berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 117/KMK.07/2020 tentang Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan meminta Kepala Daerah untuk melakukan penyesuaian belanja daerah melalui Rasionalisasi belanja pegawai, Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50%, Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50%.

Selisih anggaran hasil penyesuaian pendapatan daerah dan penyesuaian belanja digunakan untuk mendanai :

- a. Belanja bidang Kesehatan dan hal-hal lain terkait Kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemic covid-19, antara lain berupa pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien covid-19;
- b. Penyediaan jaring pengaman social/social safety net antara lain melalui pemberian bantuan social kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemic covid-19;
- c. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, anatra lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah

Tabel 3.2 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2	BELANJA	5.327.769.894.091,00	5.338.015.766.404,00	4.777.124.008.370,00	5.165.378.967.163,00		(25,55)
2.1	Belanja Operasi	3.556.745.486.293,00	3.943.488.092.709,50	3.499.389.280.347,00	3.859.610.157.225,00	4,416,755,637,814.00	(22,52)
2.1.1	Belanja Pegawai	1.379.279.128.155,00	1.870.732.534.034,00	1.669.545.457.895,00	1.848.671.982.738,00	2,151,189,803,213.00	(16,10)
2.1.2	Belanja barang dan jasa	1.916.601.637.944,00	1.922.458.206.349,50	1.694.051.144.953,00	1.539.029.767.368,00	1,943,227,065,240.00	(30,18)
2.1.5	Belanja Hibah	234.202.152.594,00	143.208.266.826,00	127.631.000.549,00	449.909.957.119,00	296,040,019,361.00	25,69
2.1.6	Belanja bantuan sosial	26.662.567.600,00	7.089.085.500,00	8.161.676.950,00	21.998.450.000,00	26,298,750,000.00	2,81
2.2	Belanja Modal	1.763.560.497.024,00	1.392.365.179.427,50	976.512.264.804,00	1.245.790.580.493,00	1,553,274,496,271.00	(30,83)
2.2.1	Belanja Tanah	422.438.669.296,00	190.663.045.773,00	174.879.250.388,00	437.105.252.384,00	342,022,722,332.00	(3,30)
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	264.414.214.369,00	254.524.178.235,00	226.101.911.006,00	157.074.680.027,00	249,740,486,832.00	(36,36)
2.2.3	Belanja bangunan dan gedung	506.810.131.538,00	374.198.318.620,00	238.548.536.514,00	210.977.934.794,00	334,646,202,898.00	(43,49)
2.2.4	Belanja Jalan, irigasi dan jalanan	534.350.783.768,00	542.446.989.238,00	302.538.105.154,00	440.330.930.828,00	610,918,173,051.00	(24,29)
2.2.5	Belanja aset tetap lainnya	35.546.698.053,00	30.532.647.561,50	34.444.461.742,00	301.782.460,00	15,946,911,158.00	(50,10)
2.3	Belanja Tidak Terduga	7.463.910.774,00	2.162.494.267,00	301.222.463.219,00	59.978.229.445,00	39,645,157,166.00	3.394,57
3	Transfer	551.065.183.269,00	650.148.754.100,00	588.395.766.747,00	668.319.977.231,00	699,043,340,179.00	(19,48)
3.1	Transfer Bagi Hasil	166.322.457.069,00	202.796.024.306,00	157.385.248.029,00	210.492.145.819,00	246,063,603,379.00	(16,68)
3.2	Transfer Bantuan Keuangan	384.742.726.200,00	447.352.729.794,00	431.010.518.718,00	457.827.831.412,00	452,979,736,800.00	(20,29)

3.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan Daerah, terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sementara itu Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri dari Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Penyertaan Modal Daerah, Pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pos-pos pembiayaan sebagaimana disajikan pada tabel 3.3 menunjukkan nilai neto pembayaan yang positif yang mampu melebihi nilai defisit, sehingga memberikan SILPA yang positif sejak tahun 2018-2022.

Penerimaan pembiayaan umumnya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya, sedangkan komponen lainnya seperti pencairan Dana Cadangan dan Hasil Penjualan Aset yang Dipisahkan hanya terjadi secara berkala. Sementara itu komponen pengeluaran pembiayaan, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan investasi non permanen hanya terjadi secara berkala dan dengan nilai yang tidak terlalu besar. Sehingga secara neto pembiayaan mengalami nilai positif. Nilai pembiayaan neto ini cukup besar sehingga mampu menutup defisit realisasi anggaran, sehingga realisasi anggaran tahun 2013-2020 memberikan SILPA positif.

Tabel 3.3 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022

No	Uraian	REALISASI				
		2018	2019	2020	2021	2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
3.1	Penerimaan Pembiayaan	1.198.916.116.901,00	792.249.631.880,00	617.757.759.057,00	535.463.426.368,00	850.908.111,379
3.1.1	SILPA	1.057.916.116.901,00	792.249.631.880,00	617.757.759.057,00	535.463.426.368,00	850.908.111,379
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	141.000.000.000,00				
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	10.941.821.652,00	29.999.998.600,00	-	-	32,199,297,110
3.2.2	Penyertaan modal daerah	10.941.821.652,00	24.999.998.600,00		-	32,199,297,110
3.2.5	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		5.000.000.000,00			-
	Pembiayaan Netto	1.187.974.295.249,00	762.249.633.280,00	617.757.759.057,00	535.463.426.368,00	818,708,814,269
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	792.249.631.880,00	617.757.759.057,00	535.497.284.677,00	850.908.111.379,00	928,273,980,567

3.1.2 Neraca Daerah

Kesehatan neraca keuangan suatu daerah dapat ditinjau melalui rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio ini merupakan perbandingan dari beberapa pos pada laporan keuangan. Adapun penjelasan lebih detil mengenai rasio likuiditas dan solvabilitas adalah sebagai berikut:

- a. Rasio likuiditas: Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas terdiri dari:
 - Rasio Lancar, menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya.
 - Rasio Cepat, menggambarkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan membandingkan aktiva lancar yang paling likuid (tanpa memperhatikan persediaan) dengan kewajiban lancar.

Rasio lancar dan rasio cepat yang baik bernilai diatas 1 (satu), yang artinya pemerintah daerah masih memiliki aset lancar yang cukup untuk membiayai kewajiban jangka pendeknya. Rasio lancar Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 adalah sebesar 20,18 dengan rasio cepat sebesar 15,48. Berdasarkan angka tersebut, Kabupaten Tangerang dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar maupun tanpa memperhatikan persediaan. Sepanjang tahun 2018-2019 tren rasio lancar dan rasio cepat Kabupaten Tangerang mengalami kenaikan, tahun 2021-2022 mengalami penurunan. Pada tahun 2020 rasio lancar mencapai 16,60 dan rasio cepat 14,38. Meskipun terjadi penurunan, angka tersebut masih berada diatas 1 (satu). Secara detail, rasio tersebut disajikan dalam tabel dibawah.

Tabel 3.4 Rasio Likuiditas Keuangan Kabupaten Tangerang Tahun 2018 – 2022

Rasio Likuiditas	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Lancar	20,12	16,57	40,85	37,31	37,31
Rasio Cepat	15,48	14,38	34,41	33,68	33,68

Sumber: Neraca Keuangan Kabupaten Tangerang, diolah

- b. Rasio solvabilitas: rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah daerah dalam memenuhi semua kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang dengan jaminan aktiva maupun ekuitas yang dimiliki pemerintah daerah. Adapun jenis rasio yang digunakan sebagai berikut:
 - 1. Rasio utang terhadap aset, menggambarkan kemampuan keuangan pemerintah dalam memenuhi seluruh kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang dengan jumlah seluruh aset yang dimilikinya.
 - 2. Rasio utang terhadap ekuitas, menggambarkan kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi seluruh kewajibannya dengan ekuitas yang dimiliki.

Rasio solvabilitas Kabupaten Tangerang dalam rentang waktu 2018-2022 menunjukkan angka yang sehat. Pada tahun 2018 Kabupaten Tangerang memiliki rasio utang terhadap aset sebesar 0,488% yang artinya aset Kabupaten Tangerang hanya dibiayain 0,329% kewajiban. Begitu pula pada tahun 2022 yang menunjukkan angka 0,194%. Selanjutnya, untuk rasio utang terhadap ekuitas Kabupaten Tangerang juga masih dibawah 100% dari tahun ke tahun. Artinya, Kabupaten Tangerang akan mampu membayar utang menggunakan ekuitasnya apabila mengalami gagal bayar.

Tabel 3.5 Rasio Solvabilitas Keuangan Kabupaten Tangerang 2018-2022

Rasio Solvabilitas	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Utang terhadap Aset	0.488	0.384	0.166	0.194	0.194
Rasio Utang terhadap Ekuitas	0.490	0.385	0.167	0.194	0.194

Sumber: Neraca Keuangan Kabupaten Tangerang, diolah

Tabel 3.6 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	ASET	14.356.043.519.847,20					
1.1	ASET LANCAR						
1.1.1	Kas di Kas Daerah	695.797.895.875,16	526.631.115.391,16	382.036.355.068,16	643.703.360.122,00	643.703.360.122	(20,82)
1.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan SKPD	840.000,00	6.940.000,00	7.295.165,00	681.940,00	681.940	135,16
1.1.4	Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD	76.078.543,00	15.680.570,00	41.115.681,00			-
1.1.5	Kas di BLUD	124.879.960.345,00	105.469.801.746,00	161.893.532.313,00	224.847.574.769,00	224.847.574.769	(5,79)
1.1.6	Kas di Dana Kapitasi JKN						-
1.1.7	Kas Lainnya		1.306.268.506,00	14.003.257.220,00			-
1.1.8	Kas di Bendahara FKTP	9.918.685.207,00					-
1.1.9	Kas di Bendahara BOS	3.879.985.568,00	12.323.666.501,00	5.595.339.172,00	2.874.782.659,00	2.874.782.659	-
1.1.10	Setara Kas		24.999.998.600,00				-
1.1.11	Investasi Jangka Pendek						-
1.1.12	Piutang Pendapatan	831.283.872.568,00	896.093.177.901,00	1.028.176.883.119,00	897.083.066.453,00	897.083.066.453,	(22,55)
1.1.13	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi						-
1.1.14	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak						-
1.1.15	Piutang Lainnya						-
1.1.16	Penyisihan Piutang	(585.485.226.017,00)	(632.930.293.440,88)	(624.805.879.991,82)	(617.206.483.376,39)	(617.206.483.376,39)	(23,60)
1.1.17	NRV atas Piutang						-
1.1.18	Beban Dibayar Dimuka	190.041.666,67	42.976.754,54	44.290.212,19	12.083.333,34	12.083.333,34	(42,42)
1.1.19	Persediaan	327.543.115.811,87	144.729.374.357,84	187.717.297.245,92	128.044.978.299,36	128.044.978.299,36	(39,47)
	JUMLAH ASET LANCAR	1.408.085.249.567,70	1.078.688.706.886,66	1.154.709.485.204,45	1.279.360.044.199,31	1.279.360.044.199,31	(26,39)
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG						-
1.2.1	Investasi Non Permanen	20.828.676.247,00	37.293.058.088,00	48.707.031.554,00	44.471.125.330,00	44.471.125.330	-
1.2.1.1	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya						-
1.2.1.2	Investasi dalam Obligasi						-
1.2.1.3	Investasi dalam Proyek Pembangunan						-
1.2.1.4	Dana Bergulir	20.828.676.247,00	37.293.058.088,00	48.707.031.554,00	44.471.125.330,00	44.471.125.330	0,24

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.2.1.5	Deposito Jangka Panjang						-
1.2.1.6	Investasi Non Permanen Lainnya						-
1.2.2	Investasi Permanen	1.028.278.454.834,91	1.028.846.624.292,56	1.026.798.085.805,63	1.023.711.826.866,00	1.023.711.826.866	-
1.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.028.278.454.834,91	1.028.846.624.292,56	1.026.798.085.805,63	1.023.711.826.866,00	1.023.711.826.866	(25,11)
1.2.2	Investasi Permanen Lainnya						-
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	1.049.107.131.081,91	1.066.139.682.380,56	1.075.505.117.359,63	1.068.182.952.196,00	1.068.182.952.196	(24,54)
1.3	ASET TETAP						-
1.3.1	Tanah	5.064.064.958.121,00	7.605.873.762.094,00	7.859.447.998.418,00	8.352.273.885.332,00	8.352.273.885.332	(10,05)
1.3.2	Peralatan dan Mesin	1.514.818.922.013,80	1.721.964.560.982,69	1.900.778.880.283,07	2.077.110.389.680,35	2.077.110.389.680,37	(16,67)
1.3.3	Gedung dan Bangunan	3.962.392.759.320,59	4.407.089.959.051,00	4.646.736.675.138,00	4.772.916.867.901,00	4.772.916.867.901	(20,16)
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.890.807.420.932,29	6.479.068.097.030,29	6.802.248.168.553,29	7.381.564.089.162,29	7.381.564.089.162,29	(19,13)
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	60.772.544.351,22	68.802.025.396,22	73.929.801.578,73	76.115.654.215,52	76.115.654.215,52	(19,09)
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	162.113.230.623,01	14.381.592.639,00	14.891.220.719,00	24.941.650.856,00	24.941.650.856	(30,02)
1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(5.081.950.646.342,64)	(5.804.618.704.820,20)	(6.587.583.589.045,85)	(7.371.579.780.112,46)	(7.371.579.780.112,49)	(15,10)
	JUMLAH ASET TETAP	11.573.019.189.019,20	14.492.561.292.373,00	14.710.449.155.644,20	15.313.342.757.034,70	15.313.342.757.034,69	(17,29)
1.4	DANA CADANGAN						-
1.4.1	Dana Cadangan						-
	JUMLAH DANA CADANGAN						-
1.5	ASET LAINNYA						-
1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	128.344.368,00	14.254.375,00		6.400.000,00	6.400.000	-
1.5.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga						-
1.5.3	Aset Tak Berwujud	26.718.750,00	61.552.083,33	34.927.083,33	214.208.333,33	214.208.333,33	67,52
1.5.4	Aset Lain-Lain	325.676.887.060,36	317.081.732.238,13	61.704.090.752,84	37.295.811.054,87	37.295.811.054,89	(55,68)
	JUMLAH ASET LAINNYA	325.831.950.178,36	317.157.538.696,46	61.739.017.836,17	37.516.419.388,20	37.516.419.388,22	(55,61)
	JUMLAH ASET	14.356.043.519.847,20	16.954.547.220.336,60	17.002.402.776.044,40	17.698.402.172.818,20	17.698.402.172.818,22	(19,38)
2	KEWAJIBAN						-
2,1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						-
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.584.788.714,00	282.373.112,00				

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2.1.2	Utang Bunga						-
2.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang						-
2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	7.321.441.100,86	9.703.718.021,41	7.408.557.950,26	9.217.244.766,67	9.217.244.766,67	(16,68)
2.1.5	Utang Beban	46.462.297.645,12	42.663.257.723,00	10.672.291.434,00	871.433.390,00		(68,75)
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	13.443.540.246,70	12.318.634.785,10	10.021.668.393,70		871.433.390	(56,49)
2.1.7	Utang Jaminan Pihak Ketiga						-
2.1.8	Utang Belanja				24.094.922.378,70	24.094.922.378,70	
2,2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						-
2.2.1	Utang Dalam Negeri						-
2.2.6	Utang Jangka Panjang Lainnya	178.908.437,00	135.217.583,67	10.021.668.393,70	104.073.250,33	104.073.250,33	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	69.990.976.143,68	65.103.201.225,18	28.263.840.028,29	34.287.673.785,70	34.287.673.785,70	(35,56)
	JUMLAH EKUITAS DANA	14.286.052.543.703,50	16.889.444.019.111,50	16.974.138.936.016,20	17.664.114.499.032,50	17.664.114.499.032,50	(19,30)
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	14.356.043.519.847,20	16.954.547.220.336,60	17.002.402.776.044,40	17.698.402.172.818,20	17.698.402.172.818,20	(19,38)

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan Pengelolaan Keuangan kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022 diuraikan ke dalam substansi Proporsi Penggunaan Anggaran untuk melihat proporsi belanja yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Selain itu Analisis Pembiayaan yang diuraikan ke dalam analisis Sumber Penutup Defisit Riil, analisis realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Tabel 3.7 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	1,379,279,128,155	1,870,732,534,034	1,669,545,457,895	1,848,671,982,738	2,238,376,783,604	-16,10
2	Total pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)	1,379,279,130,173,00	1,870,732,536,053	1,669,545,459,915	1,848,671,984,759	2,238,376,783,604	-16,10
	Persentase	100	100	100	100	100	100

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah untuk menyalurkan surplus atau menutup defisit, dalam penganggaran. Selain itu juga semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

3.2.2.1 Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Tabel 3.8 Analisis Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	5.483.110.413.991,00	5.843.672.646.281,00	5.283.259.300.737,00	6.149.143.629.405,00	6.685.066.188.868,00
	Dikurangi realisasi :					
2	Belanja Daerah	5.878.835.077.360,00	5.988.164.520.504,00	5.365.519.775.117,00	5.833.698.944.394,00	
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.941.821.652,00	29.999.998.600,00	-	-	-
	Defisit riil	(406.666.485.021,00)	(174.491.872.823,00)	(82.260.474.380,00)	315.444.685.011,00	6.685.066.188.868,00

Tabel 3.9 Analisis Sumber Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	5.483.110.413.991,00	5.843.672.646.281,00	5.283.259.300.737,00	6.149.143.629.405,00	6.818.283.797.728
	Dikurangi realisasi :					
2	Belanja Daerah	5.878.835.077.360,00	5.988.164.520.504,00	5.365.519.775.117,00	5.833.698.944.394,00	6.708.575.269.090
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.941.821.652,00	29.999.998.600,00	-	-	-
A	Defisit Riil	(406.666.485.021,00)	(174.491.872.823,00)	(82.260.474.380,00)	315.444.685.011,00	6.685.066.188.868,00
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebelumnya	1.057.916.116.901,00	792.249.631.880,00	617.757.759.057,00	535.463.426.368,00	850.908.111.379
5	Pencairan dana cadangan	141.000.000.000,00				
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	1.198.916.116.901,00	792.249.631.880,00	617.757.759.057,00	535.463.426.368,00	-
A - B	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	792.249.631.880,00	617.757.759.057,00	535.497.284.677,00	850.908.111.379,00	928.417.342.907

No	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil				
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	1.057.916.116.901,00	792.249.631.880,00	617.757.759.057,00	535.463.426.368,00	850.908.111.379
2	Pencairan dana cadangan	141.000.000.000,00				
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	1.198.916.116.901,00	792.249.631.880,00	617.757.759.057,00	535.463.426.368,00	850.908.111.379

3.2.2.2 Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Tabel 3.10 Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	5.483.110.413.991,00	5.843.672.646.281,00	5.283.259.300.737,00	6.149.143.629.405,00	6.685.066.188.868,00
	Dikurangi realisasi :					
2	Belanja Daerah	5.878.835.077.360,00	5.988.164.520.504,00	5.365.519.775.117,00	5.833.698.944.394,00	
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.941.821.652,00	29.999.998.600,00	-	-	-
A	Defisit Riil	(406.666.485.021,00)	(174.491.872.823,00)	(82.260.474.380,00)	315.444.685.011,00	6.685.066.188.868,00
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebelumnya	1.057.916.116.901,00	792.249.631.880,00	617.757.759.057,00	535.463.426.368,00	
5	Pencairan dana cadangan	141.000.000.000,00				
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	1.198.916.116.901,00	792.249.631.880,00	617.757.759.057,00	535.463.426.368,00	850.908.111.379
A - B	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	792.249.631.880,00	617.757.759.057,00	535.497.284.677,00	850.908.111.379,00	928.273.980.567,00

3.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Tahapan yang harus ditempuh untuk menganalisa kerangka pendanaan adalah dengan mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja periodik wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.

3.3.2 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan ada 4 (empat) sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (4) Lain-lain PAD yang sah.

Kebijakan yang ditempuh untuk mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah antara lain :

- a. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- b. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah.
- c. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi).
- d. Mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD.
- e. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
- f. Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
- g. Peningkatan peran dan fungsi petugas yang ada di kecamatan dalam pelayanan dan pengamatan potensi yang ada;
- h. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;
- i. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan instansi terkait.
- j. Peningkatan pelayanan publik (masyarakat) baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
- k. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah

- l. Penerapan pola insentif dan disinsentif
- m. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah
- n. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah

Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan dana perimbangan yaitu :

- 1) Meningkatkan koordinasi ke pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka peningkatan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk setiap objek dari dana perimbangan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Mengintensifkan komunikasi dengan lembaga ditingkat pusat dan provinsi khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan dana perimbangan bagi kabupaten/kota.
- 3) Merencanakan dan mendukung berbagai program yang telah ditetapkan oleh Provinsi Banten dan pemerintah pusat untuk memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Tangerang sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi dari Pemerintah Provinsi Banten.

Tabel 3.11 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

No	Uraian	2024	2025	2026
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	PENDAPATAN	7,022,765,712,829	7,294,336,604,802	7,451,857,496,776
1.1	Pendapatan Asli Daerah	3,479,008,294,703	3,583,376,600,539	3,573,694,906,376
1.1.1	Pajak Daerah	2,819,818,710,911	2,973,873,326,057	3,013,877,941,204
1.1.2	Retribusi Daerah	135,112,926,478	137,228,660,880	139,344,395,283
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan daerah yang dipisahkan	58,751,120,901	59,020,037,166	59,288,953,432
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	465,325,536,413	413,254,576,435	361,183,616,458
1.2	Pendapatan Transfer	3,543,757,418,126	3,710,960,004,263	3,878,162,590,400
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2,804,745,863,357	2,937,435,077,713	3,070,124,292,070
1.2.2	Transfer antar - daerah	739,011,554,769	773,524,926,550	808,038,298,330
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	0	0	0
1.3.1	Hibah	0	0	0
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0	0

Sumber : Hasil Proyeksi

3.3.3 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2024-2026

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat secara merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun secara cermat, sistematis dan terpola.

Sebagai komponen APBD, belanja daerah diharapkan mampu mendorong perkembangan ekonomi daerah. Belanja daerah dimaksudkan untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan yang langsung memberikan manfaat sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, untuk mendukung

pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yang merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Dalam pengelolaan belanja harus menerapkan prinsip efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan.

Efektifitas dan efisiensi dimaksudkan dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud transparan dan akuntabel yaitu setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja dialokasikan untuk belanja wajib dan mengikat sesuai ketentuan perundangan
- 2) Belanja dialokasikan untuk program dan kegiatan prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Belanja dialokasikan untuk program dan kegiatan yang memiliki daya ungkit ataupun memiliki *multiplier effects* dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah secara Nasional pada tahun 2024.
- 4) Belanja Pemilihan Umum Daerah Bupati Tangerang dan Wakil Bupati Tangerang
- 5) Belanja dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan OPD sesuai tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran OPD dan sasaran daerah.
- 6) Penghematan dan rasionalisasi terhadap belanja personil pada belanja langsung secara selektif.
- 7) Pada tahun 2024-2026 belanja diarahkan untuk pemulihan pertumbuhan ekonomi.
- 8) Mempedomani mandatory spending antara lain :
 - a. Anggaran bidang Urusan Pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 49 ayat (1)
 - b. Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% dari APBD diluar gaji (UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan)
 - c. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah (UU APBN)
 - d. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

Tabel 3.12 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

URAIAN	Target		
	2024	2025	2026
BELANJA DAERAH			
Belanja Operasi	5,333,756,640,465	5,813,424,277,796	6,293,091,915,127
Belanja Pegawai	2,451,211,765,435	2,620,161,377,578	2,789,110,989,722
Belanja Barang dan Jasa	2,686,323,819,531	2,997,041,844,718	3,307,759,869,906
Belanja Hibah	188,073,055,500	188,073,055,500	188,073,055,500
Belanja Bantuan Sosial	8,148,000,000	8,148,000,000	8,148,000,000
Belanja Modal	1,550,450,047,248	1,654,865,557,513	1,769,281,067,778
Belanja Tanah	78,742,896,506	78,742,896,506	78,742,896,506
Belanja Peralatan dan Mesin	222,155,626,851	237,401,390,381	252,647,153,911
Belanja Gedung dan Bangunan	621,742,174,099	651,742,174,099	691,742,174,099
Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	623,176,678,026	680,973,147,259	738,769,616,492
Belanja Aset Tetap Lainnya	4,632,671,766	6,005,949,268	7,379,226,770
Belanja Tak Terduga	60,000,000,000	60,000,000,000	60,000,000,000
Belanja Tak Terduga	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00
Belanja Transfer	730,860,134,078	730,860,134,078	730,860,134,078
Belanja Bagi Hasil Pendapatan	246,063,603,379.00	246,063,603,379.00	246,063,603,379.00
Belanja Bantuan Keuangan	484,796,530,699	484,796,530,699	484,796,530,699
Jumlah Belanja	7,675,066,821,791	8,259,149,969,387	8,853,233,116,983

3.3.3.1 Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, dan hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan serta penerimaan piutang. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang.

Arah kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Mengupayakan penurunan SILPA secara bertahap dengan memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran. Pada tahun 2026, surplus (defisit) dan SILPA diasumsikan menurun dibandingkan tahun sebelumnya
- 2) Efisiensi dan penghematan pada pelaksanaan program kegiatan dengan sesuai dengan standarisasi harga barang dan jasa secara ketat, dengan tetap memperhatikan *output* dan *outcome*.
- 3) Mengupayakan pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kewajiban daerah, dan penguatan kemampuan keuangan daerah.

Penerimaan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit dengan SILPA sedangkan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal secara bertahap.

Tabel 3.13 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

URAIAN	Target		
	2024	2025	2026
PEMBIAYAAN DAERAH			
Penerimaan Pembiayaan Daerah	257,251,357,662	164,502,715,323	71,754,072,985
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	257,251,357,662	164,502,715,323	71,754,072,985
Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
Hasil Penjualan kekayaan Daerah Yang dipisahkan	0	0	0
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	0	0
Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0	0
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	0	0	0
Jumlah Pembiayaan	257,251,357,662	164,502,715,323	71,754,072,985

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Pada bab ini, akan menguraikan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Tangerang untuk periode 2024-2026 yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tangerang. Pembentukan isu-isu strategis di Kabupaten Tangerang didasarkan atas beberapa komponen yang telah dianalisis terkait hasil pembangunan yang ada di periode sebelumnya, seperti, telaah atas dokumen RPJMN 2020-2024, dokumen RPD Provinsi Banten 2023-2026, dokumen RPJPD Kabupaten Tangerang 2005-2025, dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), isu internasional, dan lain sebagainya.

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan bentuk dari *“gap expectation”*: antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang telah direncanakan serta antara hal yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan ini harus diidentifikasi sehingga dapat dicari solusinya, dalam rangka menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan.

Beberapa permasalahan yang disampaikan merupakan kondisi yang menjadi fokus pelaksanaan pembangunan yang perlu diperhatikan, yakni terkait permasalahan pengembangan sumber daya manusia, permasalahan ekonomi, permasalahan tata kelola pemerintahan, permasalahan infrastruktur dan lingkungan hidup.

Tabel 4.1
Identifikasi Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Aspek

No.	Aspek	Permasalahan
a.	Aspek Geografi dan Demografi :	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Banjir ROB melanda pemukiman warga daerah pesisir utara Kabupaten Tangerang 2. Banjir yang diakibatkan intensitas curah hujan yang tinggi 3. Pemanfaatan lahan terkonsentrasi di wilayah perkotaan 4. Hilangnya lahan akibat abrasi di Pantai Utara 5. Bencana banjir melanda permukiman yang berdekatan dengan daerah aliran sungai 6. Abrasi terjadi di daerah pantai utara 7. Pemanfaatan lahan terkonsentrasi di wilayah perkotaan 8. Hilangnya lahan akibat abrasi di Pantai Utara 9. Angka kelahiran cukup tinggi
b.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat :	
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. sektor industri pengolahan yang merupakan sektor padat karya yang membutuhkan tenaga Kerja yang banyak, jika pertumbuhan sektor industri pengolahan menurun, akan berdampak kepada PHK. 2. Kenaikan harga makanan dan non makanan akibat kenaikan BBM penyebab inflasi di Kabupaten Tangerang. 3. Kemampuan masyarakat dalam akses makanan dan non makanan belum meningkat.
	Fokus Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata lama Sekolah di Kabupaten Tangerang selama 8,92 tahun, belum sampai 9 tahun (SMP) atau 12 tahun (SMA). 2. Jumlah bayi dengan gizi buruk belum tertangani secara maksimal

Tabel 4.2

Identifikasi Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum Per Urusan Pemerintahan Daerah

Urusan Pembangunan Daerah	No	Permasalahan
Pendidikan	1.	<ol style="list-style-type: none">1. Belum maksimalnya pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;2. Rasio peserta didik terhadap ruang kelas belum ideal;3. Masih terdapat peserta didik yang putus sekolah;4. Belum meratanya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan;5. Masih rendahnya peran orang tua terhadap pentingnya pendidikan PAUD bagi pengembangan potensi anak;6. Masih kurangnya jumlah TK Negeri7. Terdapat Lembaga PAUD dan Lembaga Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang belum memenuhi SNP;8. Terdapat anak usia PAUD yang belum memperoleh Pendidikan PAUD;9. Belum meratanya pendidikan Non Formal/Kesetaraan;10. Masih terdapat ATS yang belum terlayani;11. Masih rendahnya standar kualifikasi/tingkat pendidikan pendidik dan tenaga kependidikan;12. Belum meratanya distribusi pendidik dan tenaga kependidikan;13. Belum optimalnya linearitas pendidikan/program studi pendidik;14. Kurangnya dan rendahnya kualitas tenaga administrasi sekolah;15. Belum maksimalnya pengembangan potensi, bakat, dan minat peserta didik;16. Masih rendahnya Nilai Rapor Pendidikan;17. Belum maksimal pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka;18. Masih kurangnya sarana pendukung pembelajaran.
Kesehatan	2.	<ol style="list-style-type: none">1. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani cenderung menurun dikarenakan kurangnya pendataan dan tindakan preventif dari puskesmas2. Kurangnya asupan pangan bergizi pada masa kehamilan dan 1000 HPK;3. Tingginya kematian bayi yang disebabkan oleh kurangnya perhatian ibu dalam perawatan anak dikarenakan kesejahteraan keluarga yang rendah;4. Tingginya angka <i>stunting</i> dan KEK;5. Menurunnya cakupan pertolongan ibu bersalin dengan bantuan tenaga kesehatan yang kompeten yang nanti akan berdampak pada kenaikan AKI dan

Urusan Pembangunan Daerah	No	Permasalahan
		<p>AKB;</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Rendahnya bantuan tenaga kesehatan yang kompeten untuk ibu bersalin; 7. Pergantian kegiatan anggaran BOK menjadi penyakit menular dan tidak menular; 8. Petugas PKM yang terfokus pada kegiatan penanggulangan pandemi (PE dan vaksinasi); 9. Petugas pencatatan pelaporan PKM/RS yang sering berganti/mempunyai kegiatan lain sehingga pelaporan terhambat; 10. Belum optimalnya kualitas pelayanan maternal; 11. Fenomena 3 terlambat masih terjadi (Terlambat mengambil keputusan rujukan fasyankes, terlambat sampai ke tempat rujukan, terlambat ditangani dengan tepat); 12. Peningkatan kasus anemia pada ibu hamil; 13. Peningkatan kasus dua penyakit menular yang perlu mendapat perhatian khusus (TEC dan HIV/AIDS); 14. Belum optimalnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular; 15. Faktor risiko gangguan metabolik, risiko perilaku, dan risiko lingkungan; 16. Kurangnya pelaksanaan fungsi puskesmas dalam menjalankan pelayanan kesehatan dasar yang komprehensif; 17. Kurangnya peran rumah sakit dalam pelaksanaan program prioritas; 18. Adanya kesenjangan pemenuhan pelayanan kesehatan karena keterbatasan jarak untuk dijangkau; 19. Kurangnya pelatihan SDM Kesehatan; 20. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat miskin; 21. Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) belum optimal; 22. Belum optimalnya sediaan farmasi dan alat kesehatan.
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Cipta Karya belum ada turunan produk hukum di daerah, sehingga pelayanan dokumen tertunda; 2. Belum adanya standar perhitungan kebutuhan minimal dalam beberapa indikator/jenis pelayanan antara lain dalam perhitungan kebutuhan layanan air minum; 3. Beberapa wilayah Kabupaten Tangerang cukup sulit untuk mencari sumber air

Urusan Pembangunan Daerah	No	Permasalahan
		<p>baku untuk pemenuhan layanan air minum bukan perpipaan, disamping lokasinya juga cukup jauh dari jaringan air minum perpipaan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Belum optimal ketegasan dalam tindakan penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, salah satu alasannya karena belum tersedianya PPNS terkait bidang Penataan Ruang; 5. Belum optimalnya koordinasi antar pihak terkait dalam bidang penataan ruang mulai dari perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian; 6. Belum optimalnya pendataan dan penindakan izin terhadap bangunan tidak berizin dan tidak sesuai izin. Salah satu alasannya karena keterbatasan sumber daya yang tidak dapat mengejar kemajuan pembangunan yang ada di Kabupaten Tangerang; 7. Kurang memadainya kapasitas jalan Kabupaten karena lebar jalan yang tidak seimbang dengan volume kendaraan yang ada; 8. Rata-rata kerusakan jalan Kabupaten yang masih tinggi karena ada peningkatan jumlah kendaraan per tahun yang sangat pesat; 9. Tingginya Sedimentasi/Endapan/Sampah pada drainase jalan yang menyebabkan sistem drainase jalan Kabupaten belum maksimal; 10. Kurangnya pembangunan untuk daerah resapan air dan daya tampung Saluran/Sungai/Situ; 11. Kurangnya kapasitas bangunan untuk jaringan irigasi (kurang dari 1000 Ha)
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada sebagian TPU tidak ada batas antara TPU Wakaf dan TPU milik Pernda; 2. Rendahnya kesadaran pengembang untuk menyerahkan PSU; 3. Kurangnya pemahaman pengembang terkait regulasi penyerahan PSU; 4. Rendahnya kuantitas infrastruktur permukiman karena terbatasnya sumber daya dan anggaran dan akan berdampak pada capaian SPM.
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kesadaran masyarakat akan Perda dan Perkada serta penanggulangan bencana masih kurang; 2. Kurangnya personal Satpol PP dalam rangka penegakan Perda dan Perkada; 3. Data persebaran/pertumbuhan tempat hiburan belum akurat; 4. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan dan aktivitas pelaku usaha hiburan, peredaran miras;

Urusan Pembangunan Daerah	No	Permasalahan
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Penyalahgunaan pelaku kegiatan usaha; 6. Belum teralinya sinergitas yang intensif dengan Perangkat daerah dan Aparat Keamanan di wilayah terkait permasalahan trantibum; 7. Belum optimalnya koordinasi penanganan gangguan PSK; 8. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam Satlinmas; 9. Kesulitan pemerolehan data warga yang berada di radius 50 meter dari lokasi penertiban dikarenakan belum ada petugas yang khusus mencatat data warga saat pelaksanaan penertiban; 10. Dinamisnya sasaran pemenuhan pelayanan dasar sehingga tidak dapat menentukan angka yang pasti dalam perhitungan kebutuhan; 11. Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan penertiban sehingga memberatkan saat menganggarkan kebutuhan untuk pemenuhan pelayanan dasar; 12. Belum optimalnya komunikasi antar lembaga dengan baik saat pelaksanaan maupun pasca pelaksanaan kegiatan penertiban; 13. Terbatasnya jumlah personil saat pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar; 14. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. 15. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana dan kebakaran; 16. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas data kebencanaan dan kebakaran; 17. Belum adanya dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran dan dokumen rencana kontingensi per jenis bencana; 18. Belum adanya peta daerah rawan bencana; 19. Masih terbatasnya akses informasi rawan bencana bagi masyarakat; 20. Masih rendahnya cakupan pelayanan pos damkar yang ada dalam kebencanaan dan kebakaran; 21. Masih rendahnya kapasitas aparat BPBD dalam kebencanaan dan kebakaran; 22. Belum dipedomaninya KRB dan RPB dalam perencanaan penataan ruang dan perencanaan perangkat daerah terkait.
Sosial	6.	1. Belum optimalnya verifikasi dan validasi pendataan PMKS dan PSKS;

Urusan Pembangunan Daerah	No	Permasalahan
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Belum optimalnya sarana dan prasarana penanganan bagi PMKS; 3. Verifikasi data PMKS belum dilaksanakan secara berkala; 4. Target sasaran kebutuhan berdasarkan mutu layanan masih sulit ditentukan dikarenakan kejadian yang bersifat kasuistik; 5. Anggaran belum dapat memenuhi kebutuhan; 6. Keterbatasan SDM dan <i>stakeholders</i> dalam penanganan PMKS; 7. Belum optimalnya sarana dan prasarana penanganan bagi PMKS; 8. Koordinasi pemerintah pusat ke pemerintah daerah perihal bantuan sosial kurang optimal, sehingga penyaluran belum maksimal; 9. Rendahnya aksesibilitas dan keberfungsian pada anak terlantar, lansia, WRSE dan Fakir Miskin serta disabilitas; 10. Masih adanya stigma negatif terhadap eks nabi di keluarga dan masyarakat; 11. Bantuan yang diberikan masih belum tepat sasaran
Tenaga Kerja	7.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penyerapan lulusan pelatihan UPT PeLatihan Kerja di perusahaan; 2. Kurangnya tenaga instruktur yang kompeten sesuai dengan kejuruan yang ada; 3. Informasi lowongan kerja yang diperoleh pencari kerja terbatas; 4. Keahlian dan keterampilan pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; 5. <i>Attitude</i> pencari kerja yang rendah; 6. Belum optimalnya lembaga kerja sama Bipartit dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di perusahaan; 7. Belum efektifnya penanganan HPI pada tahap Bipartit; 8. Tingkat pendidikan pencari kerja masih rendah; 9. Produktivitas dan etos kerja masih rendah; 10. Minat masyarakat untuk berwirausaha masih rendah; 11. Adanya pelanggaran hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja; 12. Kurangnya pengetahuan terkait peraturan perundangan ketenagakerjaan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak; 2. Perempuan Berpolitik DPRD baru tercapai 14% dari target 30%; 3. Perempuan yang menduduki jabatan Eselon II baru 16%;

Urusan Pembangunan Daerah	No	Permasalahan
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Perempuan Kepala Keluarga yang mendapatkan pelatihan hanya sebesar 19,72%; 5. Belum optimalnya Pembinaan Tenaga Pendidik terhadap Sekolah Ramah Anak; 6. Belum optimalnya Pelatihan Konvensi Hak Anak; 7. Belum optimalnya sosialisasi tentang Pembentukan Forum Anak, Pusat Informasi Sahabat Anak, Ruang Bermain Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas dan Rumah Sakit Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa dan Kelurahan Layak Anak, dan Tempat Ibadah Layak Anak; 8. Belum optimalnya Tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak; 9. Belum optimalnya cakupan kreativitas anak; 10. Belum optimalnya sosialisasi kepada Dunia Usaha dan Media Massa dalam upaya pencapaian Kabupaten Layak Anak.
Pangan	9.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Tangerang cukup secara kuantitas namun belum beragam secara kualitas; 2. Anomali iklim; 3. Harga bahan baku pakan unggas tidak stabil (sering terjadi lonjakan); 4. Skala usaha pemeliharaan ternak rakyat masih rendah dan perorangan; 5. Belum optimalnya sistem pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD); 6. Masih rendahnya tata kelola, pendampingan pengelolaan dan jumlah Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang aktif; 7. Belum berkembangnya kelembagaan dan jaringan distribusi pangan; 8. Masih rendahnya penanganan daerah dan efisiensi serta efektivitas rentan rawan pangan yang terprogram melalui penumbuhan dan pengembangan desa mandiri pangan; 9. Masih rendahnya capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH).
Pertanahan	10.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada kesepakatan harga pengadaan tanah antara pemilik tanah dengan harga yang ditetapkan oleh tim apresial.
Lingkungan Hidup	11.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan hidup; 2. Tindak pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang masih banyak;

Urusan Pembangunan Daerah	No	Permasalahan
		3. Kurangnya penyediaan lahan RTH; 4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah; 5. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.	1. Adanya anomali data kependudukan; 2. Belum optimalnya pegawai memenuhi standar sesuai dengan Anjab ABK; 3. Masih sedikitnya OPD yang memanfaatkan data kependudukan; 4. Keterbatasan pegawai untuk ditugaskan ke Kecamatan dan Desa/Kelurahan; 5. Inovasi pada pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil belum optimal.
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13.	1. Tingkat kompetensi SDM Aparatur Desa dan Perangkat Desa belum sesuai yang diharapkan; 2. Desa tidak mampu memaksimalkan potensi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; 3. Tingkat kompetensi Lembaga Kemasyarakatan Desa rendah; 4. Kurangnya pembinaan dan pendampingan Lembaga Ekonomi Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.	1. Penurunan Laju Pertumbuhan penduduk di setiap tahunnya 2. Penurunan angka IPBK di Kabupaten Tangerang 3. Belum terimplementasinya satu data kependudukan untuk perencanaan pembangunan; 4. Belum optimalnya penyediaan data kependudukan berbasis NIK; 5. Kurangnya sosialisasi tentang pembangunan kependudukan; 6. Belum adanya dasar hukum kebijakan GDPK untuk pengendalian penduduk; 7. Kurangnya kapasitas SDM dalam menemukan dampak kependudukan; 8. Terbatasnya jumlah bimbingan teknis pembangunan kependudukan yang dilakukan; 9. Masih terdapatnya sikap ego program/sektoral dalam pelaksanaan pembinaan ber-KB; 10. Belum adanya keterpaduan dan kolaborasi pelaksanaan program KB; 11. Kurangnya strategi, desain program dan inovasi dalam pelaksanaan advokasi dan KIE

Urusan Pembangunan Daerah	No	Permasalahan
		<ul style="list-style-type: none"> 12. Tidak adanya PKB/PLKB di tingkat Kecamatan dan Desa. 13. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat akan penggunaan kontrasepsi jangka panjang; 14. Rendahnya Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan terus menurun dari tahun 2018 hingga tahun 2022; 15. Tingginya rata-rata jumlah anak per keluarga; 15. Menurunnya cakupan anggota bina keluarga remaja ber-KE; 17. Rendahnya cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi; 13. Rendahnya faskes yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan.
Perhubungan	15.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pelayanan transportasi yang terintegrasi, kinerja jaringan pelayanan angkutan umum, pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan, dan pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi; 2. Kurangnya perlengkapan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas jalan; 3. Tingginya kebutuhan transportasi moda darat; 4. Tingkat kesadaran dari masyarakat dalam berlalu lintas masih rendah.
Komunikasi dan Informatika	16.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya penyelenggaraan informasi publik oleh badan publik dan pengelolaan komunikasi publik; 2. Belum optimalnya kegiatan kemitraan dengan masyarakat, media, dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan; 3. Jumlah layanan hubungan media masih belum optimal; 4. Sarana dan prasarana persandian belum memadai; 5. Belum adanya jaringan komunikasi sandi antar perangkat daerah; 6. Belum optimalnya keamanan sistem persandian; 7. Kebijakan, strategi, dan perencanaan tata kelola pemerintah berbasis elektronik belum optimal; 8. Layanan pemerintah dan publik berbasis elektronik belum optimal; 9. Data sektoral dan publikasi statistik yang dihasilkan oleh produsen data belum seluruhnya terinput dalam portal data; 10. Kurangnya operator pengolah data; 11. Kurangnya pemahaman terkait pengisian dan manfaat metadata;

Urusan Pembangunan Daerah	No	Permasalahan
		12. Pengumpulan data dari produsen data yang lambat dari batas waktu yang ditentukan. 13. Beberapa konfirmasi hasil analisis data sektoral yang tidak ditanggapi oleh produsen data; 14. Belum optimalnya pemanfaatan data sektoral untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi pembangunan; 15. Kurangnya kegiatan statistik yang mendapatkan rekomendasi dari BPS
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	17.	1. Rendahnya kualitas dan pemasaran produk usaha mikro; 2. Rendahnya jumlah penerima dana bergulir untuk koperasi/usaha mikro melalui UPT UPDB; 3. Rendahnya kualitas dan daya saing koperasi.
Penanaman Modal	18.	1. Inkonsistensi peraturan; 2. Ketersediaan lahan terkendala dengan masalah sertifikasi, izin bangunan dan zona lahan; 3. Kualitas infrastruktur relatif masih rendah; 4. Promosi yang dilakukan belum maksimal; 5. Belum maksimalnya pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal; 6. Belum tersosialisasikannya secara merata informasi penggunaan aplikasi perizinan berusaha dan non perizinan secara online kepada masyarakat; 7. Belum ada kajian sarana, prasarana dan SDM dalam penyelenggaraan PTSP; 8. Belum optimalnya sosialisasi tata cara pembuatan LKPM; 9. Belum optimalnya pemantauan dan berjalannya tindak lanjut dari hasil kegiatan pengawasan dan pembinaan bagi pelaku usaha yang belum membuat LKPM; 10. Belum optimalnya pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang belum melaporkan LKPM; 11. Kurangnya jumlah SDM yang menguasai LKPM; 12. Kurangnya pelatihan dari Kementerian Investasi/BKPM terkait LKPM kepada SDM di daerah
Kepemudaan dan Olah Raga	19.	1. Belum optimalnya daya saing pemuda dalam pembangunan; 2. Adanya pertumbuhan organisasi pemuda baru sehingga masih membutuhkan

Urusan Pembangunan Daerah	No	Permasalahan
		pembinaan dari Pemerintah Daerah; 3. Minimnya prestasi olahraga tingkat Nasional dan Internasional; 4. Belum optimalnya peran organisasi pemuda dalam pembangunan;
Kebudayaan	20.	1. Minimnya pelaku seni tradisional untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya; 2. Minimnya sarana prasarana kesenian tradisional yang dimiliki oleh sanggar seni; 3. Rendahnya antusiasme masyarakat terhadap penyelenggaraan kesenian dan kebudayaan; 4. Kurangnya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Objek Peningkatan Kebudayaan yang bergerak; 5. Kurangnya kontribusi pemerintah akan penghargaan terhadap pelaku seni budaya.
Perpustakaan	21.	1. Sarana dan prasarana belum optimal sesuai standar; 2. Kompetensi SDM Perpustakaan masih terbatas; 3. Promosi layanan perpustakaan masih belum masif; 4. Belum optimalnya jumlah koleksi judul perpustakaan; 5. Belum tercapainya IPLM dan TGM;
Kearsipan	23.	1. Pelaksanaan akuisisi dan penyerahan arsip statis masih belum maksimal; 2. Tidak tersedianya Arsiparis; 3. Belum terkelolanya arsip sesuai NSPK.
Perikanan	24.	1. Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan Masih Rendah; 2. Belum optimalnya sistem pemasaran produk; 3. Tingginya biaya operasional produksi; 4. Masih rendahnya produktivitas pelaku usaha; 5. Rendahnya angka konsumsi ikan;
Pariwisata	25.	1. Kurangnya perencanaan, rencana aksi, dan pengembangan kawasan strategis pariwisata; 2. Minimnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata; 3. Kurangnya tata kelola kawasan strategis pariwisata; 4. Kurangnya perlindungan hasil kreativitas usaha pariwisata;

Urusan Pembangunan Daerah	No	Permasalahan
		5. Kurangnya promosi dan publikasi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri; 6. Kurangnya data pariwisata baik dalam dan luar negeri; 7. Kurangnya pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar dan lanjutan; 8. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata; 9. Rendahnya kunjungan wisata yang ada di Kabupaten Tangerang.
Pertanian	26.	1. Masih rendahnya sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang pengolahan pangan berbahan baku palawija serta tepung umbi-umbian lokal; 2. Masih rendahnya kesediaan benih unggul; 3. Masih rendahnya ketersediaan sarana produksi pertanian dan peternakan; 4. Kurangnya ketersediaan air dan lahan pertanian; 5. Masih tingginya risiko serangan hama dan penyakit tanaman; 6. Masih rendahnya kualitas serta daya saing produk pertanian; 7. Masih rendahnya surveilans penyakit hewan, jumlah medik veteriner dan paramedik veteriner, serta pelayanan kesehatan hewan; 8. Masih rendahnya kualitas produk hewan; 9. Masih rendahnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha sektor pertanian; 10. Masih rendahnya manajemen pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian; 11. Rendahnya kontribusi pertanian/perkebunan terhadap PDRB.
Perdagangan	27.	1 Kurang optimalnya promosi dan informasi potensi produk IKM dan masih minimnya penggunaan Gerai Tangerang Gemilang yang ditujukan sebagai sarana promosi produk UMKM lokal; 2 Masih naik turunnya kegiatan ekspor bersih perdagangan; 3 Belum optimalnya perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar karena beberapa kendala, seperti masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran konsumen terkait hak dan kewajibannya sebagai konsumen menurut undang-undang dan juga regulasi yang belum mengatur mekanisme detail tentang penyidikan dan aturan pelaksana pengurusan sengketa konsumen
Kelautan dan Perikanan	28	Nilai tukar nelayan yang masih fluktuatif setiap tahunnya

Urusan Pembangunan Daerah	No	Permasalahan
Perindustrian	29.	Kurang optimalnya Pembinaan kepada pelaku IKM.
Transmigrasi	30.	Terbatasnya jumlah kuota transmigran yang diterima oleh Pemerintah Daerah tidak sebanding dengan animo masyarakat yang ingin bertransmigrasi.
Administrasi Pemerintahan	31.	Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Pengawasan	32.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum Semua Pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi APIP; 2. Jumlah SDM APIP belum sesuai rekomendasi Menpan-RB; 3. Belum seluruhnya mempunyai Peta risiko korupsi dan rencana tindak pengendalian korupsi.
Perencanaan	33.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas dan profesionalisme SDM perencana yang belum merata; 2. Kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung; 3. Belum tersedianya SOP dalam implementasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah; 4. Kepatuhan PD untuk memedomani dokumen perencanaan masih rendah; 5. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan; 6. Kurang memadainya data-data pendukung dalam penyusunan dokumen perencanaan; 7. Aplikasi yang dibangun belum terintegrasi antara satu dengan yang lainnya; 8. Belum terintegrasinya dokumen RKPD dengan pokok-pokok pikiran DPKD; 9. Belum optimalnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran. 10. Belum optimalnya pendampingan kepada PD terkait pelaksanaan monev
Keuangan	34.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terjadi kendala dalam layanan tatalaksana pendataan dan pendaftaran wajib pajak serta penilaian dan penetapan pajak daerah ; 2. Masih terjadi kendala dalam layanan penyelesaian keberatan; 3. Masih terdapat realisasi laporan yang belum mencerminkan fakta dan data lapangan; 4. Masih terdapat pengusaha belum mendaftar sebagai WP; 5. Perlunya pemberlakuan sanksi terhadap WP yang tidak taat; 6. Kompetensi dan pemahaman PPK pada OPD terhadap penyusunan Laporan Keuangan belum merata dan masih rendahnya perhatian Kepala OPD pada

Urusan Pembangunan Daerah	No	Permasalahan
		proses penyusunan Laporan Keuangan; 7. Masih banyak tanah milik daerah yang belum bersertifikat dan masih terdapat perbedaan pada beberapa jenis BMD antara kondisi di lapangan dengan catatan <i>database</i> ; 8. Banyak BMD berupa tanah dan gedung yang tidak terpakai untuk operasional Pemerintah Daerah dan tidak dilakukan pemeliharaan rutin atau pengawasan secara rutin; 9. Masih tingginya program/kegiatan yang tidak terlaksana; 10. Masih rendahnya pengeluaran pemerintah untuk belanja pendidikan;
Kepegawaian	34.	Belum optimalnya Manajemen ASN

Sumber : Data Diolah, 2023

Permasalahan pembangunan ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Tangerang dapat dipecahkan sebagai berikut .

Tabel 4.3
 Analisis Permasalahan sebagai Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Belum optimalnya pelayanan dasar Kesehatan dan Pendidikan	Permasalahan kinerja sektor Pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> •Belum maksimalnya pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun •Belum maksimalnya pelaksanaan PAUD •Belum maksimalnya pelaksanaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan •Belum optimalnya Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Permasalahan kinerja sektor Perpustakaan dan Kearsipan: <ul style="list-style-type: none"> •Rendahnya kunjungan perpustakaan •Belum terbangunnya sinergitas antar instansi terkait •Belum tertib administrasi kearsipan dalam perangkat daerah
		Permasalahan kinerja sektor Kesehatan: <ul style="list-style-type: none"> • Tingginya angka kematian Ibu dan Bayi • Tingginya angka <i>sunting</i> dan KEK • Belum optimalnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular • Rendahnya mutu pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit • Rendahnya SDM Kesehatan • Belum optimalnya sediaan farmasi dan alat kesehatan
Belum optimalnya daya saing pemuda dalam pembangunan	Permasalahan kinerja sektor Kepemudaan: <ul style="list-style-type: none"> •Masih rendahnya partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan •Minimnya Akses Pemuda dalam pengembangan kewirausahaan 	
Belum optimalnya destinasi wisata dan pengembangan seni budaya	Permasalahan kinerja sektor Pariwisata: <ul style="list-style-type: none"> •Belum optimalnya pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif 	

Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
		Permasalahan kinerja sektor Kebudayaan: •Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan kelembagaan seni budaya •Rendahnya minat masyarakat terhadap seni budaya asli daerah •Belum tersedianya sarana prasarana pembinaan seni budaya daerah
	Belum optimalnya pemberdayaan peran gender	Permasalahan kinerja sektor Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak : • Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan • Belum optimalnya kualitas hidup anak • Masih tingginya kekerasan pada perempuan dan anak
	Tingginya angka kelahiran	Permasalahan kinerja sektor kependudukan dan keluarga berencana : •Belum tersedianya database kependudukan berbasis Keluarga hasil pendataan Keluarga •Belum optimalnya pencapaian program KB dan pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera
	Belum efektifnya Pemeliharaan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Permasalahan kinerja sektor ketentraman dan ketertiban : •Belum optimalnya penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum •Belum optimalnya penanganan kejadian sosial kemasyarakatan dan kebencanaan •Kapasitas dan Kuantitas SDM Satpol PP, Satlinmas, dan PPNS yang masih perlu ditingkatkan •Belum optimalnya penegakan Perda dan Perkada •Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana

Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
Belum Optimalnya Pembangunan Ekonomi Dan Masih Tirgginya Kesenjangan Pendapatan Penduduk	Belum optimalnya kontribusi sektor-sektor PDRB	Permasalahan kinerja sektor Perikanan: Pendapatan pelaku usaha perikanan masih rendah
		Permasalahan kinerja sektor Pertanian dan Pangan: <ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) maupun Cadangan Pangan Masyarakat (CPM) • Masih rendahnya penanganan daerah rentan rawan pangan berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) • Masih rendahnya penganekaragaman/diversifikasi pangan dan keamanan pangan • Masih rendahnya produksi dan produktivitas pertanian • Tingginya Potensi Risiko Terjangkitnya Penyakit Hewan Menular • Masih rendahnya kapasitas SDM Pertanian (ASN dan Petani/Peternak)
		Permasalahan kinerja sektor Perindustrian dan Perdagangan: Kurang optimalnya Pembinaan kepada pelaku IKM
		Permasalahan kinerja sektor Pariwisata: <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya daya Tarik destinasi pariwisata • Rendahnya pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual • Rendahnya publikasi dan promosi pariwisata
	Belum optimalnya realisasi investasi	Permasalahan kinerja sektor penanaman : <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pertumbuhan investasi daerah • Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan • Belum tercapainya target realisasi investasi daerah
	Lambatnya pertumbuhan IKM dan UM	Permasalahan kinerja sektor koperasi dan Usaha Mikro : <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kualitas dan pemasaran produk usaha mikro • Masih rendahnya jumlah penerima dana bergulir untuk koperasi/usaha mikro melalui UPT UPDB • Rendahnya kualitas dan daya saing koperasi

Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
	Belum optimalnya tingkat kemandirian desa	Permasalahan kinerja sektor pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa : Rendahnya kemampuan desa dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan
	Rendahnya jumlah angkatan kerja	Permasalahan kinerja sektor tenaga kerja : Tingginya angka pengangguran
	Belum optimalnya penanganan rehabilitasi sosial PMKS	Permasalahan kinerja sektor sosial : Belum optimalnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Belum optimalnya pencapaian Nilai SAKIP	Permasalahan kinerja sektor Perencanaan: Belum terwujudnya perencanaan yang berkualitas
		Permasalahan kinerja sektor Sekretariat Daerah: Belum Optimalnya Fasilitas dan Pelayanan Perangkat Daerah
		Permasalahan kinerja sektor Pengawasan: <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kapabilitas APIP • Belum optimalnya tingkat maturitas SPIP terintegrasi
	Belum optimalnya pendapatan asli daerah (PAD)	Permasalahan kinerja sektor pendapatan daerah : Belum optimalnya kontribusi PAD terhadap Perangkat Daerah
	Belum terintegrasinya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Permasalahan kinerja sektor keuangan : Penggunaan aplikasi SIPD yang belum dapat diintegrasikan sesuai dengan kebutuhan lokal daerah.
	Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola manajemen ASN	Permasalahan kinerja sektor Kepegawaian : <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya perencanaan ASN • Belum optimalnya kinerja dan pengembangan kompetensi ASN
	Belum optimalnya penyelenggaraan SPBE	Permasalahan kinerja sektor komunikasi dan informasi : <ul style="list-style-type: none"> • Masih belum optimalnya program pengelolaan informasi dan komunikasi publik • Belum optimalnya kualitas persandian dan keamanan informasi • Belum optimalnya penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten
	Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan standar operasional prosedur	Permasalahan kinerja sektor Sekretariat Daerah: <ul style="list-style-type: none"> • Belum Optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah • Belum Optimalnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan • Belum Optimalnya Fasilitas dan Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
		<p>Permasalahan kinerja sektor Sekretariat DPRD: Belum maksimalnya penyusunan dan pembahasaran raperda</p> <p>Permasalahan kinerja sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya anomali data kependudukan • Belum optimalnya Pegawai memenuhi standar sesuai dengan Anjab ABK • Belum optimalnya kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil • Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan oleh OPD maupun instansi layanan publik lainnya • Belum optimalnya inovasi pada pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil <p>Permasalahan kinerja sektor Perpustakaan dan Kearsipan: •Belum optimalnya layanan kepada pemustaka</p> <p>Permasalahan kinerja sektor Kewilayahan : Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan tingkat kewilayahan/kecamatan</p>
Belum Optimalnya Pemenuhan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur	Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur jalan	<p>Permasalahan Kinerja Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Kurang memadainya kapasitas jalan kabupaten •Kurang nya daerah resapan air dan Daya tampung Saluran/Sungai/Situ •Kurang nya kapasitas jaringan Daerah Irigasi •Tingginya Sedimentasi/Endapan/Sampah pada Drainase Jalan
	Belum optimalnya penataan ruang kota	<p>Permasalahan Kinerja Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Masih banyak bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang •Belum Optimalnya Data Sektoral untuk Mendukung Penataan Ruang •Masih banyaknya bangunan yang tidak berijin maupun tidak sesuai dengan izin yang diperoleh •Belum optimalnya pemanfaatan kawasan bangunan dan fasilitas public •Belum adanya konsep penataan bangunan dan lingkungan yang terintegrasi
	Belum optimalnya peningkatan hunian yang layak bagi	Permasalahan Kinerja Sektor Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:

Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
	masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • PSU perumahan belum terkelola dengan baik • Belum optimalnya penanganan lingkungan permukiman kumuh • Masih belum idealnya kondisi Tpu Pemerintah
		Permasalahan Kinerja Sektor Pertanahan: Permintaan pemilik tanah lebih tinggi dari harga <i>appraisal</i>
	Belum optimalnya sarana prasarana perhubungan	Permasalahan kinerja sektor perhubungan : Belum optimalnya aksesibilitas transportasi
	Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dan ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan	Permasalahan kinerja sektor Lingkungan Hidup : <ul style="list-style-type: none"> • Masih tingginya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup • Masih tingginya tingkat timbulan sampah • Kurangnya penyediaan lahan RTH
	Belum optimalnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana	Masih rendahnya kinerja pelayanan sub urusan kebencanaan

Sumber : Data Diolah, 2023

4.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan sebuah kondisi atau permasalahan daerah yang bersifat mendesak yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam merancang pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi entitas dimasa mendatang. Secara konseptual, isu strategis memiliki kemungkinan bahwa belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah suatu saat nanti.

4.2.1 Isu Internasional

4.2.1.1 *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Sejak tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs/TFB*) tahun 2015-2030 secara resmi menggantikan *Millennium Development Goals (MDGs)*. SDGs adalah agenda pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs secara eksplisit bertujuan memberantas kemiskinan dan kelaparan, mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara, memperbaiki manajemen air dan energi, dan mengambil langkah urgen untuk mengatasi perubahan iklim.

SDGs menegaskan pentingnya upaya mengakhiri kemiskinan agar dilakukan bersama dengan upaya strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menerapkan langkah kebijakan sosial untuk memenuhi aneka kebutuhan sosial (seperti pendidikan, kesehatan, proteksi sosial, kesempatan kerja), dan langkah kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim dan proteksi lingkungan. Berbeda dengan MDGs yang hanya memiliki 8 tujuan, SDGs memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target yang meliputi berbagai isu pembangunan berkelanjutan, 17 tujuan global tersebut diuraikan sebagai berikut :

- 1) Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*) – Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di setiap tempat,
- 2) Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*) – Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan gizi, dan meningkatkan pertanian yang berkelanjutan;

- 3) Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (*Good Health and Well-being*) – Menjamin hidup yang sehat dan meningkatkan kesehatan / kesejahteraan bagi semua pada semua usia;
- 4) Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*) – Menjamin pendidikan yang berkualitas, inklusif dan adil, meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua;
- 5) Kesetaraan Gender (*Gender Equality*) – Menjamin kesetaraan gender, serta memberdayakan seluruh perempuan;
- 6) Air Bersih dan Sanitasi (*Clean Water and Sanitation*) – Menjamin ketersediaan, dan pengelolaan air bersih, serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang;
- 7) Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*) – Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau (terbeli), andal, berkelanjutan, dan modern, bagi semua orang;
- 8) Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (*Decent Work and Economic Growth*) – Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif; partisipasi penuh dalam pekerjaan yang produktif, jenis pekerjaan yang layak bagi semua orang;
- 9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure*) – Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong industrialisasi yang inklusif, dan berkelanjutan serta membina inovasi;
- 10) Mengurangi Kesenjangan (*Reduced Inequalities*) – Mengurangi ketidaksetaraan di dalam, dan di antar negara;
- 11) Keberlanjutan Kota dan Komunitas (*Sustainable Cities and Communities*) – Menjadikan kota, dan pemukiman manusia inklusif, aman, dan berkelanjutan;
- 12) Konsumsi dan Produksi Bertanggungjawab (*Responsible Consumption and Production*) – Menjamin pola produksi, dan konsumsi yang berkelanjutan;
- 13) Aksi terhadap Iklim (*Climate Action*) – Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim, serta dampaknya;
- 14) Kehidupan Bawah Laut (*Life Below Water*) – Melindungi dan menggunakan lautan, laut, dan sumberdaya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan yang berkelanjutan;
- 15) Kehidupan di Darat (*Life on Land*) – Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan penggunaan ekosistem bumi secara berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, menghentikan dan membalik degradasi (kerusakan) tanah, dan kehilangan biodiversitas (keragaman hayati);

- 16) Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian (*Peace, Justice and Strong Institutions*) – menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan, memberikan akses terhadap keadilan bagi semua, membangun lembaga yang efektif, akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), dan inklusif, pada semua level; dan
- 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnership for the Goals*) – Memperkuat implementasi, dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam melaksanakan SDGs, melalui Perpres Nomor 59 tahun 2017 diamanatkan bahwa perlu adanya penyelarasan SDGs dengan rencana pembangunan nasional baik pada RPJPN maupun RPJMN. Selain itu, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Aksi Daerah TPB. Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten Tangerang berkewajiban untuk berkontribusi dalam penyusunan rencana aksi daerah TPB dan melaksanakannya sesuai kewenangan daerah otonom.

4.2.1.2 *Asean Economic Community (AEC)*

AEC adalah produk yang dihasilkan oleh ASEAN karena adanya globalisasi yang membentuk sebuah kesatuan ekonomi (*unity*) di kawasan Asia Tenggara. Indonesia yang berada di wilayah ASEAN tentunya harus menyiapkan berbagai aspek untuk bersaing di pasar bebas ASEAN ini. Hingga saat ini daya saing nasional, dan daerah di Indonesia masih rendah. Tanpa mengabaikan adanya beragam indikator daya saing internasional bagi suatu negara, maka penguatan fungsi kelembagaan dalam rangka membangun daya saing nasional, dan daerah (provinsi, kabupaten atau kota) di Indonesia sangat diperlukan.

Maka dari itu, perlu dilakukan telaah 5W+1H dalam memasuki era AEC. Pertama "*what*" yaitu apa yang dimaksud daya saing. Konsep daya saing pada umumnya dikaitkan dengan kemampuan suatu institusi kota, daerah, wilayah, atau negara dalam mempertahankan, atau meningkatkan keunggulan kompetitif yang dimiliki secara berkelanjutan. Menghadapi globalisasi ekonomi yang bercirikan persaingan bebas maka suatu daerah hanya akan bertahan apabila mempunyai daya saing yang tinggi (halwani, 2002:423). Dengan demikian, daya saing merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang dimulai dari penyusunan kebijakan, sampai pada implementasi, dan evaluasinya berbasis fungsi kelembagaan, dan tata kelola yang handal, serta pembangunan infrastruktur pendukungnya.

Kedua, “*Why*” yaitu mengapa daya saing negara perlu dibangun, dan ditingkatkan pada era AEC. Karena daya saing negara yang kuat secara keseluruhan menjadi pilar daya saing nasional. Ketiga “*When*”, kapan daya saing negara perlu dibangun dan ditingkatkan. Indikator daya saing negara perlu diperkuat seiring waktu di semua bidang, sektor, dan kegiatan yang semakin signifikan dengan seiring waktu. Keempat “*Where*” yaitu dimana lokus yang tepat bagi penguatan indikator daya saing negara. Level analisis penguatan kembali indikator daya saing negara bukan hanya pada tingkat nasional dan provinsi, melainkan perlu diturunkan level analisisnya pada tingkat Kabupaten/Kota, sesuai dengan level daerah otonom yang diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015, bahkan sampai pada unit-unit pemerintahan yang terendah (kecamatan, kelurahan/desa) di masyarakat, sebagai lokus pengembangan daya saing berbasis kompetensi lokal yang dimiliki.

Kelima “*Who*” yaitu siapa saja aktor yang berkepentingan terhadap penguatan, dan peningkatan daya saing negara pada era AEC. Aparat pemerintah terlibat dalam pelaksanaan fungsi negara pada 3 bidang prioritas pembangunan lainnya yaitu kesejahteraan rakyat; politik, hukum, keamanan; serta perekonomian. Keenam, “*How*” yaitu, bagaimana cara membangun, mempertahankan, dan meningkatkan daya saing negara atau daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Salah satunya melakukan penataan dan revitalisasi fungsi kelembagaan di berbagai bidang dan sektor.

4.2.1.3 *Asean Free Trade Area (AFTA)*

Isu strategis internasional yang sangat berpengaruh terhadap Kabupaten Tangerang adalah AFTA. Dengan terbukanya pasar bebas di kawasan ASEAN, maka aliran perdagangan barang dan jasa, investasi, dan perpindahan tenaga kerja antar negara ASEAN tak ada lagi hambatannya.

4.2.2 Isu Nasional

4.2.2.1 Isu RPJMN 2020-2024

Penyusunan RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 harus memperhatikan dokumen RPJMN tahun 2020-2024. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan SDGs dengan target-target dari 17 TPB/SDGs beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi

fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas SDM, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Lima prioritas presiden juga diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan RPJMD 2020-2024 dilengkapi dengan isu strategis dalam setiap agenda, sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan. Isu strategis yang mencakup agenda ini adalah sebagai berikut :

- a) Keberlanjutan Sumber Daya Alam (SDA)
- b) Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi
- c) Transformasi Struktural Berjalan Lambat
- d) Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan

Pembangunan kewilayahan merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024 yang diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis utama yaitu ketimpangan antar wilayah dengan sasaran antara lain: (i) meningkatnya pemerataan antarwilayah (KBI-KTI, Jawa-luar Jawa); (ii) meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah; (iii) meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah; (iv) meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah. Pada 2020-2024, pengembangan wilayah dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan, sebagaimana tercermin dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis wilayah pulau. Isu strategis yang mencakup agenda ini adalah sebagai berikut :

- a) Ketimpangan Antar Wilayah

3. Meningkatkan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

Struktur penduduk Indonesia ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif. Perubahan struktur penduduk ini akan membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bonus demografi (demographic dividend) yang dalam jangka menengah dan panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menghantarkan Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas. Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Isu strategis yang mencakup agenda ini adalah sebagai berikut :

- a) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
- b) Perlindungan Sosial bagi Seluruh Penduduk
- c) Pemenuhan Layanan Dasar
- d) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
- e) Pengentasan Kemiskinan
- f) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

4. Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental merupakan gerakan nasional untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan melalui internalisasi nilai-nilai esensial revolusi mental pada individu, masyarakat, keluarga, institusi sosial, sampai dengan lembaga-lembaga negara. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan nasional. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang diperlukan untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing, sehingga mampu berkompetisi dengan negara-negara lain. Melalui gerakan revolusi mental, nilai budaya dan kearifan lokal dapat memperkuat kohesi sosial, kerukunan, toleransi, gotong royong, dan kerja sama antarwarga sebagai syarat utama bagi keberhasilan pembangunan nasional.

Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman. Untuk itu dalam RPJMN Tahun 2020-2024, revolusi mental terus dilanjutkan secara lebih holistik dan integratif yang bertumpu pada: (1) revolusi mental dalam sistem pendidikan dengan menekankan nilai-nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi

pekerti dalam pembelajaran; (2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan dengan pembudayaan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas; dan (3) revolusi mental dalam sistem sosial dengan pembudayaan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam institusi keluarga dan interaksi antarwarga. Isu strategis yang mencakup agenda ini adalah sebagai berikut :

- a) Melemahnya Ideologi Pancasila dan Ketahanan Budaya Bangsa
- b) Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia
- c) Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti
- d) Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran Agama
- e) Belum Kukuhnya Moderasi Beragama untuk Memperkuat Toleransi dan Kerukunan
- f) Belum Optimalnya Peran Keluarga
- g) Rendahnya Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas

5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Beberapa hal yang masih memerlukan percepatan antara lain pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi, pemerataan pelayanan dasar di seluruh Indonesia, dan pembangunan infrastruktur untuk menopang perkembangan berbagai kota seiring dengan urbanisasi di Indonesia. Diperlukan upaya inovatif untuk mendorong peran serta investasi masyarakat dan badan usaha melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan skema pembiayaan kreatif lainnya. Isu strategis yang mencakup agenda ini adalah sebagai berikut :

- a) Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau
- b) Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman
- c) Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan
- d) Keselamatan dan Keamanan Transportasi
- e) Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur
- f) Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi
- g) Konektivitas Jalan
- h) Konektivitas Kereta Api
- i) Konektivitas Laut

- j) Konektivitas Udara
 - k) Konektivitas Darat
 - l) Transportasi Perkotaan
 - m) Energi dan Ketenagalistrikan Perkotaan
 - n) Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan
 - o) Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman di Perkotaan
 - p) Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan
 - q) Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan
 - r) Akses serta Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan
 - s) Kecukupan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan
 - t) Penuntasan Infrastruktur TIK
 - u) Pemanfaatan Infrastruktur TIK
 - v) Fasilitas Pendukung Transformasi Digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
- Penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam berpotensi menghambat keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Memperhatikan kondisi tersebut, upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020-2024. Isu strategis yang mencakup agenda ini adalah sebagai berikut :
- a) Deplesi SDA dan Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup
 - b) Meningkatnya Tindak Pelanggaran Hukum SDA dan Lingkungan Hidup
 - c) Tingginya Risiko Bencana di Indonesia
 - d) Risiko Bencana terkait Karakteristik Geologi
 - e) Peningkatan Potensi Dampak dan Risiko Bencana Hidrometeorologi akibat Perubahan Iklim
 - f) Masih Lemahnya Tata Kelola dan Pembiayaan Penanggulangan Bencana di Daerah
 - g) Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi GRK melalui Pembangunan Rendah Karbon
 - h) Dukungan terhadap Pembangunan Rendah Karbon

7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum Dan Keamanan Dan Transformasi Pelayanan Publik

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Pembangunan Polhukhankam memperhatikan perkembangan yang terjadi di dalam dan luar negeri. Arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 (lima) bidang yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Pemantapan Sistem Hukum Nasional, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional. Isu strategis yang mencakup agenda ini adalah sebagai berikut :

- a) Konsolidasi Demokrasi
- b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
- c) Penegakan Hukum Nasional
- d) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
- e) Menjaga Stabilitas Keamanan Sosial

Berdasarkan arah pembangunan wilayah di RPJMN 2020-2024, wilayah Kabupaten Tangerang adalah bagian dari lokasi prioritas RPJMN dalam Kawasan Jabodetabek.

4.2.2.2 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi (RB) menurut Sedarmayanti (2009:72), merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektivitas, efisien, dan akuntabilitas, sementara menurut KemenPAN RB pada hakikatnya reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Adapun beberapa faktor yang mendorong dilakukannya reformasi birokrasi menurut Miftah Thoha (2008:106-108) adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya kebutuhan melakukan pembaharuan;
- 2) Memahami perubahan yang terjadi di lingkungan strategis nasional;
- 3) Memahami strategis yang terjadi di lingkungan global; dan

- 4) Memahami perubahan yang terjadi dalam paradigma manajemen pemerintahan.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 adalah rancangan induk arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional dalam kurun waktu 2010-2025. Adapun isu reformasi birokrasi dalam paparan Oscar (2019) adalah sebagai berikut :

- 1) *Leadership*;
- 2) Politisasi dan Kooptasi Birokrasi
- 3) Administrasi dan Kelembagaan;
- 4) Budaya Birokrasi;
- 5) Transformasi Digital;
- 6) Globalisasi dan TPB;
- 7) SDM Aparatur; dan
- 8) *Closed System Bureaucracy dan Silo Mentality*.

Program Birokrasi diharapkan akan mampu berdampak optimal sehingga sesuai dengan instruksi Presiden, Kementerian PANRB sebagai instrumen untuk mempercepat pencapaian agenda prioritas pemerintah terutama penanggulangan kemiskinan dan peningkatan investasi membentuk program Reformasi Birokrasi Tematik sebagai salah satu strategi yang mengurai aspek tata kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, formulasi program/kegiatan sehingga lebih tepat sasaran, penyediaan dukungan IT melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan sebagainya. Perbedaan antara RB Tematik dengan RB General adalah sebagai berikut :

Reformasi Birokrasi Tematik :

1. RB tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai serta menjawab permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
2. Melalui RB Tematik, instansi pemerintah dapat lebih fokus dalam menyelesaikan setiap masalah terkait tata kelola yang berhubungan langsung dengan kinerja yang diharapkan (kemudahan investasi, kemiskinan dan administrasi pemerintah).
3. Penerapan RB Tematik akan mempercepat manfaat program pembangunan, sehingga dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat secara cepat.

Reformasi Birokrasi General :

1. RB General mempunyai sasaran jangka panjang untuk mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien, dan lincah.
2. RB General berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah.
3. RB General mempunyai fokus pada tercapainya budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN Profesional.

Kabupaten Tangerang dinilai sudah menerapkan tata kelola manajemen kepegawaian yang baik, sudah mendekati dengan Sistem Merit yang ditetapkan oleh KASN. Salah satu yang menjadi tantangan dalam pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Tangerang adalah masalah kurangnya SDM di jajaran aparatur pemerintah daerah. Oleh karena itu, saat ini jumlah pegawai Non ASN di Kabupaten Tangerang masih cukup tinggi. Sesuai dengan mandat dalam Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain PNS dan PPPK. Oleh karena itu, ketimpangan Non ASN dan ASN harus segera diatasi agar pemerintahan dapat tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan adanya kebijakan penghapusan status Non ASN tersebut.

4.2.3 Isu Regional

4.2.3.1 Isu Strategis Provinsi DKI Jakarta

Isu Strategis Provinsi DKI Jakarta disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti :

- a. Permasalahan strategis berdasarkan hasil analisa kinerja pemerintahan;
- b. Prioritas dan arah pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025;
- c. Kebijakan dalam RTRW 2030;
- d. Agenda pembangunan, program prioritas, kegiatan prioritas dan *Major Projects* dalam RPJMN 2020-2024;
- e. Kebijakan dalam RPJMD Prov/Kab/Kota Penyangga;
- f. Hasil evaluasi capaian SDGs. Serta;
- g. Isu aktual yang sedang terjadi.

Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan 6 (enam) isu strategis pembangunan, diantaranya :

1) Ketahanan terhadap Bencana

Sebagai salah satu kota yang berkomitmen dalam penurunan dampak iklim melalui C40 *Cities Climate Leadership Group*, Jakarta mendorong perubahan

nyata melalui kolaborasi dan pembelajaran melalui praktik terbaik. Rentannya kondisi Provinsi DKI Jakarta terhadap banjir dan genangan tidak terlepas dari demografi Jakarta, yang memiliki tingkat kemiringan 0- 3% dan 13 aliran sungai di dalam wilayahnya.

2) Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik

Peran DKI Jakarta sebagai ibukota negara, yang mempunyai kedudukan khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kedudukan tersebut, Provinsi DKI Jakarta menjadi panutan dan acuan bagi provinsi lain dalam upaya penyediaan optimal bagi masyarakat.

3) Ketahanan Ekonomi Inklusif

Pada tahun 2021, capaian indeks Gini DKI Jakarta kembali mencapai angka 0,411 dimana angka Gini ini naik dari 0.399 pada tahun 2020. Peran kelompok penduduk dengan pendapatan 40% terendah dan 40% menengah sudah lebih rendah dibandingkan dengan 20% penduduk dengan pendapatan teratas di DKI Jakarta.

4) Kota Berkelanjutan Berbasis Digital dan Komunitas

Angka timbulan sampah di Jakarta diperkirakan 3,4 liter tiap orang per hari dan kepadatan sampah adalah 0,20 kg/liter, yang berarti bahwa angka timbulan sampah adalah 0,68 kg tiap orang tiap hari (DLH, 2018).

5) Manusia Sehat, Berdaya Saing dan Setara

Jakarta, dengan segala keunggulan sumber daya manusia dibandingkan di daerah lain, mampu menjadi Center of Human Development bagi Indonesia yang membawa kontribusi positif bagi daerah lainnya. Kondisi pendidikan di DKI Jakarta secara umum sudah menunjukkan capaian yang cukup baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dalam rangka menciptakan pelayanan pendidikan prima bagi masyarakat.

6) Pemerataan Pembangunan

Peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat adalah tuntutan klasik dan utama yang menjadi tantangan Jakarta sebagai kota metropolitan. Tingkat kemiskinan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mencapai 14,87% dan di wilayah administrasi Kota Jakarta Utara mencapai 6,78% pada tahun 2020, jauh dibawah tingkat kemiskinan Provinsi yang mencapai 4,69%. Sedangkan wilayah lain di bawah rata-rata

Provinsi yaitu Jakarta Pusat sebesar 4,51%, Jakarta Timur sebesar 4,16%, Jakarta Selatan 4,34% dan Jakarta Barat sebesar 4,25%.

4.2.3.2 Isu Strategis Provinsi Banten

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa mendatang. Isu strategis juga dapat berupa potensi daerah, yang belum dimanfaatkan secara optimal, yang jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Isu strategis Provinsi Banten untuk Dokumen RPD Tahun 2023-2026 merupakan sintesis dari permasalahan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2017-2022, permasalahan pembangunan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya, serta masalah yang muncul dari setiap bidang urusan, permasalahan pada kondisi saat ini yang relevan dan telaah berbagai dokumen. Isu strategis Provinsi Banten Tahun 2023-2026 dirumuskan sebagai berikut.

1. Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Daya Saing Perekonomian;
3. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim;
4. Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk memberikan gambaran terhadap isu strategis disampaikan penjelasannya sebagai berikut.

1) Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sebagaimana diketahui, persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten relatif menurun selama kurun waktu lima tahun terakhir, apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan di provinsi lainnya di Pulau Jawa. Persentase penduduk miskin di Provinsi Banten merupakan nilai terendah kedua setelah DKI Jakarta. Meskipun demikian, masih terjadi kesenjangan persentase penduduk miskin antar kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak memiliki persentase jumlah penduduk miskin yang lebih banyak jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten secara keseluruhan. Hal lain, angka IPM 72,72 juga menunjukkan secara umum kenaikan positif namun terjadi perlambatan, perlu terobosan luar biasa khususnya pada daerah yang angka IPM nya masih jauh tertinggal yaitu Lebak dan Pandeglang. Perlambatan ini dapat mengindikasikan adanya permasalahan dan kesenjangan kemajuan pada pelaksanaan SPM di dua

wilayah tersebut dan juga di sektor-sektor pendukung IPM, seperti Pendidikan dan Kesehatan.

Dari sisi Pendidikan, rasio murid-guru di jenjang SMK melebihi batas ideal (15:1), selain itu juga persentase guru bersertifikat untuk tingkat pendidikan menengah ke atas belum mencapai 50% dan Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 16 – 18 tahun masih di bawah rata – rata APS nasional. Sementara dari sisi kesehatan, yang harus menjadi fokus adalah masih tingginya angka prevalensi stunting tercatat 24,5 dengan target nasional 16. Angka kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup) dan angka kematian bayi (Per 1000 kelahiran hidup) dimana target nasional untuk Provinsi Banten masih belum bisa tercapai lewat capaian yang ada saat ini.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Banten mempunyai komitmen untuk pengurangan pengangguran, yang merupakan salah satu masalah penting yang harus segera dituntaskan, dimana jumlah pengangguran di Provinsi Banten pada Agustus 2021 sebanyak 1,22 juta jiwa dan diupayakan turun signifikan di tahun 2026. Masalah pengangguran yang sebagaimana diketahui bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran, kondisi ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyiapan SDM berkualitas dan berdaya saing sehingga mampu terserap di pasar tenaga kerja

2) Daya Saing Perekonomian

Ekonomi Provinsi Banten diproyeksikan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa isu harus diselesaikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten utamanya perlu menciptakan iklim usaha industri yang kondusif untuk mereka tetap menjadikan Banten sebagai wilayah investasi. Sebelum pandemi, terdapat indikasi hilangnya daya saing Provinsi Banten dalam beberapa tahun terakhir.

Tak lupa pula akan fokus dan dukungan pemerintah lebih serius terhadap sektor unggulan lain seperti pertanian, perikanan dan perdagangan khususnya Usaha kecil menengah untuk turut menjadi perhatian dalam rangka peningkatan kontribusi perekonomian di Banten selain dari sektor industri. Hal lain adalah belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif, hal tersebut

disebabkan oleh belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas infrastruktur, serta dukungan amenities pariwisata. Selain hal tersebut masih belum meratanya pembangunan kewilayahan di Banten dan juga pemenuhan infrastruktur dasar di seluruh wilayah Provinsi Banten.

Hal lain pula, terjadinya penurunan realisasi penanaman modal asing yang disebabkan oleh realisasi investasi yang masih berkutat pada wilayah Banten utara karena ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata. Dampak pandemi COVID-19 dan pembatasan sosial di berbagai negara dan wilayah di Indonesia menyebabkan terjadinya dinamika ekonomi yang cukup tinggi dan meningkatkan ketidakpastian dalam berusaha sehingga menyebabkan keragu-raguan pasar dalam berinvestasi. Pemerataan pembangunan perlu diwujudkan melalui pemenuhan sarana prasarana permukiman seperti penyediaan perumahan layak huni, penataan wilayah kumuh peningkatan cakupan pelayanan air bersih dan air baku, pengolahan persampahan dan limbah.

Pelaksanaan pembangunan yang berbasis tata ruang dan lingkungan menjadi dasar peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga menjadi penting untuk diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan wilayah dan sektoral. Penataan tata ruang dan pembangunan wilayah perlu juga memperhatikan RTRW dan melihat potensi di setiap daerah Kabupaten Kota yang dalam hal ini dibagi menjadi WKP I, WKP II dan WKP III, dimana di setiap WKP sudah ada desain pembangunan kewilayahan dan prioritas pembangunan berdasarkan daya dukung lingkungan

3) Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pendekatan paradigma pembangunan dewasa ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) namun secara lebih komprehensif pada pendekatan kualitas pembangunan yang mengkomodir keberlanjutan (*sustainability*) dan pemerataan. Isu global terkait dengan perubahan iklim perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah termasuk Provinsi Banten. Perubahan iklim yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi diyakini akan memberikan dampak yang justru dapat membebani perekonomian di suatu wilayah. Kesadaran akan hal tersebut menuntut implementasi kebijakan pembangunan daerah yang ramah lingkungan termasuk di dalamnya langkah antisipatif dalam bentuk mitigasi penurunan kualitas lingkungan

hidup. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih keras dari seluruh stakeholder yang memiliki peranan dalam aksi bersama penurunan emisi Gas Rumah Kaca.

Selain itu, proses pembangunan di masa mendatang diharapkan tidak hanya menghadirkan kesejahteraan untuk wilayah, kelompok dan generasi tertentu namun pembangunan dengan manfaat dan dampak yang dirasakan oleh wilayah, kelompok dan berbagai generasi secara terus menerus. Selain itu, dalam setiap pelaksanaan program pembangunan juga mengedepankan mitigasi akan dampak yang ditimbulkan termasuk fenomena alam dalam hal ini terkait kebencanaan

4) Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu strategis bagi Provinsi Banten, khususnya terkait dengan optimalisasi capaian Reformasi Birokrasi, seperti diketahui skor indeks capaian reformasi birokrasi Provinsi Banten masih berada pada kategori B dengan nilai 61,12. Hal ini menunjukkan Pemerintah Daerah perlu menjaga komitmen yang kuat untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten serta perbaikan terus menerus dalam akuntabilitas kinerja pembangunan.

Tata kelola pemerintahan ini pun tidak terlepas dari harmonisasi hubungan antar tingkat pemerintahan, kelembagaan pusat juga lembaga vertikal lainnya dimana diperlukan juga keharmonisan dengan aparat penegak hukum dalam rangka menjaga ketahanan nasional di Provinsi Banten dalam upaya kondusifitas wilayah dari berbagai isu SARA dan penegakan ideologi Pancasila yang juga penting dalam mewujudkan pemerintahan yang berwibawa.

4.2.3.3 Isu Strategis Kabupaten Tangerang

1) Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Hijau serta Masih Tingginya Angka Kesenjangan Pendapatan Penduduk

Belum optimalnya pengembangan ekonomi daerah menjadi salah satu isu strategis di Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang memiliki fokus terkait dengan *green economy* atau ekonomi hijau yang mana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, serta mengurangi resiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Pembangunan berkelanjutan yang difokuskan oleh Kabupaten Tangerang saat ini mengedepankan perencanaan pembangunan rendah karbon. Pembangunan rendah karbon telah diamanatkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024 dalam

salah satu dari 7 agenda pembangunan, yaitu agenda pembangunan membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Dampak sosial yang ditimbulkan akibat pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan akan menyebabkan berbagai ketimpangan, salah satunya adalah ketimpangan distribusi pendapatan, pengangguran serta kemiskinan. Dalam kasus angka kemiskinan, Kabupaten Tangerang telah mengalami penurunan angka kemiskinan berdasarkan pada tahun 2013-2019, pada tahun 2019 merupakan persentase terendah yaitu 5,14 persen. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin mengalami kenaikan menjadi 6,23 persen ini disebabkan pandemi covid-19 yang belum mereda sampai dengan tahun 2021 yang mencapai angka 7,12 persen, dengan berbagai program untuk mengatasi pandemi pada tahun 2022 terjadi penurunan angka kemiskinan menjadi 6,92 persen.

Dengan kondisi sumber daya manusia yang berlimpah, yang ditandai adanya Angkatan Kerja berusia muda dan produktif, harus diarahkan pada peningkatan kemampuan keterampilan dalam pengolahan sumber daya potensi yang dimiliki daerah. Penyediaan penawaran tenaga kerja yang berlimpah, tanpa ada keterkaitannya dengan kebutuhan dunia usaha, tentu akan sia-sia. Salah satu yang perlu dikembangkan dalam dunia pendidikan ada pendidikan vokasi. Selain sekolah, keterkaitan tenaga kerja dengan usaha dapat juga melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Tentu dalam upaya pelayanan peningkatan keterampilan tenaga kerja ini, perlu diidentifikasi kebutuhan dasar, baik peralatan maupun teknologinya.

Salah satu isu yang mulai berkembang dan dihadapi oleh para pencari kerja di Kabupaten Tangerang adalah mulai sempitnya lapangan pekerjaan karena banyak industri dan pabrik yang pindah beroperasi di daerah lain. Hal ini menjadi tantangan bersama bagaimana akhirnya para pencari kerja harus mulai diberikan pelatihan dan bimbingan agar bisa lebih mandiri dengan berwirausaha. Selain itu, permasalahan lain seperti kurangnya fasilitas modal untuk UM dan IKM, informasi potensi dan peluang investasi yang kurang detail dan tidak memudahkan calon investor dalam mengakses dan mendapatkan informasi menjadi satu isu strategis di Kabupaten Tangerang. Tantangan yang dimiliki Kabupaten Tangerang terkait dengan IKM dan UM adalah pendataan dan pembinaan IKM dan UM yang belum berkelanjutan dan merata. Beberapa IKM juga terkendala terkait dengan legalitas produk,

sehingga IKM yang tidak memiliki legalitas memilih untuk melalui agen karena birokrasi sangat sulit untuk mendapatkan legalitas tersebut.

Untuk wilayah kebijakan kabupaten, penekanan pemulihan di sektor unggulan adalah yang berkaitan dengan kewenangan kabupaten sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adaptasi baru berupa kemampuan IKM memenuhi kebutuhan di sektor yang sedang meningkat contohnya adalah pada sektor kesehatan. Khusus untuk sektor pertanian, dalam jangka waktu perencanaan ini diharapkan tidak terjadi penurunan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Tangerang. Hal tersebut dikarenakan, semakin berkurangnya lahan pertanian karena pembangunan yang gencar dijalankan. Sektor unggulan lain yang harus dikuatkan karena menjadi ikon dan wajah Kabupaten Tangerang adalah sektor industri dan perdagangan, yang belakangan ini mengalami penurunan karena beberapa hal.

Sektor lain yang perlu dikembangkan adalah sektor pariwisata dan sektor ekonomi kreatif. Pariwisata tidak akan berkembang bila tidak diselesaikan "*bottleneck*" yang menghambat proses pengembangan pariwisata itu sendiri. Ekonomi kreatif dikembangkan berdasarkan potensi sumber daya lokal yang dimiliki Kabupaten Tangerang. Selain itu, ekonomi kreatif juga menstimulasi lahirnya wirausaha lokal yang dapat mengangkat keunggulan, budaya, dan karakteristik wilayah sehingga dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, bahkan memicu daya saing daerah.

2) Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi. Perencanaan pembangunan, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja ditetapkan merupakan beberapa indikator yang digunakan untuk terbentuknya sebuah tata kelola pemerintah yang baik. Perencanaan pembangunan yang strategis diperlukan agar pemerintah daerah tahu terkait dengan apa yang harus dikerjakan, kapan harus dikerjakan, sumber daya yang diperlukan dan berapa target yang harus. Pengukuran kinerja juga digunakan sebagai alat untuk menganalisis secara tepat terkait dengan informasi-informasi dan data-data yang diperoleh yang mana nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Evaluasi kinerja difungsikan untuk mengetahui seberapa baik tingkat penguasaan pegawai terhadap kompetensi yang telah ditetapkan

dan juga untuk mengetahui terkait kendala-kendala yang dialami pegawai sehingga nantinya bisa ditemukan penyelesaian atas kendala tersebut.

Beberapa indikator lain yang digunakan Kabupaten Tangerang terkait dengan pembentukan tata kelola pemerintahan yang baik adalah terkait dengan: Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Kabupaten Tangerang serta pemerataan kualitas aparatur pada setiap organisasi perangkat daerah diperlukan sehingga Kabupaten Tangerang mampu melakukan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, bersih, dan berintegritas untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata; Revitalisasi reformasi administrasi juga digunakan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang memiliki visi ke depan, bersih, akuntabel, transparan, tertib administrasi, taat peraturan, dan partisipatif; Peningkatan tata kelola keuangan dan aset daerah yang profesional dan akuntabel dalam mewujudkan pendapatan dan belanja daerah yang optimal, pengawasan yang efektif, serta laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan; Pengembangan kelembagaan dan regulasi yang mampu menciptakan peraturan-peraturan berkualitas yang menjadi dasar pengambilan keputusan, implementasi dan evaluasi kebijakan, serta terwujudnya penegakan peraturan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun; Pengembangan *Smart City* untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dengan tata kelola pemerintahan sehari-hari sehingga terwujud efisiensi dalam pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan warga Kabupaten Tangerang yang modern; Pemanfaatan teknologi untuk proses pengadaan barang dan jasa seperti *e-purchasing* sehingga terwujud pengadaan barang dan jasa yang akuntabel, transparan, efisien, dan efektif. Sedangkan tantangan yang mungkin dihadapi oleh Kabupaten Tangerang terkait dengan pengelolaan pemerintahan adalah terkait dengan belum optimalnya kualitas SDM yang memiliki *skill* dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya. Adapun SDM yang ada saat ini dapat ditingkatkan kompetensinya dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan baik secara struktural maupun fungsional melalui BPSDM sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

3) Belum Optimalnya Pelayanan Dasar pada Sektor Sosial Budaya

Terdapat isu mengenai kurangnya jumlah SDM di bidang sosial budaya yang dapat menghambat kinerja pelayanan publik, yang salah satunya terjadi di bidang Pendidikan. Fenomena semacam ini dikhawatirkan dapat mengurangi

mutu dan kualitas sektor pendidikan karena terbagunya fokus pengajar kepada lebih dari satu tugas yang harus dilaksanakan sekaligus. Isu pembangunan SDM perlu menjadi prioritas daerah Kabupaten Tangerang sebagaimana dicanangkan juga di RPJMN 2020-2024. Apabila bonus demografi ini dapat ditransformasikan dengan baik melalui SDM unggul dan berdaya saing, maka bonus demografi dapat memicu terjadinya bonus kesejahteraan dengan lompatan ekonomi yang signifikan.

Pada bidang kesehatan juga terdapat isu yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu kurangnya jumlah tenaga kesehatan dan pengelolaan manajemen rumah sakit menyebabkan rendahnya mutu dan kualitas pelayanan kesehatan. Permasalahan gizi di Kabupaten Tangerang turut menjadi isu strategis yaitu terkait dengan *stunting*. Hal ini diduga dikarenakan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat terutama mengenai asupan makanan yang bergizi dan kurang terjaganya lingkungan dari sisi buruknya fasilitas sanitasi air bersih.

Pada sektor kependudukan, isu kepemilikan dokumen kependudukan masih menjadi perhatian dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelengkapan administrasi kependudukan dan data kependudukan. Selain itu, masih terdapatnya kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus akibat tindak kekerasan, isu tersebut sejalan dengan arahan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang mengarahkan Kabupaten/Kota mempunyai sistem berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Isu strategis lainnya adalah belum optimalnya kapasitas lembaga kebudayaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan masih terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas dasar, masih terdapat keluarga pra-sejahtera yang tidak memiliki rumah layak huni, dan proses verifikasi data PMKS yang masih tumpang tindih, yang menyebabkan adanya perbedaan jumlah PMKS yang terekam.

4) Pemenuhan dan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah serta memedomani prioritas nasional. Infrastruktur adalah struktur fasilitas dasar yang digunakan untuk kepentingan umum, baik fisik maupun non fisik yang

dibangun oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur bukan hanya sekedar membangun atau mengadakan kebutuhan infrastruktur tetapi juga sinkronisasi untuk terciptanya keterpaduan pengembangan infrastruktur yang melibatkan berbagai macam pihak.

Isu strategis yang ada di Kabupaten Tangerang yang pertama adalah terkait sektor bina marga yang masih kurang memadainya kapasitas jalan kabupaten yang mana masih banyak kerusakan jalan. Hal ini ditandai dengan proporsi jalan yang memenuhi kualifikasi dalam kondisi mantap adalah 77,07% pada tahun 2021. Kabupaten Tangerang juga memiliki daerah rawan banjir yang cukup tinggi persentasenya, hal ini dikarenakan masih kurangnya daerah resapan air dan daya tampung dari Drainase Jalan/Sungai/Situ yang ada disekitar daerah rawan banjir. Selain itu, tingginya sedimentasi/endapan/dan sampah pada drainase jalan juga menjadi salah satu pemicu terjadinya banjir.

Kedua, aksesibilitas transportasi di Kabupaten Tangerang termasuk terminal dan transportasi umum menjadi isu strategis di Kabupaten Tangerang. Pelayanan transportasi di Kabupaten Tangerang belum terintegrasi karena belum ada Kajian Rencana Umum Jaringan Transportasi yang disusun. Tingginya kebutuhan transportasi moda darat juga masih belum semua teratasi karena belum terdapat pemetaan jaringan trayek sesuai kebutuhan baik dalam trayek maupun yang tidak dalam trayek, Rencana Pembangunan terkait BRT, LRT, dan MRT serta Terminal Tipe A dan C yang terintegrasi juga menjadi isu strategis di Kabupaten Tangerang.

Ketiga, rumah tangga dikatakan mempunyai akses sanitasi apabila rumah tangga yang ada di Kabupaten Tangerang sudah memiliki fasilitas buang air besar (BAB) baik sendiri maupun bersama dan tangki septik sebagai tempat pembuangan akhir kotoran/tinja (TPAT). Kondisi wilayah pedesaan dan perkotaan yang ada di Kabupaten Tangerang menimbulkan adanya perbedaan tingkat sanitasi. Kawasan kumuh di Kabupaten Tangerang masih terhitung tinggi, yaitu sebesar 29,66% pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena rendahnya kualitas infrastruktur permukiman dan masih terbatasnya kemampuan SDM dalam penyediaan infrastruktur tersebut.

Keempat, pencemaran dan kerusakan di Kabupaten Tangerang juga menjadi isu strategis daerah, karena kondisi lingkungan hidup yang masih belum baik dan juga terkait pencemaran yang masih rendah, khususnya pada pengelolaan persampahan. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap

pengelolaan sampah dan kurangnya sarana prasarana pengelolaan sampah menjadi faktor yang menyebabkan belum optimalnya pengelolaan sampah di Kabupaten Tangerang.

5) Pemekaran Wilayah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur terkait dengan Pemekaran Daerah. Pemekaran yang dimaksud adalah pemecahan Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota menjadi dua atau lebih Daerah baru atau penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam satu Daerah Provinsi menjadi satu Daerah Baru. Pemekaran daerah baru diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan daerah. Rencana pemekaran di wilayah Kabupaten Tangerang merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pemerintahan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur.

4.2.3.4 Telaah Kebijakan RTRW Kabupaten Tangerang

Penelaahan terhadap isu strategis RTRW bertujuan untuk mewujudkan keselarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang telah disusun. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031, tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tangerang 2011-2031 adalah untuk mewujudkan Kabupaten Tangerang sebagai pusat kegiatan industri, permukiman, dan pengembangan kawasan Perkotaan Baru Pantura yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing menuju masyarakat madani yang didukung oleh pertanian yang berkelanjutan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan. Berikut adalah rincian Kawasan Strategis yang ada di Kabupaten Tangerang :

Tabel 4.4 Rincian Kawasan Strategis Kabupaten Tangerang

Kawasan Strategis	Lokasi
Kawasan Hutan Lindung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Kronjo 2. Kecamatan Kemiri 3. Kecamatan Mauk 4. Kecamatan Pakuhaji 5. Kecamatan Teluknaga 6. Kecamatan Kosambi
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Solear 2. Kecamatan Cisoka 3. Kecamatan Tigaraksa 4. Kecamatan Panongan 5. Kecamatan Jambe 6. Kecamatan Legok 7. Kecamatan Kelapa Dua 8. Kecamatan Cisauk
Kawasan Sempadan Pantai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Kosambi 2. Kecamatan Teluknaga 3. Kecamatan Pakuhaji 4. Kecamatan Sukadiri 5. Kecamatan Mauk 6. Kecamatan Kemiri 7. Kecamatan Kronjo
Kawasan Sempadan Sungai	<ol style="list-style-type: none"> a. Sungai Besar : <ul style="list-style-type: none"> • Sungai Cisadane • Sungai Cidurian • Sungai Cimanceuri b. Sungai Kecil : <ul style="list-style-type: none"> • Sungai Ciapus • Sungai Ciasin • Sungai Cibarebeg • Sungai Cibiuk/Cilaku • Sungai Cibolang • Sungai Cibugel • Sungai Cicalengka • Sungai Cicayur • Sungai Cigonteng • Sungai Cigarukgak • Sungai Cimauk • Sungai Cijantra • Sungai Cikakalen • Sungai Cikolear • Sungai Cileuleus • Sungai Cilongo • Sungai Cilogok • Sungai Cilowong • Sungai Cimanauh • Sungai Cimanceuri • Sungai Cimatuk • Sungai Cipasilian • Sungai Cipayeun • Sungai Cirajeun • Sungai Cirangon • Sungai Cirarab

Kawasan Strategis	Lokasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Sungai Cirumpak • Sungai Cisauk • Sungai Cisabi • Sungai Ciselatip • Sungai Cisoge • Sungai Cituis • Kali Ketapang • Kali Perancis • Kali Kramat • Kali Apung • Kali Asin • Sungai Tahang
<p>Kawasan Sekitar Danau atau Situ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Situ Pondok dan Rawa Warung Rebo (Kecamatan Sindangjaya) 2. Situ Cilongok (Kecamatan Pasarkemis) 3. Situ Pasirgadung (Kecamatan Cikupa) 4. Situ Kelapa Dua (Kecamatan Kelapa Dua) 5. Situ Cihuni (Kecamatan Pagedangan) 6. Situ Jengkol (Kecamatan Solear) 7. Rawa Ranca Ilat dan Rawa Waluh (Kecamatan Kronjo) 8. Rawa Garukgak, Rawa Patrasana, Rawa Gabus, Rawa Genggong (Kecamatan Kresek) 9. Rawa Setingin (Kecamatan Kemiri) 10. Rawa Gede (Kecamatan Sukadiri) 11. Rawa Kepuh (Kecamatan Pakuhaji) 12. Rawa Gelam (Kecamatan Pasar Kemis) 13. Rawa Jambu (Kecamatan Rajeg)
<p>Kawasan Cagar Budaya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Tigaraksa : Situs Makam Gajah Barong, Situs Makam Nyi Mas Gamparan, Situs Makam Buyut Siyam, Situs Makam Syech Mubarak, Situs Makam Buyut Sandi, Situs Makam Buyut Mali, Situs Makam Nyi Sarinem, Situs Makam Ki Mas Laeng, Situs Makam Raden Mas Kuncung, dan Situs Makam Wali Ahmad. 2. Kecamatan Mauk : Sisa fosil <i>Elephant Maximus</i>, Situs Bangunan Pekong Soekong, dan Situs Makam Dewi Neng 3. Kecamatan Cikupa:

Kawasan Strategis	Lokasi
	<p>Situs Sumur Tujuh dan Situs Makam Nyi Mas Aulia</p> <p>4. Kecamatan Sukadiri : Situs Sumur Tua dan Situs Rawa Kidang</p> <p>5. Kecamatan Pakuhaji : Situs Makam Panjang Syech Daud dan Situs Makam Wali Riman</p> <p>6. Kecamatan Teluknaga : Situs Penggilingan Tebu</p> <p>7. Kecamatan Kronjo: Situs Makam Jaga Laut</p> <p>8. Kecamatan Solear : Situs Makam Solear</p> <p>9. Kecamatan Kosambi : Situs Makam Panjang Dadap</p> <p>10. Kecamatan Sepatan : Situs Makam Buyut Mijah, Situs Makam Buyut Akhir, Situs Makam Kepuh, dan Situs Makam Buyut Resem</p> <p>11. Kecamatan Cisauk: Situs Makam Mede, Situs Makam Tubagus Taram, Situs Makam Ki Buyut Golokgog</p> <p>12. Kecamatan Sukamulya : Klenteng</p>
Kawasan Rawan Bencana	<p>a. Rawan Banjir :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kemiri • Kecamatan Kronjo • Kecamatan Sepatan • Kecamatan Sepatan Timur • Kecamatan Pakuhaji • Kecamatan Mauk • Kecamatan Rajeg • Kecamatan Balaraja • Kecamatan Tigaraksa • Kecamatan Jambe • Kecamatan Teluknaga • Kecamatan Pasar Kemis • Kecamatan Kresek • Kecamatan Cisoka • Kecamatan Solear • Kecamatan Jayanti <p>b. Rawan Gempa dan Tsunami :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kronjo • Kecamatan Kemiri • Kecamatan Mauk
Kawasan Pertanian	<p>a. Pertanian Lahan Basah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Sindang Jaya • Kecamatan Sepatan • Kecamatan Sepatan Timur • Kecamatan Pakuhaji

Kawasan Strategis	Lokasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Teluknaga • Kecamatan Kronjo • Kecamatan Mekar Baru • Kecamatan Sukamulya • Kecamatan Gunung Kaler • Kecamatan Kresek • Kecamatan Mauk • Kecamatan Rajeg • Kecamatan Kemiri • Kecamatan Sukadiri <p>b. Pertanian Lahan Kering :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Jambe • Kecamatan Panongan • Kecamatan Solear • Kecamatan Cisoka • Kecamatan Jayanti
Kawasan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Legok 2. Kecamatan Panongan 3. Kecamatan Pagedangan 4. Kecamatan Curug 5. Kecamatan Cikupa 6. Kecamatan Tigaraksa 7. Kecamatan Kemiri 8. Kecamatan Pasar Kemis 9. Kecamatan Rajeg 10. Kecamatan Teluknaga 11. Kecamatan Cisauk 12. Kecamatan Jambe 13. Kecamatan Cisoka 14. Kecamatan Mauk 15. Kecamatan Gunung Kaler
Kawasan Agropolitan	Kecamatan Sepatan dan Kecamatan Sepatan Timur
Kawasan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perikanan Tangkap <ul style="list-style-type: none"> • Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tipe C : <ol style="list-style-type: none"> a. PPI Kronjo, Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo b. PPI Cituis, Desa Surya Bahari, Kecamatan Pakuhaji • PPI Tipe D : <ol style="list-style-type: none"> a. PPI Benyawakan, Desa Lontar, Kecamatan Kemiri b. PPI Ketapang, Desa Ketapang, Kecamatan Mauk c. PPI Tanjung Pasir, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga d. PPI Dadap, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi 2. Perikanan Budi Daya <ul style="list-style-type: none"> • Perikanan budi daya air tawar berupa kolam tersebar di wilayah Kabupaten

Kawasan Strategis	Lokasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Perikanan budi daya air payau berupa kolam di Kecamatan Kronjo, Kecamatan Mekar Baru, Kecamatan Mauk, dan Kecamatan Kosambi <p>3. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan Komoditas Ikan Asin di Desa Suryabahari, Kecamatan Pakuhaji • Tempat Pelelangan Ikan (TPI) : <ul style="list-style-type: none"> a. Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga b. Desa Dadap Kecamatan Kosambi c. Desa Suryabahari Kecamatan Pakuhaji d. Desa Ketapang dan Desa Mauk Kecamatan Mauk e. Desa Lontar Kecamatan Kemiri f. Desa Kronjo Kecamatan Kronjo
Kawasan Minapolitan	Kecamatan Kronjo
Kawasan Industri	<p>1. Industri Besar :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Pasar Kemis • Kecamatan Cikupa • Kecamatan Jambe • Kecamatan Tigaraksa • Kecamatan Sepatan • Kecamatan Balaraja <p>2. Industri Sedang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Curug • Kecamatan Kosambi • Kecamatan Pakuhaji • Kecamatan Jayanti • Kecamatan Sepatan • Kecamatan Kelapa Dua • Kecamatan Pagedangan • Kecamatan Mekar Baru • Kecamatan Sindang Jaya • Kecamatan Legok • Kecamatan Cisauk • Kecamatan Kronjo • Kecamatan Panongan <p>3. Industri Kecil dan/atau Rumah Tangga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Pasar Kemis • Kecamatan Curug • Kecamatan Cisoka
Kawasan Pariwisata	<p>1. Pariwisata Alam :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pantai Tanjung Pasir dan

Kawasan Strategis	Lokasi
	<p>Pantai Mutiara Kecamatan Teluknaga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pantai Tanjung Kait Kecamatan Mauk • Pantai Dadap Kecamatan Kosambi • Pulau Cangkir Kecamatan Kronjo • Pantai Karang Serang Kecamatan Sukadiri • Situ Kelapa Dua dan Danau Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua • Situ Cihuni Kecamatan Pagedangan • Situ Pondok Kecamatan Pasar Kemis • Situ Garukgak dan Situ Patrasana Kecamatan Kresek <p>2. Pariwisata Budaya :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rumah asli peninggalan dan Situs makam Raden Aria Wangsakara, Situs makam Buyut Onang, Situs Makam Ki Muttaqin, Situs Makam Ki Yunus, dan Situs Makam Ki Musa di Kecamatan Pagedangan • Rumah kebaya tempo dulu, Situs Makam Nyi Mas Melati, dan Situ Makam Pangeran Jayakarta di Kecamatan Sukamulya • Situs Makam Gajah Barong, Situs Makam Nyi Mas Gamparan, Situs Makam Buyut Siyam, Situs Makam Syech Mubarak, Situs Makam Buyut Sandi, Situs Makam Buyut Mali, Situs Makam Nyai Saritinem, Situs Makam Ki Mas Laeng, Situs Makam Raden Mas Kuncung, dan Situs Makam Wali Ahmad di Kecamatan Tigaraksa • Sisa fosil <i>Elephant Maximus</i>, Situs Bangunan Pekong Soekong, dan Situs Makam Dewi Neng di Kecamatan Mauk • Situs Sumur Tujuh dan Situs Makam Nyi Mas Aulia di Kecamatan Cikupa • Situs Sumur Tua dan Situs Rawa Kidang di Kecamatan Sukadiri • Situs Makam Panjang Syech Daud dan Situs Makam Wali

Kawasan Strategis	Lokasi
	<p>Riman di Kecamatan Pakuhaji</p> <ul style="list-style-type: none"> • Situs Penggilingan Tebu di Kecamatan Teluknaga • Situs Makam Jaga Laut di Kecamatan Kronjo • Situs Makam Solear di Kecamatan Solear • Situs Makam Panjang Dadap di Kecamatan Kosambi • Situs Makam Buyut Mijah, Situs Makam Buyut Akhir, Situs Makam Kepuh, dan Situs Makam Buyut Resem di Kecamatan Sepatan • Situs Makam Gede, Situs Makam Tubagus Taram, Situs Makam Ki Buyut Galokgog di Kecamatan Cisauk <p>3. Pariwisata Buatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wisata Edukasi di Tanjung Pasir Resort • Penangkaran Buaya di Kecamatan Teluknaga • Bumi Perkemahan Kitri Bhakti, Desa Sukabakti, Kecamatan Curug • Wisata olahraga, Desa Sampora, Kecamatan Pagedangan dan Kelurahan Bojongnangka, Kecamatan Kalapa Dua
Kawasan Permukiman	<p>1. Permukiman Perkotaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Pagedangan • Kecamatan Cisauk • Kecamatan Legok • Kecamatan Kelapa Dua • Kecamatan Curug • Kecamatan Cikupa • Kecamatan Pasar Kemis • Kecamatan Balaraja • Kecamatan Sukamulya • Kecamatan Tigaraksa • Kecamatan Panongan • Kecamatan Jambe • Kecamatan Cisoka • Kecamatan Solear • Kecamatan Jayanti • Kecamatan Teluknaga • Kecamatan Sepatan • Kecamatan Sepatan Timur • Kecamatan Kosambi • Kecamatan Sindang Jaya <p>2. Permukiman Pedesaan :</p>

Kawasan Strategis	Lokasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kronjo • Kecamatan Mekar Baru • Kecamatan Gunung Kaler • Kecamatan Kresek • Kecamatan Mauk • Kecamatan Kemiri • Kecamatan Rajeg • Kecamatan Pakuhaji • Kecamatan Sukadiri
Kawasan Reklamasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Kosambi 2. Kecamatan Teluknaga 3. Kecamatan Pakuhaji 4. Kecamatan Sukadiri 5. Kecamatan Mauk 6. Kecamatan Kemiri 7. Kecamatan Kronjo
Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komplek Datasemen Arhanud Rudal 003 Falatehan Kecamatan Cikupa 2. Makorem 052 Jayakarta Kecamatan Kelapa Dua 3. Radar TNI AU Kecamatan Mauk 4. Polres Metropolitan Tigaraksa 5. Pos Angkatan Laut Tipe C Kecamatan Kronjo 6. Polsek tersebar di seluruh kecamatan 7. Koramil tersebar di seluruh kecamatan
Kawasan Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Jambe 2. Kecamatan Kronjo 3. Kecamatan Mauk 4. Kecamatan Kosambi 5. Kecamatan Pasar Kemis 6. Kecamatan Sepatan 7. Kecamatan Cikupa 8. Kecamatan Kelapa Dua 9. Kecamatan Curug 10. Kecamatan Kemiri
Kawasan Lingkungan	Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Teluknaga

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031

Tabel 4.5 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Kebijakan	Strategi
Pengembangan kawasan industri yang mempunyai daya saing dan nilai tambah dengan skala pelayanan nasional	<ol style="list-style-type: none"> a. Mempersiapkan ruang kawasan industri dibagian tengah Kabupaten dilengkapi dengan sarana prasarana yang berwawasan lingkungan; b. Meningkatkan dan membangun infrastruktur pendukung kawasan industri;

Kebijakan	Strategi
	c. Meningkatkan aksesibilitas antar pusat produksi dan pusat pemasaran.
Pengembangan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan pusat perkotaan dan pusat pelayanan kawasan sekitarnya di seluruh wilayah kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur permukiman dengan kegiatan industri dan pertanian; b. Mewujudkan pusat-pusat kegiatan wilayah baru yang dipromosikan sesuai dengan kewenangan Kabupaten; c. Mengembangkan fungsi pusat-pusat kegiatan yang ada di wilayah Kabupaten sesuai dengan hirarkinya; d. Meningkatkan intensitas pembangunan permukiman di tiap kecamatan melalui pola pembangunan vertical, pola perluasan dan/atau pengembangan kawasan permukiman dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan; e. Menata kawasan permukiman Tigaraksa untuk meningkatkan peran dan fungsi kawasan perkotaan Tigaraksa sebagai pusat pemerintahan dan ibukota Kabupaten; f. Meningkatkan aksesibilitas antar pusat perkotaan, desa, antar pusat perkotaan dan pusat desa.
Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru Pantura yang berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan reklamasi sepanjang pantai Utara Kabupaten dengan memperhatikan ekosistem sekitarnya; b. Membangun dan mengintegrasikan infrastruktur pendukung reklamasi Utara dengan wilayah daratan Kabupaten
Pengembangan pertanian berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan kawasan pertanian yang berkelanjutan untuk menunjang keberadaan kawasan permukiman dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Kabupaten; b. Menetapkan kawasan minapolitan di wilayah bagian utara Kabupaten; c. Menetapkan kawasan agropolitan di wilayah bagian tengah Kabupaten; d. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang mendukung pengembangan pertanian.
Peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan keamanan negara	<ul style="list-style-type: none"> a. Menudukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus kawasan pertahanan dan keamanan negara; b. Mengembangkan kegiatan budi daya secara efektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara; c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan

Kebijakan	Strategi
	dan keamanan negara sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan negara dengan kawasan budi daya terbangun; d. Membantu memelihara dan menjaga asset-aset pertahanan dan keamanan negara.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang 2024-2026 secara khusus disajikan pada bagian ini. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Kinerja tujuan dan sasaran dapat diukur dan selanjutnya dievaluasi dengan indikator yang ditetapkan. Indikator berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*), namun secara khusus indikator yang pada bagian ini merupakan alat ukur pencapaian kinerja hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Penentuan indikator berfungsi untuk memberikan batasan pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat berjalan dengan efisien dan efektif dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki. Perumusan tujuan, sasaran, dan indikator merupakan tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara menyeluruh.

Perumusan tujuan dan sasaran pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Berbeda dengan periode 2024-2026, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang menyebabkan adanya perbedaan pendekatan perumusan tujuan dan sasaran karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga untuk tetap menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tangerang merumuskan tema Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
2. Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025

5.1 Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025

Periode penyusunan RPD Kabupaten Tangerang 2024-2026 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tangerang 2005-2025, yang merupakan tahap Usaha Peningkatan Berkelanjutan. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten periode tersebut ditujukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan dalam RPJPD. Visi pembangunan sebagaimana tertuang dalam dalam RPJPD Kabupaten Tangerang 2005-2025 adalah:

“Kabupaten Tangerang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani.”

Yang dimaksud dengan :

- a. Daya Saing (Competitive Forces);

Kemampuan/kekuatan adaptasi terhadap perubahan internal dan eksternal untuk meraih keberhasilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik.

Daya Saing Daerah ; kemampuan perkonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan regional, nasional dan global.

Daya saing daerah terkait erat dengan Perkembangan Perekonomian Daerah, Keterbukaan, Sistem Keuangan, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam serta Potensi Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Sumber Daya Manusia, Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat, Kinerja Pemerintahan dan kebijakan Pemerintah, Manajemen dan Ekonomi Makro.

- b. Masyarakat Madani (*Civil Society*); adalah masyarakat yang menjadikan agama (hubungan vertikal dengan Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa dan hubungan horizontal antar sesama manusia dan makhluk hidup lainnya) sebagai tolok ukur kehidupan sehari-hari.

Masyarakat Madani menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan/ persaudaran / kekeluargaan (egaliterianisme), penghargaan didasarkan kepada prestasi, keterbukaan (inclusivisme) dan partisipasi, adil dan demokratis, merdeka (independent) dari segala "penguasaan" manusia atas manusia lainnya, juga masyarakat yang bebas (freedom) dari pertentangan sosial yang anarkis dan destruktif.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas maka ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai berikut :

- 1). Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia;
- 2). Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;
- 3). Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
- 4). Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan
- 5). Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Visi dan Misi tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan menetapkan sasaran pembangunan

Tabel 5. 1
Misi dan Sasaran RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025

Misi	Tujuan	Sasaran
1 Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia;	Mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang adil dan sejahtera yang beriman dan bertaqwa sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1 Terlaksananya sistem jaminan sosial dan penataan kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Tangerang yang terpadu, efisien dan efektif.
		2 Meningkatnya derajat dan mutu pendidikan masyarakat Kabupaten Tangerang.
		3 Meningkatnya derajat dan mutu kesehatan masyarakat Kabupaten Tangerang.
		4 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG).
		5 Berkembangnya karakter masyarakat Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdayasaing, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, dan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
		6 Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam seluruh bidang pembangunan.
		7 Makin kuatnya nilai-nilai keutamaan, berakhlak mulia, bermoral, beriman dan bertaqawa

Misi	Tujuan	Sasaran
		<p>yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Tangerang.</p> <p>8 Makin mantapnya budaya dan pemberdayaan masyarakat serta organisasi masyarakat Kabupaten Tangerang.</p>
2	Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;	<p>1 Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pada tahun 2025 pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Tangerang semakin meningkat, pengangguran menurun dan penduduk miskin berkurang.</p> <p>2 Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat Kabupaten Tangerang dari pengembangan sektor industri pengolahan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>3 Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat Kabupaten Tangerang dari pengembangan sektor pertanian modern yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi..</p> <p>4 Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat Kabupaten Tangerang dari pengembangan sektor jasa yang lebih bermutu dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi berdayasaing.</p>
3	Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;	<p>1 Terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan di Kabupaten Tangerang yang terpadu dan merata ke seluruh wilayah kecamatan.</p> <p>2 Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang efisien sesuai kebutuhan termasuk terpenuhinya pasokan listrik bagi hampir seluruh rumah tangga dan wilayah perdesaan dan .</p> <p>3 Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.</p> <p>4 Terpenuhinya penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan, permukiman dan fasilitas umum</p>

Misi	Tujuan	Sasaran
4	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan	<p>5 Terwujudnya efisiensi pemanfaatan dan pembangunan infrastruktur pos dan telekomunikasi</p> <p>1 Meningkatnya kapasitas aparat pemerintahan Kabupaten Tangerang yang profesional, kompeten, bersih, andal, berwibawa dan bertanggungjawab.</p> <p>2 Menguatnya peranan masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik</p> <p>3 Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.</p> <p>4 Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah Kabupaten Tangerang yang menjamin martabat kemanusiaan, keselamatan masyarakat, dan keutuhan wilayah dari ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan</p>
5	Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.	<p>1 Terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan yang makin merata ke seluruh wilayah Kabupaten Tangerang termasuk wilayah perdesaan.</p> <p>2 Terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.</p> <p>3 Terwujudnya kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Tangerang yang didukung oleh pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara serasi, seimbang, dan lestari.</p> <p>4 Terpeliharanya keragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam dan lingkungan Kabupaten Tangerang.</p> <p>5 Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat Kabupaten Tangerang dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.</p>

5.2 Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

Berpedoman pada visi dan misi RPJPD dan berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 serta memperhatikan RPJPMN 2020-2024 dan RPD Provinsi Banten 2023-2024, Pemerintah Kabupaten Tangerang merekonstruksi pencapaian visi RPJPD dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang 2024-2026.

Berdasarkan pertimbangan dari visi dan misi RPJPD Kabupaten Tangerang 2005-2025 dan berdasarkan pada analisis arah kebijakan RPJPD tahap IV serta memperhatikan isu strategis Kabupaten Tangerang, maka dirumuskan Tujuan Pembangunan RPD Kabupaten Tangerang 2024-2026 sebagai berikut :

Tabel 5. 2 Perumusan Tujuan RPD Kabupaten Tangerang 2024-2026

Misi RPJPD	Tujuan RPD
Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia dan Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional (Misi 1 dan Misi 3)	1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
	2 Meningkatkan Kondusifitas Daerah dengan Pengembangan Perilaku Masyarakat yang Berlandaskan Keagamaan, Toleransi, dan Gotong Royong
Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal dan Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional (Misi 2 dan Misi 3)	3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif
Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan	4 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik

Misi RPJPD	Tujuan RPD
Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.	5 Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur yang Terpadu dan Berkelanjutan

Secara lengkap cascading tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tangerang 2024-2026 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tujuan 1 dan 2 Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang 2024-2026



Gambar 5.1 Cascading Tujuan 1 dan 2 Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang 2024-2026



Gambar 5.2 Cascading Tujuan 3 Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang 2024-2026

Tujuan 4 Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang 2024-2026

TUJUAN	MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI DIGITALISASI DAN INTEGRASI PELAYANAN PUBLIK						
INDIKATOR TUJUAN	INDEKS REFORMASI BIROKRASI						
SASARAN	MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAH						
INDIKATOR SASARAN	NILAI SAKIP	NILAI INDEKS KEMANDIRIAN FISKAL	OPINI BPK	INDEKS PROFESIONALITAS ASN	MATURITAS SPIP TERINTEGRASI	INDEKS SPBE	INDEKS PELAYANAN PUBLIK
PERANGKAT DAERAH	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH; SEKRETARIS DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	INSPEKTORAT DAERAH	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SEKRETARIAT DAERAH; SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH; DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL; DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP; KECAMATAN

Gambar 5.3 Cascading Tujuan 4 Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang 2024-2026



Gambar 5.4 Cascading Tujuan 5 Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang 2024-2026

Tabel 5. 3
Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja			Kondisi Akhir	PD Penanggung jawab	PD Pendukung
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. $IPM_j = \frac{1}{3} \sum_j IndeksX_{ij}$ Keterangan: - Indeks X _{ij} : Indeks komponen IPM ke I untuk wilayah ke-j - i : 1, 2, 3 (urutan komponen IPM) - j : 1, 2 k (wilayah)	72,97	73,27	73,55	73,82	74,1	74,1		
		Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (mean years of schooling), dan harapan lama sekolah (expected years of schooling). Pada proses penentuan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian	0,68	0,68	0,69	0,7	0,71	0,71	Dinas Pendidikan,	Dinas Perpustakaan dan Arsip

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja			Kondisi Akhir	PD Penanggung jawab	PD Pendukung						
					2022	2023	2024	2025	2026									
				<table border="1"> <tr> <td>M a x</td> <td>85</td> <td>18</td> <td>15</td> <td>26.57</td> <td>2.352</td> </tr> </table> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I_{HLS} : Indeks Harapan Lama Sekolah - I_{RLS} : Indeks Rata-rata Lama Sekolah - $I_{pendidikan}$: Indeks Pendidikan 	M a x	85	18	15	26.57	2.352								
M a x	85	18	15	26.57	2.352													
		Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Indeks Kesehatan	<p>Indeks kesehatan merupakan ukuran yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada dimensi kesehatan, yaitu Umur Panjang dan Hidup Sehat. Indikatornya adalah Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) yang merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.</p> $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AHH: Angka Kematian menurut umur (Age Specific Death Rate/ASDR) - AHHmin: 20 - AHHmaks: 85 	0,77	0,775	0,78	0,79	0,8	0,8	Dinas Kesehatan	Dinas Perkim, RSUD						

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja			Kondisi Akhir	PD Penanggung jawab	PD Pendukung
					2022	2023	2024	2025	2026			
		Meningkatkan Daya Saing Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	<p>Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan alat ukur pembangunan pemuda di lima domain dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.</p> <p>Tahapan menghitung IPP:</p> <p>1. Menetapkan nilai skor setiap indikator</p> $\text{Skor indikator}_i = \frac{\text{Nilai indikator } y_i - \text{batas minimum}_i}{\text{Batas maksimum}_i - \text{batas minimum}_i} \quad \text{①}$ $\text{Skor indikator}_i = 1 - \frac{\text{Nilai indikator } y_i - \text{batas minimum}_i}{\text{Batas maksimum}_i - \text{batas minimum}_i} \quad \text{②}$ <p>2. Menghitung nilai indeks domain</p> $\text{Indeks Domain}_i = \frac{\text{skor } X_1 + \text{skor } X_2 \dots + \text{skor } X_n}{n} \times 10$ <p>3. Menghitung nilai IPP</p> $\text{IPP} = \frac{\text{Indeks Domain 1} + \text{Indeks domain 2} + \dots + \text{Indeks Domain 5}}{5}$	50,13	51	52	53	54	54	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Disdik, Disnaker, Dinkes, DPPPA
		Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	<p>Pemberdayaan gender dalam pembangunan diukur melalui indeks komposit Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini merupakan nama lain dari Gender Empowerment Measure (GEM) yang dikembangkan UNDP. IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga</p>	62,17	62,17	62,67	63,17	63,17	63,67	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Kesbangpol

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja			Kondisi Akhir	PD Penanggung jawab	PD Pendukung
					2022	2023	2024	2025	2026			
				profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender sudah terbangun melalui partisipasi perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi.								
		Meningkatkan Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	<p>Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat penambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Metode penghitungan laju pertumbuhan penduduk yang digunakan oleh BPS adalah metode geometrik</p> <p>Kegunaan Indikator ini adalah untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu.</p> $r = \left(\frac{P_t}{P_0}\right)^{\frac{1}{t-1}}$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - r : laju pertumbuhan penduduk - P_t : Jumlah penduduk tahun t - P_0 : Jumlah penduduk tahun awal - t : periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun) 	1,47	1,4	1,3	1,15	1,05	1,05	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinkes, Disdukcapil
2	Meningkatkan Kondusifitas Daerah dengan		Indeks Kesalehan Sosial	Survei masyarakat terhadap Solidaritas, Toleransi, dan Stabilitas yang memberikan implikasi sosio-kultural bagi pembangunan masyarakat dan bangsa	N/A	N/A	74	76	78	78		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja			Kondisi Akhir	PD Penanggung jawab	PD Pendukung
					2022	2023	2024	2025	2026			
	Pengembangan Perilaku Masyarakat yang Berlandaskan Keagamaan, Toleransi, dan Gotong Royong			<p>Rumusan IKS $= \frac{\text{Nilai Solidaritas} + \text{Nilai Toleransi}}{3}$</p>								
		Mewujudkan Lingkungan yang Kondusif, Aman, dan Tertib	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	<p>Komposisi penyusunnya adalah penegakan perda dan perbup, laporan jumlah kriminalitas kab, konflik sosial. Tingkat keberhasilannya dengan membandingkan indeks ketentraman dan ketertiban umum tahun n dengan tahun n-1, jika nilai lebih rendah menunjukkan capaian yang lebih baik.</p> <p>Indeks ketentraman dan ketertiban umum $= \frac{\text{Persentase penyelesaian pelanggaran}}{\text{jumlah pelanggaran ketentraman}}$</p>	2,02	2,1	2,14	2,26	2,38	2,38	Satuan Polisi Pamong Praja	Badang Kesbangpol
3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam		Laju Pertumbuhan Ekonomi	<p>Perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDB/PDRB atas dasar harga konstan. Indikator ini berguna untuk</p> <p>a) Mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan</p>	5,21	5,20-5,47	5,11-5,25	5,20-5,33	5,27-5,41	5,27-5,41		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja			Kondisi Akhir	PD Penanggung jawab	PD Pendukung
					2022	2023	2024	2025	2026			
	rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif			nasional; b) Sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional; c). Sebagai dasar pembuatan prakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu.								
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Indikator ini berguna untuk mengindikasikan besarnya	7,88	7,67	7,51	7,36	7,2	7,2		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja			Kondisi Akhir	PD Penanggung jawab	PD Pendukung
					2022	2023	2024	2025	2026			
				<p>persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.</p> $TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPT : Tingkat pengangguran terbuka (%) - PP : Jumlah pengangguran (orang) - PAK : Jumlah angkatan kerja (orang) 								
			Persentase Penduduk Miskin	<p>Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Headcount Index secara sederhana mengukur proporsi yang dikategorikan miskin. Indikator ini berguna untuk mengetahui persentase penduduk yang dikategorikan miskin.</p> $P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^0$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - P_0 : Persentase penduduk miskin - z : Garis kemiskinan - y_i : Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan $y_i < z$ - q : Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan - n : Jumlah penduduk 	6,92	6,58	5,94	5,74	5,5	5,5		
		Meningkatkan Pertumbuh	Persentase Kontribusi PDRB	PDRB yang akan dinilai adalah PDRB yang bersumber dari Sektor unggulan Kabupaten Tangerang.	52,63	53	53,49	54,35	55,21	55,21	Dinas Perikanan; Dinas	DPMPTSP

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja			Kondisi Akhir	PD Penanggung jawab	PD Pendukung
					2022	2023	2024	2025	2026			
		an Ekonomi Daerah Sektor Unggulan	Sektor Unggulan	<p>Terdapat 4 sektor yang akan dihitung dalam perhitungan PDRB ini</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sektor Industri 2. Sektor Perdagangan 3. Sektor Pertanian 4. Sektor Perikanan <p>Persentase Kontribusi PDRB Sektor U Total PDRB Sektor Industri Pengola =</p>							Pertanian dan Ketahanan Pangan; Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Persentase Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	<p>Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.</p> <p>Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.</p> <p>Persentase Realisasi Investasi $\frac{(PMA}{PMDN}$ Realisasi Investasi $\frac{(PMA}{PMDN})_n - Real$ =</p> <p>Realisasi Investas</p>	N/A	N/A	5,12	5,12	5,12	5,12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Badan Kesbangpol, Satpol PP, Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, DBMSDA
			Persentase Daya Saing	<p>Daya saing adalah produk Unggulan Lokal dari usaha mikro, kecil dan</p>	20,45	21,00	22,73	26,52	30,30	30,30	Dinas Koperasi dan Usaha	Diporabudpar

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja			Kondisi Akhir	PD Penanggung jawab	PD Pendukung
					2022	2023	2024	2025	2026			
			Produk Unggulan Lokal	menengah yang diampu oleh Dinas Koperasi dan Industri Kecil Menengah (IKM) yang diampu oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan. Produk Unggulan adalah Akumulasi dari dua jumlah produk tersebut yang dijual keluar daerah Kab Tangerang baik skala regional, nasional maupun internasional (ekspor). Persentase Daya Saing Produk Unggulan $= \frac{\text{Jumlah produk usaha mikro dan kecil}}{\text{Total seluruh produk usaha}}$							Mikro; Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Persentase Peningkatan Jumlah kunjungan Wisatawan adalah perhitungan Peningkatan Jumlah Wisatawan yang datang ke kabupater. Tangerang dari tahun ke tahun. Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan $= \frac{\text{Jumlah wisatawan tahun (n)} - \text{Jumlah wisatawan tahun (n-1)}}{\text{Jumlah wisatawan tahun (n-1)}}$	3,25	3,30	3,41	3,57	3,73	3,73	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dinas perhubungan, dinas binamarga, dtrb, diskoperasi usaha mikro dan dinas perindustrian dan perdagangan.
		Meningkatkan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	IDM terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi. Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari Dimensi Model Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial); Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan); Dimensi Pendidikan	0,7207	0,7250	0,7307	0,7407	0,7507	0,7507	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DLHK

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja			Kondisi Akhir	PD Penanggung jawab	PD Pendukung	
					2022	2023	2024	2025	2026				
				<p>(indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi). Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistic, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah). Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).</p> <p>Ukuran pengklasifikasi Desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan Desa. Berikut merupakan 5 (lima) status Desa : Desa Mandiri Desa Maju Desa Berkembang Desa Tertinggal Desa Sangat Tertinggal</p>									
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan	77,00	77,20	77,50	78,00	78,50	78,50	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Diperindag	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja			Kondisi Akhir	PD Penanggung jawab	PD Pendukung
					2022	2023	2024	2025	2026			
				<p>pemanfaatan pangan. Kegunaan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah</p> $\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^3 X_i}{3}$ <p>\bar{X} : rata-rata skor untuk masing-masing dimensi dimana i menunjukkan dimensi. (rentang nilainya $0 \leq \bar{X} \leq 23$ atau dalam bentuk persentase $0\% \leq \bar{X} \leq 100\%$)</p> <p>Jika indeks ketahanan pangan $< (\mu - 1,0 \sigma)$ maka daerah tersebut kurang tahan pangan; Jika $(\mu - 1,0 \sigma) < \text{indeks ketahanan pangan} < (\mu + 1,0 \sigma)$, maka daerah tersebut cukup tahan pangan; Jika indeks ketahanan pangan $\geq (\mu + 1,0\sigma)$, maka daerah tersebut memiliki tahan pangan yang tinggi</p>								
		Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	<p>Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. Kegunaan indikator ini untuk mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah.</p> $TPAK = \frac{a}{b} \times 100\%$ <p>Keterangan: - a : Jumlah angkatan kerja</p>	67,45	67,65	67,85	68,25	68,65	68,65	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Pendidikan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja			Kondisi Akhir	PD Penanggung jawab	PD Pendukung
					2022	2023	2024	2025	2026			
				<p>- b : Jumlah penduduk 15 tahun ke atas</p> <p>Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.</p>								
		Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	Persentase PPKS yang Berdaya	<p>Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.</p> <p>PPKS Berdaya adalah PPKS yang sudah memiliki kemampuan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasarnya. PPKS yang ditargetkan akan berdaya adalah PPKS dengan beberapa ketentuan, mulai anak terlantar, ansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, WRSE, eks napi dan pakir miskin desil 1.</p> <p>Persentase PPKS yang Berdaya $= \frac{\text{Jumlah PPKS yang berdaya}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100\%$</p>	N/A	N/A	1,44%	1,69%	1,87%	1,87%	Dinas Sosial	Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi UM, DPPA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja			Kondisi Akhir	PD Penanggung jawab	PD Pendukung	
					2022	2023	2024	2025	2026				
4	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik		Indeks Reformasi Birokrasi	Definisi Indeks reformasi birokrasi adalah penyimpulan atas hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi. Nilai akan diperoleh dari Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh KemenPANRB.	62,74	72	73	74	75	75			
		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah	Nilai SAKIP	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan	72,68	74	76	78	80,5	80,5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Sekretaris Daerah; Inspektorat Daerah	Seluruh OPD	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja			Kondisi Akhir	PD Penanggung jawab	PD Pendukung															
					2022	2023	2024	2025	2026																		
				peningkatan kinerja instansi pemerintah Nilai akan diperoleh dari Hasil Evaluasi SAKIP' oleh KemenPANRB.																							
			Nilai Indeks Kemandirian Fiskal	<p>Kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiaya sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Kemandirian fiskal daerah dapat diketahui dengan menghitung rasio antara pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan atau rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan. Oleh karena itu, revidi atas kemandirian fiskal daerah dipandang perlu untuk dilakukan agar kemandirian fiskal daerah bisa dipetakan dan diketahui kondisi kemandirian fiskal tiap-tiap daerah.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nilai IKF</th> <th>Kondisi Kemandirian Fiskal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>$0,00 \leq IKF \leq 0,025$</td> <td>Belum Mandiri</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>$0,025 \leq IKF \leq 0,50$</td> <td>Menuju Kemandirian</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>$0,50 \leq IKF \leq 0,75$</td> <td>Mandiri</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>$0,75 \leq IKF \leq 1,00$</td> <td>Sangat Mandiri</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nilai IKF	Kondisi Kemandirian Fiskal	1	$0,00 \leq IKF \leq 0,025$	Belum Mandiri	2	$0,025 \leq IKF \leq 0,50$	Menuju Kemandirian	3	$0,50 \leq IKF \leq 0,75$	Mandiri	4	$0,75 \leq IKF \leq 1,00$	Sangat Mandiri	0,505	0,510	0,520	0,525	0,530	0,530	Badan Pendapatan Daerah	
No	Nilai IKF	Kondisi Kemandirian Fiskal																									
1	$0,00 \leq IKF \leq 0,025$	Belum Mandiri																									
2	$0,025 \leq IKF \leq 0,50$	Menuju Kemandirian																									
3	$0,50 \leq IKF \leq 0,75$	Mandiri																									
4	$0,75 \leq IKF \leq 1,00$	Sangat Mandiri																									

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja			Kondisi Akhir	PD Penanggung jawab	PD Pendukung	
					2022	2023	2024	2025	2026				
				d. DBH sumber daya alam.									
			Opini BPK	<p>Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan indikator terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dikelompokkan menjadi empat :</p> <p>a. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu opin. audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.</p> <p>b. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material,</p>	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Seluruh OPD	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja			Kondisi Akhir	PD Penanggung jawab	PD Pendukung
					2022	2023	2024	2025	2026			
				<p>kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.</p> <p>c. Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) yaitu opini yang diberikan ketika auditor tidak menyakini apakah laporan keuangan yang disajikan wajar atau tidak.</p> <p>d. Tidak Wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah satu material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.</p>								
			Indeks Profesionalitas ASN	<p>Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN akan digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN serta penilaian Reformasi Birokrasi. Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yaitu jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator. Sumber Indeks Profesionalitas ASN yaitu Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS), penilaian prestasi kerja PNS dan data hukuman disiplin pegawai. Hasil penilaian profesionalisme ASN oleh BKN.</p> $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$	57,45	65	71	75	81	81	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Seluruh OPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja			Kondisi Akhir	PD Penanggung jawab	PD Pendukung
					2022	2023	2024	2025	2026			
				$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_2 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_3 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_4 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: - IP : Indeks Profesionalisme - IP_i : Indeks Profesionalisme ke-i - IP_1 : Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi - IP_2 : Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi - IP_3 : Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja - IP_4 : Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$: Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$: Bobot Indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$: Bobot Indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$: Bobot Indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-m								
			Maturitas SPIP Terintegrasi	Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan	3	3	3	3	3	3	Inspektorat Daerah	Seluruh OPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional			Kondisi Awal		Target Kinerja			Kondisi Akhir	PD Penanggung jawab	PD Pendukung
							2022	2023	2024	2025	2026			
				2	Penilaian Risiko	20	2	10						
				3	Kegiatan Pengendalian	25	11	2,27						
				4	Informasi dan Komunikasi	10	2	5						
				5	Pemantauan	15	2	7,5						
					Jumlah	100	25							
			Indeks SPBE	Struktur penilaian tingkat kematangan penerapan SPBE terdiri atas: a. domain, merupakan area penerapan SPBE yang dinilai; b. aspek, merupakan area spesifik penerapan SPBE yang dinilai; dan c. indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek penerapan SPBE			3,08	3,10	3,17	3,19	3,21	3,21	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh OPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja			Kondisi Akhir	PD Penanggung jawab	PD Pendukung																		
					2022	2023	2024	2025	2026																					
				<p>NA_{ij} adalah nilai indeks aspek ke-j pada domain ke-i BA_{ij} adalah nilai bobot aspek ke-j pada domain ke-i</p> <p>Perhitungan indeks domain :</p> $I_{\text{Indeks Domain}} = \frac{1}{\sum_{j=1}^n BA_{ij}} \sum_{j=1}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$ <p>Dimana: ND_j adalah nilai indeks domain ke-j; BD_j adalah nilai bobot domain ke-j.</p> <p>Predikat Indeks SPBE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nilai Indeks</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 - 5,0</td> <td>Murnian</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 - < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 - < 3,5</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 - < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td><1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nilai Indeks	Predikat	1	4,2 - 5,0	Murnian	2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 - < 3,5	Baik	4	1,8 - < 2,6	Cukup	5	<1,8	Kurang								
No	Nilai Indeks	Predikat																												
1	4,2 - 5,0	Murnian																												
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik																												
3	2,6 - < 3,5	Baik																												
4	1,8 - < 2,6	Cukup																												
5	<1,8	Kurang																												
			Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan pemerintahan, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Berikut merupakan proses evaluasi pelayanan publik:	4,12	4,15	4,2	4,3	4,4	4,4	Sekretariat Daerah; Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Perpustakaan dan Arsip	Seluruh Kecamatan																		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja			Kondisi Akhir	PD Penanggung jawab	PD Pendukung
					2022	2023	2024	2025	2026			
		Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Pembangunan infrastruktur yang dimaksud disini adalah infrastruktur Bina marga dan SDA. Indeks Pembangunan Infrastruktur = Persentase Kondisi Infrastruktur Bina Marga dalam Kondisi Baik + Persentase Kondisi Infrastruktur SDA dalam Kondisi Baik	27%	29%	32%	35%	35%	35%	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	
			Persentase Realisasi Pola Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	Pembangunan maupun pemanfaatan ruang senantiasa merujuk dan selaras dengan RTRW. Persentase Realisasi Pola Pemanfaatan Ruang $= \frac{\text{Jumlah Pola Pemanfaatan Ruang yang Sesuai RTRW}}{\text{Jumlah Total Pemanfaatan Ruang}}$	8%	29%	37%	55%	55%	55%	Dinas Tata Ruang dan Bangunan	DPMPTSP
			Rasio Luas Kawasan Permukiman, Perumahan dan Pemakaman yang layak	Jumlah luas Kawasan Permukiman, Perumahan dan Pemakaman layak dibagi luas wilayah Kabupaten Tangerang. Rasio Luas Kawasan Permukiman, Perumahan dan Pemakaman yang layak $= \frac{\text{Luas Kawasan Permukiman, Perumahan dan Pemakaman layak}}{\text{Luas Kabupaten Tangerang}}$	0,9433	0,9436	0,9439	0,9442	0,9442	0,9442	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman	Bappeda
			Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio Konektivitas Kabupaten $= (IK_1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK_2 \times \text{bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$ - IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten tersebut) - IK2 (angkutan sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi	0,75	0,76	0,79	0,83	0,83	0,83	Dinas Perhubungan	DBMSEA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja			Kondisi Akhir	PD Penanggung jawab	PD Pendukung
					2022	2023	2024	2025	2026			
				SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30). Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50), wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70).								
		Meningkatkan Kualitas Hidup yang Sehat dan Tangguh Terhadap Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<p>Rumus perhitungan :</p> $\text{Indeks Kualitas Lingkungan Hidup} = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IKLH : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup - IKU : Indeks Kualitas Udara - IKA : Indeks Kualitas Air - IKL : Indeks Kualitas Lahan 	55,88	55,62	56,25	56,89	56,89	56,89	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perhubungan, Diperingkat
			Indeks Resiko Bencana (IRBI)	$\text{Indeks Resiko Bencana (IRBI)} = \frac{\text{Hazard} \times \text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$ <p>Keterangan :</p> <p>Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitudo) dari semua fenomena alam Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan</p>	130,45	125	120	115	115	115	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dinas Sosial

5.3 Penyelarasan Sasaran Indikator Makro Pembangunan

Penetapan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 tersebut di atas merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan yang sekaligus menggambarkan kemajuan pembangunan daerah baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Indikator makro pembangunan terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Gini. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (*impact*) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional dan nasional sehingga diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta pelaku pembangunan lainnya.

Penentuan target indikator makro memperhatikan pencapaian indikator makro sampai dengan tahun 2022, rata-rata pertumbuhan dari masing-masing indikator serta kecenderungan pencapaian jika dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Banten.

Tabel 5. 4
 Sasaran Indikator Makro Nasional, Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang

No	Uraian Indikator Makro	Satuan	RPJMN Tahun 2020-2024					RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026				RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026							
			Target					Kondisi Awal		Target		Kondisi Awal			Transisi	Target			
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,40	5,50	5,60	5,70	5,80	4,49	5,03	5,02-5,15	5,11-5,25	5,20-5,33	5,27-5,41	4,70	5,47	5,20 - 5,47	5,11 - 5,25	5,20 - 5,33	5,27 - 5,41
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,00	7,80	7,70	7,30	7,00	8,98	8,82	8,67	8,51	8,36	8,2	9,06	7,88	7,67	7,51	7,36	7,2
3	Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin	Persen	4,80	4,50	4,00	3,65	3,48	6,66	6,16	5,58	5,94	5,74	5,79	7,12	6,92	6,58	5,94	5,74	5,5
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	72,51	73,26	74,01	74,77	75,54	72,72	73,32	73,27	73,55	73,82	74,10	72,29	72,97	73,27	73,55	73,82	74,1
5	Index Gini	Poin	0,385	0,377 - 0,382	0,376-0,378	0,375 - 0,377	0,374-0,376	0,363	0,360	0,354	0,349	0,344	0,339	0,294	0,282	0,285	0,28	0,275	0,27

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

6.1 Strategi

Strategi merupakan wawasan yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola setiap program kegiatannya dengan menyusun cara, langkah atau tahapan untuk mencapai tujuan. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas setiap tahun dalam pencapaian pembangunan daerah. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan cara tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

6.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan juga merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah atau perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi akan diturunkan ke dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Arah kebijakan juga merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. Strategi-strategi yang telah dibahas sebelumnya akan difokuskan untuk mencapai arah kebijakan yang diterjemahkan pada tabel berikut ini :

Tabel 6.1
Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Tangerang 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akses dan mutu layanan Pendidikan Dasar 9 Tahun 2. Peningkatan akses mutu layanan PAUD 3. Peningkatan akses dan mutu layanan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 4. Peningkatan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan 5. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dalam bidang administrasi sekolah 6. Peningkatan kualitas pembelajaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan kebutuhan ruang kelas untuk peserta didik 2. Sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Pendidikan PAUD bagi pengembangan potensi anak 3. Peningkatan standar kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan 4. Meningkatkan pengembangan potensi, bakat, dan minat peserta didik
	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya sinergitas penyelenggaraan upaya Kesehatan Ibu dan Anak 2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat 3. Meningkatkan pengendalian penyakit 4. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 5. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan 6. Pemenuhan kebutuhan obat dan alat Kesehatan sesuai standar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intervensi secara kontinu dengan penekanan promotif dan preventif 2. Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil 3. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisectoral, guna pencegahan dan pengendalian penyakit 4. Penguatan pelayanan Kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP Pemerintah dan FKTP Swasta 5. Pengembangan tenaga Kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatkan Daya Saing Pemuda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan 2. Peningkatan akses pemuda dalam pengembangan kewirausahaan 3. Optimalisasi pembudayaan olahraga di masyarakat 4. Optimalisasi pembinaan olahraga prestasi 5. Peningkatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) 6. Peningkatan minat masyarakat terhadap seni budaya 7. Pengadaan sarana dan prasarana seni budaya 	<p>dasar seperti promosi kesehatan dan perawat komunitas</p> <p>6. Penguatan sistem logistik farmasi <i>real time</i> berbasis elektronik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dibentuknya program pembinaan pemuda dalam hal pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan organisasi kepemudaan, program kewirausahaan pemuda, program pembudayaan olahraga sejak dini, program pemusatan Latihan pada sentra olahraga, program perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan OPK, program promosi dan festival seni budaya, program pembangunan gedung pertunjukan kesenian kebudayaan, program perencanaan kawasan strategis pariwisata 2. Dibentuknya rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif
	Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran serta perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, dan sosial politik 2. Meningkatkan perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Meningkatkan regulasi menuju Kabupaten Layak Anak 4. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah 5. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan komitmen Pemda, masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan capaian indeks pemberdayaan gender dan dalam pemenuhan hak-hak anak 2. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk mengeliminasi tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan jejaring kerjasama dalam penanganan kasus-kasus kekerasan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak	terhadap perempuan dan anak 3. Peninjauan kebijakan menuju Kabupaten Layak Anak 4. Peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan
	Meningkatkan Pengendalian Penduduk	1. Adanya sinergitas perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan data kependudukan 2. Pemanfaatan NIK pada <i>database</i> kependudukan berbasis keluarga 3. Mengoptimalkan pengelolaan sistem informasi kependudukan 4. Meningkatkan pemahaman <i>stakeholder</i> dan masyarakat tentang kependudukan 5. Mengoptimalkan penyusunan dan pemanfaatan GDPK 6. Mengidentifikasinya masalah dampak kependudukan 7. Meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam sosialisasi pembangunan kependudukan 8. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan ber-KB antar program dan sektoral 9. Mengoptimalkannya advokasi dan KIE KB 10. Meningkatkan pelayanan ber-KB 11. Mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kelompok BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UUPKS 12. Mengoptimalkannya advokasi promosi dan KIE dalam pembinaan dan pemberdayaan kelompok BKP, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UUPKS 13. Menyediakan sarana prasarana dan	1. Koordinasi dan sinergitas dalam pelaksanaan pengendalian kependudukan 2. Mengoptimalkan penyediaan data kependudukan berbasis NIK 3. Melakukan pemetaan data kependudukan 4. Peningkatan kapasitas dan pendayagunaan PKB, PLKB dan Kader dalam penyuluhan dan pembinaan KB 5. Menyusun dasar hukum kebijakan GDPK untuk pengendalian penduduk 6. Meningkatkan kapasitas SDM dalam menemu kenali dampak kependudukan 7. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dalam pembangunan kependudukan 8. Meningkatkan sikap ego program/sektoral dalam pelaksanaan pembinaan ber-KB 9. Mengoptimalkan data dan pemetaan sasaran dalam melakukan advokasi 10. Mengoptimalkan pendayagunaan mitra kerja dalam pelayanan KB 11. Menyediakan data dan pemetaan sasaran kelompok pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>dukungan operasional pembinaan dan pemberdayaan kelompok BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UUPKS</p> <p>14. Meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera</p> <p>15. Meningkatkan akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga</p>	<p>12. Meningkatkan strategi, desain program dan inovasi advokasi dan KIE dalam pelaksanaan pembinaan</p> <p>13. Menyediakan data sasaran untuk perencanaan sarpras dan dukungan operasional dalam pembinaan dan pemberdayaan kelompok sasaran K3</p> <p>14. Mengoptimalkan pendayagunaan organisasi kemasyarakatan dalam pemberdayaan dan peningkatan</p> <p>15. Menyediakan pusat informasi dan konseling ketahanan keluarga</p>
<p>Meningkatkan Kondusifitas Daerah dengan Pengembangan Perilaku Masyarakat yang Berlandaskan Keagamaan, Toleransi, dan Gotong Royong</p>	<p>Mewujudkan Lingkungan yang Kondusif, Aman, dan Tertib</p>	<p>1. Meningkatkan kegiatan deteksi dini dan cegah dini, peran serta masyarakat dan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</p> <p>2. Meningkatkan pemberdayaan Satlinmas dan Personil Satpol PP dalam penanganan keamanan dan ketertiban umum</p> <p>3. Meningkatkan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum</p> <p>4. Memelihara situasi dalam masyarakat yang kondusif</p>	<p>1. Melakukan rapat koordinasi secara rutin dengan perangkat daerah dan aparat keamanan di wilayah terkait permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</p> <p>2. Melakukan perhitungan jumlah ideal personel Satpol PP sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Pamong Praja dan mengusulkan penambahan kepada unsur pimpinan</p> <p>3. Melakukan sosialisasi terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat</p> <p>4. Pengiriman diklat PPNS bagi PNS/ASN yang memenuhi persyaratan</p> <p>5. Membuat usulan penambahan anggaran untuk pengembangan</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>kapasitas bagi personil Satpol PP dan Satlinmas</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Menginventarisasi sarpras yang belum terakomodir dan pemenuhan sarpras sesuai prioritas kebutuhan 7. Memprioritaskan anggaran untuk sosialisasi terhadap Perda dan Perkada 8. Melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal melalui pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan 9. Pembinaan tentang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik dan pemanfaatan modal sosial 10. Penguatan sumber daya Aparatur Badan Kesbangpol
<p>Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat secara Komprehensif</p>	<p>Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Unggulan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produksi penangkapan ikan melalui bantuan dan pemberdayaan nelayan kecil 2. Membangun pusat kawasan budidaya terpadu 3. Merehabilitasi lingkungan perikanan 4. Meningkatkan sistem penyelenggaraan pelelangan ikan 5. Meningkatkan produksi budidaya melalui aplikasi teknologi 6. Meningkatkan produksi benih melalui optimalisasi fungsi BBI 7. Meningkatkan sistem pengawasan terhadap kelompok usaha perikanan 8. Meningkatkan informasi dan pemasaran produk hasil perikanan 9. Meningkatkan kelembagaan, keamanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarpras penangkapan ikan, produk hasil perikanan, pengolahan produk hasil perikanan dan perikanan budidaya serta pendidikan pelatihan dan bimtek penangkapan ikan bagi kelompok nelayan 2. Peningkatan pelayanan TPI dalam permodalan, meningkatkan kebersihan TPI melalui Gerakan Jumat Bersih, mendorong seluruh nelayan melelangkan hasil tangkapannya ke TPI melalui sosialisasi & penertiban 3. Peningkatan sistem pengawasan terhadap kelompok usaha perikanan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>pangan dan mutu produk hasil perikanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan ketersediaan pangan baik hewani maupun nabati dalam jumlah keragaman untuk mendukung konsumsi pangan sesuai kaidah kesehatan dan gizi seimbang dan pengembangan cadangan pangan hidup 2. Pengembangan distribusi pangan yang merata, harga stabil dan terjangkau dengan mendorong dan mendukung upaya peningkatan daya beli dan mengurangi jumlah penduduk yang miskin 3. Pemantauan impor pangan 4. Pengembangan dan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal melalui upaya pengolahan pangan berbahan baku palawija serta tepung umbi-umbian lokal diantaranya menjadi berbentuk tepung dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan dan mensinergikan upaya peningkatan kapasitas produksi pangan untuk meningkatkan ketersediaan pangan 2. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah 3. Mengembangkan dan memperkuat ketrampilan masyarakat dalam hal menyediakan makanan sesuai kaidah kesehatan dan gizi seimbang 4. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan ekonomi pedesaan dalam rangka mengembangkan sistem distribusi pangan dan aksesibilitas pangan serta upaya kewaspadaan pangan dan penanganan rawan pangan 5. Peningkatan capaian skor PPH dengan meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis bahan baku pangan lokal 6. Mengembangkan jaringan antar lembaga masyarakat untuk pemenuhan hak atas pangan dan gizi 7. Meningkatkan pengawasan mutu dan keamanan pangan 8. Meningkatkan ketersediaan benih unggul melalui pembinaan kepada para penangkar benih 9. Meningkatkan ketersediaan alat mesin pertanian pra-panen

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			10. Meningkatkan sistem agribisnis terintegrasi <i>on-farm</i> sampai dengan <i>off-farm</i> di lokasi pusat kawasan agropolitan
		1. Meningkatkan nilai investasi daerah 2. Meningkatkan kinerja pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan	1. Perbaiki iklim penanaman modal sebagai layanan yang mudah bagi investor 2. Menerapkan OSS dan SIPINTER dalam pelayanan sistem <i>online</i> perizinan berusaha dan non perizinan
		1. Perluasan akses pelayanan dana bergulir 2. Peningkatan permodalan 3. Peningkatan akses pemasaran 4. Fasilitasi legalitas dan penguatan kewirausahaan 5. Peningkatan usaha koperasi 6. Peningkatan kualitas SDM Koperasi 7. Peningkatan kualitas kelembagaan dan pengawasan koperasi 8. Meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi koperasi	1. Pembentukan koordinator wilayah pelayanan dana bergulir 2. Peningkatan akses pembiayaan, kemitraan dan promosi dengan pelaku usaha kecil dan menengah serta kualitas produk usaha mikro 3. Pembentukan jaringan kerjasama, pemasaran dan informasi produk koperasi 4. Peningkatan pengetahuan dan kapasitas SDM pengelola koperasi 5. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan intensitas pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan koperasi 6. Penguatan manajemen usaha koperasi melalui pengembangan dan restrukturisasi usaha serta peningkatan kualitas produksi
		1. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata 2. Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan	1. Promosi dan publikasi sosial media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		intelektual 3. Optimalisasi publikasi dan promosi pariwisata 4. Optimalisasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	2. Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar dan lanjutan
	Meningkatkan Kemandirian Desa	1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa 2. Meningkatkan ketahanan sosial desa 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi desa 4. Meningkatkan ketahanan ekologi desa 5. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi desa	1. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur Desa dan Perangkat Desa 2. Meningkatkan penguatan koordinasi dan integrasi pembinaan SDM masyarakat desa 3. Meningkatkan penguatan fasilitasi pengembangan produk unggulan di desa 4. Meningkatkan penguatan fasilitasi pengembangan produk unggulan di desa 5. Meningkatkan penguatan koordinasi dan integrasi kualitas lingkungan desa 6. Meningkatkan pembinaan, pengembangan, pengelolaan dan pendayagunaan BUMDes
	Meningkatnya Ketahanan Pangan	1. Optimalisasi pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah bekerja sama dengan Perum BULOG atau lembaga lain sesuai ketentuan perundangan 2. Penguatan kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya dan pengembangan sistem cadangan pangan melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dengan optimalisasi Gapoktan dan Poktan ataupun lembaga 3. Peningkatan efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan pangan di daerah rawan pangan dan mengelola pangan pokok fortifikasi bagi	1. Mengembangkan dan memperkuat kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat hingga di tingkat desa dan atau komunitas 2. Meningkatkan penggunaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dalam hal pemantauan dan penanganan daerah rawan pangan 3. Mendorong, mengembangkan dan membangun serta memfasilitasi peran masyarakat dalam pemenuhan pangan sebagai implementasi pemenuhan hak atas pangan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		kelompok khusus 4. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan pada masyarakat	4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan 5. Meningkatkan ketersediaan bibit tanaman dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura serta BPP 6. Meningkatkan pendampingan kepada para petani dalam melaksanakan GAP 7. Melaksanakan penyediaan bibit ternak ruminansia dan unggas 8. Melaksanakan bimbingan teknis pengolahan pakan ternak dengan pemanfaatan sumber bahan baku 9. Mengembangkan kelompok tani ternak yang handal dalam melakukan manajemen usaha 10. Menyediakan obat-obatan hewan yang bermutu serta sarana kesehatan hewan yang berkualitas
	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	1. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja 2. Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja 3. Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis dinamis dan berkeadilan	1. Peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat dan pemagangan 2. Peningkatan akses dan kemudahan layanan informasi lowongan kerja bagi pencari kerja melalui sistem informasi berbasis web 3. Peningkatan perlindungan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha
	Meningkatnya Cakupan	1. Meningkatkan perlindungan sosial bagi PPKS 2. Meningkatkan penanganan rehabilitasi sosial bagi PPKS	1. Meningkatkan cakupan penerima bantuan bagi PPKS 2. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Penanganan PPKS	<ol style="list-style-type: none"> 3. Penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan berbasis data terpadu yang valid 4. Meningkatkan pemberdayaan sosial bagi PPKS 5. Penyelenggaraan pendampingan terhadap bantuan sosial 	<p>dasar bagi PPKS</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan pemutakhiran data penerima bantuan 4. Meningkatkan pemberdayaan melalui KUBE dan UEP bagi PPKS
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kompetensi aparatur perencana melalui Bimtek dan Diklat 2. Menjaga keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran 3. Mengembangkan data dan teknologi informasi perencanaan pembangunan 4. Meningkatkan keterlibatan <i>stakeholders</i> dalam perencanaan pembangunan 5. Optimalisasi pelaksanaan monev perencanaan, pengukuran, dan pelaksanaan pembangunan 6. Pelaksanaan kajian, penelitian pengembangan dan inovasi berbasis potensi dan permasalahan pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penyelenggaraan BIMTEK dan Diklat bagi perencana dalam penyusunan dokumen perencanaan 2. Optimalisasi pemanfaatan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan 3. Peningkatan integrasi data perencanaan pembangunan 4. Membangun sistem perencanaan pembangunan yang inklusif dan dapat diakses oleh seluruh <i>stakeholder</i> 5. Peningkatan pemahaman PD terkait konsep anggaran berbasis kinerja 6. Pemanfaatan hasil kajian sebagai dasar dalam implementasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
		Meningkatkan kualitas dokumen pertanggungjawaban Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara intens dengan PD terkait 2. Menyusun dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan tepat waktu 3. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah 4. Menyusun pedoman pelaksanaan pembangunan daerah
		Peningkatan mutu sistem pengawasan dan pengendalian internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan transparansi melalui pengembangan zona integritas 3. Monev implementasi SPIP 4. Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi APIP
		<ul style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi tatalaksana layanan pajak daerah 2. Optimalisasi pengawasan dan pengendalian terhadap wajib pajak 3. Optimalisasi pengelolaan data dan informasi secara terintegrasi 4. Optimalisasi perencanaan dan pengembangan potensi pendapatan daerah 5. Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan sistem pelaporan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan teknologi informasi terkini dalam pelayanan pajak daerah 2. Pengawasan objek pajak daerah 3. Optimalisasi penggalan potensi objek pajak baru 4. Persiapan dan penyusunan regulasi pendapatan daerah
		<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas layanan pajak daerah 2. Optimalisasi pengawasan terhadap wajib pajak 3. Optimalisasi intensifikasi PAD 4. Penyiapan dan penyusunan kebijakan pendapatan daerah yang mendukung program 5. Meningkatkan sistem pengelolaan belanja dan pendapatan daerah 6. Mensosialisasikan kebijakan pengelolaan keuangan daerah 7. Meningkatkan profesionalisme aparatur 8. Meningkatkan penatausahaan keuangan 9. Meningkatkan manajemen aset daerah melalui aplikasi handal dan terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sistem pengelolaan belanja daerah 2. Pengadaan sosialisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah 3. Perencanaan penganggaran daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 4. Peningkatan profesionalisme aparatur 5. Peningkatan penatausahaan keuangan 6. Peningkatan manajemen aset daerah melalui aplikasi yang handal dan terintegrasi 7. Inventarisasi bidang tanah milik Pemda 8. Pengoptimalan pengelolaan aset daerah 9. Peningkatan jaminan pengamanan aset daerah 10. Peningkatan penerimaan retribusi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pemakaian kekayaan daerah
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengembangan kompetensi, disiplin, kinerja dan penempatan aparatur 2. Meningkatkan pelayanan, kualitas data dan informasi kepegawaian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengembangan karir aparatur melalui <i>talent pool</i> dan rencana suksesi 2. Peningkatan pelayanan kepegawaian sesuai standar pelayanan 3. Peningkatan terhadap bobot dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kebijakan, tata kelola dan layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik 2. Peningkatan keterbukaan informasi publik melalui penyediaan informasi publik secara mudah dan terbuka 3. Peningkatan kualitas persandian dan keamanan informasi yang akuntabel 4. Penyediaan dan pengintegrasian data sektoral dari seluruh OPD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kebijakan internal, strategi dan perencanaan tata kelola pemerintah berbasis elektronik 2. Meningkatkan penyelenggaraan informasi publik oleh Badan Publik melalui Forum PPID 3. Meningkatkan sarpras persandian 4. Meningkatkan penyediaan data sektoral
		Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap fasilitasi pelayanan publik, tata laksana dan kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelesaikan rancangan perundang-undangan menjadi produk hukum 2. Meningkatkan fungsi bidang kesejahteraan rakyat 3. Menjaga ketersediaan, keterjangkauan, kelancaran distribusi bahan pokok dan bahan penting lainnya serta mengoptimalkan komunikasi efektif 4. Percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah 5. Menyusun RKBMD dan RKPBM PD dengan efektif dan efisien 6. Menyusun jadwal pelaksanaan petugas protokoler, komunikasi pimpinan dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pendokumentasian dengan efektif dan efisien
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan layanan fasilitasi Sekretariat DPRD 2. Harmonisasi penyusunan pembahasan Raperda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kinerja fasilitasi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD 2. Harmonisasi usulan raperda melalui propemperda 3. Meningkatkan kinerja fasilitasi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas data kependudukan 2. Pelayanan jemput bola dan pelayanan keliling 3. Membuat inovasi untuk memudahkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan cakupan perekaman penduduk wajib KTP-el, KIA, aktivasi identitas Kependudukan Digital, cakupan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan akta perceraian 2. Meningkatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil yang membahagiakan melalui inovasi 3. Pemanfaatan data kependudukan
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kunjungan perpustakaan 2. Mengoptimalkan kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan 3. Mengoptimalkan pengelolaan arsip daerah 4. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman pentingnya arsip 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akses dan sarpras perpustakaan 2. Peningkatan pengelolaan arsip statis dan dinamis pemerintah daerah secara profesional 3. Implementasi "SRIKANDI" secara optimal
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sinergitas dengan TNI POLRI 2. Pemerataan akses, peningkatan kualitas dan pemberdayaan masyarakat 3. Meningkatkan pelayanan kecamatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan 2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 3. Meningkatkan pemeliharaan sarpras pelayanan umum 4. Meningkatkan administrasi kepegawaian

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			perangkat daerah 5. Meningkatkan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 6. Meningkatkan administrasi keuangan perangkat daerah 7. Meningkatkan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur yang Terpadu dan Berkelanjutan	Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur	1. Peningkatan kapasitas jalan 2. Pembuatan embung dan kolam retensi 3. Peningkatan sungai dan saluran drainase 4. Pembuatan jaringan daerah irigasi pada Lahan Sawah Dilindungi (LSD)	1. Penyediaan lahan, alat berat, dokumen pengelolaan SDA, dokumen perencanaan teknis drainase dan fisik konstruksi 2. Memperbarui SK Jalan Kabupaten 3. Pemeliharaan drainase jalan kabupaten
		1. Mendigitalisasikan seluruh data perizinan, non perizinan, dan tematik menjadi peta digital 2. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam hal penataan dan pemanfaatan ruang 3. Meningkatkan kesesuaian bangunan terhadap ketentuan pemanfaatan ruang 4. Peningkatan kenyamanan kawasan bangunan dan fasilitas publik	1. Pemanfaatan SIG sebagai <i>database</i> permohonan perijinan dan non perijinan 2. Membangun kawasan prioritas yang perlu ditetapkan RDTR secara berkesinambungan 3. Optimalisasi sosialisasi penataan ruang secara langsung maupun tidak langsung 4. Meningkatkan ketegasan dalam tindakan penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku 5. Mengoptimalkan koordinasi antar pihak terkait dalam bidang penataan ruang
		1. Meningkatkan sarana dan prasarana air bersih bagi masyarakat 2. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana TPU aset Pemda 3. Meningkatkan pelayanan air limbah domestik	1. Menyediakan sarana air bersih bagi masyarakat 2. Melakukan pemeliharaan sarpras TPU yang sudah dibangun secara berkala 3. Melakukan pelayanan pendistribusian

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		4. Meningkatkan penataan kawasan kumuh 5. Meningkatkan kualitas PSU Perumahan	air bersih secara maksimal 4. Melakukan pembangunan sarpras pemakaman 5. Menyediakan sarana sanitasi bagi masyarakat miskin 6. Melakukan pelayanan penyedotan air limbah domestik baik niaga maupun non niaga secara maksimal 7. Melakukan peningkatan jalan lingkungan, sanitasi dan drainase lingkungan 8. Melakukan penataan pada PSU perumahan 9. Pengadaan lahan untuk kepentingan umum yang tepat peruntukannya
		1. Membuat jaringan trayek sesuai kebutuhan baik dalam trayek dan tidak dalam trayek 2. Menyediakan perlengkapan jalan sesuai dengan kebutuhan transportasi lalu lintas	1. Pembangunan sarpras transportasi 2. Beroperasinya moda transportasi angkutan 3. Melakukan pengawasan pengendalian lalu lintas
	Meningkatkan Kualitas Hidup yang Sehat dan Tangguh terhadap Bencana	1. Meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan 2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan 3. Meningkatkan luas tutupan lahan 4. Meningkatkan penanganan persampahan dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup 2. Melakukan pembinaan pengelolaan lingkungan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan 3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan baik langsung maupun tidak langsung terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan 4. Meningkatkan luas RTH

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			5. Meningkatkan sarpras dan pengelolaan dan penanganan persampahan 6. Terkelolanya pengolahan sampah melalui teknologi ramah lingkungan
		1. Meningkatkan layanan informasi rawan bencana 2. Meningkatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 3. Meningkatkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 4. meningkatkan layanan respon cepat penanggulangan kejadian kebakaran selama 15 menit 5. meningkatkan layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran	1. Pengembangan kegiatan komunikasi informasi dan edukasi bagi masyarakat di daerah rawan bencana 2. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui pembentukan desa tangguh bencana dan penyelamatan evaluasi mandiri 3. Peningkatan cakupan layanan pemadam kebakaran melalui penambahan pos damkar di wilayah manajemen kebakaran, peningkatan kapasitas aparatur damkar, dan peningkatan kualitas dan kuantitas peralatan damkar 4. Peningkatan peran relawan pemadam kebakaran dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa/kelurahan

Sumber : RPD Kabupaten Tangerang 2024-2026

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan tersebut, selanjutnya dirumuskan arah kebijakan tahunan pembangunan untuk periode tahun 2024-2026 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah tahunan.

Tabel 6.2 Arah Kebijakan Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

Tujuan	Arah Kebijakan Tahunan		
	2024	2025	2026
	Tema: Pemantapan Sdm Yang Berdaya Saing Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Tema: Peningkatan Kualitas Sumberdaya dan aksesibilitas Kesehatan dalam rangka penurunan stunting	Tema: Peningkatan Kualitas infrastruktur dalam rangka Pemerataan Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan akses dan mutu layanan Pendidikan Dasar 9 Tahun serta meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pengembangan kewirausahaan dan karir	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup dengan penekanan <i>promotif dan preventif</i> serta penguatan kelembagaan kesehatan dan sumberdaya kesehatan.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, daerah perbatasan melalui pelayanan dasar sosial yang terpadu serta peningkatan akses masyarakat miskin pada pelayanan publik
Meningkatkan Kondusifitas Daerah Dengan Pengembangan Perilaku Masyarakat Yang Berlandaskan Keagamaan, Toleransi, Dan Gotong Royong	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat guna melahirkan situasi kondusif yang baik bagi pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan toleransi, kerukunan dan empati dalam kehidupan bermasyarakat	Penguatan nilai gotong royong guna melahirkan pembangunan yang berkualitas dan merata
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan kesempatan kerja dengan kerjasama	Penguatan pertumbuhan ekonomi dalam rangka	Mendorong pertumbuhan perekonomian dalam rangka

Tujuan	Arah Kebijakan Tahunan		
	2024	2025	2026
Yang Berkelanjutan Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Secara Komprehensif	antara industri dan instansi pendidikan untuk menyesuaikan kebutuhan pekerja dengan penyediaan tenaga kerja serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja.	mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	pembangunan infrastruktur yang lebih merata dan berkualitas
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Digitalisasi Dan Integrasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi dalam rangka melahirkan kebijakan yang berkualitas bagi pertumbuhan perekonomian dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.	Penerapan digitalisasi data dalam rangka mengawal penurunan stunting dan pencapaian kinerja dalam reformasi birokrasi	Pemantapan menuju Pelayanan Publik Berkualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik dalam rangka mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien
Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur Terpadu Dan Berkelanjutan Yang	Mendorong Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata untuk menekan kesenjangan ekonomi	Pemantapan Infrastruktur kesehatan yang berkualitas, lengkap dan merata guna mendorong penurunan angka stunting	Meningkatkan pertumbuhan infrastruktur dasar yang merata dalam rangka menekan angka kesenjangan sosial dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat

6.3 Program Pembangunan

Program Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 merupakan bentuk pengimplemntasian dari strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah. Program Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang 2024-2026 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6.3

Program Pembangunan Daerah RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

No	Prioritas Daerah	Indikator	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas (Kepmen050/5889)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			72,97	74,1					
			Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,68	0,71	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	94.5	96	Pendidikan
						Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs		79.3	81		
						Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD		49	54.6		
						Angka Partisipasi Murni (APM) Non Formal/Kesetaraan		N/A	86		
							Program Pengembangan Kurikulum	Persentase implementasi kurikulum muatan lokal	100	100	Pendidikan
							Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualitas (minimal D4/S1)	0	92	Pendidikan
							Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Rekomendasi Perizinan yang Diterbitkan (PAUD/SD/SMP dan Pendidikan Non Formal)	0	90	Pendidikan
							Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pemenuhan Pembinaan Perpustakaan	100%	100%	Perpustakaan
			Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Indeks Kesehatan	0,77	0,8	Program Pemenuhan Upaya	Jumlah Logistik Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	61.053	65.424	Kesehatan

No	Prioritas Daerah	Indikator	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas (Kepmen050/5889)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
							Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah SDM Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Sesuai Sasaran Ibu Hamil	1.654	1.654	
						Jumlah Logistik Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		58.41	62.45		
						Jumlah SDM Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		1.654	1.654		
						Jumlah Logistik Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		55,351	59,317		
						Jumlah SDM Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		1.698	1.698		
						Jumlah Logistik Pelayanan Kesehatan Balita		284.085	302.449		
						Jumlah SDM Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Balita		1.558	1.558		
						Jumlah Logistik Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar		555.505	583.329		
						Jumlah SDM Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar		798	798		
						Jumlah Logistik Skrining Pelayanan		2,211,973	2,370,426		

No	Prioritas Daerah	Indikator	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas (Kepmen050/5889)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
								Kesehatan Usia 15-59 Tahun			
								Jumlah SDM Kesehatan yang Melakukan Skrining Pelayanan Kesehatan Usia 15-59 Tahun	978	978	
								Jumlah Logistik Pelayanan Kesehatan Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas	190,92	204,597	
								Jumlah SDM Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas	1.649	1.649	
								Jumlah Logistik Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	707.620	758.311	
								Jumlah SDM Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	834	834	
								Jumlah Logistik Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	42.316	45.349	
								Jumlah SDM Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Sesuai Sasaran Penderita Diabetes Mellitus	858	858	
								Jumlah Logistik Pelayanan Kesehatan Sesuai Sasaran ODGJ Berat	4.219	4.523	
								Jumlah SDM Kesehatan yang	44	44	

No	Prioritas Daerah	Indikator	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas (Kepmen050/5889)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
								Memberikan Pelayanan Kesehatan Sesuai Sasaran ODGJ Berat			
								Jumlah Logistik Pelayanan Kesehatan Sesuai Sasaran Orang Terduga TBC	48.751	52.245	
								Jumlah SDM Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Sesuai Sasaran Orang Terduga TBC	284	284	
								Jumlah Logistik Pelayanan Kesehatan Risiko Terinfeksi HIV	80.163	85.907	
								Jumlah SDM Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Risiko Terinfeksi HIV	328	328	
								Jumlah Balita Wasting yang Mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan	6.745	6.156	
								Jumlah Balita Stunting yang Mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan	8.746	7.982	
								Persentase Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	92%	95%	
								Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Puskesmas	81%	85.40%	
								Persentase Puskesmas dengan	85%	95%	

No	Prioritas Daerah	Indikator	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas (Kepmen050/58 89)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
								Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga	100	100	
								Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Institusi Pendidikan	100	100	
								Persentase Posyandu yang Berada pada Strata Purnama Mandiri	100	100	
			Meningkatkan Daya Saing Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	50,13	54	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	N/A	100%	Kepemudaan dan Olahraga
							Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	N/A	100%	Kepemudaan dan Olahraga
							Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pemenuhan Pengembangan Kebudayaan	N/A	100%	Kebudayaan
							Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pemenuhan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%	100%	Pariwisata
							Program Pemasaran Pariwisata	Persentase dokumen hasil penguatan promosi dan laporan kegiatan pariwisata	N/A	100%	Pariwisata
							Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan	Persentase ekonomi kreatif yang dikembangkan	N/A	100%	Pariwisata

No	Prioritas Daerah	Indikator	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas (Kepmen050/5889)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
							Hak Kekayaan Intelektual				
							Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	N/A	100%	Pariwisata
			Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	62,17	65	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	100%	100%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							Program Perlindungan Perempuan	Prosentase Perlindungan terhadap Perempuan	100%	100%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga	100%	100%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Profil Gender dan Penyusunan Pedoman Pengumpulan Data Terpilah	100%	100%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Seluruh Klaster Hak Anak	100%	100%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Perlindungan terhadap Anak	100%	100%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Prioritas Daerah	Indikator	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas (Kepmen050/5889)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
			Meningkatkan Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,47	1,05	Program Pengendalian Penduduk	Persentase rekomendasi kebijakan dalam rangka pengendalian kependdkan	100	1	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
								Persentase Kampung KB yang dibina dan sesuai dengan standar penilaian	30	70	
								Persentase Rumah Data di Kampung KB yang memenuhi klasifikasi Paripurna	25	40	
								Persentase ketersediaan pemetaan dan sistem infomasi pengendalian kependudukan	100	100	
							Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern	71%	71,75%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
								Persentase Peserta Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	26,65%	27,37%	
								Persentase Hasil Kegiatan Advokasi, Penyuluhan dan Pendayagunaan Keluarga	90,00%	100,00%	
							Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan KS	92%	92,75%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
								Prosentase Keluarga Beresiko yang Mendapat Pendampingan dan Ditindaklanjuti	93%	95,00%	
								Prosentase Kerjasama dengan Mitra Kerja	N/A	100%	

No	Prioritas Daerah	Indikator	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas (Kepmen050/5889)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
2	Meningkatkan Kondusifitas Daerah dengan Pengembangan Perilaku Masyarakat yang Berlandaskan Keagamaan, Toleransi, dan Gotong Royong	Indeks Kesalehan Sosial				78					
			Mewujudkan Lingkungan yang Kondusif, Aman, dan Tertib	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	2,02	2,5	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Perda dan Perkada yang Ditegakan	100%	100%	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
							Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	0,41%	0,27%	Kesatuan Bangsa dan Politik
							Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik di Daerah	8,61%	25,94%	Kesatuan Bangsa dan Politik
							Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	14,29%	42,86%	Kesatuan Bangsa dan Politik
							Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	0,33%	2,73%	Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Prioritas Daerah	Indikator	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas (Kepmen050/5889)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
							Ekonomi, Sosial, dan Budaya				
							Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pembinaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	N/A	38,83%	Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat secara Komprehensif	Angka Pertumbuhan Ekonomi			4,63	5,27-5,41					
		Tingkat Pengangguran Terbuka			7,88	7,2					
		Persentase Penduduk Miskin			6,92	5,5					
			Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Unggulan	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	52,63%	55,21%	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	22,833	30	Kelautan dan Perikanan
		Persentase Realisasi Investasi		N/A	5,12%	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	21,405	22,383	Kelautan dan Perikanan	
		Persentase Daya Saing Produk Unggulan Lokal		20,45%	100,00%	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Kelompok Usaha Perikanan di Kabupaten yang Diawasi	N/A	165	Kelautan dan Perikanan	
		Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata		3,25%	3,73%	Program Pengolahan dan	Jumlah Kelompok yang Menerima Informasi,	N/A	57	Kelautan dan Perikanan	

No	Prioritas Daerah	Indikator	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas (Kepmen050/5889)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
							Pemasaran Hasil Perikanan	Pemasaran, Kelembagaan, dan Mutu Hasil Pemasaran			
							Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Lumbung Pangan yang Aktif	0%	64,47%	Pangan
							Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Jumlah Unit Usaha Pertanian yang Dilakukan Pengawasan dan Pembinaan	90%	100%	Pertanian
							Program Pengembangan Ekspor	Prosentase Meningkatnya Pelaku Usaha yang siap melakukan Ekspor	58.61%	69.60%	Perdagangan
							Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	70.00%	100%	Perdagangan
							Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Prosentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang disubsidi yang dimonitor/ dipantau	36.11%	100.00%	Perdagangan
							Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Prosentase jumlah produk IKM yang difasilitasi promosi penggunaan Produk Dalam Negeri	23%	33%	Perdagangan
							Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan tera/tera ulang UTP	81.63%	100.00%	Perdagangan

No	Prioritas Daerah	Indikator	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas (Kepmen050/5889)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
							Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Peningkatan Jumlah IKM	9.46%	16.37%	Perindustrian
							Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang Memiliki Izin/Legalitas yang Diawasi	24.95%	100%	Perindustrian
							Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Prosentase data industri dan data kawasan industri yang dilakukan pengolahan, analisis, dan publikasi/diseminasi	24.95%	100%	Perindustrian
							Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pengembangan Potensi Investasi Regional di dalam Aplikasi Investasi	25%	75%	Penanaman Modal
						Persentase Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Keterpaduan		5%	100%		
							Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Minat Investasi	20%	60%	Penanaman Modal
							Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha pada Sektor Industri dengan Skala Usaha Menengah dan Besar yang Melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal	70%	75%	Penanaman Modal
							Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan Investasi	90%	91%	Penanaman Modal

No	Prioritas Daerah	Indikator	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas (Kepmen050/5889)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
							Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data Perizinan yang Diolah dan Diinformasikan Melalui Sistem Pelaporan <i>Online</i>	70%	85%	Penanaman Modal
							Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	21.43%	64,29%	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
							Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Update dan Jumlah Koperasi Aktif yang Dilakukan Penilaian dan Peningkatan	27.03%	81.09%	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
							Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Jumlah Koperasi Berkualitas	17.86%	53.58%	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
							Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase <i>Update</i> dan Jumlah Koperasi Aktif yang Dilakukan Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	13,29%	80.37%	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
							Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Prosentase Usaha Mikro yang Diberdayakan	1,84%	9.4%	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
							Program Pengembangan UMKM	Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang Terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB	2.14%	6,42%	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						Persentase Usaha Mikro yang Dipromosikan		1,27%	4,80%		

No	Prioritas Daerah	Indikator	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas (Kepmen050/5889)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
			Meningkatkan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	0.7107	0,7507	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Mandiri	15	45	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Desa yang Menghasilkan PADES	1	4	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Prosentase Lembaga Masyarakat yang Difasilitasi	100%	100%	
							Program Penataan Desa	Jumlah Rekomendasi Penataan Desa	1	4	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi Kerjasamanya	1	4	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	77	78,5	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase 12 Jenis Pangan Strategis yang Mengalami Kenaikan Harga < 5-10%	100%	100%	Pangan
								Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah	10,78%	29,15%	
								Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan	84,5	86	
							Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan	1	3	Pangan
								Persentase jumlah Desa Rentan Rawan Pangan yang Diintervensi	60%	100%	
							Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu	75%	90%	Pangan

No	Prioritas Daerah	Indikator	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas (Kepmen050/5889)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
								dan Keamanan Pangan			
							Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian	15%	60%	Pertanian
							Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	45%	75%	Pertanian
							Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penanganan Jumlah Penyakit Hewan yang Ditangani	53%	80%	Pertanian
								Persentase Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan SNI	62	68	Pertanian
							Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani yang Meningkatkan Kapasitasnya	50%	80%	Pertanian
			Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,05	66,52	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Ketersediaan Data Makro dan Mikro Ketenagakerjaan	100%	100%	Tenaga Kerja
							Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan BLK yang Ditempatkan	51%	67,30%	Tenaga Kerja
								Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang terakreditasi	25	40	Tenaga Kerja
							Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja Berdasarkan Lowongan Kerja yang Terdaftar	94,74%	95,45%	Tenaga Kerja

No	Prioritas Daerah	Indikator	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas (Kepmen050/5889)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
								Jumlah Wirausaha Baru	244	2000	
							Program Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan	65%	85%	Tenaga Kerja
							Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Penurunan Animo Masyarakat Bertransmigrasi	12	24	Transmigrasi
			Meningkatnya Cakupan Penanganan PPKS	Persentase PPKS yang Berdaya	N/A	5%	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang Meningkatkan Perannya dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	67,99%	83,82%	Sosial
							Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan	0%	100%	Sosial
							Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	19,17%	100%	Sosial
							Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100,00 %	100,00%	Sosial
							Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	85%	100%	Sosial
							Program Pengelolaan	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan TMP	80,00%	90,00%	Sosial

No	Prioritas Daerah	Indikator	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas (Kepmen050/5889)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
							Taman Makam Pahlawan				
4	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi			71	75					
			Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah	Nilai SAKIP	72,52	80,5	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan	100%	100%	Perencanaan
							Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Afiriasi Konsistensi Program RPJMD/RPD dengan RKPD	100%	100%	Perencanaan
							Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Menjadi Kebijakan	22,22%	100%	Penelitian dan Pengembangan
						Persentase Inovasi Daerah yang Diimplementasikan		55,56%	100%		
							Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Sedang	Tinggi	Sekretariat Daerah
						Indeks Reformasi Hukum		Cukup	Baik		
						Prosentase Hasil Kebijakan yang Ditetapkan		100%	100		
							Program Perekonomian dan Pembangunan	Prosentase Rumusan Kebijakan Perekonomian yang Diselesaikan	100%	100	Sekretariat Daerah

No	Prioritas Daerah	Indikator	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas (Kepmen050/5889)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
								Prosentase Jumlah Perangkat Daerah yang Patuh terhadap Pemenuhan Administrasi Pembangunan	100%	100	
								Indeks Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	100	
				Maturitas SPIP	31,522	3,37	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Prosentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan 3E	1%	100%	Pengawasan Urusan Pemerintahan
							Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Prosentase Perangkat Daerah yang Memenuhi Kriteria Menuju Zona Integritas	100%	100%	Pengawasan Urusan Pemerintahan
							Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase pemenuhan kegiatan pada program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	100%	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
							Program Pengelolaan Arsip	Persentase pemenuhan kegiatan pada program pengelolaan arsip	100%	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
							Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase pemenuhan kegiatan pada program perizinan penggunaan arsip	100%	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
							Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase pemenuhan kegiatan pada program perlindungan dan penyelamatan arsip	100%	100%	Pengelolaan Arsip
				Nilai Indeks Kemandirian Fiskal	0,505	0,53	Program Pengelolaan	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak	77%	80%	Keuangan

No	Prioritas Daerah	Indikator	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas (Kepmen050/5889)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
							Pendapatan Daerah	Persentase Pemenuhan Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	100%	100%	
						Persentase Capaian Target Pajak Daerah		100%	100%		
						Persentase Pemenuhan Layanan dan Pelaporan Data Informasi Pendapatan Daerah		100%	100%		
				Opini BPK	WTP	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rata-rata <i>Mandatory Spending</i> , Penyusunan KUA PPAS, Penyampaian Nota Keuangan dan Persetujuan RAPBD	N/A	98%	Keuangan
						Kesesuaian Waktu penyampaian Laporan Keuangan Daerah Kepada BPK, kesesuaian penyerapan anggaran terhadap rencana anggaran		N/A	96%		
						Persentase Kesesuaian Dokumen Perncairan		N/A	100%		
							Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rata-rata Persentase Capaian Pengamanan Aset Daerah	N/A	70%	Keuangan
						Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Digunauahakan		N/A	95%		
				Indeks Profesionalitas ASN	85	81	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan ASN	40	40	Kepegawaian

No	Prioritas Daerah	Indikator	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas (Kepmen050/58 89)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
								Nilai Aspek Pengadaan ASN	40	40	
								Nilai Aspek Pengembangan Karier	62,5	75	
								Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	40	40	
								Nilai Aspek Manajemen Kinerja	70	80	
								Nilai Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	37,5	40	
								Nilai Aspek Perlindungan dan Pelayanan	16	16	
								Nilai Aspek Sistem Informasi Kepegawaian	19	24	
							Program Pengembangan SDM	Nilai Aspek Pengembangan Karier	62,5	75	Pendidikan dan Pelatihan
				Indeks SPBE	3,08	3,21	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Prosentase Layanan Keterbukaan Daftar Informasi Publik	100%	100%	Komunikasi dan Informatika
							Program Aplikasi Informatika	Persentase Penyediaan Layanan Aplikasi dan Layanan Internet	100%	100%	Komunikasi dan Informatika
							Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengaman Informasi	Prosentase Layanan Keamanan Informasi	45%	75%	Komunikasi dan Informatika
							Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Statistik Sektoral	55%	75%	Statistik

No	Prioritas Daerah	Indikator	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas (Kepmen050/5889)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
				Indeks Pelayanan Publik	4,12	4,4	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Pemenuhan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	89%	100%	Sekretariat DPRD
							Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Perekaman KTP-el	99%	99%	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Cakupan Kepemilikan KIA		50%	80%		
						Cakupan SKPWNI yang Diterbitkan		100%	100%		
						Cakupan SKDWNI yang Diterbitkan		100%	100%		
							Program Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0 s/d 18 Tahun	98%	100%	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Cakupan Kepemilikan Akte Perkawinan		100%	100%		
						Cakupan Akte Kematian		100%	100%		
						Cakupan Akte Perceraian		100%	100%		
						Cakupan Kepemilikan Akte Pengesahan Anak		100%	100%		
							Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik	100%	100%	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Persentase OPD dan Lembaga Non Pemerintah yang Melakukan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		53,23%	100%		
							Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	100%	100%	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Prioritas Daerah	Indikator	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas (Kepmen050/5889)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
							Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan Trantibum yang Difasilitasi	100%	100%	Kewilayahan
							Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Laporan Keuangan dan Administrasi Baik	100%	100%	Kecamatan Kelapa Dua
							Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Terpenuhinya Paten sesuai dengan Standar	100%	100%	Kecamatan Kelapa Dua
							Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelompok Masyarakat yang Mendapat Pembinaan/Pemberdayaan	100%	100%	Kecamatan Kelapa Dua
							Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	Kecamatan Kelapa Dua
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100%	Kecamatan Balaraja
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	Kecamatan Balaraja
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	Kecamatan Balaraja

No	Prioritas Daerah	Indikator	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas (Kepmen050/5889)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
							KETERTIBAN UMUM				
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase laporan trantibum yang di fasilitasi	100%	100%	Kecamatan Cikupa
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik	90.10%	90.40%	Kecamatan Cikupa
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	65.00%	80.00%	Kecamatan Cikupa
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terpenuhinya paten sesuai dengan standart dan Infrastruktur yang terpelihara	98.55%	98.88%	Kecamatan Cikupa
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan trantibum yang ditangani	93,25%	95,00%	Kecamatan Cisauk
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	90,00%	95,50%	Kecamatan Cisauk

No	Prioritas Daerah	Indikator	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas (Kepmen050/5889)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	90,00%	95,50%	Kecamatan Cisauk
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan paten sesuai dengan standart dan Insfrastruktur dasar yang terpelihara	87,5	89,5	Kecamatan Cisauk
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	90,00%	93,75%	Kecamatan Cisauk
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase laporan trantibum yang di fasilitasi	100%	100%	Kecamatan Cisoka
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik	97%	100%	Kecamatan Cisoka
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terpenuhinya paten sesuai dengan standart	100%	100%	Kecamatan Cisoka
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	100%	100%	Kecamatan Cisoka

No	Prioritas Daerah	Indikator	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas (Kepmen050/5889)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	"Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug	100%	100%	Kecamatan Curug
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaaan Kec. Curug	78%	100%	Kecamatan Curug
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Curug	65%	100%	Kecamatan Curug
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik di kecamatan Curug	80%	100%	Kecamatan Curug
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase laporan trantibum yang difasilitasi	100%	100%	Kecamatan Gunung Kaler
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik	97%	100%	Kecamatan Gunung Kaler
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase terpenuhinya paten sesuai dengan standart	100%	100%	Kecamatan Gunung Kaler

No	Prioritas Daerah	Indikator	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas (Kepmen050/5889)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
							PELAYANAN PUBLIK				
								Persentase infrastruktur dasar yang terpelihara	97%	100%	Kecamatan Gunung Kaler
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase laporan trantibum yang di fasilitasi	100%	100%	Kecamatan Jambe
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik	42.86%	79.89%	Kecamatan Jambe
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	65.00%	80.00%	Kecamatan Jambe
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terpenuhinya paten sesuai dengan standart dan Infrastruktur yang terpelihara	89%	89.70%	Kecamatan Jambe
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase laporan trantibum yang di fasilitasi	71.40%	100%	Kecamatan Jayanti

No	Prioritas Daerah	Indikator	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas (Kepmen050/5889)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik	88.88%	100%	Kecamatan Jayanti
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terpenuhinya paten sesuai dengan standart	100%	100%	Kecamatan Jayanti
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/ pemberdayaan	88%	100%	Kecamatan Jayanti
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	100%	100%	Kecamatan Kelapa Dua
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	Kecamatan Kelapa Dua
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	10%	10%	Kecamatan Kelapa Dua
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	Kecamatan Kelapa Dua

No	Prioritas Daerah	Indikator	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas (Kepmen050/5889)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	Kecamatan Kelapa Dua
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase laporan trantibum yang di fasilitasi	100%	100%	Kecamatan Kemiri
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik	97%	100%	Kecamatan Kemiri
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terpenuhinya paten sesuai dengan standart	100%	100%	Kecamatan Kemiri
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	100%	100%	Kecamatan Kemiri
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100%	Kecamatan Kosambi
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	88%	100%	Kecamatan Kosambi

No	Prioritas Daerah	Indikator	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas (Kepmen050/5889)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	71,40%	100%	Kecamatan Kosambi
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	88,80%	100%	Kecamatan Kosambi
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase laporan trantibum yang di fasilitasi	100%	100%	Kecamatan Kresek
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik	42.86%	79.89%	Kecamatan Kresek
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	65.00%	80.00%	Kecamatan Kresek
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terpenuhinya paten sesuai dengan standart dan Infrastruktur yang terpelihara	89%	89.70%	Kecamatan Kresek
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase laporan trantibum yang di fasilitasi	100%	100%	Kecamatan Kronjo

No	Prioritas Daerah	Indikator	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas (Kepmen050/5889)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	jumlah desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik	2	100	Kecamatan Kronjo
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terpenuhinya paten sesuai dengan standart dan Infrastruktur yang terpelihara	89%	89.70%	Kecamatan Kronjo
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/ pemberdayaan	100%	100%	Kecamatan Kronjo
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	100%	100%	Kecamatan Legok
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	100	Kecamatan Legok
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	75	100	Kecamatan Legok
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	88.88	100	Kecamatan Legok

No	Prioritas Daerah	Indikator	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas (Kepmen050/5889)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan peenyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100%	Kecamatan Mauk
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	Kecamatan Mauk
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	Kecamatan Mauk
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	88.88	92	Kecamatan Mauk
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase laporan trantibum yang di fasilitasi	100%	100%	Kecamatan Mekar Baru
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik	60%	75%	Kecamatan Mekar Baru
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	60%	75%	Kecamatan Mekar Baru

No	Prioritas Daerah	Indikator	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas (Kepmen050/5889)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terpenuhinya paten sesuai dengan standart dan Infrastruktur yang terpelihara	70%	85%	Kecamatan Mekar Baru
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Pagedangan	87%	95%	Kecamatan Pagedangan
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Kec. Pagedangan	85.00%		Kecamatan Pagedangan
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditangani	75%	90%	Kecamatan Pagedangan
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik di kecamatan Pagedangan	88%	95%	Kecamatan Pagedangan
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase laporan trantibum yang difasilitasi	100%	100%	Kecamatan Pakuhaji

No	Prioritas Daerah	Indikator	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas (Kepmen050/5889)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik	97%	100%	Kecamatan Pakuhaji
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terpenuhinya paten sesuai dengan standart	100%	100%	Kecamatan Pakuhaji
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	100%	100%	Kecamatan Pakuhaji
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase laporan trantibum yang di fasilitasi	100%	100	Kecamatan Panongan
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik	100%	100	Kecamatan Panongan
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terpenuhinya paten sesuai dengan standart	92%	95%	Kecamatan Panongan
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	14.29	28.57	Kecamatan Panongan

No	Prioritas Daerah	Indikator	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas (Kepmen050/5889)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase laporan trantibum yang di fasilitasi	60%	100%	Kecamatan Pasar Kemis
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik	100%	100%	Kecamatan Pasar Kemis
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terpenuhinya paten sesuai dengan standart	100%	100%	Kecamatan Pasar Kemis
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/ pemberdayaan	100%	100%	Kecamatan Pasar Kemis
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase laporan trantibum yang di fasilitasi	100%	100%	Kecamatan Rajeg
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik	100%	100%	Kecamatan Rajeg
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase terpenuhinya paten sesuai dengan standart	100%	100%	Kecamatan Rajeg

No	Prioritas Daerah	Indikator	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas (Kepmen050/5889)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
							PELAYANAN PUBLIK				
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	100%	100%	Kecamatan Rajeg
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	89.8	92.45	Kecamatan Sepatan
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	80	90	Kecamatan Sepatan
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	75	100	Kecamatan Sepatan
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan laporan keuangan baik	88.88	92	Kecamatan Sepatan
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan peenyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	100	Kecamatan Sepatan Timur

No	Prioritas Daerah	Indikator	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas (Kepmen050/5889)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	84	90	Kecamatan Sepatan Timur
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100	100	Kecamatan Sepatan Timur
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	84.25	88	Kecamatan Sepatan Timur
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan peenyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	89.80%	92.45%	Kecamatan Sindang Jaya
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	80%	90	Kecamatan Sindang Jaya
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	75	100	Kecamatan Sindang Jaya
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	88.88	92	Kecamatan Sindang Jaya

No	Prioritas Daerah	Indikator	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas (Kepmen050/5889)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
							Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	43%	71%	Kecamatan Solear
							Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pemenuhan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	70%	89%	Kecamatan Solear
							Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pemenuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	70%	89%	Kecamatan Solear
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	88%	100%	Kecamatan Solear
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100%	Kecamatan Sukadiri
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	90	Kecamatan Sukadiri
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	Kecamatan Sukadiri

No	Prioritas Daerah	Indikator	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas (Kepmen050/5889)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	88.88%	92	Kecamatan Sukadiri
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan peenyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100%	Kecamatan Sukamulya
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	Kecamatan Sukamulya
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	Kecamatan Sukamulya
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	Kecamatan Sukamulya
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan peenyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	89.80%	92.45%	Kecamatan Teluknaga
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	80%	90%	Kecamatan Teluknaga

No	Prioritas Daerah	Indikator	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas (Kepmen050/5889)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	75%	100%	Kecamatan Teluknaga
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	88.88%	92%	Kecamatan Teluknaga
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	80	90	Kecamatn Tigaraksa
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan peenyenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	89,8	92,45	Kecamatn Tigaraksa
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	75	100	Kecamatn Tigaraksa
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	88,88	92	Kecamatn Tigaraksa
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	Kecamatn Tigaraksa

No	Prioritas Daerah	Indikator	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas (Kepmen050/5889)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
5	Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur yang Terpadu dan Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur				80					
			Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur	Indeks Pembangunan Infrastruktur	27	35	Program Penyelenggaraan Jalan	Prosentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	92,08%	94%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase Realisasi Pola Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW	8%	55%	Program Pengelolaan SDA	Persentase Infrastruktur Sungai dan Pembuang dalam Kondisi Baik	63,20%	84%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Rasio Luas Kawasan Permukiman, Perumahan, dan Pemukiman yang Layak	0,9433	0,9442	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Infrastruktur Drainase yang Tertangani	11,43%	14,43%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Rasio Konektivitas Kabupaten		0,83	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Presentase Penataan Ruang yang Terselenggara	65	76	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Terselenggara	35	50	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Program Penataan Bangunan Gedung	Prosentase Pemenuhan Pembangunan Gedung yang Berkualitas Baik	55	70	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan Sarana Air Bersih	64,67%	88,67%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
								Prosentase Terpenuhinya Pelayanan Pendistribusian Air Bersih bagi Masyarakat	100%	100%	

No	Prioritas Daerah	Indikator	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas (Kepmen050/5889)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
							Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Sarana Sanitasi yang Dibangun	96,48%	96,68%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Persentase Cakupan Layanan Penyedotan Lumpur Tinja		0,14%	0,42%		
						Program Pengembangan Permukiman	Persentase Peningkatan Kualitas Permukiman Tidak Tertata	100%	100%	Perumahan, dan Kawasan Permukiman	
							Persentase Sarana dan Prasarana TPU yang Terbangun	14,14%	100%		
							Persentase Sarana dan Prasarana TPU yang Terpelihara	11,11%	100%		
						Program Pengembangan Perumahan	Persentase Pemenuhan Pembinaan Pengelolaan Penyelenggaraan, Pendataan dan Perencanaan Perumahan, Rumah Susun dan Apartemen	100%	100%	Perumahan, dan Kawasan Permukiman	
							Persentase Pemenuhan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	100%	100%		
						Program Kawasan Permukiman	Persentase Pemenuhan Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman	100%	100%	Perumahan, dan Kawasan Permukiman	
							Persentase Rumah Layak Huni	5,52%	14,03%		
						Program Peningkatan Prasarana,	Persentase Perumahan yang Memenuhi Standar	42,39%	54,31%	Perumahan, dan Kawasan Permukiman	

No	Prioritas Daerah	Indikator	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas (Kepmen050/5889)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
							Sarana, dan Utilitas Umum				
							Program Penatagunaan Tanah	Persentase Kebutuhan Lahan bagi Kepentingan Umum	100	100	Pertanahan
						Tersedianya Jaringan Angkutan yang Beroperasi		N/A	7		
							Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah Terminal yang terbangun	N/A	3	Dinas Perhubungan
						Rasio tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan		N/A	0.7		
						Persentase Penanganan Titik Kemacetan Lalu Lintas		2	100.00%		
						Persentase Perlangkapan Jalan		75%	92%		
			Meningkatkan Kualitas Hidup yang Sehat dan Tangguh terhadap Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,88	56,89	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Dibuat	3	3	Lingkungan Hidup
							Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian terhadap Kinerja Masyarakat	35	30	Lingkungan Hidup
							Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan Udara, Air	50%	50%	Lingkungan Hidup
						10%			10%		

No	Prioritas Daerah	Indikator	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas (Kepmen050/5889)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
							Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Presentase Tindak Lanjut Pengaduan Pengelolaan Limbah B3	100%	100%	Lingkungan Hidup
							Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Pelaku Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	150	750	Lingkungan Hidup
							Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	100%	Lingkungan Hidup
							Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Kawasan Keanekaragaman Hayati yang Terkelola	1,00%	3,60%	Lingkungan Hidup
							Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pemenuhan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional	N/A	100%	Lingkungan Hidup
							Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola	60	64	Lingkungan Hidup
								Indeks Ketangguhan Desa	100%	100%	Ketenteraman dan Ketertiban

No	Prioritas Daerah	Indikator	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas (Kepmen050/5889)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Bidang urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
				Indeks Resiko Bencana	130,45	115	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana sesuai Jenis Ancaman Bencana			Umum serta Perlindungan Masyarakat
								Persentase Korban Bencana yang Mendapat Layanan Penyelamatan dan Evakuasi			
							Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Korban Kebakaran dan Non Kebakaran yang Mendapat Layanan Pencegahan, Penyelamatan dan Evakuasi	100%	100%	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan uraian program yang telah dijabarkan ada tabel di atas merupakan sebuah amanat yang harus diprioritaskan. Selain program tersebut, prioritas pembangunan juga harus diarahkan untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewenangan Kabupaten. Penerapan SPM telah dituangkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Program penerapan SPM dituangkan pada tabel berikut ini :

Tabel 6.4 Target Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024 – 2026

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target SPM			Perangkat Daerah
		2024	2025	2026	
A	SPM PENDIDIKAN				Dinas Pendidikan
1	Pendidikan Anak Usia Dini	100	100	100	Dinas Pendidikan
2	Pendidikan Dasar	100	100	100	Dinas Pendidikan
3	Pendidikan Kesetaraan	100	100	100	Dinas Pendidikan
B	SPM KESEHATAN				Dinas Kesehatan
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	100	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	100	100	Dinas Kesehatan
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100	100	Dinas Kesehatan
4	Pelayanan kesehatan balita	100	100	100	Dinas Kesehatan
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	100	100	Dinas Kesehatan
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	100	100	Dinas Kesehatan
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	100	100	Dinas Kesehatan
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	100	100	Dinas Kesehatan
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100	100	100	Dinas Kesehatan
10	Pelayan kesehatan ODGJ	100	100	100	Dinas Kesehatan
11	Pelayanan kesehatan orang dengan tuberculosis	100	100	100	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	100	100	100	Dinas Kesehatan
C	SPM PEKERJAAN UMUM DAN PR				Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	100	100	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	100	100	100	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
D	SPM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMRUKIMAN				Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang	100	100	100	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target SPM			Perangkat Daerah
		2024	2025	2026	
	layak huni bagi korban bencana dikabupaten				
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	100	100	100	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
E	SPM KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum				Satuan Polisi Pamong Praja
2	Pelayanan informasi rawan bencana	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
F	SPM SOSIAL	100	100	100	Dinas Sosial
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100	100	100	Dinas Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100	100	100	Dinas Sosial
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100	100	100	Dinas Sosial
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100	100	100	Dinas Sosial
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	100	Dinas Sosial

Tabel 6.15 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Tangerang 2024 – 2026

Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	(Tujuan/Impact/Outcome)			2022	2023	Tahun 2024		Target 2025		Target 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tujuan 1.1 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			72,97		73,55		73,82		74,1		74,1		
Sasaran 1.1 Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan			0,68		0,69		0,7		0,71		0,71		
Program Pengelolaan Pendidikan														
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Peserta Didik Usia 7-12 tahun dibagi Jumlah Penduduk Usia 7-12 tahun	Persen	93,50	94,50	95,00	488,606,428,698	95,5	4,917,066,008,007	96,00	496,956,331,621,941	96,00	496,956,331,621,941	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Jumlah Peserta Didik Usia 13-15 tahun dibagi Jumlah Penduduk Usia 13-15 tahun	Persen	77,30	79,3	80,00	4,334,696,346,326	80,5	45,127,986,431,423	81,00	500,120,153,060,991	81,00	500,120,153,060,991	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar (APIK) PAUD	Jumlah Peserta Didik Usia 5-6 tahun dibagi Jumlah Penduduk Usia 5-6 tahun	Persen	26,19	49	50,60	44,692,893,806	53	41,392,893,806	54,60	45,407,893,806	54,60	45,407,893,806	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik kesetaraan usia 7-18 Tahun dibagi Jumlah penduduk usia 7-18 Tahun	Persen	0,12	0,11									Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/ Kesetaraan usia 7-18 Tahun yang lulus pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C	Persen			80,00	18,700,600,000	83,00	13,415,600,000	86,00	13,695,600,000	86,00	13,695,600,000	Dinas Pendidikan
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase implementasi kurikulum muatan lokal	Jumlah Peserta Didik yang dapat baca tulis Al Quran	Persen	100%	100%	100%	400,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	Dinas Pendidikan
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi minimal D4/S1	Rata-Rata Capaian Outcome pada Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persen	100	100	90%	220,000,000	91%	240,000,000	92%	260,000,000	92%	260,000,000	Dinas Pendidikan
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Rekomendasi perizinan Pendidikan yang diterbitkan (PAUD/SD/SMP)	Rata-Rata Capaian Outcome pada Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persen	0	0	80%	400,000,000	85%	400,000,000	90%	400,000,000	90%	400,000,000	Dinas Pendidikan

Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Definisi Operasional	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPKD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPKD		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab
				2022	2023	Tahun 2024		Target 2025		Target 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Presentase pembinaan perpustakaan perpuustakaan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program Pembinaan Perpuustakaan	Persen	1	1	1	2.575.000,000	1	2.703.750,000	1	2.838.937.500	1	2.838.937.500	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan
Sasaran 1.2. Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Indeks Kesehatan			0,77		0,78		0,79		0,8		0,8		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit/Rujukan	Jumlah Logistik pelayanan kesehatan sesuai sasaran Ibu Hamil	Rasio	0.10	0.10	0.10	672.645.538.596	0.10	686.098.449.370	0.10	701.192.615.260	0.10	701.192.615.260	Dinas Kesehatan
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Terakreditasi	Jumlah SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan sesuai sasaran Ibu Hamil	Persen	55.56%	74.07%	85.19%		92.56%		100.00%		100.00%		Dinas Kesehatan
	Persentase Logistik pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Logistik pelayanan kesehatan sesuai sasaran Ibu Hamil	Persen	100	100	100		100		100		65.424		Dinas Kesehatan
	Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Jumlah SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai sasaran Ibu Hamil	Persen	100	100	100		100		100		1654		Dinas Kesehatan
	Persentase Logistik pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Logistik pelayanan kesehatan sesuai sasaran Bayi Baru Lahir	Persen	100	100	100		100		100		62.450		Dinas Kesehatan
	Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai sasaran Bayi Baru Lahir	Persen	100	100	100		100		100		1654		Dinas Kesehatan
	Persentase Logistik pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Logistik pelayanan kesehatan sesuai sasaran Balita	Persen	99,75	100	100		100		100		59.317		Dinas Kesehatan
	Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai sasaran Balita	Persen	100	100	100		100		100		1698		Dinas Kesehatan
	Persentase Logistik pelayanan kesehatan Balita	Jumlah Logistik pelayanan kesehatan sesuai sasaran Usia Pendidikan Dasar	Persen	88,31	100	100		100		100		302.449		Dinas Kesehatan
	Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Balita	Jumlah SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai sasaran Balita	Persen	100	100	100		100		100		1558		Dinas Kesehatan

Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/Outcome	Definisi Operasional	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RKRPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Peringkat Daerah Penanggung Jawab				
				2022	2023	Tahun 2024		Target 2025		Target 2026			Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		saasran Usia Pendidikan Dasar														
	Persentase Logatik Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Logistik Skriming Pelayanan Kesehatan Usia 15-59 tahun	Persen	58,92	100	100	100	100	100	100	583.329				Dinas Kesehatan	
	Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Usia Pendidikan Dasar	Jumlah SDM Kesehatan yang melakukan Skriming Pelayanan Kesehatan Usia 15-59 tahun	Persen	100	100	100	100	100	100	100	798				Dinas Kesehatan	
	Persentase Logatik Skriming Pelayanan Kesehatan Usia 15-59 tahun	Jumlah Logistik pelayanan kesehatan sesuai sasaran Warga Negara Usia 60 tahun keatas	Persen	79,07	100	100	100	100	100	100	2.370.426				Dinas Kesehatan	
	Persentase SDM Kesehatan yang melakukan Skriming Pelayanan Kesehatan Usia 15-59 tahun	Jumlah SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai saasaran Warga Negara Usia 60 tahun keatas	Persen	100	100	100	100	100	100	100	978				Dinas Kesehatan	
	Persentase Logatik pelayanan Kesehatan Warga Negara Usia 60 tahun keatas	Jumlah Logistik pelayanan kesehatan sesuai saasaran Penderita Hipertensi	Persen	66,36	100	100	100	100	100	100	204.597				Dinas Kesehatan	
	Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan Kesehatan Warga Negara Usia 60 tahun keatas	Jumlah SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai saasaran Penderita Hipertensi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	1.649				Dinas Kesehatan	
	Persentase Logatik pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Logistik pelayanan kesehatan sesuai saasaran Penderita Diabetes Mellitus	Persen	100	100	100	100	100	100	100	758.311				Dinas Kesehatan	
	Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai saasaran Penderita Diabetes Mellitus	Persen	100	100	100	100	100	100	100	834				Dinas Kesehatan	
	Persentase Logatik pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Logistik pelayanan kesehatan sesuai saasaran ODGJ Berat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	45.349				Dinas Kesehatan	
	Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai saasaran ODGJ Berat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	858				Dinas Kesehatan	

Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	(Tujuan/Impact/Outcome)			2022	2023	Tahun 2024		Target 2025		Target 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Persentase Logistik pelayanan kesehatan ODGJ Berat	Jumlah Logistik pelayanan kesehatan sesuai sasaran Orang Terduga TBC	Persen	77,84	100	100		100		100		4,523		Dinas Kesehatan
	Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan ODGJ Berat	Jumlah SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai sasaran Orang Terduga TBC	Persen	100	100	100		100		100		44		Dinas Kesehatan
	Persentase Logistik pelayanan kesehatan Orang Terduga TBC	Jumlah Logistik pelayanan kesehatan sesuai sasaran Risiko Terinfeksi HIV	Persen	88,40	100	100		100		100		52,245		Dinas Kesehatan
	Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Orang Terduga TBC	Jumlah SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai sasaran Risiko Terinfeksi HIV	Persen	100	100	100		100		100		284		Dinas Kesehatan
	Persentase Logistik pelayanan kesehatan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Balita Wasting yang mendapatkan Perawatan/ Pelayanan Kesehatan	Persen	100	100	100		100		100		85,907		Dinas Kesehatan
	Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Balita Stunting yang mendapatkan Perawatan/ Pelayanan Kesehatan	Persen	100	100	100		100		100		328		Dinas Kesehatan
	Persentase Balita Wasting yang mendapatkan Perawatan/ Pelayanan Kesehatan	Total capaian indikator Nasional Mutu dibagi jumlah indikator (13 Indikator) dikali 100%	Persen	99	100	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase Balita Stunting yang mendapatkan Perawatan/ Pelayanan Kesehatan	Angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Puskesmas	Persen	77.1	85	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Puskesmas	Persentase Puskesmas yang Memiliki 80% Obat dan Vaksin Esensial (Pemantauan dilaksanakan terhadap 40 item Obat Indikator)	Indeks	83.94	81.00	84.40		84.90		85.40		85.40		Dinas Kesehatan
	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	Jenis Alat Kesehatan yang ada di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar dibagi Total jenis Alat Kesehatan yang Tersedia dikali 100%	Persen	80.00%	85.00%	85.00%		90.00%		95.00%		95.00%		Dinas Kesehatan

Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Definis Operasional	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Peringkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022	2023	Tahun 2024		Target 2025		Target 2026			Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Persentase alat kesehatan memenuhi standar	Jumlah RS Terealisasi dan Jumlah RS Rujukan di Kabupaten dikali 100%	Persent	81,85%	80,00%	81,00%	82,00%	83,00%			83,00%		Dinas Kesehatan	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Rata-rata Capaian Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Persen	100	100	100	100	100	2.982.350,790	3.047.962,510	100	3.047.962,510	Dinas Kesehatan	
Program Sediaan Pangan, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sarana kemasruhan yang sesuai standar	Rata-rata Capaian P-IRT yang sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100			100		Dinas Kesehatan	
	Persentase sarana kemasruhan yang sesuai standar	Rata-rata Capaian sarana kemasruhan yang sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100			100		Dinas Kesehatan	
	Persentase TPM yang memenuhi syarat berdasarkan Inspeksi Kesehatan Lingkungan	Rata-rata Capaian TPM yang memenuhi syarat berdasarkan Inspeksi Kesehatan Lingkungan	Persen	100	100	100	100	100			100		Dinas Kesehatan	
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah PHBS Rumah Tangga	Jumlah PHBS Rumah Tangga	Rumah Tangga	46357	40278	42004	43155	44881	9.876.009,560	10.073.529,760	44881	10.295.147,420	Dinas Kesehatan	
	Persentase Organisasi Masyarakat kemitraan bidang kesehatan	Rata-rata Capaian Organisasi Masyarakat kemitraan bidang kesehatan	Persen	100	100	100	100	100			100		Dinas Kesehatan	
	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tahanan Rumah Tangga	Rata-rata Capaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tahanan Rumah Tangga	Persen	100	100	100	100	100			100		Dinas Kesehatan	
	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tahanan institusi pendidikan	Rata-rata Capaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tahanan institusi pendidikan	Persen	100	100	100	100	100			100		Dinas Kesehatan	
	Persentase Posyandu yang berada pada Strata Purnama Mandiri	Rata-rata Capaian Posyandu yang berada pada Strata Purnama Mandiri	Persen	100	100	100	100	100			100		Dinas Kesehatan	
Sasaran 1.3. Meningkatkan Daya Saing Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda			50,13		52	53	54			54			

Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Definisi Operasional	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RRPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Peningkat Daerah Pengembang Jawab
				2023		Tahun 2024		Target 2025		Target 2026		Target	Rp	
				2022	2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYASAING KEPEREMUDAAN	Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan	Persen	N/A	N/A	29%	6.325.000.000	33%	7.450.000.000	38%	8.700.000.000	100%	8.700.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Parwisata
				N/A	N/A	29	6.325.000.000	33	7.450.000.000	38	8.700.000.000	100	8.700.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Parwisata
Sasaran 1.4 Meningkatkan Penguasaan dan Penguasaan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender			62,17		63		64		65		65		
				100	100	100%	2.100.000.000	100%	970.000.000	100%	950.000.000	100%	950.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perlindungan Terhadap Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	Persen	100	100	100%	1.000.000	100%	1.050.000	100%	1.100.000	100%	1.100.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				100	100	100%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Profil Gender dan Penyusunan Pedoman Pengumpulan Data Terpilah	Jumlah kegiatan Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak	Persen	100%	100	100%	100.000.000	100%	125.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				100%	100	100%	1.010.000.000	100%	1.062.500.000	100%	1.125.000.000	100%	1.125.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sasaran 1.5 Mengembangkan Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti dibanding dengan semua jumlah rekomendasi yg	Persen	1,47		1,3		1,15		1,05		1,05		
				100%	100	100%	1.150.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.250.000.000	100%	1.250.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase rekomendasi kebijakan dalam rangka pengendalian kependudukan	Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti dibanding dengan semua jumlah rekomendasi yg	Persen	100	100	1	101.532.400	1	114.029.640	1	127.130.604	1	127.130.604	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				100	100	1	1.367.532.400	1	1.455.029.640	1	1.547.580.604	1	1.547.580.604	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Definisi Operasional	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Prangkat Dinas Penanggung Jawab		
				2022		2023		Tahun 2024		Target 2025				Target 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		dihasilkan kegiatan antisipasi dan koordinasi													
	Persentase Kampung KB yang dibina dan sesuai dengan standar penilaian		Persen	13	30	40	342.000.000	50	402.000.000	60	618.000.000	70	618.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Persentase Rumah Data di kampung KB yang memenuhi klasifikasi Paripurna		Persen	15	25	30	1.266.000.000	35	1.341.000.000	40	1.420.450.000	40	1.420.450.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Persentase ketersediaan pemetaan dan sistem informasi pengendalian kependudukan		Persen	100	100	100	545.000.000	100	584.000.000	100	652.000.000	100	652.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							8.863.712.488		9.401.051.551		11.186.804.336		11.186.804.336	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Angka Prevalensi Kontraresi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) adalah persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang sedang menggunakan alat/cara KB modern.		Persen	70,75	71	71,25	229.000.000	71,5	266.000.000	71,75	328.000.000	71,75	328.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Persentase Peserta Aktif Metode Kontraresi Jangka Panjang (implan, IUD, Operasi Wanita dan Medis Operasi Pria) terhadap Total Peserta Aktif KB		Persen	26,41	26,65	26,89	2.854.792.910	27,13	2.885.153.838	27,37	2.915.785.375	27,37	2.915.785.375	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Persentase hasil kegiatan advokasi, penyuluhan dan pendayagunaan keluarga dibidang dengan jumlah rencana target advokasi		Persen	90%	90%	90%	5.779.919.578	95%	6.249.897.713	100%	7.943.018.961	100%	7.943.018.961	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENERKATAN KELUARGA SE/MTTBA/RS							11.805.033.712		9.378.684.997		7.618.439.446		7.618.439.446	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Persentase capaian kinerja	rata2 capaian prosentase hasil	Persen	92	92	92	1.152.025.712	92,25	1.287.528.997	92,75	1.443.602.446	92,75	1.443.602.446	Dinas Pengendalian	

Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Definisi Operasional	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RKP		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPP	Peringkat Daerah Penyelenggara JawaB		
				2022	2023	Tahun 2024		Target 2025		Target 2026				Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik di Daerah	Kebangsaan dibagi jumlah cakupan orang yang memiliki hak politik di Kabupaten Tangerang. Jumlah partai politik dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik dibagi jumlah cakupan partai politik dan lembaga pendidikan di Kabupaten Tangerang	Persen	8,61%		8,61%	3.900.000,000	8,61%	3.900.000,000	8,61%	3.900.000,000	25,94%	3.900.000.000	Kesatuan Bangsa dan Politik	
Program Pembudayaan dan Persewaan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang jumlah pembinaan dibagi jumlah cakupan Organisasi Kemasyarakatan yang terdata di Kabupaten Tangerang	Persen	8,61%		14,29%	3.750.000,000	14,29%	3.750.000,000	14,29%	3.750.000,000	42,86%	3.750.000.000	Kesatuan Bangsa dan Politik	
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Jumlah kelompok Masyarakat yang mengikuti pembinaan dibagi jumlah cakupan Kelompok Masyarakat yang terdata di Kabupaten Tangerang	Persen	14,29%		0,91%	7.500.000,000	0,91%	7.500.000,000	0,91%	7.500.000,000	2,73%	7.500.000.000	Kesatuan Bangsa dan Politik	
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pembinaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Nasional dan Penanganan konflik dibagi jumlah cakupan orang yang tergabung dalam forum kewaspadaan di masyarakat di Kabupaten Tangerang	Persen	0,33%		12,94%	6.000.000,000	12,94%	6.000.000,000	12,94%	6.000.000,000	38,83%	6.000.000.000	Kesatuan Bangsa dan Politik	
Tujuan 2.1 Meningkatkan Perumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dalam Rangka Berwujudan Masyarakat yang Maju dan Berkualitas serta Komprehensif	Angka Pertumbuhan Ekonomi			4,63		5,11-5,25		5,20-5,33		5,27-5,41		5,27-5,41			

Tujuan/Sasaran/Program di Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja <i>(Tujuan / Impact / Outcome)</i>	Definisi Operasional	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Peningkat Daerah Pengembang Jawab
				2022	2023	Tahun 2024		Target 2025		Target 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang terfaahita Dana Pemertintah melalui UPDB melalui UPDB	Jumlah Koperasi dan usaha mikro yang terfaahita Dana Pemertintah melalui UPDB dibagi jumlah KUM yang ada	Persen	2,14%	2,14%	4,845,358,164	2,14%	5,164,416,684	2,14%	5,466,792,120	6,42%	5,466,792,120	Dinas Koperasi dan Usaha Menengah
	Prosentase Usaha Mikro yang Dipromosikan	Jumlah produk Usaha yang difaahita Promosi dibagi jumlah seluruh produk Usaha mikro yang ada	Persen	1,20%	1,27%	1,000,000,000	1,40%	1,150,000,000	1,60%	1,300,000,000	4,80%	1,300,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Menengah
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal													
	Pengembangan Potensi Investasi Regional di dalam Aplikasi Investasi	Realisasi Pengembangan Potensi Investasi Regional (PIR) yang dibuat pertahun di dalam Aplikasi Sistem Informasi Proyek/ Investasi Daerah (Sipidaj) untuk 4 Kecamatan	Persen	N/A	25%	350,000,000	25%	720,000,000	25%	900,000,000	75%	900,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Keterpaduan	Jumlah kebijakan pembentukan MPP dibagi jumlah kebijakan perayaratn yang harus ada	Persen	N/A	5%	1,800,000,000	25%	1,860,000,000	75%	2,196,000,000	100%	2,196,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Minat Investasi	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dibuat per tahun / Jumlah target Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan selama 3 tahun (55,500 NIB) x 100%	Persen	N/A	20%	1,000,000,000	20%	1,200,000,000	20%	1,440,000,000	60%	1,440,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha pada Sektor Industri Usaha Menengah dan Besar yang Melaporkan Laporan Kegiatan Usaha pada sektor industri dengan skala Penanaman Modal	Pelaku Usaha pada sektor Industri dengan skala usaha Menengah dan Besar yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dibagi Jumlah Pelaku usaha pada sektor industri dengan skala usaha Menengah dan Besar x 100%	Persen	86,3%	70%	1,400,000,000	72%	1,680,000,000	74%	2,016,000,000	75%	2,016,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Penanaman Investasi	Hasil perhitungan SKM terhadap Pelayanan Penanaman dan Non Penanaman	Persen	3,92%	90%	2,000,000,000	90,5%	2,400,000,000	91%	2,880,000,000	91%	2,880,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	(Tujuan / Impact/ Outcome)			2022	2023	Tahun 2024		Target 2025		Target 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data Penanaman yang Diolah dan Diinformasikan Melalui Sistem Pelaporan Online	Jumlah data penanaman yang terbit / Jumlah data penanaman yang masuk x 100%	Persen	50%	70%	75%	1,000,000,000	80%	1,200,000,000	85%	1,440,000,000	85%	1,440,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi perikanan Tangkap tahun n	Ton	21,148	21,254	21,383	3,450,000,000	21,510	3,250,000,000	21,639	3,250,000,000	21,639	3,250,000,000	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi perikanan budidaya tahun n	Ton	21,089	21,405	21,727	3,700,000,000	22,052	3,400,000,000	22,383	3,400,000,000	22,383	3,400,000,000	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	Rata-rata capaian pemenuhan peningkatan produksi olahan perikanan	%	-	N/A	1.5	1,650,000,000	1.5	1,450,000,000	1.5	1,450,000,000	1.5	1,450,000,000	Dinas Perikanan
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pemenuhan Pengembangan Kebudayaan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program Pengembangan Kebudayaan	Persen	N/A	N/A	33%	2,482,999,907	33%	2,484,499,907	34%	2,485,999,907	100%	2,485,999,907	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pemenuhan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persen	100%	100%	33%	1,974,000,000	33%	1,974,000,000	34%	1,974,000,000	100%	1,974,000,000	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase dokumen hasil penguatan promo dan laporan kegiatan pariwisata	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program pemasaran Pariwisata	Persen	N/A	N/A	33%	850,000,000	33%	850,000,000	34%	850,000,000	100%	850,000,000	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase ekonomi kreatif yang dikembangkan	Rata-rata capaian Outcome kegiatan pada program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persen	N/A	N/A	46%	775,000,000	8%	275,000,000	46%	700,000,000	100%	700,000,000	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
Pertanian	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rata-rata Capaian Outcome kegiatan pada Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persen	N/A	N/A	33%	875,000,000	33%	875,000,000	33%	875,000,000	100%	875,000,000	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian	Jumlah Ketersediaan Sarana Pertanian Tahun n dibagi Jumlah Kebutuhan Sarana Pertanian*100	Persen	11%	19%	30%	14,902,672,940	45%	14,392,974,370	60%	15,569,935,978	60%	15,569,935,978	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	Jumlah Ketersediaan Prasarana Pertanian Tahun n dibagi Jumlah Kebutuhan	Persen	35%	45%	55%	1,995,700,000	65%	1,995,700,000	75%	1,995,700,000	75%	1,995,700,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Definisi Operasional	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Peringkat Daerah Peranggung Jawab		
				2022	2023	Tahun 2024		Target 2025		Target 2026			Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Perentase Peranginan Jumlah Penyakit Hewan yang ditangani	Jumlah hewan yang sembuh/recovery dibagi dengan jumlah hewan yang ditangani * 100	Persen	53%	69%	70%	950.000.000	79%	1.250.000.000	80%	1.450.000.000	1.450.000.000	Dinas Pertanian dan Kehutanan Pangan	
	Perentase Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan SNI	Jumlah Sampel Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan SNI dibagi Jumlah Sampel Produk Hewan * 100	Persen	60	62	64	800.000.000	66	950.000.000	68	1.150.000.000	1.150.000.000	Dinas Pertanian dan Kehutanan Pangan	
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Perentase Usaha Pertanian yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan dan	Jumlah Unit Usaha Pertanian yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan dibagi Jumlah Unit Usaha Pertanian * 100	Persen	20	90	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	150.000.000	Dinas Pertanian dan Kehutanan Pangan	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Perentase SDM Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Penyuluh Pertanian dan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya dibagi Jumlah Penyuluh Pertanian dan Petani * 100	Persen	40%	50%	60%	2.871.143.500	70%	3.088.443.500	80%	3.592.941.500	3.592.941.500	Dinas Pertanian dan Kehutanan Pangan	
Perdagangan														
Program Pengembangan Ekspor	Perentase Mengkatnya Pelaku Usaha yang asip melakukan usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang asip melakukan ekspor dibagi pelaku usaha perdagangan	Persen	56,04%	58,61%	62,27%	1,100,000,000	65,93%	1,155,000,000	69,60%	1,212,750,000	3,467,750,000	Dinas perindustrian dan Perdagangan	
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Perentase jumlah fasilitas pengelolaan sarana distribus perdagangan	Jumlah fasilitas sarana distribus perdagangan dibagi jumlah seluruh pasar	Persen	44,00%	70,00%	80%	150,000,000	90%	150,000,000	100%	150,000,000	450,000,000	Dinas perindustrian dan Perdagangan	
Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Perentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang disubsidi yang dimonitor/dipantau	Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang disubsidi di pasar acurah jumlah seluruh pasar	Persen	25,00%	36-11%	50,00%	620,000,000	75,00%	730,000,000	100,00%	840,000,000	2,190,000,000	Dinas perindustrian dan Perdagangan	
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Perentase jumlah produk IKM yang difasilitasi promosi penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah produk IKM yang difasilitasi promosi penggunaan Produk Dalam Negeri dibagi	Persen	20,00%	23%	27%	300,000,000	30%	315,000,000	33%	330,750,000	945,750,000	Dinas perindustrian dan Perdagangan	

Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Definisi Operasional	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RRPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RRPD		Peringkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023	Tahun 2024		Target 2025		Target 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Standarisasi dan Perindungan Kontainer	Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan tera/tera ulang UTTP	Produktif IKM pada Katalog Perdagangan, Jumlah Pelaku Usaha yang mendapat pelayanan tera/tera ulang UTTP dibagi Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki Potensi UTTP	Persen	38,97%	81,63%	88,44%	1.700.000,000	95,24%	1.785.000,000	100,00%	1.874.280,000	100,00%	5.359.250,000	Dinas perindustrian dan Perdagangan
Perindustrian														
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Peningkatan Jumlah IKM	Jumlah IKM tahun n kurang Jumlah IKM tahun 2021 dibagi Jumlah IKM tahun 2021	Persen	3,08%	11,62%	20,17%	1.300.000,000	28,72%	1.600.000,000	37,26%	1.900.000,000	37,26%	4.800.000,000	Dinas perindustrian dan Perdagangan
Program Pengendalian dan Industri Kabupaten/kota	Persentase Pelaku Usaha yang memiliki izin/legisitas yang diawasi	Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi dibagi Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki legalitas	Persen	73,28%	24,95%	24,95%	350.000,000	25,05%	350.000,000	25,05%	350.000,000	100%	1.050.000,000	Dinas perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data industri dan data kawasan industri yang dilakukan pengolahan, analisis, dan publikasi/diseminasi	Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi dibagi Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki Akun SINas	Persen	19,24%	24,95%	24,95%	650.000,000	25,05%	650.000,000	25,05%	650.000,000	100%	1.950.000,000	Dinas perindustrian dan Perdagangan
Sasaran 2.2 Meningkatkan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun			0,7107	0,7307	0,7307		0,7407	0,7407	0,7507	0,7507	0,7507		
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Tanggarang berdasarkan hasil survei dan Kemendes PDTT sampai dengan tahun berkenaan (tahun n)	Desa	5	15	25	7.600.000,000	35	9.370.000,000	45	10.650.000,000	45	10.650.000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Desa yang Menghasilkan PADes	Jumlah Desa di Kabupaten Tanggarang yang mengimplementasikan PADes (Desa Mandiri bersumber dari BUMDes sampai dengan tahun	Desa	N/A	1	2	24.267.410,655	3	25.480.781,187	4	26.754.820,247	4	26.754.820,247	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Definisi Operasional	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RKP		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Peringkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022	2023	Tahun 2024		Target 2025		Target 2026				Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Pangan Harapan (IPPH)	diikuti Skor PPH Ideal 1100-100													
	Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA)	Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA)	Dokumen	1	1	110.000,000	115.500,000	1	121.275,000	3	121.275,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
	Persentase Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan yang Diantverasi	Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan yang Diantverasi sebagai Jumlah Desa Rentan Rawan 100	Person	47,27	60	331.000,000	372.500,000	86,36	391.125,000	100	391.125,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	Pangan Segar Asli Tumbuhan (PSAT) yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan dibagi Jumlah Sampel PSAT*100	Person	95	75	1.520.000,000	280.000,000	85	290.000,000	255	290.000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja			67,05		65,72		66,12		66,52					
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase ketersediaan data makro dan mikro ketenagakerjaan	Jumlah data ketenagakerjaan yang tersedia/Jumlah ketenagakerjaan yang aktif dan terdaftar 100	Person	NA	NA	500.000,000	550.000,000	100%	600.000,000	100%	600.000,000	Dinas Tenaga Kerja			
	Persentase lulusan Pelatihan yang kompeten	Jumlah Lulusan BLK yang ditempatkan di perusahaan dan berwirausaha dibagi jumlah lulusan BLK x 100	Person	NA	71%	28.350.000,000	21.530.000,000	75,00%	21.900.000,000	77,80%	21.900.000,000	Dinas Tenaga Kerja			
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang terakreditasi	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang terakreditasi	Lembaga	21	25			35		40		Dinas Tenaga Kerja			
	Persentase Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan Lowongan Kerja yang Terdaftar	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dibagi jumlah lowongan kerja yang terdaftar x100	Person	97,71%	95,24%	4.273.000,000	5.210.000,000	96,87%	6.625.000,000	96,90%	6.625.000,000	Dinas Tenaga Kerja			
	Jumlah Wirausaha Baru	Jumlah Wirausaha Baru	Orang	208	244	480	660	860		2000		Dinas Tenaga Kerja			

Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Definisi Operasional	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RKP		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Peringkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022	2023	Tahun 2024		Target 2025		Target 2026				Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka semplogeta Pengusaha-pekerja per tahun	Jumlah Persejahtaran hubungan industrial/ terdampak/ jumlah persejahtaran hubungan industrial yang terdampak/efektif x 100	Person	1,54%	1,43%	1,34%	2,423,000,000	1,25%	2,664,000,000	1,18%	2,931,000,000	1,18%	2,931,000,000	Dinas Tenaga Kerja	
PROGRAM PEMBANGUNAN BERKEMAJUAN TRANSMIGRAN	Menurunnya Animo Masyarakat bertransmigrasi	Jumlah animo masyarakat bertransmigrasi pada tahun n	Orang	NA	NA	10 KK	70,000,000	8 KK	65,000,000	6 KK	60,000,000	24 KK	60,000,000	Dinas Tenaga Kerja	
Sasaran 2.5 Meningkatkan Cakupan Penanganan PKKS	Presentase PKKS yang Berdaya			N/A		1,44%	14,792,052,760	1,69%	15,371,052,761	1,87%	15,902,052,761	5%	46,065,158,282		
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase PKKS yang meningkat perannya dalam kehidupan sosial	Jumlah PKKS yang meningkat perannya dibagi Jumlah Cakupan PKKS dikali 100% "Cakupan PKKS" adalah TKS/PSM, Tagana, Karang Taruna, Duma Usaha dan LKS		67,99%	76,87%	1,510,000,000	80,35%	1,641,000,000	83,82%	1,861,000,000	83,82%	5,012,000,000	1	Dinas Sosial	
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Presentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan	Jumlah Warga Migran Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan jumlah target migran dikali 100%		0%	0,3333	50,000,000	0,3333	50,000,000	0,3334	50,000,000	100%	150,000,000	1	Dinas Sosial	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase PKKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Jumlah yang mendapatkan rehabilitasi di bagi PKKS yang dirangsang mendapatkan rehabilitasi dikali 100		19,17%	29,96%	3,055,000,000	32,70%	3,136,000,000	37,33%	3,102,000,000	100%	9,296,000,000	1	Dinas Sosial	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase masyarakat miskin yg mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial di bagi jumlah fakir miskin yang dirangsang dikali 100		100	100	9,288,052,760	100	9,298,052,761	100	9,318,052,761	100	27,904,158,281	100	Dinas Sosial	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah	Jumlah kebutuhan dasar korban bencana alam/ sosial pada saat terdampak bencana pada saat dan setelah		85%	100%	1,236,000,000	100%	1,366,000,000	100%	1,496,000,000	100%	4,098,000,000	1	Dinas Sosial	

Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Definisi Operasional	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RRPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Peringkat Daerah Pemangku Jawab		
				2022	2023	Tahun 2024		Target 2025		Target 2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
Tujuan 3.1 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik	Jumlah layanan berbasis digital sebanyak 100%	Jumlah layanan berbasis digital sebanyak 100%		71		73	74	75						
Sasaran 3.1 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah	Nilai SAKIP			72.52		76	78	80.5						
	Nilai Indeks Kemandirian Fiskal			0,505		0,52	0,525	0,53						
	Opini BPK			WTP		WTP	WTP	WTP						
	Indeks Profesionalitas ASN			85		75	78	81						
	Matangas SFP			31,522		3,35	3,36	3,37						
	Indeks SPBE			3,08		3,17	3,19	3,21						
	Indeks Pelayanan Publik			4,12		4,2	4,3	4,4						
Program Pendafaran Penduduk														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan Peretaman KTP-el	Jumlah wajib KTP yang sudah direkam dibagi Jumlah Penduduk Wajib KTP	Persen	99,26	99%	99%	99%	99%	5,361,229,491	5,400,922,391	99%	99%	5,400,922,391	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan kepemilikan KIA	Jumlah KIA yang diterbitkan dibagi Jumlah Penduduk usia 0 - 17 Tahun	Persen	40	50%	60%	70	80			80	80		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan SKPWNI yang diterbitkan	Jumlah SKPWNI yang diterbitkan dibagi dengan Target SKPWNI	Persen	100	100%	100%	100	100			100	100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan SKDWINI yang diterbitkan	Jumlah SKDWINI yang diterbitkan dibagi dengan Target SKDWINI	Persen	100	100%	100%	100	100			100	100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pencatatan Sipil														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0 s/d 18 tahun	Cakupan penduduk usia 0 s.d. 18 tahun yang memiliki Akte Kelahiran	Persen	93,07% (903.733)	98%	99%	1,725,000,000	99,50%	1,725,000,000	1,725,000,000	99,55%	99,55%	1,725,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Definisi Operasional	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RGD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	
				2022	2023	Tahun 2024		Target 2025		Target 2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	Cakupan Kepemilikan Akte Perlawanan	Cakupan penduduk yang telah memiliki Akte Perlawanan	Persen	100% (727.047)	100%	100%					100%				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan Kepemilikan Akte Kemataan	Cakupan penduduk yang telah memiliki Akte Kemataan	Persen	100% (19.562)	100%	100%					100%				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan Kepemilikan Akte Perceraian	Cakupan penduduk yang telah memiliki Akte Perceraian	Persen	100% (6.737)	100%	100%					100%				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan Kepemilikan Akte Pengesahan Anak	Cakupan penduduk yang telah memiliki Akte Pengesahan Anak	Persen	100%	100%	100%					100%				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Jaringin SIAK dalam Kondasi Baik	Cakupan jaringin SIAK yang operasional dalam kondasi baik	Persen	100	100	89.879,962	89.879,962	89.879,962	89.879,962	100%	100%	89.879,962	89.879,962	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase OPD dan Lembaga Non Pemerintah yang telah melakukan kerja Sama	Cakupan OPD dan Lembaga Non Pemerintah yang telah melakukan kerja Sama	Persen	35,48	53,23					69%	85			100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pemenuhan Profil Kependudukan	Persentase Pemenuhan enghasilan Profil Kependudukan	Persen	100	100	50.962.500	50.962.500	50.962.500	50.962.500	100	100	50.962.500	50.962.500	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Kerebukan dalam informasi publik	Persentase Kerebukan dalam informasi publik	Persen	100	100%	9.392.500.000	10.623.875.000	10.623.875.000	12.240.956.250	100%	100%	12.240.956.250	12.240.956.250	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Penyediaan Layanan Aplikasi dan layanan internet	Persentase Penyediaan Layanan Aplikasi dan layanan internet	Persen	100	100%	40.326.829.836	44.719.629.892	44.719.629.892	49.627.574.376	100%	100%	49.627.574.376	49.627.574.376	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase statistik sektoral	Persentase data statistik sektoral	Persen	55	58%	1.092.500.000	1.256.375.000	1.256.375.000	1.444.831.250	60%	65%	1.444.831.250	1.444.831.250	75%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	Persentase keamanan informasi	Persentase layanan keamanan informasi	Persen	45%	48%	1.403.000.000	1.613.450.000	1.613.450.000	1.855.467.500	55%	65%	1.855.467.500	1.855.467.500	75%	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASIONAL KUNO	Persentase pemenuhan kegiatan pada program pelestarian koleksi nasional dan nasional kuno	Rata-rata capaian outcome kegiatan pada program pelestarian koleksi nasional dan nasional kuno	Persen	100%	100%	152.500.000	160.125.000	160.125.000	168.131.250	100%	100%	168.131.250	168.131.250	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase pemenuhan kegiatan pada program pengelolaan arsip	Rata-rata outcome kegiatan pada program pengelolaan arsip	Persen	100%	100%	2.575.000.000	2.703.750.000	2.703.750.000	2.838.937.500	100%	100%	2.838.937.500	2.838.937.500	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tujuan/Sasaran/Program Subanggaran Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Definisi Operasional	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RKPD	Perangkat Daerah Penyelenggara Jawab		
				2022	2023	Tahun 2024		Target 2025		Target 2026				Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase pemenuhan kegiatan pada program perizinan penggunaan arsip	Rata-rata capaian outcome kegiatan program perizinan penggunaan arsip	Persen	100%	100%	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENVELAMATAN ARSIP	Persentase pemenuhan kegiatan pada program perlindungan dan penyelamatan arsip	Rata-rata capaian outcome kegiatan program perlindungan dan penyelamatan arsip	Persen	100%	100%	100%	840.000.000	100%	882.000.000	100%	882.000.000	100%	882.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kategori	-	Sedang	Sedang	15.008.515.979	Tinggi	11.902.785.462	Tinggi	13.265.366.558	Tinggi	13.265.366.558	Sekretariat Daerah	
	Indeks Reformasi Hukum	Predikat Indeks Reformasi Hukum	Indeks	Buruk	Cukup	Cukup	2.935.289.003	Baik	3.908.630.836	Baik	5.204.732.821	Baik	5.204.732.821	Sekretariat Daerah	
	Prosentase Hasil Kebijakan Yang ditetapkan	Dokumen Kebijakan yang ditetapkan dibagi Jumlah Hasil koordinasi dikali 100%	Persen	100	100	100	152.500.000	100	160.125.000	100	168.131.250	100	168.131.250	Sekretariat Daerah	
Program Perencanaan dan Pembangunan	Prosentase Rumusan kebijakan perencanaan yang diselesaikan	Jumlah Hasil Kebijakan Perencanaan dibagi Jumlah Total Kebijakan Perencanaan yang diselesaikan x 100%	Persen	100	100	100	14.168.515.979	100	11.020.785.462	100	12.383.966.558	100	12.383.966.558	Sekretariat Daerah	
	Prosentase Jumlah Perangkat Daerah yang patuh terhadap pemenuhan pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah yang patuh di bagi total Perangkat Daerah yang di evaluasi dikali 100%	Persen	100	100	100	2.935.289.003	100	3.908.630.836	100	5.204.732.821	100	5.204.732.821	Sekretariat Daerah	
	Indeks Rata Rata Kelola Pengadaan Barang Dan Jasa	Rata-rata capaian kegiatan pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Indeks	100	100	100	152.500.000	100	160.125.000	100	168.131.250	100	168.131.250	Sekretariat Daerah	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Rata-rata capaian kegiatan pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	88	100	100	57.019.063.541	100	59.870.016.718	100	62.863.517.554	100	62.863.517.554	Sekretariat DPRD	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Pelaporan dan pengendalian perencanaan pembangunan	(Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu dibagi jumlah total dokumen yang disusun) x 100%	Persen	100	100	100	1.783.000.000	100	1.818.600.000	100	1.855.000.000	100	1.855.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

Tujuan/ Sasaran/ Program in Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Definisi Operasional	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Peringkat Dan Penanggung Jawab		
				2022	2023	Tahun 2024		Target 2025		Target 2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
	Presentase Ketepatan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	Jumlah Presentase Capaian Data Pembangunan	Persen	62	63	64	535.000.000	66	545.300.000	70	556.200.000	70	556.200.000	70	556.200.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Presentase Ketepatan Data Pembangunan	Jumlah dokumen pelaporan dan pengendalian perencanaan pembangunan yang diuraun tepat waktu dibagi jumlah total dokumen yang diuraun x 100%	Persen	100	100	100	545.800.000	100	557.000.000	100	570.000.000	100	570.000.000	100	570.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	% Penjabaran Konatensi Program RPJMD dan RKPD kedalam APBD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Program yang teruang dalam dokumen perencanaan PD lingkup Bidang PPM yang sesuai dengan RPJMD/ RPD dibagi program dalam dok perencanaan PD lingkup Bidang PPM x 100	Persen	100	100	100	1.200.000.000	100	1.223.800.000	100	1.248.550.000	100	1.248.550.000	100	1.248.550.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	% PD dengan kinerja baik lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Program yang teruang dalam dokumen perencanaan PD lingkup Bidang SDA (Sumber Daya Alam) yang sesuai dengan RPJMD/ RPD dibagi program dalam dok perencanaan PD lingkup Bidang SDA (Sumber Daya Alam) x 100	Persen	100	100	100	553.900.000	100	571.000.000	100	582.800.000	100	582.800.000	100	582.800.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	% Penjabaran Konatensi Program RPJMD dan RKPD kedalam APBD lingkup Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Program yang teruang dalam dokumen perencanaan PD lingkup Bidang SDA (Sumber Daya Alam) yang sesuai dengan RPJMD/ RPD dibagi program dalam dok perencanaan PD lingkup Bidang SDA (Sumber Daya Alam) x 100	Persen	100	100	100	1.784.200.000	100	1.819.800.000	100	1.856.200.000	100	1.856.200.000	100	1.856.200.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	% PD dengan kinerja baik lingkup Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Program yang teruang dalam dokumen perencanaan PD lingkup Bidang Infrastruktur dan	Persen	100	100	100	295.900.000	100	301.800.000	100	307.800.000	100	307.800.000	100	307.800.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	% Penjabaran Konatensi Program RPJMD dan RKPD kedalam APBD lingkup Bidang	Program yang teruang dalam dokumen perencanaan PD lingkup Bidang Infrastruktur dan	Persen	100	100	100	2.900.000.000	100	2.870.000.000	100	2.884.000.000	100	2.884.000.000	100	2.884.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Pemanggung Jawab	
	(Tujuan/Impact/Outcome)			2022	2023	Tahun 2024		Target 2025		Target 2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	Infrastruktur dan Kewilayahan	Kewilayahan yang sesuai dengan RPJMD/RPD dibagi program dalam dok perencanaan PD lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan x 100													
	% PD dengan kinerja baik lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persen	100	100	100	300,000,000	100	360,000,000	100	400,000,000	100	400,000,000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pengelolaan Keuangan Daerah															
	Rata rata Mandatory Spending (Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur, A/P, Pelatihan), Penyusunan KUA PPAS, penyampaian Nota Keuangan, Peretujuan RAPBD,		Persen	N/A	N/A	97%	5,617,115,361	98%	6,178,826,897	98%	6,796,709,587	98%	6,796,709,587		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Kesesuaian Waktu penyampaian Laporan Keuangan Daerah Kepada BPK, kesesuaian penyerapan anggaran terhadap rencana anggaran		Persen	N/A	N/A	92%		94%		96%		96%			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	kesesuaian dokumen pencairan		Persen	N/A	N/A	100%		100%		100%		100%			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah															
	Rata rata Persentase capaian pengamanan aset daerah,		Persen	N/A	N/A	60%	11,351,120,674	65%	12,486,232,742	70%	13,734,856,016	70%	13,734,856,016		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase pemanfaatan barang milik daerah yang digunakusahakari		Persen	N/A	N/A	91%		92%		95%		95%			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah															
	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak	Junlah wp uang patuh dibagi jumlah WP	Persen	106,67	77	78%	605.150,000	79%	695,922,000	80%	800,400,000	80%	800,400,000		Badan Pendapatan Daerah
	Persentase Pemenuhan Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pengembangan	Junlah Dokumen yang tersedia dibagi jumlah dokumen yang dibutuhkan	Persen	100	100	100%	1,226,235,000	100%	1,254,401,500	100%	1,374,597,000	100%	1,374,597,000		Badan Pendapatan Daerah

Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Definisi Operasional	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RRPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Peningkat Daerah Peninggang Jember		
				2022	2023	Tahun 2024		Target 2025		Target 2026		Target	Rp		Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
	Pendapatan Daerah															
	Persentase Capaian Target Pajak Daerah	Realisasi Pajak dibagi Target Pajak	Persen	121,34	100	100%	10,116.426,000	100%	10,621.098.500	100%	11,851.743.400	100%	11,851.743.400	100%	11,851.743.400	Badan Pendapatan Daerah
	Persentase Pemenuhan Layanan dan Pelaporan Data Informasi, Pendapatan Daerah	Jumlah Layanan dan Laporan yang terpenuhi dibagi Jumlah layanan dan laporan yang diminta	Persen	100	100	100%	1,121.700,000	100%	1,290.000,000	100%	1,483.500,000	100%	1,483.500,000	100%	1,483.500,000	Badan Pendapatan Daerah
Program Kerjasama Daerah																
	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan ASN	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan ASN	Nilai	32,5	40	40	35.977.500	40	35.977.500	40	35.977.500	40	35.977.500	40	35.977.500	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Nilai Aspek Pengadaan ASN	Nilai Aspek Pengadaan ASN	Nilai	36	40	40	1.253.693.245	40	1.253.693.245	40	1.253.693.245	40	1.253.693.245	40	1.253.693.245	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Nilai Aspek Pengembangan Karier	Nilai Aspek Pengembangan Karier	Nilai	57,5	62,5	67,5	9.243.451.776	72,5	9.480.778.021	75	9.724.349.419	75	9.724.349.419	75	9.724.349.419	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	Nilai	40	40	40	771.110.496	40	781.110.496	40	791.110.496	40	791.110.496	40	791.110.496	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Nilai Aspek Manajemen Kinerja	Nilai Aspek Manajemen Kinerja	Nilai	62,5	70	75	670.000.000	80	700.000.000	80	700.000.000	80	700.000.000	80	700.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Nilai Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Nilai Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Nilai	35	37,5	40	440.000.000	40	500.000.000	40	600.000.000	40	600.000.000	40	600.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Nilai Aspek perlindungan dan pelayanan	Nilai Aspek perlindungan dan pelayanan	Nilai	16	16	16	484.676.350	16	484.676.350	16	484.676.350	16	484.676.350	16	484.676.350	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Nilai Aspek Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai Aspek Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai	17	19	20	854.447.493	24	888.625.393	24	888.625.393	24	888.625.393	24	888.625.393	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Pengembangan SDM	Nilai Aspek Pengembangan Karier	Batas-rata Capaian pengembangan pada program/urusan pemerintahan	Nilai	57,5	62,5	67,5	9.243.451.776	72,5	9.480.778.021	75	9.724.349.419	75	9.724.349.419	75	9.724.349.419	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																
	Persentase hasil ketiangan yang menjadi kebijakan	Jumlah implementasi rencana ketiangan dibagi rencana ketiangan x 100	Persen	22,22	16,7	33,33	610.000.000	33,33	445.500.000	33,33	265.062.500	100	265.062.500	100	265.062.500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan/ Sasaran/ Program Pengembangan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Definisi Operasional	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penggolong Jawa20
				2022	2023	Tahun 2024		Target 2025		Target 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Persentase Inovasi Daerah yang Didokumentasikan	Jumlah Perangkat Daerah yang berhasil diadopsi dalam penerapan inovasi daerah dibagi Jumlah Perangkat Daerah yang mengadopsikan inovasi x 100	Perasen	55.56	33.33	26.67	2,045,444,486	33.33	2,086,353,375	40	2,128,080,443	100	2,128,080,443	Badan Pemerintahan Pembangunan Daerah
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Prosentase Perangkat Daerah yang melaksanakan 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis)	Jumlah Perangkat Daerah yang dipikisa dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100%	Perasen	0	1	33%	4,052,089,979	66%	399,686,962	100%	532,223,158	100%	532,223,158	Inspektorat
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Prosentase Perangkat Daerah yang Memenuhi Kriteria Menuju Zona Integradasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dicanangkan dibagi Jumlah Seluruh Perangkat Daerah dikali 100%	Perasen	0	100	100%	2,935,289,003	100%	3,908,630,836	100%	5,204,732,821	100%	5,204,732,821	Inspektorat
PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar dengan standar	Total terpenuhinya paten sesuai dengan standar/ total seluruh paten di masing-masing kecamatan x 100%	Perasen	100	100%	100%	4,076,000,000	100%	4,850,000,000	100%	5,350,000,000	100%	5,350,000,000	Kecamatan Balaraja
	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Total infrastruktur dasar (penghubung desa) yang terpelihara / total infrastruktur dasar (penghubung desa) x 100%												Kecamatan Balaraja
PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Total infrastruktur dasar (penghubung desa) yang terpelihara / total infrastruktur dasar (penghubung desa) x 100%	Perasen	98.55%	98.55	98.60%	9,072,700,183	98.75%	11,340,875,229	96.88%	14,176,094,036	98.88%	14,176,094,036	Kecamatan Cikupa
	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Total terpenuhinya paten sesuai dengan standar/ total seluruh paten di masing-masing kecamatan x 100%												Kecamatan Cikupa

Tujuan / Sasaran / Program dalam Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Definisi Operasional	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022	2023	Tahun 2024		Target 2025		Target 2026				Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Total infrastruktur dasar (penghubung desa) yang terpelihara / total infrastruktur dasar (penghubung desa) x 100%	Persen	87,5%	88,25%	88,25%	88,75%	89,5%	89,5%	89,5%	8,900,000,000	8,900,000,000	89,5%	8,900,000,000	Kecamatan Cisaok
PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Total terpenuhnya paten sesuai dengan standar / total seluruh paten di masing-masing kecamatan x 100%	Persen												Kecamatan Cisaok
PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Total infrastruktur dasar (penghubung desa) yang terpelihara / total infrastruktur dasar (penghubung desa) x 100%	Persen	99%	98,15%	98,30%	98,30%	98,50%	98,50%	98,50%	5,370,003,922	6,444,004,706	99%	7,732,505,647	Kecamatan Curug
PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Total terpenuhnya paten sesuai dengan standar / total seluruh paten di masing-masing kecamatan x 100%	Persen	81,14%	82%	84%	84%	85%	85%	85%	1,759,046,252	2,111,575,503	85%	2,533,890,603	Kecamatan Curug
PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Total infrastruktur dasar (penghubung desa) yang terpelihara / total infrastruktur dasar (penghubung desa) x 100%	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,835,000,000	6,775,000,000	100%	6,775,000,000	Kecamatan Cisaok
															Kecamatan Cisaok

Tujuan/ Sasaran/ Program in Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Definisi Operasional	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Peringkat Daerah Pengembang Jawab
				2022	2023	Tahun 2024		Target 2025		Target 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Total terpenuhinya paten sesuai dengan standar/ total seluruh paten di masing-masing kecamatan x 100%	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5.500.000.000	100%	5.500.000.000	Kecamatan Gunung Kaler
				97%	97%	100%	100%	100%	Kecamatan Gunung Kaler					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Total infrastruktur dasar (penghubung desa) yang terpelihara / total infrastruktur dasar (penghubung desa) x 100%	Persen	89%	89%	80,25%	89,50%	89,70%	89,70%	89,70%	6.090.308.166	89,70%	7.612.885.208	Kecamatan Jambi
				89%	89%	80,25%	89,50%	89,70%	89,70%	89,70%	7.612.885.208	Kecamatan Jambi		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Total terpenuhinya paten sesuai dengan standar/ total seluruh paten di masing-masing kecamatan x 100%	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	220.000.000	100%	250.000.000	Kecamatan Jayanti
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	250.000.000	Kecamatan Jayanti		

Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Definisi Operasional	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Peningkat Daerah Pungging JawaB	
				2022	2023	Tahun 2024		Target 2025		Target 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
PROGRAM PENLENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Total terpenuhinya paten sesuai dengan standar/ total seluruh paten di masing-masing kecamatan x 100%	Persen	100%	100%	100%	11.323.275,400	100%	11.450.008,000	100%	11.579.358,300	100%	11.579.358,300	Kecamatan Kelapa Dua
PROGRAM PENLENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Total terpenuhinya paten sesuai dengan standar/ total seluruh paten di masing-masing kecamatan x 100%	Persen	100%	100%	100%	8.600.000,000	100%	10.100.000,000	100%	10.600.000,000	100%	10.600.000,000	Kecamatan Kemiri
PROGRAM PENLENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Total terpenuhinya paten sesuai dengan standar/ total seluruh paten di masing-masing kecamatan x 100%	Persen	87%	100%	100%	16.849.919,360	100%	17.615.824,785	100%	19.377.407,264	100%	19.377.407,264	Kecamatan Kosambi

Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RKP		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
	(Tujuan/Impact/Outcome)			2022	2023	Tahun 2024		Target 2025		Target 2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Total terpenuhinya paten sesuai dengan standar/ total seluruh paten di masing-masing kecamatan x 100%	Persen	100%	100%	100%	4,500,000,000	100%	5,000,000,000	100%	5,500,000,000	100%	5,500,000,000	Kecamatan Pakuhaji	
	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Total infrastruktur dasar (penghubung desa) yang terpelihara / total infrastruktur dasar (penghubung desa) x 100%												Kecamatan Pakuhaji	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Total terpenuhinya paten sesuai dengan standar/ total seluruh paten di masing-masing kecamatan x 100%	Persen	92%	92%	93%	9,686,000,000	94%	9,936,000,000	95%	10,386,000,000	95%	10,386,000,000	Kecamatan Panongan	
	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Total infrastruktur dasar (penghubung desa) yang terpelihara / total infrastruktur dasar (penghubung desa) x 100%												Kecamatan Panongan	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Total terpenuhinya paten sesuai dengan standar/ total seluruh paten di masing-masing kecamatan x 100%	Persen	100%	100%	100%	220,000,000	100%	220,000,000	100%	220,000,000	100%	220,000,000	Kecamatan Pasar Kemis	
	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Total infrastruktur dasar (penghubung desa) yang terpelihara / total infrastruktur dasar (penghubung desa) x 100%												Kecamatan Pasar Kemis	

Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Definisi Operasional	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPKD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022	2023	Tahun 2024		Target 2025		Target 2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Total infrastruktur dasar (penghubung desa) yang terpelihara / total infrastruktur dasar (penghubung desa) x 100%	Persen	100%	100%	100%	5.661.982,928	100%	6.228.181,221	100%	6.850.999,343	100%	6.850.999,343	Kecamatan Sukamulya
				100%	100%	100%	395.551,180	100%	415.106,298	100%	436.616,927	100%	436.616,927	Kecamatan Sukamulya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Total infrastruktur dasar (penghubung desa) yang terpelihara / total infrastruktur dasar (penghubung desa) x 100%	Persen	100%	100%	100%	8.000.000,000	100%	10.000.000,000	100%	12.000.000,000	100%	12.000.000,000	Kecamatan Tejaknaga
				86,93	89,80%	100,00%	200.000,000	100,00%	200.000,000	100,00%	200.000,000	100,00%	200.000,000	Kecamatan Tejaknaga
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Total infrastruktur dasar (penghubung desa) yang terpelihara / total infrastruktur dasar (penghubung desa) x 100%	Persen	89,8	89,80%	91,35	10.000.000,000	91,9	10.600.000,000	92,45	10.900.000,000	92,45	10.900.000,000	Kecamatan Tigaraksa
				89,8	89,8	91,35	10.000.000,000	91,9	10.600.000,000	92,45	10.900.000,000	92,45	10.900.000,000	Kecamatan Tigaraksa

Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Definisi Operasional	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				2022	2023	Tahun 2024		Target 2025		Target 2026				Target	Rp				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pembinaan/pendayanaan	Total kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan atau pemberdayaan / total kelompok masyarakat x 100%	Persen																
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pembinaan/pendayanaan	Jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pemberdayaan / jumlah lembaga pemberdayaan x 100%	Persen	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,500,000,000	1,500,000,000	100%	1,500,000,000	Kecamatan Gunung Kaler
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pembinaan/pendayanaan	Jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pemberdayaan / jumlah lembaga pemberdayaan x 100%	Persen	65.00%	88.00%	70.00%	75.00%	93.79%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	1,168,750,000	1,168,750,000	80.00%	1,168,750,000	Kecamatan Balaraja
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pembinaan/pendayanaan	Jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pemberdayaan / jumlah lembaga pemberdayaan x 100%	Persen	90.00%	92.50%	92.50%	93.79%	93.79%	93.79%	93.79%	93.79%	93.79%	93.79%	93.79%	17,755,000,000	17,755,000,000	93.79%	17,755,000,000	Kecamatan Cikupa
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pembinaan/pendayanaan	Jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pemberdayaan / jumlah lembaga pemberdayaan x 100%	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,780,000,000	1,780,000,000	100%	1,780,000,000	Kecamatan Ciaulak
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pembinaan/pendayanaan	Jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pemberdayaan / jumlah lembaga pemberdayaan x 100%	Persen	73%	78%	79%	80%	80%	80.50%	80.50%	80.50%	80.50%	80.50%	80.50%	5,347,494,919	5,347,494,919	81%	13,517,278,822	Kecamatan Curug
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pembinaan/pendayanaan	Jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pemberdayaan / jumlah lembaga pemberdayaan x 100%	Persen	65.00%	88.00%	70.00%	75.00%	93.79%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	935,000,000	935,000,000	80.00%	1,168,750,000	Kecamatan Jembe
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pembinaan/pendayanaan	Jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pemberdayaan / jumlah lembaga pemberdayaan x 100%	Persen	88.88%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,748,000,000	1,855,000,000	100%	1,855,000,000	Kecamatan Jayanti
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pemberdayaan / jumlah lembaga pemberdayaan x 100%	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,457,511,000	1,457,511,000	100%	1,457,511,000	Kecamatan Kelapa Dua
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat	Jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pemberdayaan / jumlah lembaga pemberdayaan x 100%	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,320,000,000	1,320,000,000	100%	1,320,000,000	Kecamatan Kemiri

Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPKD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
	(Tujuan/ Impact/ Outcome)			2022	2023	Tahun 2024		Target 2025		Target 2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	pembinaan/pembudayaan	pembudayaan) x 100%													
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	(jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pemberdayaan / jumlah lembaga pemberdayaan) x 100%	Persen	75%	88%	100%	1,060,659,543	100%	1,108,871,340	100%	1,219,758,474	100%	1,219,758,474	Kecamatan Kosambi	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pembudayaan	(jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pemberdayaan / jumlah lembaga pemberdayaan) x 100%	Persen	75%	65.00%	70.00%	928,130,987	75.00%	1,113,757,185	80.00%	1,336,508,622	80.00%	1,336,508,622	Kecamatan Kresak	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pembudayaan	(jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pemberdayaan / jumlah lembaga pemberdayaan) x 100%	Persen	100%	100%	100%	790,000,000	100%	915,000,000	100%	1,120,000,000	100%	1,120,000,000	Kecamatan Kronjo	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	(jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pemberdayaan / jumlah lembaga pemberdayaan) x 100%	Persen	100%	100%	100%	500,000,000	100%	1,300,000,000	100%	1,400,000,000	100%	1,400,000,000	Kecamatan Mauk	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	(jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pemberdayaan / jumlah lembaga pemberdayaan) x 100%	Persen	100%	100%	100%	1,078,000,000	100%	1,300,000,000	100%	1,400,000,000	100%	1,400,000,000	Kecamatan Legok	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pembudayaan	(jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pemberdayaan / jumlah lembaga pemberdayaan) x 100%	Persen	55%	60%	65%	1,289,000,000	70%	1,083,055,093	75%	959,000,000	75%	959,000,000	Kecamatan Mekar Baru	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pembudayaan Kec. Pagedangan	(jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pemberdayaan / jumlah lembaga pemberdayaan) x 100%	Persen	75.00%	85.00%	88.00%	1,500,000,000	90.00%	1,750,000,000	95%	2,000,000,000	95%	2,000,000,000	Kecamatan Pagedangan	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pembudayaan	(jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pemberdayaan / jumlah lembaga pemberdayaan) x 100%	Persen	100%	100%	100%	1,100,000,000	100%	1,200,000,000	100%	1,300,000,000	100%	1,300,000,000	Kecamatan Pakuhaji	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pembudayaan	(jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pemberdayaan / jumlah lembaga pemberdayaan) x 100%	Persen	14.29	14.29	28.57	2,550,000,000	28.57	2,600,000,000	28.57	2,650,000,000	28.57	2,650,000,000	Kecamatan Panongan	
PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase kelompok masyarakat yang	(jumlah lembaga masyarakat yang mendapat	Persen	100%	100%	100%	2,050,000,000	100%	2,050,000,000	100%	2,050,000,000	100%	2,050,000,000	Kecamatan Pasar Kemis	

Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
	(Tujuan/Impact/Outcome)			2022	2023	Tahun 2024		Target 2025		Target 2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	mendapat pembinaan/pemberdayaan	pemberdayaan / jumlah lembaga pemberdayaan x 100%													
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	(jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pemberdayaan / jumlah lembaga pemberdayaan) x 100%	Persen	100%	100%	100%	1,398,130,797	100%	1,220,000,000	100%	1,320,000,000	100%	1,320,000,000		Kecamatan Rajeg
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	(jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pemberdayaan / jumlah lembaga pemberdayaan) x 100%	Persen	80	84	85	920,000,000	86.5	1,150,000,000	90	1,250,000,000	90	1,250,000,000		Kecamatan Sepatan Timur
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	(jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pemberdayaan / jumlah lembaga pemberdayaan) x 100%	Persen	75	80%	85	1,266,914,495	87	1,330,260,219	90	1,396,773,230	90	1,396,773,230		Kecamatan Sindang Jaya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	(jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pemberdayaan / jumlah lembaga pemberdayaan) x 100%	Persen	75	80	85	1,200,000,000	87	1,300,000,000	90	1,400,000,000	90	1,400,000,000		Kecamatan Sepatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	(jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pemberdayaan / jumlah lembaga pemberdayaan) x 100%	Persen	75%	88%	100%	1,000,000,000	100%	1,200,000,000	100%	1,250,000,000	100%	1,250,000,000		Kecamatan Solear
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	(jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pemberdayaan / jumlah lembaga pemberdayaan) x 100%	Persen	100	100%	100%	700,000,000	100%	850,000,000	90	900,000,000	90	900,000,000		Kecamatan Sukadiri
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	(jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pemberdayaan / jumlah lembaga pemberdayaan) x 100%	Persen	100%	100%	100%	900,134,948	100%	990,148,443	100%	1,089,163,287	100%	1,089,163,287		Kecamatan Sukamulya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	(jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pemberdayaan / jumlah lembaga pemberdayaan) x 100%	Persen	75	80%	100%	900,000,000	100%	970,000,000	100%	1,000,000,000	90%	1,000,000,000		Kecamatan Teluknaga
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	(jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pemberdayaan / jumlah lembaga pemberdayaan) x 100%	Persen	80	80	85	1,125,000,000	87	1,180,000,000	90	1,235,000,000	90	1,235,000,000		Kecamatan Tigaraksa

Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Definisi Operasional	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Peringkat Daerah Perangsong Jember
				2023		Tahun 2024				Target 2025				Target 2026					
				2022	2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
PROGRAM KOORDINASI KETERAMPILAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan yang ditundaklanjuti	Total laporan trantibum yang difaasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100%	Persen	100	100	100%	471.000.000	100%	494.550.000	100%	519.277.500	100%	519.277.500	100%	519.277.500	Kecamatan Balara			
PROGRAM KOORDINASI KETERAMPILAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan yang ditundaklanjuti	Total laporan trantibum yang difaasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100%	Persen	100	100	100%	362.500.000	100%	370.500.000	100%	380.700.000	100%	380.700.000	100%	380.700.000	Kecamatan Cikupa			
PROGRAM KOORDINASI KETERAMPILAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan yang ditundaklanjuti	Total laporan trantibum yang difaasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100%	Persen	93,25%	94,00%	94,00%	584.000.000	94,75%	584.000.000	95,00%	584.000.000	95,00%	584.000.000	95,00%	584.000.000	Kecamatan Ciauw			
PROGRAM KOORDINASI KETERAMPILAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan yang ditundaklanjuti	Total laporan trantibum yang difaasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100%	Persen	100%	100%	100%	560.000.000	100%	570.000.000	100%	580.000.000	100%	580.000.000	100%	580.000.000	Kecamatan Ciooka			
PROGRAM KOORDINASI KETERAMPILAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan yang ditundaklanjuti	Total laporan trantibum yang difaasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100%	Persen	57,14%	71,43%	72,50%	943.976.199	73%	1.038.373.819	75,00%	1.142.211.201	75,00%	1.142.211.201	75	3.124.561.219	Kecamatan Curing			
PROGRAM KOORDINASI KETERAMPILAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan yang ditundaklanjuti	Total laporan trantibum yang difaasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100%	Persen	100%	100%	100%	232.000.000	100%	290.000.000	100%	362.500.000	100%	362.500.000	100%	362.500.000	Kecamatan Jambe			
PROGRAM KOORDINASI KETERAMPILAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan yang ditundaklanjuti	Total laporan trantibum yang difaasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100%	Persen	60,00%	71,40%	100%	120.000.000	100%	130.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	Kecamatan Jayanti			
PROGRAM KOORDINASI KETERAMPILAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan yang ditundaklanjuti	Total laporan trantibum yang difaasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100%	Persen	10%	10%	10%	107.939.000	10%	118.732.000	10%	130.606.000	10%	130.606.000	10%	130.606.000	Kecamatan Kolaga Dua			
PROGRAM KOORDINASI KETERAMPILAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan yang ditundaklanjuti	Total laporan trantibum yang difaasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100%	Persen	100%	100%	100%	360.000.000	100%	370.000.000	100%	380.000.000	100%	380.000.000	100%	380.000.000	Kecamatan Kermin			
PROGRAM KOORDINASI KETERAMPILAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan yang ditundaklanjuti	Total laporan trantibum yang difaasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100%	Persen	60%	71,4%	100%	757.609.085	100%	792.045.862	100%	871.250.448	100%	871.250.448	100%	871.250.448	Kecamatan Kosambi			
PROGRAM KOORDINASI KETERAMPILAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan yang ditundaklanjuti	Total laporan trantibum yang difaasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100%	Persen	100%	100%	100%	425.204.136	100%	595.285.790	100%	833.400.107	100%	833.400.107	100%	833.400.107	Kecamatan Kresek			
PROGRAM KOORDINASI	Persentase gangguan	Total laporan trantibum yang difaasilitasi / total	Persen	100%	100%	100%	351.000.000	100%	359.550.000	100%	364.000.000	100%	364.000.000	100%	364.000.000	Kecamatan Kronjo			

Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Definisi Operasional	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RKP		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Peringkat Daerah Pengembang Jember		
				2022	2023	Tahun 2024		Target 2025		Target 2026				Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	trantubum yang diundaklanjtu	seluruh laporan trantubum yang masuk x 100%													
PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantubum yang diundaklanjtu	Total laporan trantubum yang difasilitasi / total seluruh laporan trantubum yang masuk x 100%	Persen	60%	75%	100%	392.000.000	442.000.000	492.200.000	100%	492.200.000	100%	492.200.000	Kecamatan Legok	
PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantubum yang diundaklanjtu	Total laporan trantubum yang difasilitasi / total seluruh laporan trantubum yang masuk x 100%	Persen	100%	100%	100%	380.000.000	442.000.000	492.200.000	100%	492.200.000	100%	492.200.000	Kecamatan Mauk	
PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantubum yang diundaklanjtu	Total laporan trantubum yang difasilitasi / total seluruh laporan trantubum yang masuk x 100%	Persen	100%	100%	100%	468.284.732	450.000.000	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	Kecamatan Mekar Baru	
PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantubum yang diundaklanjtu	Total laporan trantubum yang difasilitasi / total seluruh laporan trantubum yang masuk x 100%	Persen	60%	75%	75%	300.000.000	350.000.000	400.000.000	80.00%	400.000.000	90%	400.000.000	Kecamatan Pagedangan	
PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantubum yang diundaklanjtu	Total laporan trantubum yang difasilitasi / total seluruh laporan trantubum yang masuk x 100%	Persen	100%	100%	100%	360.000.000	370.000.000	380.000.000	100%	380.000.000	100%	380.000.000	Kecamatan Pakuhaji	
PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantubum yang diundaklanjtu	Total laporan trantubum yang difasilitasi / total seluruh laporan trantubum yang masuk x 100%	Persen	100%	100%	100%	765.000.000	765.000.000	765.000.000	100	765.000.000	100	765.000.000	Kecamatan Panongan	
PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantubum yang diundaklanjtu	Total laporan trantubum yang difasilitasi / total seluruh laporan trantubum yang masuk x 100%	Persen	60%	100%	100%	320.000.000	330.000.000	330.000.000	100%	330.000.000	100%	330.000.000	Kecamatan Pasar Kema	
PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantubum yang diundaklanjtu	Total laporan trantubum yang difasilitasi / total seluruh laporan trantubum yang masuk x 100%	Persen	60	75	100	392.000.000	442.000.000	492.200.000	100	492.200.000	100	492.200.000	Kecamatan Sepatan	
PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantubum yang diundaklanjtu	Total laporan trantubum yang difasilitasi / total seluruh laporan trantubum yang masuk x 100%	Persen	100	100	100	501.962.793	514.511.863	527.060.933	100	527.060.933	100	527.060.933	Kecamatan Sepatan Timur	
PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantubum yang diundaklanjtu	Total laporan trantubum yang difasilitasi / total seluruh laporan trantubum yang masuk x 100%	Persen	60	75	100	491.210.689	515.771.224	541.559.785	100	541.559.785	100	541.559.785	Kecamatan Sindang Jaya	
PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantubum yang diundaklanjtu	Total laporan trantubum yang difasilitasi / total seluruh laporan trantubum yang masuk x 100%	Persen	100	100%	100%	380.000.000	442.000.000	492.200.000	100%	492.200.000	100%	492.200.000	Kecamatan Sukadin	

Tujuan/Sasaran/Program in Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/O outcome)	Definisi Operasional	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Peringkat Daerah Peranggung Jawab
				2022	2023	Tahun 2024		Target 2025		Target 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM KOORDINASI KETERKAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditundaklanjuti	Total laporan trantibum yang difaasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100%	Persen	15%	10%	100%	401.682,600	100%	441.850,960	100%	486.035,946	100%	486.035,946	Kecamatan Sukamulya
PROGRAM KOORDINASI KETERKAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditundaklanjuti	Total laporan trantibum yang difaasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100%	Persen	60	75%	100%	300.000,000	100%	300.000,000	100%	300.000,000	100%	300.000,000	Kecamatan Teluknaga
PROGRAM KOORDINASI KETERKAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditundaklanjuti	Total laporan trantibum yang difaasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100%	Persen	75	75	100	8.000.000,000	100	8.500.000,000	100	8.700.000,000	100	8.700.000,000	Kecamatan Tiganaka
PROGRAM KOORDINASI KETERKAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditundaklanjuti	Total laporan trantibum yang difaasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100%	Persen	100%	100%	100%	425.683,101	100%	370.000,000	100%	380.000,000	100%	380.000,000	Kecamatan Rajeg
PROGRAM KOORDINASI KETERKAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditundaklanjuti	Total laporan trantibum yang difaasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100%	Persen	43%	43%	43%	500.000,000	57%	500.000,000	57%	500.000,000	71%	500.000,000	Kecamatan Solara
PROGRAM KOORDINASI KETERKAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditundaklanjuti	Total laporan trantibum yang difaasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100%	Persen											Kecamatan Gunung Kalir
PROGRAM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditundaklanjuti	Total laporan trantibum yang difaasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100%	Persen	90,00%	92,50%	92,50%	200.000,000	94,00%	200.000,000	95,50%	200.000,000	95,50%	200.000,000	Kecamatan Cisauk
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditundaklanjuti	Total laporan trantibum yang difaasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100%	Persen	100%	100%	100%	300.000,000	100%	330.000,000	100%	363.000,000	100%	363.000,000	Kecamatan Kelapa Dua
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditundaklanjuti	Total laporan trantibum yang difaasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100%	Persen	N/A	N/A	100%	130.000,000	100%	140.000,000	100%	145.000,000	100%	145.000,000	Kecamatan Tiganaka
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditundaklanjuti	Total laporan trantibum yang difaasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100%	Persen											Kecamatan Balaraja
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditundaklanjuti	Total laporan trantibum yang difaasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100%	Persen											Kecamatan Cikupa
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditundaklanjuti	Total laporan trantibum yang difaasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100%	Persen											Kecamatan Ciajoka

Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	(Tujuan/ Impact/ Outcome)			2022	2023	Tahun 2024		Target 2025		Target 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Rata-rata Capaian outcourse kegiatan pada Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Persen	0%	0%	80%	150,000,000	81%	180,000,000	83%	216,000,000	83	546,000,000	Kecamatan Curug
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti													Kecamatan Jambe
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti													Kecamatan Jayanti
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti													Kecamatan Kemiri
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti													Kecamatan Kosambi
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti													Kecamatan Kresek
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti													Kecamatan Kronjo
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti													Kecamatan Legok
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti													Kecamatan Mauk
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti													Kecamatan Mekar Baru
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti													Kecamatan Pagedangan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti													Kecamatan Pakuhaji
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti													Kecamatan Panongan

Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Definisi Operasional	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Peringkat Daerah Pengembang Jabar	
				2022	2023	Tahun 2024		Target 2025		Target 2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti														Kecamatan Pasar Kemas
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti														Kecamatan Sepatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti														Kecamatan Sepatan Timur
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti														Kecamatan Sindang Jaya
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti														Kecamatan Sukadiri
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti														Kecamatan Sukamulya
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti /jumlah rekomendasi x 100%	Persen	1	1	250.000.000	1	275.000.000	1	302.500.000	1	302.500.000	1	302.500.000	Kecamatan Teluknaga
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti /jumlah rekomendasi x 100%	Persen	0	0	300.000.000	1	300.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	Kecamatan Rajeg
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti														Kecamatan Solear
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti														Kecamatan Gunung Kaler
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik	(jumlah desa yang tertib administrasi/Jumlah Desa)x100%	Persen	100%	100%	425.685,101	100%	370.000,000	100%	380.000,000	100%	380.000,000	100%	380.000,000	Kecamatan Rajeg
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik	(jumlah desa yang tertib administrasi/Jumlah Desa)x100%	Persen	85,71	88,88%	190.000.000	89,00%	240.000,000	90,00%	300.000,000	92%	300.000,000	92%	300.000,000	Kecamatan Solear
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik	(jumlah desa yang tertib administrasi/Jumlah Desa)x100%	Persen	90,10%	90,10%	135.316.000	90,19%	222.341,200	90,25%	258.673,100	90,40%	258.673,100	90,40%	258.673,100	Kecamatan Cisauk
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik	(jumlah desa yang tertib administrasi/Jumlah Desa)x100%	Persen	90,00%	92,50%	515.000,000	92,50%	815.000,000	94,00%	615.000,000	95,50%	615.000,000	95,50%	615.000,000	Kecamatan Cisaug

Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	(Tujuan/Impact/Outcome)			2022	2023	Tahun 2024		Target 2025		Target 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik	(jumlah desa yang tertib administrasi/Jumlah Desa x100%	Persen	97%	97%	100%	290,000,000	100%	300,000,000	100%	310,000,000	100%	310,000,000	Kecamatan Cioaka
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik	(jumlah desa yang tertib administrasi/Jumlah Desa x100%	Persen	77.77%	89%	89.19%	308,851,708	89.30%	414,736,879	89.45%	373,710,567	89%	1,097,299,153	Kecamatan Curug
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik	(jumlah desa yang tertib administrasi/Jumlah Desa x100%	Persen	100%	100%	100%	360,000,000	100%	370,000,000	100%	380,000,000	100%	380,000,000	Kecamatan Gunung Kaler
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik	(jumlah desa yang tertib administrasi/Jumlah Desa x100%	Persen	97%	97%	100%	200,000,000	100%	210,000,000	100%	220,000,000	100%	220,000,000	Kecamatan Gunung Kaler
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik	(jumlah desa yang tertib administrasi/Jumlah Desa x100%	Persen	42.86%	42.86%	65.14%	153,750,000	70.89%	99,000,000	79.89%	154,687,500	79.89%	154,687,500	Kecamatan Jambe
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik	(jumlah desa yang tertib administrasi/Jumlah Desa x100%	Persen	88.88%	88.88%	100%	150,000,000	100%	160,000,000	100%	180,000,000	100%	180,000,000	Kecamatan Jayanti
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik	(jumlah desa yang tertib administrasi/Jumlah Desa x100%	Persen	100%	100%	100%	532,221,991	100%	585,444,190	100%	643,988,609	100%	643,988,609	Kecamatan Kelapa Dua
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik	(jumlah desa yang tertib administrasi/Jumlah Desa x100%	Persen	95%	97%	100%	200,000,000	100%	210,000,000	100%	220,000,000	100%	220,000,000	Kecamatan Kemiri
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik	(jumlah desa yang tertib administrasi/Jumlah Desa x100%	Persen	86%	88.8%	100%	208,586,100	100%	218,067,286	100%	239,874,015	100%	239,874,015	Kecamatan Kosambi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik	(jumlah desa yang tertib administrasi/Jumlah Desa x100%	Persen	78%	42.86%	65.14%	67,650,000	70.89%	67,650,000	79.89%	67,650,000	79.89%	67,650,000	Kecamatan Kresek
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik	(jumlah desa yang tertib administrasi/Jumlah Desa x100%	Persen	2	2	2	250,000,000	3	300,000,000	3	350,000,000	100	350,000,000	Kecamatan Kronjo
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik	(jumlah desa yang tertib administrasi/Jumlah Desa x100%	Persen	100%	88.88%	100%	190,000,000	100%	240,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	Kecamatan Legok
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik	(jumlah desa yang tertib administrasi/Jumlah Desa x100%	Persen	85.71%	88.88	89	300,000,000	90	240,000,000	92	300,000,000	92	300,000,000	Kecamatan Mauk
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik	(jumlah desa yang tertib administrasi/Jumlah Desa x100%	Persen	55%	60%	65%	350,000,000	70%	400,000,000	75%	350,000,000	75%	350,000,000	Kecamatan Mekar Baru
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik	(jumlah desa yang tertib administrasi/Jumlah Desa x100%	Persen	77%	88%	88.00%	250,000,000	90.00%	300,000,000	95%	350,000,000	95%	350,000,000	Kecamatan Pagedangan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik	(jumlah desa yang tertib administrasi/Jumlah Desa x100%	Persen	95%	97%	100%	200,000,000	100%	210,000,000	100%	220,000,000	100%	220,000,000	Kecamatan Pakuhaji
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik	(jumlah desa yang tertib administrasi/Jumlah Desa x100%	Persen	100%	100%	100%	190,000,000	100	240,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	Kecamatan Panongan

Tujuan/Sasaran/Program in Pemerintahan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Pangkat Pencapaian Jumlah		
				2022		2023		Tahun 2024		Tahun 2025			Tahun 2026	
				2022	2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik	(jumlah desa yang terbit administrasi/Jumlah Desa X100%)	Persen	100%	100%	100%	80.000.000	100%	85.000.000	100%	85.000.000	Kecamatan Paur Kemis		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik	(jumlah desa yang terbit administrasi/Jumlah Desa X100%)	Persen	100%	100%	200.000.000	100%	210.000.000	100%	220.000.000	100%	220.000.000	Kecamatan Page	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik	(jumlah desa yang terbit administrasi/Jumlah Desa X100%)	Persen	85,71	42,86	42,86	190.000.000	90	240.000.000	92	300.000.000	92	300.000.000	Kecamatan Sepatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik	(jumlah desa yang terbit administrasi/Jumlah Desa X100%)	Persen	80	84,29%	85%	236.463.506	87%	255.380.586	88%	300.000.000	88%	300.000.000	Kecamatan Sepatan Timur
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik	(jumlah desa yang terbit administrasi/Jumlah Desa X100%)	Persen	85,71	88,88	89	94.824.080	90	99.565.284	92	104.543.549	92	104.543.549	Kecamatan Sumbang Jaya
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik	(jumlah desa yang terbit administrasi/Jumlah Desa X100%)	Persen	70%	70%	72%	300.000.000	78%	400.000.000	89%	450.000.000	89%	450.000.000	Kecamatan Solok
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik	(jumlah desa yang terbit administrasi/Jumlah Desa X100%)	Persen	85,71	88,88%	89	400.000.000	90	240.000.000	92	300.000.000	92	300.000.000	Kecamatan Subakm
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik	(jumlah desa yang terbit administrasi/Jumlah Desa X100%)	Persen	100%	100%	100%	482.221.991	100%	640.444.190	100%	704.488.609	100%	704.488.609	Kecamatan Sukamulya
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik	(jumlah desa yang terbit administrasi/Jumlah Desa X100%)	Persen	100	100,00%	100%	450.000.000	100%	650.000.000	100%	650.000.000	100%	650.000.000	Kecamatan Telukanga
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik	(jumlah desa yang terbit administrasi/Jumlah Desa X100%)	Persen	88,88	88,88	89	200.000.000	90	210.000.000	92	220.000.000	92	220.000.000	Kecamatan Tigaraksa
Tujuan 4.1 Mengembangkan Penguasaan Infrastruktur yang Terpadu dan Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur				70			75		80		80		
Sasaran 4.1 Memangkainya Penguasaan dan Kualitas Infrastruktur	Indeks Pembangunan Infrastruktur			27		32		35		35		35		
	Persentase Realisasi Pola Kemudahan Ruang sesuai KTRW			9%		37%		59%		59%		59%		
	Rasio Luas Persebaran Perumahan dan Pemukiman yang Layak			0,9433		0,9439		0,9442		0,9442		0,9442		
	Rasio Konektivitas Kabupaten					0,76		0,79		0,83		0,83		

Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	(Tujuan/Impact/Outcome)			2022	2023	Tahun 2024		Target 2025		Target 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemenuhan pemeliharaan TMP	Jumlah Item pada TMP yang terkelola dibagi jumlah seluruh item pada TMP yang harus dikelola dikali 100%	Persen	78%	80%	80%	856,500,000	89%	701,500,000	90%	726,500,000	90%	2,284,500,000	Dinas Sosial
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)														Dinas Bina Marga dan SDA
	Persentase Infrastruktur Sungai dan Pembuang dalam Kondisi Baik	Panjang Penanganan Normalisasi Sungai dan Pembuang/Total Panjang Sungai dan Pembuang x 100	Persen	63.20		70.20%	110,086,116,904	77.20%	100,991,128,594	84.2%	1,039,602,414,529	84%	1,039,602,414,529	Dinas Bina Marga dan SDA
	Prosentase Lahan Sawah Dilindungi yang Terlayani Irigasi	Lokasi Lahan sawah dilindungi yang tertangani/total lokasi lahan sawah dilindungi	Persen	63.6		77.27%	5,550,000,000	90.9%	5,550,000,000	100%	5,200,000,000	100%	5,200,000,000	Dinas Bina Marga dan SDA
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM														Dinas Perumahan,Per mukaman dan Pemakaman
	Cakupan Sarana Air Bersih	Jumlah Rumah tangga Pengguna Air Bersih / Jumlah Rumah tangga di Kabupaten Tangerang x 100	Persen	59.07	64.67	72.67	66,160,000,000	80.67	67,170,000,000	88.67	70,200,000,000	88.67	70,200,000,000	Dinas Perumahan,Per mukaman dan Pemakaman
	Prosentase Terpenuhinya Pelayanan Pendistribusian Air Bersih Bagi Masyarakat	Jumlah Air bersih yang didistribusikan ke masyarakat dibagi Jumlah Kebutuhan Air bersih untuk didistribusikan kepada masyarakat x 100	Persen	103.64	100	100	6,500,000,000	100	7,000,000,000	100	7,400,000,000	100	7,400,000,000	Dinas Perumahan,Per mukaman dan Pemakaman
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH														Dinas Perumahan,Per mukaman dan Pemakaman
	Persentase Sarana Sanitasi yang Dibangun	Jumlah rumah tangga bersanitasi dibagi Jumlah seluruh rumah tangga dikali 100	Persen	96.35	96.48	96.61	9,500,000,000	96.75	9,500,000,000	96.88	10,000,000,000	96.88	10,000,000,000	Dinas Perumahan,Per mukaman dan Pemakaman
	Persentase Cakupan Layanan Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Layanan lumpur tinja terjadwal (LZT2) dibagi Jumlah Penduduk kabupaten Tangerang dikali 100	Persen	0.136	0.138	0.140	5,850,000,000	0.143	3,300,000,000	0.146	3,500,000,000		3,500,000,000	Dinas Perumahan,Per mukaman dan Pemakaman
PROGRAM PENGELOLAAN DAN	Prosentase Infrastruktur	% Pemanganan Drainase Jalan Kabupaten	Persen	11.43		11.93%	40,800,000,000	12.43%	44,880,000,000	12.93%	49,368,000,000	12.93%	49,368,000,000	Dinas Perumahan,Per

Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RKP		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
	(Tujuan/Impact/Outcome)			2022	2023	Tahun 2024		Target 2025		Target 2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Drainase dalam Kondisi Baik														mulokman dan Pemakaman
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN															Dinas Perumahan, Permulokman dan Pemakaman
	Persentase Peningkatan kualitas permukiman tidak tertata	Jumlah sarana prasarana yang dibangun dibagi jumlah sarana prasarana yang direncanakan untuk dibangun dikali 100	Persen		100	100.00	25,000,000,000	100.00	30,000,000,000	100.00	35,000,000,000	100.00	35,000,000,000		Dinas Perumahan, Permulokman dan Pemakaman
	Persentase Sarana dan Prasarana TPU yang terbangun	Jumlah Tpu yang ditangani dibagi Jumlah tpu asset Pemda dikali 100	Persen	45.45%	14.14%	14.14%	7,000,000,000	14.14%	7,000,000,000	11.11%	7,000,000,000	100%	7,000,000,000		Dinas Perumahan, Permulokman dan Pemakaman
	Persentase Sarana dan Prasarana TPU yang Terpelihara	Jumlah Tpu yang ditangani dibagi Jumlah tpu asset Pemda dikali 100	Persen	47.47%	11.11%	12.12%	1,700,000,000	14.14%	1,750,000,000	15.19%	1,700,000,000	100%	1,700,000,000		Dinas Perumahan, Permulokman dan Pemakaman
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Pemenuhan Pembangunan Gedung yang Berkualitas Baik	Jumlah bangunan yang ditata per total bangunan	Persen	50	55	60	226,889,200,000	65	184,089,200,000	70	131,089,200,000	70	131,089,200,000		Dinas Tata Ruang dan Bangunan
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Terseleenggara	Jumlah bangunan dan lingkungan yang ditata per total bangunan dan lingkungan	Persen	30	35	40	16,334,500,000	45	21,814,000,000	50	27,293,500,000	50	27,293,500,000		Dinas Tata Ruang dan Bangunan
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten	Panjang Peningkatan dan Rehab Jalan Kabupaten tertangan/ rencana Total Penanganan	Persen	7.92	0	3.38%	150,585,000,000	4.89%	169,706,500,000	6.4%	188,103,150,000	6%	188,103,150,000		Dinas Bina Marga dan SDA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penataan Ruang yang Terseleenggara	Jumlah penataan ruang yang diselenggarakan	Persen	60	65	70	4,278,625,045	73	4,855,681,684	76	5,413,948,107	76	5,413,948,107		Dinas Tata Ruang dan Bangunan
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN															
	Persentase Pemenuhan Pembinaan Pengelolaan Penyelenggaraan, pendataan dan Perencanaan Perumahan, rumah susun dan Apartemen	Rata rata capaian pemenuhan Pembinaan Penyelenggaraan, pendataan dan Perencanaan Perumahan, rumah susun dan Apartemen	Persen	100	100	100	500,000,000	100	520,000,000	100	550,000,000	100	550,000,000		Dinas Perumahan, Permulokman dan Pemakaman
	Persentase Pemenuhan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rata rata capaian pemenuhan Jumlah Rumah tidak layak huni Korban Bencana Alam yang direhabilitasi	Persen	100	100	100	350,000,000	100	370,000,000	100	400,000,000	100	400,000,000		Dinas Perumahan, Permulokman dan Pemakaman

Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPPD		Fenomena Daerah yang Perlu Ditangani
				2022	2023	Tahun 2024		Target 2025		Target 2026		Target	Rp	Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
PROGRAM KAWASAN PERBUMIHAN	Perentase Perumahan Pengembangan Kawasan Perumahan Perkotaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan kawasan yang terasumsikan / Jumlah Dokumen Pengembangan Perumahan yang disusun/diambil 100	Persegi	100	100	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Perkotaan		
	Perentase Rumah Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang dirubah dibagi Jumlah rumah tidak layak huni yang dipertimbangkan dikali 100	Persegi	2,76	5,52	8,27	37.600.000.000	11,09	39.600.000.000	14,03	41.600.000.000	14,03	41.600.000.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Perkotaan		
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perentase Perumahan yang memenuhi Standar	Jumlah Perumahan yang sudah diserahkan/pemenuhan pasu dibagi Jumlah Seluruh Perumahan dikali 100	Persegi	42,39	45,14	47,89	15.770.000.000	50,64	17.810.000.000	54,31	20.850.000.000	54,31	20.850.000.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Perkotaan		
Program Peningkatan Jalan dan Angkutan Jalan (LAL)	Realisasi Lahan yang direncanakan per tahun	Jumlah realisasi Pengadaan lahan / Pengadaan lahan yang direncanakan x 100	Persegi	100	100	30,97	245.947.196.850	35,4	353.657.268.379	33,63	292.329.770.000	100	292.329.770.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Perkotaan		
	Terdapatnya Jaringan Angkutan yang Beroperasi	Jumlah Jaringan Angkutan yang Beroperasi	Jumlah	N/A	N/A	1	5.055.000.000	2	5.315.000.000	4	6.515.000.000	7	6.515.000.000	Dinas Perumahan		
	Terminal yang terbangun	Jumlah Terminal C yang Dibangun	Unit	N/A	N/A	1	9.250.000.000	1	9.250.000.000	1	9.250.000.000	3	9.250.000.000	Dinas Perumahan		
	Rasio tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Jumlah kecelakaan yang Berkurangnya Pada Suatu periode Rancangan dalam masa pembebasan dibagi dengan jumlah kendaraan yang telah melalui proses Rancangan pada suatu periode Rancangan	Rasio	N/A	N/A	0,3	40.119.100.000	0,5	13.413.400.000	0,7	15.647.700.000	0,7	15.647.700.000	Dinas Perumahan		
	Perentase Pemukiman Titik Kemacetan Lalu Lintas	Jumlah Titik Kemacetan Yang di Tandai dibagi Jumlah Titik Kemacetan yang Menjadi target (4 titik dikali 100%)	Persegi	1	1	33,33%	13.894.050.000	66,67%	16.449.050.000	100,00%	15.804.050.000	100,00%	15.804.050.000	Dinas Perumahan		

Tujuan/ Sasaran/ Program in Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Definisi Operasional	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Pencapaian Daerah Peningkat Jawab		
				2022	2023	Tahun 2024		Target 2025		Target 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
	Persentase Perlangkapan Jalan	Jumlah Perbaikan Jalan pada Tahun n di bagi Jumlah Perlangkapan Jalan yang seharusnya terdapat	Persem	79%	79%	Target	54.550.380,200	79%	60.283.000,000	92%	67.440.380,200	92%	67.440.380,200	Dinas Perhubungan
Sasaran 4.2 Meningkatkan Kualitas Hidup yang Sehat dan Tangguh terhadap Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			55,88	56,25	Target	56,25	56,89	56,89	115	115	56,89	115	
Indeks Resiko Bencana				130,45	129	Target	129	115	115	115	115	115		
Program Peningkatan Bencana	Indeks Keunggulan Desa (IKD)													Badan Peningkatan Bencana Daerah
	Tingkat Madya	Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama Iaktor 51- 60	Tingkat	111	91	Target	910.000,000	91	910.000,000	92	920.000,000	274	920.000,000	Badan Peningkatan Bencana Daerah
	Tingkat Utama	Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya Iaktor 36- 50	Tingkat	163	0	Target	0	91	910.000,000	91	910.000,000	182	910.000,000	Badan Peningkatan Bencana Daerah
	Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana sesuai Jenis Ancaman Bencana	Jumlah penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana sesuai Jenis Ancaman Bencana	Persem	100%	100%	Target	500.000,000	100%	500.000,000	100%	500.000,000	100%	500.000,000	Badan Peningkatan Bencana Daerah
	Persentase Korban Bencana yang Mendapat Layanan Penyelamatan dan Eвакуasi	Jumlah korban Bencana yang Mendapat Layanan Penyelamatan dan Eвакуasi	Persem	100	100%	Target	1.000.000,000	100%	1.000.000,000	100%	1.000.000,000	100%	1.000.000,000	Badan Peningkatan Bencana Daerah
Program Pencegahan, Pemangulangan, Penyvelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Korban Kebakaran dan Non Kebakaran yang Mendapat Layanan Penyelamatan dan Eвакуasi	jumlah korban Kebakaran dan Non Kebakaran yang Mendapat Layanan Penyelamatan dan Eвакуasi	Persem	100	100%	Target	15.000.000,000	100%	15.000.000,000	100%	15.000.000,000	100%	15.000.000,000	Badan Peningkatan Bencana Daerah
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Dibuat	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen	3	3	Target	1.550.000,000	3	1.750.000,000	3	2.150.000,000	3	2.150.000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebencanaan
Program Pengkangan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian terhadap Kinerja Masyarakat	Terlaksananya pembinaan dan penilaian terhadap kinerja masyarakat	Penilaian	20	35	Target	80.000,000	25	80.000,000	27	80.000,000	30	1.000.000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebencanaan
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau	Peningkatan Kualitas	Persentase Peningkatan Kualitas	Persem	50%	50%	Target	5.741.413,242	50%	6.241.413,242	50%	6.850.000,000	50%	6.850.000,000	Dinas Lingkungan

Tujuan/Sasaran/Program di Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Peningkat Daerah Peninggang Jawab	
				2022	2023	Tahun 2024		Target 2025		Target 2026		Target	Rp						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
Kerusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Udara, Lingkungan Air	Lingkungan Udara, Air																	Hidup dan Kebencanaan
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Persentase Tindak Lanjut Pengendalian Pengelolaan Limbah B3	Jumlah pengendalian pengelolaan limbah B3 yang dindaklanjuti/Ju mlah pengendalian pengelolaan limbah B3 x 100%	Persen	100	100	100%	400.000.000	100%	500.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	
Program Perbaikan dan Penguasaan terhadap ran Lingkungan dan lain Perdagangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Pelaku Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	Jumlah Pelaku Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup /Jumlah Pelaku usaha	Pelaku Usaha	100	100	250	555.600.012	250	610.000.000	250	615.000.000	750	615.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebencanaan					
Program Peningkatan Pengadaan Lingkungan Hidup	Persentase Pengadaan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan Pengadaan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen	100	100	100%	438.231.739	100%	450.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebencanaan					
Program Pengelolaan Kelembagaan Hayati	Persentase Kelembagaan Hayati yang Terkeleola	Jumlah kawasan kelembagaan hayati yang terkeleola / Jumlah Kelembagaan hayati yang ada x 100%	Persen	27	10	1.20%	15.550.000.000	1.20%	17.450.000.000	1.20%	19.450.000.000	3.60%	19.450.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebencanaan					
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Tumbuhan Sampah yang Terkeleola	Tumbuhan Sampah yang Terkeleola/ tumbuhan yang ada x 100%	Persen	27	1	60	94.179.904.075	62	106.632.009.532	64	118.395.874.011	64	118.395.874.011	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebencanaan					
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Perentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional	Rata-rata Capaian pada Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional	Persen	100	100	100.00%	21.000.000.000	100%	23.000.000.000	100%	25.000.000.000	100%	25.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebencanaan					

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan pembangunan yang memuat kapasitas riil keuangan daerah dalam rangka mendanai program pembangunan daerah. Kapasitas riil keuangan yang disajikan adalah perkiraan ketersediaan pendanaan di luar belanja wajib dan mengikat. Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menyusun program pembangunan, indikator kinerja dan target kinerja *outcome* seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan arah kebijakan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran.

7.1 Kerangka Pendanaan

Belanja daerah ditujukan untuk mendanai penyelenggaraan urusan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan urusan konkuren pemerintah daerah provinsi meliputi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan unsur pemerintahan umum.

Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM, sedangkan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK).

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program perangkat daerah guna mencapai sasaran pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi, maka dialokasikan anggaran untuk belanja daerah sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab III Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ini. Kerangka pendanaan pembangunan daerah dapat dijelaskan menurut struktur belanja daerah. Belanja daerah yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menerapkan *money follow programme* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang.

Tabel 7.1
Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2024-2026

URAIAN	Target		
	2024	2025	2026
BELANJA DAERAH			
Belanja Operasi	7.252.991.356.934,61	7.699.257.791.221,88	8.195.950.845.078,63
Belanja Pegawai	4.762.223.951.784,22	5.149.149.171.587,65	5.582.840.077.980,54
Belanja Barang dan Jasa	2.430.682.304.647,85	2.746.487.761.007,29	3.103.324.118.885,89
Belanja Hibah	332.837.793.767,57	374.209.531.532,88	420.723.776.302,42
Belanja Bantuan Sosial	28.578.744.864,94	31.056.406.029,01	33.748.870.357,90
Belanja Modal	1.697.710.096.730,91	1.703.408.587.570,68	1.709.126.205.820,90
Belanja Tanah	397.643.863.276,41	462.310.342.784,49	537.493.150.993,10

URAIAN	Target		
	2024	2025	2026
Belanja Peralatan dan Mesin	258.205.632.766,17	266.957.711.334,28	276.006.448.338,69
Belanja Gedung dan Bangunan	347.496.617.089,28	360.840.487.185,51	374.696.761.893,44
Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	674.414.397.740,38	744.510.148.729,12	821.891.352.583,54
Belanja Aset Tetap Lainnya	19.949.585.858,66	24.956.931.909,18	31.221.121.818,39
Belanja Tak Terduga	43.007.066.493,68	46.654.065.732,34	50.610.330.506,44
Belanja Tak Terduga	43.007.066.493,68	46.654.065.732,34	50.610.330.506,44
Belanja Transfer	750.050.241.925,80	800.045.966.331,21	853.374.230.770,74
Belanja Bagi Hasil Pendapatan	276.931.990.237,25	311.672.779.572,52	350.771.759.677,32
Belanja Bantuan Keuangan	473.118.251.688,55	494.152.082.082,34	516.121.031.802,97
Jumlah Belanja	7.252.991.356.934,61	7.699.257.791.221,88	8.195.950.845.078,63

Sumber: *Proyeksi Tim Penyusun, 2023*

7.2 Proyeksi Pendanaan Program

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Daerah. Program pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Perencanaan program dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu :

- Penjabaran visi dan misi RPJPD Tahun 2005-2025;
- Berbasis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah;
- Pelayanan dasar berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs);
- Peningkatan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan Kesempatan Kerja, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih;
- Penerapan sub bidang urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Rencana program perangkat daerah Kabupaten Tangerang untuk periode tahun 2023 sampai dengan 2026 sebanyak 152 program. Program dimaksud merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Kabupaten Tangerang, serta unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawasan dan unsur pemerintahan umum.

Dalam rangka pencapaian target pembangunan Kabupaten Tangerang tahun 2023-2026, telah disusun program pembangunan yang disertai pagu indikatif yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang. Pendanaan program pembangunan berdasarkan urusan, bidang urusan, dan perangkat daerah sebagaimana tercantum pada Tabel 7.2.

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
Pendidikan														
Program Pengelolaan Pendidikan														
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Peserta Didik Usia 7-12 tahun dibagi Jumlah Penduduk Usia 7-12 tahun	Persen	93.50	94.50	95.00	488,606,428,698	95.5	4,917,066,008,007	96.00	496956331621941	96.00	496,956,331,621,941	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Jumlah Peserta Didik Usia 13-15 tahun dibagi Jumlah Penduduk Usia 13-15 tahun	Persen	77.30	79.3	80.00	4,334,696,346,326	80.5	45127986431423	81.00	500120153060991	81.00	500,120,153,060,991	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Jumlah Peserta Didik Usia 5-6 tahun dibagi Jumlah Penduduk Usia 5-6 tahun	Persen	26.19	49	50.60	44,692,893,806	53	41,392,893,806	54.60	45,407,893,806	54.60	45,407,893,806	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan dibagi Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan dikali 100%	Persen	0.12	0.11	100.00	18,700,600,000	100.00	13,415,600,000	100.00	13,695,600,000	100.00	13,695,600,000	Dinas Pendidikan
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase implementasi kurikulum muatan lokal	Jumlah Peserta Didik yang dapat baca tulis Al Quran	Persen	100%	100%	100%	400,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	Dinas Pendidikan
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi minimal D4/S1	Rata-Rata Capaian Outcome pada Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persen	100	100	90%	220,000,000	91%	240,000,000	92%	260,000,000	92%	260,000,000	Dinas Pendidikan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Definisi Operasional	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Prangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kondisi Kinerja Awal			2024			2025			2026			Target	Rp	
				2022	2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Kesehatan	Persentase Rekomendasi perizinan Pendidikan yang diterbitkan (PAUI/SD/SMK dan Pendidikan Non Formal)	Rata-Rata Capaian Outcome pada Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persen	0	0	80%	400.000.000	85%	400.000.000	90%	400.000.000	90%	400.000.000	Dirnas Pendidikan				
Program Perencanaan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah Logistik pelayanan kesehatan sesuai sasaran Ibu Hamil	Rasio	0.10	0.10	0.10	672.045.538.596	0.10	686.098.449.370	0.10	701.192.615.260	0.10	701.192.615.260	Dirnas Kesehatan				
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Terakreditasi	Jumlah SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai sasaran Ibu Hamil	Persen	55,56%	74,07%	85,19%		92,59%		100,00%		100,00%		Dirnas Kesehatan				
	Persentase Logistik pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Logistik pelayanan kesehatan sesuai sasaran Ibu Bersalin	Persen	100	100	100		100		100		100		Dirnas Kesehatan				
	Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Jumlah SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai sasaran Ibu Bersalin	Persen	100	100	100		100		100		100		Dirnas Kesehatan				
	Persentase Logistik pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Logistik pelayanan kesehatan sesuai sasaran Bayi Baru Lahir	Persen	100	100	100		100		100		100		Dirnas Kesehatan				
	Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai sasaran Bayi Baru Lahir	Persen	100	100	100		100		100		100		Dirnas Kesehatan				
	Persentase Logistik pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Logistik pelayanan kesehatan sesuai sasaran Balita	Persen	99,75	100	100		100		100		100		Dirnas Kesehatan				
	Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai sasaran Balita	Persen	100	100	100		100		100		100		Dirnas Kesehatan				
	Persentase Logistik pelayanan kesehatan Balita	Jumlah Logistik pelayanan kesehatan sesuai sasaran Usia Pendidikan Dasar	Persen	88,31	100	100		100		100		100		Dirnas Kesehatan				
	Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Balita	Jumlah SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai sasaran Usia Pendidikan Dasar	Persen	100	100	100		100		100		100		Dirnas Kesehatan				
	Persentase Logistik pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Logistik Skringung Pelayanan	Persen	58,92	100	100		100		100		100		Dirnas Kesehatan				

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026				
				2022	2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Kesehatan Usia 15-59 tahun												
	Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Usia Pendidikan Dasar	Jumlah SDM Kesehatan yang melakukan Skrining Pelayanan Kesehatan Usia 15-59 tahun	Persen	100	100	100		100		100		798		Dinas Kesehatan
	Persentase Logistik Skrining Pelayanan Kesehatan Usia 15-59 tahun	Jumlah Logistik pelayanan kesehatan sesuai sasaran Warga Negara Usia 60 tahun keatas	Persen	79,07	100	100		100		100		2,370,426		Dinas Kesehatan
	Persentase SDM Kesehatan yang melakukan Skrining Pelayanan Kesehatan Usia 15-59 tahun	Jumlah SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai sasaran Warga Negara Usia 60 tahun keatas	Persen	100	100	100		100		100		978		Dinas Kesehatan
	Persentase Logistik pelayanan kesehatan Warga Negara Usia 60 tahun keatas	Jumlah Logistik pelayanan kesehatan sesuai sasaran Penderita Hipertensi	Persen	66,36	100	100		100		100		204,597		Dinas Kesehatan
	Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Warga Negara Usia 60 tahun keatas	Jumlah SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai sasaran Penderita Hipertensi	Persen	100	100	100		100		100		1,649		Dinas Kesehatan
	Persentase Logistik pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Logistik pelayanan kesehatan sesuai sasaran Penderita Diabetes Mellitus	Persen	100	100	100		100		100		758,311		Dinas Kesehatan
	Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai sasaran Penderita Diabetes Mellitus	Persen	100	100	100		100		100		834		Dinas Kesehatan
	Persentase Logistik pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Logistik pelayanan kesehatan sesuai sasaran ODGJ Berat	Persen	100	100	100		100		100		45,349		Dinas Kesehatan
	Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai sasaran ODGJ Berat	Persen	100	100	100		100		100		858		Dinas Kesehatan
	Persentase Logistik pelayanan kesehatan ODGJ Berat	Jumlah Logistik pelayanan kesehatan sesuai sasaran Orang Terduga TBC	Persen	77,84	100	100		100		100		4,523		Dinas Kesehatan
	Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan ODGJ Berat	Jumlah SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai	Persen	100	100	100		100		100		44		Dinas Kesehatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		sasaran Orang Terduga TBC												
	Persentase Logistik pelayanan kesehatan Orang Terduga TBC	Jumlah Logistik pelayanan kesehatan sesuai sasaran Risiko Terinfeksi HIV	Persen	88,40	100	100		100		100		52,245		Dinas Kesehatan
	Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Orang Terduga TBC	Jumlah SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai sasaran Risiko Terinfeksi HIV	Persen	100	100	100		100		100		284		Dinas Kesehatan
	Persentase Logistik pelayanan kesehatan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Balita Wasting yang mendapatkan Perawatan/ Pelayanan Kesehatan	Persen	100	100	100		100		100		85,907		Dinas Kesehatan
	Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Balita Stunting yang mendapatkan Perawatan/ Pelayanan Kesehatan	Persen	100	100	100		100		100		328		Dinas Kesehatan
	Persentase Balita Wasting yang mendapatkan Perawatan/ Pelayanan Kesehatan	Total capaian indikator Nasional Mutu dibagi jumlah indikator (13 Indikator) dikali 100%	Persen	99	100	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase Balita Stunting yang mendapatkan Perawatan/ Pelayanan Kesehatan	Angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Puskesmas	Persen	77.1	85	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Puskesmas	Persentase Puskesmas yang Memiliki 80% Obat dan Vaksin Essensial (Pemantauan dilaksanakan terhadap 40 item Obat Indikator)	Indeks	83.94	81.00	84.40		84.90		85.40		85.40		Dinas Kesehatan
	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Essensial	Jenis Alat Kesehatan yang ada di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar dibagi Total jenis Alat Kesehatan yang Tersedia dikali 100%	Persen	80.00%	85.00%	85.00%		90.00%		95.00%		95.00%		Dinas Kesehatan
	Persentase alat kesehatan memenuhi standar	Jumlah RS Rujukan yang Terakreditasi minimal Madya dibagi Jumlah RS Rujukan di Kabupaten dikali 100%	Persen	81.85%	80.00%	81.00%		82.00%		83.00%		83.00%		Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Rata-rata Capaian Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Persen	100	100	100	2,923,873,314	100	2,982,350,790	100	3,047,962,510	100	3,047,962,510	Dinas Kesehatan
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Tenaga	Rata-rata Capaian Pembinaan dan	Persen	100	100	100		100		100		100		Dinas Kesehatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Definisi Operasional	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024					2025					2026		
				2022	2023	Target	Rp	Target	2024	2025	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase P-IPK yang sesuai standar	Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Perseri	100	100	100		100		100		100		100	Dinas Kesehatan	
	Persentase sarana kefarmasian yang sesuai standar	Rata-rata Capaian P- IPK yang sesuai standar	Perseri	100	100	100		100		100		100		100	Dinas Kesehatan	
	Persentase TPM yang memenuhi syarat berdasarkan inspeksi Kesehatan Lingkungan	Rata-rata Capaian sarana kefarmasian yang sesuai standar	Perseri	100	100	100		100		100		100		100	Dinas Kesehatan	
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah PHBS Rumah Tangga	Jumlah PHBS Rumah Tangga	Rumah Tangga	46357	40278	42004	9.876.009.560	43155	10.073.529.760	44881	10.295.147.420	44881	10.295.147.420	Dinas Kesehatan		
	Persentase Organisasi Masyarakat kemitaan bidang Kesehatan	Rata-rata Capaian Organisasi Masyarakat kemitaan bidang Kesehatan	Perseri	100	100	100		100		100		100		100	Dinas Kesehatan	
	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga	Rata-rata Capaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga	Perseri	100	100	100		100		100		100		100	Dinas Kesehatan	
	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan institusi pendidikan	Rata-rata Capaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan institusi pendidikan	Perseri	100	100	100		100		100		100		100	Dinas Kesehatan	
	Persentase Posyandu yang berada pada Strata Purnama Mandiri	Rata-rata Capaian Posyandu yang berada pada Strata Purnama Mandiri	Perseri	100	100	100		100		100		100		100	Dinas Kesehatan	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDM)															Dinas Bina Marga dan SDA	
	Persentase Infrastruktur Sungai dan Pembuang dalam Kondisi Baik	Pangang Penanganan Normalisasi Sungai dan Pembuang/Total Pangang Sungai dan Pembuang x 100	Perseri	63,20		70,20%	110.086.116.904	77,20%	100.991.128.594	84,2%	1.039.602.414.529	84%	1.039.602.414.529	Dinas Bina Marga dan SDA		
	Persentase Laban Sawah Dilindungi yang Terlayani Irigasi	Lokasi Laban sawah dilindungi yang terlayani/total lokasi laban sawah dilindungi	Perseri	63,6		77,27%	5.550.000.000	90,9%	5.550.000.000	100%	5.200.000.000	100%	5.200.000.000	Dinas Bina Marga dan SDA		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM														Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Definisi Operasional	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024					2025					2026					Target	Rp	
				2022	2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
	Cakupan Sarana Air Bersih	Jumlah Rumah tangga Pengguna Air Bersih / Jumlah Rumah tangga di Kabupaten Tangerang x 100	Persen	59,07	64,67	72,67	66.160.000.000	80,67	67.170.000.000	88,67	70.200.000.000	88,67	70.200.000.000	88,67	70.200.000.000	Dinas Perumahan,Perumahan dan Pemukiman					
	Prosentase Terpenuhiya Pelayanan Peridistribusian Air Bersih Bagi Masyarakat	Jumlah Air bersih yang didistribusikan ke masyarakat dibagi Jumlah kebutuhan Air bersih untuk didistribusikan kepada masyarakat x 100	Persen	103,64	100	100	6.500.000.000	100	7.000.000.000	100	7.400.000.000	100	7.400.000.000	100	7.400.000.000	Dinas Perumahan,Perumahan dan Pemukiman					
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERKAMPYAHAN REGIONAL	Persentase Pemenuhan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional	Persen	100	100	100,00%	21.000.000.000	100%	23.000.000.000	100%	25.000.000.000	100%	25.000.000.000	100%	25.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan					
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Sarana Sanitasi yang Dibangun	Jumlah rumah tangga bersantasi dibagi Jumlah seluruh rumah tangga dikali 100	Persen	96,35	96,48	96,61	9.500.000.000	96,75	9.500.000.000	96,88	10.000.000.000	96,88	10.000.000.000	96,88	10.000.000.000	Dinas Perumahan,Perumahan dan Pemukiman					
	Persentase Cakupan Layanan Penyediaan Lumpur Tinja	Jumlah Layanan lumpur tinja terdawal (L2T2) dibagi Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang dikali 100	Persen	0,136	0,138	0,140	5.850.000.000	0,143	3.300.000.000	0,146	3.500.000.000	0,146	3.500.000.000	0,146	3.500.000.000	Dinas Perumahan,Perumahan dan Pemukiman					
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Prosentase Infrastruktur Drainase dalam Kondisi Baik	% Perantangan Drainase Jalan Kabupaten	Persen	11,43		11,93%	40.800.000.000	12,43%	44.880.000.000	12,93%	49.368.000.000	12,93%	49.368.000.000	12,93%	49.368.000.000	Dinas Perumahan,Perumahan dan Pemukiman					
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN	Persentase Peningkatan kualitas permukiman tidak terata	Jumlah sarana prasarana yang dibangun dibagi jumlah sarana prasarana yang direncanakan untuk dibangun dikali 100	Persen		100	100,00	25.000.000.000	100,00	30.000.000.000	100,00	35.000.000.000	100,00	35.000.000.000	100,00	35.000.000.000	Dinas Perumahan,Perumahan dan Pemukiman					
	Persentase Sarana dan Prasarana TPU yang terbangun	Jumlah Tpu yang ditangani dibagi Jumlah tpu asset Pemda dikali 100	Persen	45,45%	14,14%	14,14%	7.000.000.000	14,14%	7.000.000.000	11,11%	7.000.000.000	100%	7.000.000.000	100%	7.000.000.000	Dinas Perumahan,Perumahan dan Pemukiman					
	Persentase Sarana dan Prasarana TPU yang Terpelihara	Jumlah Tpu yang ditangani dibagi Jumlah tpu asset Pemda dikali 100	Persen	47,47%	11,11%	12,12%	1.700.000.000	14,14%	1.750.000.000	15,15%	1.700.000.000	100%	1.700.000.000	100%	1.700.000.000	Dinas Perumahan,Perumahan dan Pemukiman					
Program Penataan Bangunan Gedung	Prosentase Pemenuhan Pembangunan Gedung yang Berkualitas Baik	Jumlah bangunan yang ditata Per total bangunan	Persen	50	55	60	226.889.200.000	65	184.089.200.000	70	131.089.200.000	70	131.089.200.000	70	131.089.200.000	Dinas Tata Ruang dan Bangunan					

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Terselenggara	Jumlah bangunan dan lingkungan yang ditata per total bangunan dan lingkungan	Persen	30	35	40	16,334,500,000	45	21,814,000,000	50	27,293,500,000	50	27,293,500,000	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten	Panjang Peningkatan dan Rehab Jalan Kabupaten tertangani/rencana Total Penanganan	Persen	7.92	0	3.38%	150,585,000,000	4.89%	169,706,500,000	6.4%	188,103,150,000	6%	188,103,150,000	Dinas Bina Marga dan SDA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penataan Ruang yang Terselenggara	Jumlah penataan ruang yang diselenggarakan	Persen	60	65	70	4,278,625,045	73	4,855,681,684	76	5,413,948,107	76	5,413,948,107	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman														
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN														
	Persentase Pemenuhan Pembinaan Pengelolaan Penyelenggaraan, pendataan dan Perencanaan Perumahan, rumah susun dan Apartemen	Rata rata capaian pemenuhan Pembinaan Penyelenggaraan, pendataan dan Perencanaan Perumahan, rumah susun dan Apartemen	Persen	100	100	100	500,000,000	100	520,000,000	100	550,000,000	100	550,000,000	Dinas Perumahan,Permukiman dan Pemakaman
	Persentase Pemenuhan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rata rata capaian pemenuhan Jumlah Rumah tidak layak huni Korban Bencana Alam yang direhabilitasi	Persen	100	100	100	350,000,000	100	370,000,000	100	400,000,000	100	400,000,000	Dinas Perumahan,Permukiman dan Pemakaman
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN														
	Persentase Pemenuhan Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan kawasan yang tersusun / Jumlah Dokumen pengembangan kawasan yang direncanakan dikali 100	Persen	100	100		2,500,000,000	100	2,500,000,000	100	2,500,000,000	100	2,500,000,000	Dinas Perumahan,Permukiman dan Pemakaman
	Persentase Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah tidak layak huni yang direhab dibagi Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbupkan dikali 100	Persen	2.76	5.52	8.27	37,600,000,000	11.09	39,600,000,000	14.03	41,600,000,000	14.03	41,600,000,000	Dinas Perumahan,Permukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang memenuhi Standar	Jumlah Perumahan yang sudah diserahkan psu dibagi Jumlah Seluruh Perumahan dikali 100	Persen	42.39	45.14	47.89	15,770,000,000	50.64	17,810,000,000	54.31	20,850,000,000	54.31	20,850,000,000	Dinas Perumahan,Permukiman dan Pemakaman

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026				
				2022	2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ketertarikan dan Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat														
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														Satuan Pol PP
	Persentase Penanganan gangguan Ketertarikan dan ketertiban umum	Jumlah Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang ditangani dibagi Jumlah Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang dilaporkan dan yang teridentifikasi oleh satpol pp dikali 100	Persen	100	100	100	12,556,408,400	100	10,825,000,000	100	11,050,000,000	100	11,050,000,000	Satuan Pol PP
	Persentase Linmas yang terlatih	Jumlah Linmas yang terlatih di bagi Jumlah Linmas Keseluruhan dikali 100	Persen	0	0	11		11		10		32		Satuan Pol PP
	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah SDM yang terlatih / Total SDM Satuan Polisi Pamong Praja dikali 100	Persen	0	0	100		100		100		100		Satuan Pol PP
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA dibagi Jumlah pelanggaran PERDA yang dilaporkan dikali 100	Persen	100	100	100		100		100		100		Satuan Pol PP
Program Penanggulangan Bencana														Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Indeks Ketangguhan Desa (IKD):													Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Tingkat Madya	Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama (skor 51-60)	Tingkat	111		91	910,000,000	91	910,000,000	92	920,000,000	274	920,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Tingkat Utama	Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya (skor 36-50)	Tingkat	163		0		91	910,000,000	91	910,000,000	182	910,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana sesuai Jenis Ancaman Bencana	Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana sesuai Jenis Ancaman Bencana	Persen	100%	100%	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase Korban Bencana yang Mendapat Layanan Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapat Layanan Penyelamatan dan Evakuasi	Persen	100	100%	100%	1,000,000,000	100%	1,000,000,000	100%	1,000,000,000	100%	1,000,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Definisi Operasional	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Prangkal Daerah Penerimaan Jawab
				Kondisi Kinerja Awal				2024				2025				2026		
				2022	2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Tenaga Kerja			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
PROGRAM PERENCANAAN TEMAGA KERJA	Persentase ketersediaan data makro dan mikro ketenagakerjaan	Jumlah data ketenagakerjaan yang tersedia/Jumlah data ketenagakerjaan yang wajib diusun daerahx100	Persen	NA	NA	100%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	Dinas Tenaga Kerja				
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TEMAGA KERJA	Persentase lulusan Pelatihan yang kompeten	Jumlah lulusan BLK yang ditempatkan di perusahaan dan berwirausaha dibagi jumlah lulusan BLK x 100	Persen	NA	71%	72.20%	28.350.000.000	75.00%	21.530.000.000	77.80%	21.900.000.000	77.80%	21.900.000.000	Dinas Tenaga Kerja				
PROGRAM PEMEMPATAN TEMAGA KERJA	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang terakreditasi	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang terakreditasi	Lembaga	21 Lembaga	25 Lembaga	30 Lembaga		35 Lembaga		40 Lembaga		40 Lembaga		Dinas Tenaga Kerja				
	Persentase Pemempatan Tenaga Kerja berdasarkan Lowongan Kerja yang Terdaftar	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dibagi jumlah lowongan kerja terdaftar x100	Persen	97.71%	95.24%	96.12%	4.273.000.000	96.87%	5.210.000.000	96.90%	6.625.000.000	96.90%	6.625.000.000	Dinas Tenaga Kerja				
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Wirausaha Baru	Jumlah Wirausaha Baru	Orang	208 Orang	244 Orang	480 Orang		660 Orang		860 Orang		2000 Orang		Dinas Tenaga Kerja				
	Angka serguketa Pengusaha-pekerja per tahun	Jumlah Perseshan hubungan industrial terselesakan/ Jumlah perseshan hubungan industrial yang terkirimhikasi x 100	Persen	1.54%	1.43%	1.34%	2.423.000.000	1.25%	2.664.000.000	1.18%	2.931.000.000	1.18%	2.931.000.000	Dinas Tenaga Kerja				
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Kata-rata capaian kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Persen	100	100	100%	2.100.000.000	100%	970.000.000	100%	950.000.000	100%	950.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perlindungan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif	Persen	100	100	100%	1.000.000	100%	1.050.000	100%	1.100.000	100%	1.100.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga	Jumlah kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga	Persen	100	100	100%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Profil Gender Pedoman Pengumpulan Data Terpiilih	Jumlah kegiatan Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak	Persen	100%	100	100%	100.000.000	100%	125.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
Program Pemenuhan Hak Anak (PHN)	Persentase Seluruh Klaster Hak Anak	Jumlah Seluruh Klaster Hak Anak	Persen	100%	100	100%	1.010.000.000	100%	1.062.500.000	100%	1.125.000.000	100%	1.125.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Definisi Operasional	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2024							2025								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	
				2022	2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	13	14		15	
Program Perindungan Khusus Anak Pangan	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
Program Perindungan Khusus Anak Pangan	Persentase Perindungan terhadap Anak	Jumlah AMPK yang mendapat layanan komprehensif	Persen	100%	100	100%	1.150.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.250.000.000	100%	1.250.000.000	100%	1.250.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Lumbung Pangan yang Aktif	Jumlah Lumbung Pangan yang Aktif dibagi Jumlah Lumbung Pangan Di Kabupaten Tangtangg 100	Persen	33%	0	43,42%	1.675.000.000	53,95%	1.200.000.000	64,47%	1.300.000.000	64,47%	1.300.000.000	64,47%	1.300.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT															Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan					
	Persentase 12 jenis Pangan Strategis yang Mengalami Kenaikan Harga < 5-10%	Jumlah Pangan Strategis yang mengalami Kenaikan Harga < 5-10% dibagi Jumlah Pangan Strategis (12)*100	Persen	100	100	100	1.995.000.000	100	1.025.000.000	100	1.065.000.000	100	1.065.000.000	100	1.065.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
	Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Jumlah Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dibagi Hasil Penghitungan Jumlah Kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)*100	Persen	9,05%	10,78%	16,90%	1.109.360.000	23,03%	1.220.000.000	29,15%	1.330.000.000	29,15%	1.330.000.000	29,15%	1.330.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
	Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dibagi Skor PPH Ideal (100)*100	Persen	84,4	84,5	85	290.000.000	85,5	295.000.000	86	300.000.000	86	300.000.000	86	300.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
PROGRAM PENANGANAN KERAWAMAN PANGAN																				
	Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA)	Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA)	Dokumen	1	1	1	110.000.000	1	115.500.000	1	121.275.000	3	121.275.000	3	121.275.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
	Persentase Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan yang Dianteraksi	Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan yang Dianteraksi dibagi Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan*100	Persen	47,27	60	72,72	331.000.000	86,36	372.500.000	100	391.125.000	100	391.125.000	100	391.125.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
PROGRAM PENGAWASAN KEMAMANAN PANGAN																				
	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah Sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan dibagi Jumlah Sampel PSAT*100	Persen	95	75	80	1.520.000.000	85	280.000.000	90	290.000.000	255	290.000.000	255	290.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Definisi Operasional	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Perangkit Daerah Penanggung Jawab
				Kondisi Kinerja Awal			2024			2025			2026			Target	Rp	
				2022	2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Pertanahan																		
Program Peningkatan Tanah	Prosentase Realisasi lahan yang direncanakan per tahun	Jumlah realisasi / pengadaaan lahan yang direncanakan x 100	Persen	100	100	30,97	245.947.196.850	35,4	353.657.268.379	33,63	292.329.770.000	100	292.329.770.000		Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman			
Lingkungan Hidup																		
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Dibuat	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen	3	3	3	1.550.000.000	3	1.750.000.000	3	2.150.000.000	3	2.150.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			
Program Peningkatan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Tertaksananya Pembinaan dan Penilaian terhadap Kinerja Masyarakat	Tertaksananya pembinaan dan penilaian terhadap kinerja masyarakat	Penilaian	20	35	25	80.000.000	27	80.000.000	30	1.000.000.000	30	1.000.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan Udara, Air	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan Udara, Air	Persen	50%	50%	50%	5.741.413.242	50%	6.241.413.242	50%	6.850.000.000	50%	6.850.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Pengelolaan Limbah B3	Jumlah pengaduan / pengelolaan limbah B3 yang ditindaklanjuti / Jumlah pengaduan pengelolaan limbah B3 x 100%	Persen	100	100	100%	400.000.000	100%	500.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			
Program Pembinaan dan Penguasaan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perindustrian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Pelaku Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup / Jumlah Pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup / Jumlah Pelaku usaha	Pelaku Usaha	100	100	250	555.600.012	250	610.000.000	250	615.000.000	750	615.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			
Program Peningkatan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penanganan Pengaduan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen	100	100	100%	438.233.739	100%	450.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			
Program Pengelolaan Kelembagaan Masyarakat	Persentase Kawasan Kelembagaan Masyarakat yang Terkelola	Jumlah kawasan kelembagaan masyarakat yang terkelola / Jumlah Kelembagaan masyarakat yang ada x 100%	Persen	2,7	1,0	1,20%	15.550.000.000	1,20%	17.450.000.000	1,20%	19.450.000.000	3,60%	19.450.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			
Program Pengelolaan Persempahan	Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola	Timbulan Sampah yang Terkelola / timbulan yang ada x 100%	Persen	2,7	1	60	94.179.904.075	62	106.632.009.532	64	118.395.874.011	64	118.395.874.011		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil															Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Perakaman KTP-el	Jumlah wajib KTP yang sudah direkam dibagi Jumlah Penduduk Wajib KTP	Persen	99,26	99%	99%	5.350.968.991	99%	5.361.229.491	99%	5.400.922.391	99%	5.400.922.391		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Output/Outcome)	Definisi Operasional	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
				Kondisi Kinerja Awal					2024							2025					2026				
				2022	2023	Target	Rp	Target	2024	2025	Target	Rp	Target			2026	2027	Target	Rp	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
	Cakupan kepemilikan KIA	Jumlah KIA yang diterbitkan dibagi Jumlah Penduduk usia 0 - 17 Tahun	Persen	40	50%	60%		70		80		80		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
	Cakupan SKP/WNI yang diterbitkan	Jumlah SKP/WNI yang diterbitkan dibagi dengan Target SKP/WNI	Persen	100	100%	100%		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
	Cakupan SKD/WNI yang diterbitkan	Jumlah SKD/WNI yang diterbitkan dibagi dengan Target SKD/WNI	Persen	100	100%	100%		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
Program Pencatatan Sipil																									
	Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0 s/d 18 tahun	Cakupan penduduk usia 0 s.d. 18 tahun yang telah memiliki Akte Kelahiran	Persen	93,07% (903.733)	98%	99%	1.725.000.000	99,50%	1.725.000.000	99,55%	1.725.000.000	99,55%	1.725.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
	Cakupan Kepemilikan Akte Perkawinan	Cakupan penduduk yang telah memiliki Akte Perkawinan	Persen	100% (727.047)	100%	100%		100%		100%		100%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
	Cakupan Kepemilikan Akte Kematian	Cakupan penduduk yang telah memiliki Akte Kematian	Persen	100% (19.562)	100%	100%		100%		100%		100%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
	Cakupan Kepemilikan Akte Perceraian	Cakupan penduduk yang telah memiliki Akte Perceraian	Persen	100% (6.737)	100%	100%		100%		100%		100%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
	Cakupan Kepemilikan Akte Pengesahan Anak	Cakupan penduduk yang telah memiliki Akte Pengesahan Anak	Persen	100%	100%	100%		100%		100%		100%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																									
	Persentase Jaminan SIAK dalam Kondisi Baik	Cakupan jaminan SIAK yang beroperasi dalam kondisi baik	Persen	100	100	100	89.879.962	100%	89.879.962	100%	89.879.962	100%	89.879.962	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
	Persentase OPD dan Lembaga Non Pemerintah yang melakukan Kerja Sama Pemantauan Data Kependudukan	Cakupan OPD dan lembaga non Pemerintah yang sudah melakukan Perjanjian Kerjasama	Persen	35,48	53,23	69%		85		100		100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
PROGRAM PENGEMBANGAN PROFIL KEPENDUDUKAN																									
	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan		100	100	100	50.962.500	100	50.962.500	100	50.962.500	100	50.962.500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA																									
	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah desa Mandiri di Kabupaten Tanggung berdasarkan hasil survei dari Kemendes PDTT	Desa	5	15	25	7.600.000.000	35	9.370.000.000	45	10.650.000.000	45	10.650.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa											

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023	Target	2024		2025		2026		Target	Rp		
							Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		sampai dengan tahun berkenaan (tahun n)														
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Desa yang Menghasilkan PADes	Jumlah Desa di Kabupaten Tangerang yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes) bersumber dari bagi hasil BUMDes sampai dengan tahun berkenaan (tahun n)	Desa	N/A	1	2	24.267.410,655	3	25.480.781.187	4	26.754.820.247	4	26.754.820.247	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		
	Prosentase lembaga masyarakat yang diasiliasi	Jumlah lembaga masyarakat yang diasiliasi dibagi dengan jumlah lembaga masyarakat di Kabupaten Tangerang	Persen	100	100	100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		
PROGRAM PENATAAN DESA	jumlah rekomendasi penataan desa	Jumlah Desa di Kabupaten Tangerang yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes) bersumber dari bagi hasil BUMDes sampai dengan tahun berkenaan (tahun n)	Rekomendasi	N/A	1	1	1.000.000.000	1	1.050.000.000	1	1.102.500.000	4	1.102.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		
PROGRAM PENINGKATAN KEMASYARAKATAN DESA	Jumlah desa yang diasiliasi kerjasamanya	Jumlah lembaga masyarakat yang diasiliasi dibagi dengan jumlah lembaga masyarakat di Kabupaten Tangerang	Desa	N/A	1	1	1.000.000.000	1	1.050.000.000	1	1.102.500.000	4	1.102.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							1.367.532.400		1.455.029.640		1.547.580.604		1.547.580.604	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Persentase rekomendasi kebijakan dalam rangka pengendalian kependidikan	Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditundakan/utuh dibanding dengan semua jumlah rekomendasi yg dihasilkan kepat sinkronisasi dan koordinasi	Persen	100	100	1	101.532.400	1	114.029.640	1	127.130.604	1	127.130.604	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Persentase Kampung KB yang dibina dan sesuai dengan standar penilaian	Jumlah kampung KB yang dibina sesuai standar penilaian dibanding	Persen	13	30	40	342.000.000	50	402.000.000	60	618.000.000	70	618.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Definisi Operasional	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kondisi Kinerja Awal		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir-Periode RPD		
				2022	2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Jumlah rumah data di kampung KB yang memenuhi klasifikasi Parpurna	Persen	15	25	30	1,266,000,000	35	1,341,000,000	40	1,420,450,000	40	1,420,450,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah data dan pemetaan tersebut dibandingkan dengan target ketersediaan data yang dibutuhkan	Persen	100	100	100	545,000,000	100	584,000,000	100	652,000,000	100	652,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBIAYAAN KELUARGA BERENCANA (KBI)							8,863,712,488		9,401,051,551		11,186,804,336		11,186,804,336	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate /mCPR)	Persen	70.75	71	71.25	229,000,000	71.5	266,000,000	71.75	328,000,000	71.75	328,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Angka Prevalensi Kontrasepsi Jangka Panjang (PJUS) yang sedang menggunakan alat/cara KB modern.	Persen	26.41	26.65	26.89	2,854,792,910	27.13	2,885,153,838	27.37	2,915,785,375	27.37	2,915,785,375	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase hasil kegiatan advokasi, penyuluhan dan pendayagunaan keluarga dengan jumlah rencana target advokasi	Persen	90%	90%	90%	5,779,919,578	95%	6,249,897,713	100%	7,943,018,961	100%	7,943,018,961	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KKS)							11,805,033,712		9,378,684,997		7,618,439,446		7,618,439,446	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Prosentase capaian kinerja pemberdayaan KKS	Persen	92	92	92	1,152,025,712	92.25	1,287,528,997	92.75	1,443,602,446	92.75	1,443,602,446	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Prosentase keluarga berhasil yang mendapat pendampingan dan ditindaklanjuti	Persen	93	93	93	10,315,008,000	94	7,736,256,000	95	5,802,192,000	95	5,802,192,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Definisi Operasional	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJ		Perangkal Daerah Penanggung Jawab
				Kondisi Kinerja Awal			2024			2025			2026			Target	Rp	
				2022	2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Prosentase kerjasama dengan mitra kerja	jumlah target keluarga berisiko	Persen	N/A	N/A	100	338.000.000	100	354.900.000	100	372.645.000	100	372.645.000	Dinas Pengendalian, Penduduk dan Keluarga Berencana				
Program Penyeenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Tersedianya Jaringan Angkutan yang Beroperasi Terminal yang terbangun	Jumlah Jaringan Angkutan yang Beroperasi Jumlah Terminal C yang Dibangun	Jaringan Unit	N/A N/A	N/A N/A	1 1	5.055.000.000 9.250.000.000	2 1	5.315.000.000 9.250.000.000	4 1	6.515.000.000 9.250.000.000	7 3	6.515.000.000 9.250.000.000	Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan				
	Rasio tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Jumlah Kendaraan yang Berkeselamatan Pada Suatu periode Rampcheck dalam durasi waktu masa Rampcheck dibagi dengan jumlah kendaraan yang telah melalui proses Rampcheck pada suatu periode Rampcheck	Rasio	N/A	N/A	0.3	40.119.100.000	0.5	13.413.400.000	0.7	15.647.700.000	0.7	15.647.700.000	Dinas Perhubungan				
	Persentase Penanganan Titik Kemacetan Lalu Lintas	Jumlah Titik Kemacetan Yang di Tangani dibagi Jumlah Titik Kemacetan yang Menjadi Target (4 Titik) dikali 100%	Persen	1	1	33.33%	13.884.050.000	66.67%	16.449.050.000	100.00%	15.804.050.000	100.00%	15.804.050.000	Dinas Perhubungan				
	Persentase Perlangkapan Jalan	Jumlah Perlangkapan Jalan pada Tahun n di bagi Jumlah Perlangkapan jalan yang seharusnya tersedia	Persen	75%	75%	58%	54.550.380.200	75%	60.283.000.000	92%	67.440.380.200	92%	67.440.380.200	Dinas Perhubungan				
Komunikasi dan Informatika																		
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Prosentase layanan ketebukaan daftar informasi publik	Prosentase layanan ketebukaan daftar informasi publik	Persen	100	100%	100%	9.392.500.000	100%	10.623.875.000	100%	12.240.956.250	100%	12.240.956.250	Dinas Komunikasi dan Informatika				
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Penyediaan Layanan Aplikasi dan layanan internet	Terperutuhnya Persentase Penyediaan Layanan Aplikasi dan layanan internet	Persen	100	100%	100%	40.326.829.836	100%	44.719.629.892	100%	49.627.574.376	100%	49.627.574.376	Dinas Komunikasi dan Informatika				
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOBERASI	Persentase update dan jumlah koperasi aktif yang dilakukan Pemertlesaian dan Pengawasan	Rata rata update dan jumlah koperasi aktif yang dilakukan	Persen	8.93%	21.43%	21.43%	750.000.000	21.43%	825.000.000	21.43%	907.500.000	64.29%	907.500.000	Dinas Koperasi dan Usaha Menengah				

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Definisi Operasional	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Prangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024				2025				2026				Target	Rp	
				2022	2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOOPERASI	Persentase update dan jumlah koperasi aktif yang dilakukan penilaian dan peningkatan koperasi yang penertarikan.	jumlah koperasi yang dilakukan penilaian dan pemertarikan dibagi koperasi yang aktif	Persen	13.51	27.03%	27.03%	750.000.000	27.03%	825.000.000	27.03%	907.500.000	81.09%	907.500.000	Dinas Koperasi dan Usaha Menengah				
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOOPERASIAN	Persentase Jumlah Koperasi berkualitas		Persen	-	17.86%	17.86%	500.000.000	17.86%	550.000.000	17.86%	605.000.000	53.58%	605.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Menengah				
PROGRAM PEMBEBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOOPERASI	Persentase update dan jumlah koperasi aktif yang dilakukan Penunngkatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi.	jumlah koperasi yang dilakukan Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dibagi jumlah koperasi yang aktif	Persen	13.29%	13.29%	26.79%	1.500.000.000	26.79%	1.650.000.000	26.79%	1.815.000.000	80.37%	1.815.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Menengah				
PROGRAM PEMBEBERDAYAAN USHA MENENGAH, USHA KECIL, DAN USHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	Jumlah usaha Mikro yang terfasilitasi regalias usaha dan mendapat penguatan kewirausahaan dibagi jumlah usaha mikro yang ada	Persen	1.84%	1.84%	2.8%	1.200.000.000	3.1%	1.400.000.000	3.5%	1.600.000.000	9.4%	1.600.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Menengah				
PROGRAM PENGEMANGAN UMKM																		
	Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB	jumlah Koperasi dan usaha mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB dibagi jumlah KUM yang ada	Persen	2.14%	2.14%	2.14%	4.845.358.164	2.14%	5.164.416.684	2.14%	5.466.792.120	6.42%	5.466.792.120	Dinas Koperasi dan Usaha Menengah				
	Persentase Usaha Mikro yang Dipromosikan	Jumlah produk Usaha yang didasilitasi Promosi dibagi jumlah seluruh produk Usaha mikro yang ada	Persen	1.20%	1.27%	1.40%	1.000.000.000	1.60%	1.150.000.000	1.80%	1.300.000.000	4.80%	1.300.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Menengah				
Penanaman Modal																		
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal																		
	Pengembangan Potensi Investasi Regional di dalam Aplikasi Investasi	Realisasi pengembangan Potensi Investasi Regional (PIR) yang dibuat, perhatian di dalam Aplikasi Sistem Informasi Proyek Investasi Daerah (Sipida) untuk 4 Kecamatan	Persen	N/A	25%	25%	350.000.000	25%	720.000.000	25%	900.000.000	75%	900.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
	Persentase Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Keterpaduan	Jumlah kebijakan penyusunan pemerintahan MPP dibagi jumlah	Persen	N/A	5%	25%	1.800.000.000	75%	1.860.000.000	100%	2.196.000.000	100%	2.196.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		kebijakan persyaratan yang harus ada												
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Minat Investasi	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan per tahun / Jumlah target Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan selama 3 tahun (55.500 NIB) x 100%	Persen	N/A	20%	20%	1,000,000,000	20%	1,200,000,000	20%	1,440,000,000	60%	1,440,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha pada Sektor Industri dengan Skala Usaha Menengah dan Besar yang Melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dibagi Jumlah Pelaku Usaha pada sektor Industri dengan skala usaha Menengah dan Besar x 100%	Pelaku Usaha pada sektor Industri dengan skala usaha Menengah dan Besar yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dibagi Jumlah Pelaku Usaha pada sektor Industri dengan skala usaha Menengah dan Besar x 100%	Persen	86,3%	70%	72%	1,400,000,000	74%	1,680,000,000	75%	2,016,000,000	75%	2,016,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan Investasi	Hasil perhitungan SKM terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persen	3,92%	90%	90,5%	2,000,000,000	91%	2,400,000,000	91%	2,880,000,000	91%	2,880,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data Perizinan yang Diolah dan Diinformasikan Melalui Sistem Pelaporan Online	Jumlah data perizinan yang terbit / Jumlah data perizinan yang masuk x 100%	Persen	50%	70%	75%	1,000,000,000	80%	1,200,000,000	85%	1,440,000,000	85%	1,440,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kepemudaan dan Olahraga														
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYASAING KEPEMUDAAN	Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan	Persen	N/A	N/A	29%	6,325,000,000	33%	7,450,000,000	38%	8,700,000,000	100%	8,700,000,000	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYASAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya saing Keolahragaan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program Pengembangan Kapasitas Daya saing Keolahragaan	Persen	N/A	N/A	29	6,325,000,000	33	7,450,000,000	38	8,700,000,000	100	8,700,000,000	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
Statistik														
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase statistik sektoral	Prosentase data statistik sektoral	Persen	55	55%	60%	1,092,500,000	65%	1,256,375,000	70%	1,444,831,250	75%	1,444,831,250	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persandian														
Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	prosentase layanan kemanan informasi	prosentase layanan kemanan informasi	Persen	45%	45%	55%	1,403,000,000	65%	1,613,450,000	75%	1,855,467,500	75%	1,855,467,500	Dinas Komunikasi dan Informatika

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kebudayaan														
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pemenuhan Pengembangan Kebudayaan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program Pengembangan Kebudayaan	Persen	N/A	N/A	33%	2,482,999,907	33%	2,484,499,907	34%	2,485,999,907	100%	2,485,999,907	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
Perpustakaan														
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase pemenuhan pembinaan perpustakaan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program Pembinaan Perpustakaan	Persen	1	1	1	2,575,000,000	1	2,703,750,000	1	2,838,937,500	1	2,838,937,500	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kearsipan														
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase pemenuhan kegiatan pada program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Rata-rata capaian outcome kegiatan pada program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persen	100%	100%	100%	152,500,000	100%	160,125,000	100%	168,131,250		168,131,250	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase pemenuhan kegiatan pada program pengelolaan arsip	Rata-rata outcome kegiatan pada program pengelolaan arsip	Persen	100%	100%	100%	2,575,000,000	100%	2,703,750,000	100%	2,838,937,500	100%	2,838,937,500	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase pemenuhan kegiatan pada program perizinan penggunaan arsip	Rata-rata capaian outcome kegiatan program perizinan penggunaan arsip	Persen	100%	100%	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase pemenuhan kegiatan pada program perlindungan dan penyelamatan arsip	Rata-rata capaian outcome kegiatan program perlindungan dan penyelamatan arsip	Persen	100%	100%	100%	840,000,000	100%	882,000,000	100%	882,000,000	100%	882,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
Kelautan dan Perikanan														
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi perikanan Tangkap tahun n	Ton	21,148	21,254	21,383	3,450,000,000	21,510	3,250,000,000	21,639	3,250,000,000	21,639	3,250,000,000	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi perikanan budidaya tahun n	Ton	21,089	21,405	21,727	3,700,000,000	22,052	3,400,000,000	22,383	3,400,000,000	22,383	3,400,000,000	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	Rata - rata capaian pemenuhan peningkatan produksi olahan perikanan	%	-	N/A	1.5	1,650,000,000	1.5	1,450,000,000	1.5	1,450,000,000	1.5	1,450,000,000	Dinas Perikanan
Pariwisata														
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pemenuhan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persen	100%	100%	33%	1,974,000,000	33%	1,974,000,000	34%	1,974,000,000	100%	1,974,000,000	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase dokumen hasil penguatan promosi dan laporan kegiatan pariwisata	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program pemasaran pariwisata	Persen	N/A	N/A	33%	850,000,000	33%	850,000,000	34%	850,000,000	100%	850,000,000	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase ekonomi kreatif yang dikembangkan	Rata-rata capaian Outcome kegiatan pada program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persen	N/A	N/A	46%	775,000,000	8%	275,000,000	46%	700,000,000	100%	700,000,000	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rata-rata Capaian Outcome kegiatan pada Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persen	N/A	N/A	33%	875,000,000	33%	875,000,000	33%	875,000,000	100%	875,000,000	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
Pertanian														
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian	Jumlah Ketersediaan Sarana Pertanian Tahun n dibagi Jumlah Kebutuhan Sarana Pertanian*100	Persen	11%	15%	30%	14,902,672,940	45%	14,392,974,370	60%	15,569,935,978	60%	15,569,935,978	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	Jumlah Ketersediaan Prasarana Pertanian Tahun n dibagi Jumlah Kebutuhan Sarana Pertanian*100	Persen	35%	45%	55%	1,995,700,000	65%	1,995,700,000	75%	1,995,700,000	75%	1,995,700,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER														
	Persentase Penanganan Jumlah Penyakit Hewan yang ditangani	Jumlah hewan yang sembuh/recovery dibagi dengan jumlah hewan yang ditangani * 100	Persen	53%	65%	70%	950,000,000	75%	1,250,000,000	80%	1,450,000,000	80%	1,450,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Persentase Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan SNI	Jumlah Sampel Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan SNI dibagi Jumlah Sampel Produk Hewan * 100	Persen	60	62	64	800,000,000	66	950,000,000	68	1,150,000,000	68	1,150,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Jumlah Unit Usaha Pertanian yang Dilakukan Pengawasan dan Pembinaan	Jumlah Unit Usaha Pertanian yang Dilakukan Pengawasan dan Pembinaan dibagi Jumlah Unit Usaha Pertanian *100	Persen	20	90	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Penyuluh Pertanian dan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya dibagi Jumlah Penyuluh	Persen	40%	50%	60%	2,871,143,500	70%	3,088,443,500	80%	3,592,941,500	80%	3,592,941,500	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Definisi Operasional	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Kondisi Kinerja Awal			2024			2025			2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	
				2022	2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		13	14
URUSAN PEMERINTAHAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Sekretariat Daerah																		
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat																		
	Predikat Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kategori		-	Sedang	Sedang	15.008.515.979	Tinggi	11.902.785.462	Tinggi	13.265.366.558	Tinggi	13.265.366.558	Sekretariat Daerah			
	Indeks Reformasi Hukum	Predikat Indeks Reformasi Hukum	Indeks	Buruk	Cukup	Cukup	2.935.289.003	Baik	3.908.630.836	Baik	5.204.732.821	Baik	5.204.732.821	Sekretariat Daerah				
	Prosentase Hasil Kebijakan Yang ditetapkan	Prosentase Dokumen Kebijakan yang ditetapkan dibagi Jumlah Hasil Koordinasi dikali 100%	Persen	100	100	100	152.500.000	100	160.125.000	100	168.131.250	100	168.131.250	Sekretariat Daerah				
Program Perencanaan dan Pembangunan																		
	Prosentase Ruminasan kebijakan Perencanaan yang diselesaikan	Jumlah Hasil kebijakan Perencanaan dibagi Jumlah Total Kebijakan Perencanaan yang diselesaikan x 100 %	Persen	100	100	100	14.168.515.979	100	11.020.785.462	100	12.383.966.558	100	12.383.966.558	Sekretariat Daerah				
	Prosentase Jumlah Perangkat Daerah yang patuh terhadap pemenuhan Administrasi Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah yang patuh di bagi total Perangkat Daerah yang di evaluasi dikali 100 %	Persen	100	100	100	2.935.289.003	100	3.908.630.836	100	5.204.732.821	100	5.204.732.821	Sekretariat Daerah				
	Indeks Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa		Indeks	100	100	100	152.500.000	100	160.125.000	100	168.131.250	100	168.131.250	Sekretariat Daerah				
Sekretariat DPRD																		
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD																		
Penunjang Urusan Pemerintahan																		
Perencanaan																		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH																		
	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Rata-rata capaian kegiatan pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	88	100	100	57.019.063.541	100	59.870.016.718	100	62.863.517.554	100	62.863.517.554	Sekretariat DPRD				
	Persentase Dokumen Pelaporan dan	Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu dibagi jumlah total	Persen	100	100	100	1.783.000.000	100	1.818.600.000	100	1.855.000.000	100	1.855.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Definisi Operasional	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kondisi Kinerja Awal		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD						
				2022	2023	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Pengendalian Perencanaan Pembangunan	dokumen yang disusun] x 100%																
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	Jumlah Persentase Capaian Data Pembangunan (Jumlah dokumen pelaporan dan pengendalian pembangunan yang disusun tepat waktu dibagi jumlah total dokumen yang disusun] x 100%	Persen	62	63	64	535.000.000	66	545.300.000	70	556.200.000	70	556.200.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
	Persentase Ketersediaan Data Pembangunan		Persen	100	100	100	545.800.000	100	557.000.000	100	570.000.000	100	570.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
PROGRAM KOORDINASI DAN SINERKONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
	% Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dan RKPD kedalam APBD Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Program yang tertuang dalam dokumen perencanaan PD	Persen	100	100	100	1.200.000.000	100	1.223.800.000	100	1.248.550.000	100	1.248.550.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
	% PD dengan kinerja baik lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Program yang tertuang dalam dokumen perencanaan PD	Persen	100	100	100	553.900.000	100	571.000.000	100	582.500.000	100	582.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
	% Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dan RKPD kedalam APBD lingkup Bidang Pemerintahan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Program yang tertuang dalam dokumen perencanaan PD (Sumber Daya Alam) yang sesuai dengan RPJMD/RPD dibagi program dalam dok perencanaan PD	Persen	100	100	100	1.784.200.000	100	1.819.800.000	100	1.856.200.000	100	1.856.200.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
	% PD dengan kinerja baik lingkup Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Program yang tertuang dalam dokumen perencanaan PD (Sumber Daya Alam) x 100	Persen	100	100	100	295.900.000	100	301.800.000	100	307.800.000	100	307.800.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
	% Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dan RKPD kedalam APBD lingkup Bidang Infrastruktur dan Kelembahan	Program yang tertuang dalam dokumen perencanaan PD	Persen	100	100	100	2.500.000.000	100	2.870.000.000	100	3.284.000.000	100	3.284.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Definisi Operasional	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kondisi Kinerja Awal		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
				2022	2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	% PD dengan kinerja baik Infrastuktur dan Kewilayahan	sesuai dengan RPJMD /RPD dibagi program dalam dok perencanaan PD Infrastuktur dan Kewilayahan x 100	Persen	100	100	100	300.000.000	100	360.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Keuangan														
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rata rata Mandatory Spending (Kesehatan, Pendidikan, Infrastuktur, APIP, Pelatihan), Penyusunan KUA PPAS, penyusunan Nota Keuangan, Penjualan RA/PPD		Persen	N/A	N/A	97%	5.617.115.361	98%	6.178.826.897	98%	6.796.709.587	98%	6.796.709.587	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Kesesuaian Waktu penyampaian Laporan Keuangan Daerah Kepada BPK, kesesuaian penyeterapan anggaran terhadap rencana anggaran		Persen	N/A	N/A	92%		94%		96%		96%		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	kesesuaian dokumen perencanaan		Persen	N/A	N/A	100%		100%		100%		100%		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rata rata Persentase capaian pengamanan aset daerah.		Persen	N/A	N/A	60%	11.351.120.674	65%	12.486.232.742	70%	13.734.856.016	70%	13.734.856.016	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase pemanfaatan barang milik daerah yang digunakusahkan		Persen	N/A	N/A	91%		92%		95%		95%		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak	Jumlah wp uang patuh dibagi jumlah WP	Persen	106,67	77	78%	605.150.000	79%	695.922.000	80%	800.400.000	80%	800.400.000	Badan Pendapatan Daerah
	Persentase Pemenuhan Keterseediaan Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen yang tersedia dibagi jumlah dokumen yang dibutuhkan	Persen	100	100	100%	1.226.235.000	100%	1.254.401.500	100%	1.374.597.000	100%	1.374.597.000	Badan Pendapatan Daerah
	Persentase Capaian Target Pajak Daerah	Realisasi Pajak dibagi Target Pajak	Persen	121,34	100	100%	10.116.426.000	100%	10.621.098.500	100%	11.851.743.400	100%	11.851.743.400	Badan Pendapatan Daerah
	Persentase Pemenuhan Layanan dan Pelaporan Data Informasi Pendapatan Daerah	Jumlah Layanan dan Laporan yang terpenuhi dibagi Jumlah layanan dan laporan yang diminta	Persen	100	100	100%	1.121.700.000	100%	1.290.000.000	100%	1.483.500.000	100%	1.483.500.000	Badan Pendapatan Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Prosentase Perangkat Daerah yang melaksanakan 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis)	Jumlah Perangkat Daerah yang diperiksa dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100%	Persen	0	1	33%	4,052,089,979	66%	399,686,962	100%	532,223,158	100%	532,223,158	Inspektorat
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Prosentase Perangkat Daerah yang Memenuhi Kriteria Menuju Zona Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dicanangkan dibagi Jumlah Seluruh Perangkat Daerah dikali 100%	Persen	0	100	100%	2,935,289,003	100%	3,908,630,836	100%	5,204,732,821	100%	5,204,732,821	Inspektorat
Kewilayahan														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Total terpenuhinya paten sesuai dengan standar / total seluruh paten di masing-masing kecamatan x 100%	Persen	100	100%	100%	4,076,000,000	100%	4,850,000,000	100%	5,350,000,000	100%	5,350,000,000	Kecamatan Balaraja
	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Total infrastruktur dasar (penghubung desa) yang terpelihara / total infrastruktur dasar (penghubung desa) x 100%												Kecamatan Balaraja
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Total infrastruktur dasar (penghubung desa) yang terpelihara / total infrastruktur dasar (penghubung desa) x 100%	Persen	98.55%	98.55	98.60%	9,072,700,183	98.75%	11,340,875,229	98.88%	14,176,094,036	98.88%	14,176,094,036	Kecamatan Cikupa
	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Total terpenuhinya paten sesuai dengan standar / total seluruh paten di masing-masing kecamatan x 100%												Kecamatan Cikupa
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Total infrastruktur dasar (penghubung desa) yang terpelihara / total infrastruktur	Persen	87,5%	88,25%	88,25%	8,600,000,000	88,75%	8,900,000,000	89,5%	8,900,000,000	89,5%	8,900,000,000	Kecamatan Cisauk

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Definisi Operasional	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Prangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Kondisi Kinerja Awal			2024			2025			2026		Target		Rp
				2022	2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1 DAN PELAYANAN PUBLIK	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Total terpenuhnya paten sesuai dengan standar / total seluruh paten di masing-masing kecamatan x 100%	Persen	100%	100%	100%	8.600.000.000	100%	10.100.000.000	100%	10.600.000.000	100%	10.600.000.000	Kecamatan Kemuri			
	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Total infrastruktur dasar (penghubung desa) yang terpelihara / total infrastruktur dasar (penghubung desa) x 100%												Kecamatan Kemuri			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																	
	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Total terpenuhnya paten sesuai dengan standar / total seluruh paten di masing-masing kecamatan x 100%	Persen	87%	100%	100%	16.849.919.360	100%	17.615.824.785	100%	19.377.407.264	100%	19.377.407.264	Kecamatan Kosambi			
	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Total infrastruktur dasar (penghubung desa) yang terpelihara / total infrastruktur dasar (penghubung desa) x 100%												Kecamatan Kosambi			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																	
	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Total terpenuhnya paten sesuai dengan standar / total seluruh paten di masing-masing kecamatan x 100%	Persen	100%	100%	100%	6.173.158.470	100%	6.779.224.317	100%	7.467.646.748	100%	7.467.646.748	Kecamatan Legok			
	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Total infrastruktur dasar (penghubung desa) yang terpelihara / total infrastruktur dasar (penghubung desa) x 100%												Kecamatan Legok			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																	
	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Total terpenuhnya paten sesuai dengan standar / total seluruh paten di masing-	Persen	88,86%	89%	89,25%	4.871.433.022	89,50%	5.976.124.918	89,70%	7.300.509.780	89,70%	7.300.509.780	Kecamatan Kresak			

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026				
				2022	2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DAN PELAYANAN PUBLIK														
	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Total terpenuhinya paten sesuai dengan standar/ total seluruh paten di masing-masing kecamatan x 100%	Persen	100%	100%	100%	220,000,000	100%	220,000,000	100%	220,000,000	100%	220,000,000	Kecamatan Pasar Kemis
	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Total infrastruktur dasar (penghubung desa) yang terpelihara / total infrastruktur dasar (penghubung desa) x 100%												Kecamatan Pasar Kemis
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Total terpenuhinya paten sesuai dengan standar/ total seluruh paten di masing-masing kecamatan x 100%	Persen	100%	100%	100%	8,228,624,579	100%	10,100,000,000	100%	10,600,000,000	100%	10,600,000,000	Kecamatan Rajeg
	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Total infrastruktur dasar (penghubung desa) yang terpelihara / total infrastruktur dasar (penghubung desa) x 100%												Kecamatan Rajeg
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Total infrastruktur dasar (penghubung desa) yang terpelihara / total infrastruktur dasar (penghubung desa) x 100%												Kecamatan Sepatan
	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Total terpenuhinya paten sesuai dengan standar/ total seluruh paten di masing-masing kecamatan x 100%	Persen	86.93	89.8	91.35	6,886,000,000	91.9	8,436,000,000	92.45	9,986,000,000	92.45	9,986,000,000	Kecamatan Sepatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Total terpenuhinya paten sesuai dengan standar/ total seluruh paten di masing-	Persen	100	100	100	5,126,012,721	100	5,508,538,039	100	6,816,251,490	100	6,816,251,490	Kecamatan Sepatan Timur

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Definisi Operasional	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kondisi Kinerja Awal		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD						
				2022	2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		masing kecamatan x 100%																
	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Total infrastruktur dasar (penghubung desa) yang terpelihara / total infrastruktur dasar (penghubung desa) x 100%																
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																		
	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Total terperuhnya paten sesuai dengan standar / total seluruh paten di masing-masing kecamatan x 100%	Persen	86,93	89,80%	91,35%	3,801,049,866	91,90%	4,529,485,959	92,45%	5,402,020,577	92,45%	5,402,020,577	Kecamatan Sindang Jaya				
	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Total infrastruktur dasar (penghubung desa) yang terpelihara / total infrastruktur dasar (penghubung desa) x 100%	Persen	70%	70%	75%	8,000,000,000	78%	9,000,000,000	89%	10,000,000,000	89%	10,000,000,000	Kecamatan Solear				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																		
	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Total infrastruktur dasar (penghubung desa) yang terpelihara / total infrastruktur dasar (penghubung desa) x 100%	Persen	100	100%	100%	7,850,000,000	100%	8,450,000,000	100%	10,000,000,000	100%	10,000,000,000	Kecamatan Sukadiri				

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Definisi Operasional	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				Kondisi Kinerja Awal					2024					2025						2026				
				2022	2023	Target	Rp	Target	2024	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
PROGRAM PENYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Total infrastruktur dasar (penghubung desa) yang terpelihara / total infrastruktur dasar (penghubung desa) x 100%	Persen	100%	100%	100%	5.661.982.928	100%	6.228.181.221	100%	6.850.999.343	100%	6.850.999.343	100%	6.850.999.343	Kecamatan Sukamulya								
PROGRAM PENYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Total terpenunnya paten sesuai dengan standar / total seluruh paten di masing-masing kecamatan x 100%	Persen	100%	100%	100%	395.551.180	100%	415.106.298	100%	436.616.927	100%	436.616.927	100%	436.616.927	Kecamatan Sukamulya								
PROGRAM PENYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Total infrastruktur dasar (penghubung desa) yang terpelihara / total infrastruktur dasar (penghubung desa) x 100%	Persen	100%	100%	100%	8.000.000.000	100%	10.000.000.000	100%	12.000.000.000	100%	12.000.000.000	100%	12.000.000.000	Kecamatan Teluknaga								
PROGRAM PENYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Total terpenunnya paten sesuai dengan standar / total seluruh paten di masing-masing kecamatan x 100%	Persen	86,93	89,80%	100,00%	200.000.000	100,00%	200.000.000	100,00%	200.000.000	100,00%	200.000.000	100,00%	200.000.000	Kecamatan Teluknaga								
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Total terpenunnya paten sesuai dengan standar / total seluruh paten di masing-masing kecamatan x 100%	Persen	89,8	89,8	91,35	10.000.000.000	91,9	10.600.000.000	92,45	10.900.000.000	92,45	10.900.000.000	92,45	10.900.000.000	Kecamatan Tigaraksa								
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pembudayaan	Total kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan atau	Persen													Kecamatan Gunung Kaler								

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp			
				5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan / jumlah lembaga pemberdayaan) x 100%	Persen	100	100%	100%	1.325.000.000	100%	1.450.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	Kecamatan Balaraja		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan / jumlah lembaga pemberdayaan) x 100%	Persen	65.00%	88.00%	70.00%	748.000.000	75.00%	935.000.000	80.00%	1.168.750.000	80.00%	1.168.750.000	Kecamatan Cikupa		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan / jumlah lembaga pemberdayaan) x 100%	Persen	90.00%	92.50%	92.50%	17.755.000.000	93.75%	17.755.000.000	93.75%	17.755.000.000	93.75%	17.755.000.000	Kecamatan Ciasuk		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan / jumlah lembaga pemberdayaan) x 100%	Persen	100%	100%	100%	1.740.000.000	100%	1.760.000.000	100%	1.780.000.000	100%	1.780.000.000	Kecamatan Cisolka		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Kec. Curug	jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan / jumlah lembaga pemberdayaan) x 100%	Persen	75%	78%	79%	3.713.538.138	80%	4.456.245.766	80.50%	5.347.494.919	81%	13.517.278.822	Kecamatan Curug		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan / jumlah lembaga pemberdayaan) x 100%	Persen	65.00%	88.00%	70.00%	748.000.000	75.00%	935.000.000	80.00%	1.168.750.000	80.00%	1.168.750.000	Kecamatan Jember		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan / jumlah lembaga pemberdayaan) x 100%	Persen	88.88%	88%	100%	1.599.287.417	100%	1.748.000.000	100%	1.855.000.000	100%	1.855.000.000	Kecamatan Jayanti		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase penunahan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan	jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan / jumlah lembaga pemberdayaan) x 100%	Persen	100%	100%	100%	1.204.554.000	100%	1.325.010.000	100%	1.457.511.000	100%	1.457.511.000	Kecamatan Kelapa Dua		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan / jumlah lembaga pemberdayaan) x 100%	Persen	100%	100%	100%	1.120.000.000	100%	1.220.000.000	100%	1.320.000.000	100%	1.320.000.000	Kecamatan Kemiri		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		jumlah lembaga pemberdayaan) x 100%												
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	(jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pemberdayaan / jumlah lembaga pemberdayaan) x 100%	Persen	100%	100%	100%	1,398,130,797	100%	1,220,000,000	100%	1,320,000,000	100%	1,320,000,000	Kecamatan Rajeg
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	(jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pemberdayaan / jumlah lembaga pemberdayaan) x 100%	Persen	80	84	85	920,000,000	86.5	1,150,000,000	90	1,250,000,000	90	1,250,000,000	Kecamatan Sepatan Timur
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	(jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pemberdayaan / jumlah lembaga pemberdayaan) x 100%	Persen	75	80%	85	1,266,914,495	87	1,330,260,219	90	1,396,773,230	90	1,396,773,230	Kecamatan Sindang Jaya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	(jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pemberdayaan / jumlah lembaga pemberdayaan) x 100%	Persen	75	80	85	1,200,000,000	87	1,300,000,000	90	1,400,000,000	90	1,400,000,000	Kecamatan Sepatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	(jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pemberdayaan / jumlah lembaga pemberdayaan) x 100%	Persen	75%	88%	100%	1,000,000,000	100%	1,200,000,000	100%	1,250,000,000	100%	1,250,000,000	Kecamatan Solear
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	(jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pemberdayaan / jumlah lembaga pemberdayaan) x 100%	Persen	100	100%	100%	700,000,000	100%	850,000,000	90	900,000,000	90	900,000,000	Kecamatan Sukadiri
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	(jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pemberdayaan / jumlah lembaga pemberdayaan) x 100%	Persen	100%	100%	100%	900,134,948	100%	990,148,443	100%	1,089,163,287	100%	1,089,163,287	Kecamatan Sukamulya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	(jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pemberdayaan / jumlah lembaga pemberdayaan) x 100%	Persen	75	80%	100%	900,000,000	100%	970,000,000	100%	1,000,000,000	90%	1,000,000,000	Kecamatan Teluknaga
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	(jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pemberdayaan / jumlah lembaga pemberdayaan) x 100%	Persen	80	80	85	1,125,000,000	87	1,180,000,000	90	1,235,000,000	90	1,235,000,000	Kecamatn Tigaraksa

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026				
						2022	2023	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Total laporan trantibum yang difasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100%	Persen	100AA127:E433	100%	100%	471,000,000	100%	494,550,000	100%	519,277,500	100%	519,277,500	Kecamatan Balaraja
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Total laporan trantibum yang difasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100%	Persen	100%	100%	100%	362,500,000	100%	370,500,000	100%	380,700,000	100%	380,700,000	Kecamatan Cikupa
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Total laporan trantibum yang difasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100%	Persen	93,25%	94,00%	94,00%	584,000,000	94,75%	584,000,000	95,00%	584,000,000	95,00%	584,000,000	Kecamatan Cisaug
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Total laporan trantibum yang difasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100%	Persen	100%	100%	100%	560,000,000	100%	570,000,000	100%	580,000,000	100%	580,000,000	Kecamatan Cisoka
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Total laporan trantibum yang difasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100%	Persen	57,14%	71,43%	72,50%	943,976,199	73%	1,038,373,819	75,00%	1,142,211,201	75	3,124,561,219	Kecamatan Curug
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Total laporan trantibum yang difasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100%	Persen	100%	100%	100%	232,000,000	100%	290,000,000	100%	362,500,000	100%	362,500,000	Kecamatan Jambe
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Total laporan trantibum yang difasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100%	Persen	60,00%	71,40%	100%	120,000,000	100%	130,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	Kecamatan Jayanti
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Total laporan trantibum yang difasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100%	Persen	10%	10%	10%	107,939,000	10%	118,732,000	10%	130,606,000	10%	130,606,000	Kecamatan Kelapa Dua
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Total laporan trantibum yang difasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100%	Persen	100%	100%	100%	360,000,000	100%	370,000,000	100%	380,000,000	100%	380,000,000	Kecamatan Kemiri
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Total laporan trantibum yang difasilitasi / total seluruh laporan	Persen	60%	71,4%	100%	757,609,085	100%	792,045,862	100%	871,250,448	100%	871,250,448	Kecamatan Kosambi

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026				
				2022	2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		rantibum yang masuk x 100%												
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan rantibum yang ditindaklanjuti	Total laporan rantibum yang difasilitasi / total seluruh laporan rantibum yang masuk x 100%	Persen	100%	100%	100%	425,204,136	100%	595,285,790	100%	833,400,107	100%	833,400,107	Kecamatan Kresek
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan rantibum yang ditindaklanjuti	Total laporan rantibum yang difasilitasi / total seluruh laporan rantibum yang masuk x 100%	Persen	100%	100%	100%	351,000,000	100%	359,550,000	100%	364,000,000	100%	364,000,000	Kecamatan Kronjo
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan rantibum yang ditindaklanjuti	Total laporan rantibum yang difasilitasi / total seluruh laporan rantibum yang masuk x 100%	Persen	60%	75%	100%	392,000,000	100%	442,000,000	100%	492,200,000	100%	492,200,000	Kecamatan Legok
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan rantibum yang ditindaklanjuti	Total laporan rantibum yang difasilitasi / total seluruh laporan rantibum yang masuk x 100%	Persen	100%	100%	100%	380,000,000	100%	442,000,000	100%	492,200,000	100%	492,200,000	Kecamatan Mauk
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan rantibum yang ditindaklanjuti	Total laporan rantibum yang difasilitasi / total seluruh laporan rantibum yang masuk x 100%	Persen	100%	100%	100%	468,284,732	100%	450,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	Kecamatan Mekar Baru
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan rantibum yang ditindaklanjuti	Total laporan rantibum yang difasilitasi / total seluruh laporan rantibum yang masuk x 100%	Persen	60%	75%	75%	300,000,000	80.00%	350,000,000	90%	400,000,000	90%	400,000,000	Kecamatan Pagedangan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan rantibum yang ditindaklanjuti	Total laporan rantibum yang difasilitasi / total seluruh laporan rantibum yang masuk x 100%	Persen	100%	100%	100%	360,000,000	100%	370,000,000	100%	380,000,000	100%	380,000,000	Kecamatan Pakuhaji
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan rantibum yang ditindaklanjuti	Total laporan rantibum yang difasilitasi / total seluruh laporan rantibum yang masuk x 100%	Persen	100%	100%	100%	765,000,000	100	765,000,000	100	765,000,000	100	765,000,000	Kecamatan Panongan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan rantibum yang ditindaklanjuti	Total laporan rantibum yang difasilitasi / total seluruh laporan rantibum yang masuk x 100%	Persen	60%	100%	100%	320,000,000	100%	330,000,000	100%	330,000,000	100%	330,000,000	Kecamatan Pasar Kemis

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026				
				2022	2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Total laporan trantibum yang difasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100%	Persen	60	75	100	392.000.000	100	442.000.000	100	492.200.000	100	492.200.000	Kecamatan Sepatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Total laporan trantibum yang difasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100%	Persen	100	100	100	501.962.793	100	514.511.863	100	527.060.933	100	527.060.933	Kecamatan Sepatan Timur
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Total laporan trantibum yang difasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100%	Persen	60	75	100	491.210.689	100	515.771.224	100	541.559.785	100	541.559.785	Kecamatan Sindang Jaya
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Total laporan trantibum yang difasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100%	Persen	100	100%	100%	380.000.000	100%	442.000.000	100%	492.200.000	100%	492.200.000	Kecamatan Sukadiri
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Total laporan trantibum yang difasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100%	Persen	15%	10%	100%	401.682.600	100%	441.850.860	100%	486.035.946	100%	486.035.946	Kecamatan Sukamulya
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Total laporan trantibum yang difasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100%	Persen	60	75%	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	Kecamatan Teluknaga
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Total laporan trantibum yang difasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100%	Persen	75	75	100	8.000.000.000	100	8.500.000.000	100	8.700.000.000	100	8.700.000.000	Kecamatn Tigaraksa
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Total laporan trantibum yang difasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100%		100%	100%	100%	425.683.101	100%	370.000.000	100%	380.000.000	100%	380.000.000	Kecamatan Rajeg
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Total laporan trantibum yang difasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100%	Persen	43%	43%	43%	500.000.000	57%	500.000.000	71%	500.000.000	71%	500.000.000	Kecamatan Solear
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Total laporan trantibum yang difasilitasi / total seluruh laporan												Kecamatan Gunung Kaler

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Definisi Operasional	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Perangklak Daerah Penanggung Jawab					
				Kondisi Kinerja Awal					2024					2025						2026				
				2022	2023	Target	Rp	Target	2024	2025	Target	Rp	Target	2026	2027	Target	Rp	Target		Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Total laporan tranthbum yang difasilitasi / total seluruh laporan tranthbum yang masuk x 100%	Perseri	90,00%	92,50%	92,50%	200.000.000	94,00%	200.000.000	95,50%	200.000.000	95,50%	200.000.000	200.000.000	Kecamatan Cisauk									
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti		Perseri	100%	100%	100%	300.000.000	100%	330.000.000	100%	363.000.000	100%	363.000.000	363.000.000	Kecamatan Kelapa Dua									
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti		Perseri	N/A	N/A	100%	130.000.000	100%	140.000.000	100%	145.000.000	100%	145.000.000	145.000.000	Kecamatan Tigaraksa									
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti													Kecamatan Baliraja										
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti													Kecamatan Cikupa										
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti													Kecamatan Cisoka										
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Perseri	0%	0%	80%	150.000.000	81%	180.000.000	83%	216.000.000	83	546.000.000	Kecamatan Curug										
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti													Kecamatan Jambé										
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti													Kecamatan Jayanti										
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti													Kecamatan Kemiri										
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti													Kecamatan Kosambi										

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Definisi Operasional	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJ		Perangkat Daerah Penerimaan Jawab
				Kondisi Kinerja Awal		2024		2025		2026		Target	Rp			
				2022	2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
PEMERINTAHAN UMUM				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti														Kecamatan Kresak	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti														Kecamatan Kroyo	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti														Kecamatan Legok	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti														Kecamatan Mauk	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti														Kecamatan Mekar Baru	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti														Kecamatan Pagendaran	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti														Kecamatan Pakuhaji	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti														Kecamatan Panongan	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti														Kecamatan Pasar Kemis	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti														Kecamatan Sepatan	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti														Kecamatan Sepatan Timur	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti													Kecamatan Sindang Jaya
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti													Kecamatan Sukadiri
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti /jumlah rekomendasi x 100%	Persen	1	1	1	250,000,000	1	275,000,000	1	302,500,000	1	302,500,000	Kecamatan Sukamulya
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti /jumlah rekomendasi x 100%	Persen	0	0	1	300,000,000	1	300,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000	Kecamatan Teluknaga
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti													Kecamatan Rajeg
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti													Kecamatan Solear
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti													Kecamatan Gunung Kaler
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	(jumlah desa yang tertib administrasi/Jumlah Desa)x100%	Persen	100%	100%	100%	425,683,101	100%	370,000,000	100%	380,000,000	100%	380,000,000	Kecamatan Rajeg
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	(jumlah desa yang tertib administrasi/Jumlah Desa)x100%	Persen	85.71	88,88%	89.00%	190,000,000	90.00%	240,000,000	92%	300,000,000	92%	300,000,000	Kecamatan Solear
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	(jumlah desa yang tertib administrasi/Jumlah Desa)x100%	Persen	90.10%	90.10%	90.15%	135,416,000	90.25%	222,341,200	90.40%	258,673,100	90.40%	258,673,100	Kecamatan Cisauk
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	(jumlah desa yang tertib administrasi/Jumlah Desa)x100%	Persen	90,00%	92,50%	92,50%	515,000,000	94,00%	815,000,000	95,50%	615,000,000	95,50%	615,000,000	Kecamatan Cisauk
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	(jumlah desa yang tertib	Persen	97%	97%	100%	290,000,000	100%	300,000,000	100%	310,000,000	100%	310,000,000	Kecamatan Cisoka

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PEMERINTAHAN DESA		administrasi/Jumlah Desa x100%												
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	(jumlah desa yang tertib administrasi/Jumlah Desa x100%	Persen	77.77%	89%	89.15%	308,851,708	89.30%	414,736,879	89.49%	373,710,567	89%	1,097,299,153	Kecamatan Curug
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	(jumlah desa yang tertib administrasi/Jumlah Desa x100%	Persen	100%	100%	100%	360,000,000	100%	370,000,000	100%	380,000,000	100%	380,000,000	Kecamatan Gunung Kaler
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	(jumlah desa yang tertib administrasi/Jumlah Desa x100%	Persen	97%	97%	100%	200,000,000	100%	210,000,000	100%	220,000,000	100%	220,000,000	Kecamatan Gunung Kaler
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	(jumlah desa yang tertib administrasi/Jumlah Desa x100%	Persen	42.86%	42.86%	65.14%	153,750,000	70.89%	99,000,000	79.89%	154,687,500	79.89%	154,687,500	Kecamatan Jambe
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	(jumlah desa yang tertib administrasi/Jumlah Desa x100%	Persen	88.88%	88.88%	100%	150,000,000	100%	160,000,000	100%	180,000,000	100%	180,000,000	Kecamatan Jayanti
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	(jumlah desa yang tertib administrasi/Jumlah Desa x100%	Persen	100%	100%	100%	532,221,991	100%	585,444,190	100%	643,988,609	100%	643,988,609	Kecamatan Kelapa Dua
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	(jumlah desa yang tertib administrasi/Jumlah Desa x100%	Persen	95%	97%	100%	200,000,000	100%	210,000,000	100%	220,000,000	100%	220,000,000	Kecamatan Kemiri
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	(jumlah desa yang tertib administrasi/Jumlah Desa x100%	Persen	86%	88,8%	100%	208,586,100	100%	218,067,286	100%	239,874,015	100%	239,874,015	Kecamatan Kosambi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	(jumlah desa yang tertib administrasi/Jumlah Desa x100%	Persen	78%	42.86%	65.14%	67,650,000	70.89%	67,650,000	79.89%	67,650,000	79.89%	67,650,000	Kecamatan Kresek
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	(jumlah desa yang tertib administrasi/Jumlah Desa x100%	Persen	2	2	2	250,000,000	3	300,000,000	3	350,000,000	100	350,000,000	Kecamatan Kronjo
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	(jumlah desa yang tertib administrasi/Jumlah Desa x100%	Persen	100%	88.88%	100%	190,000,000	100%	240,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	Kecamatan Legok

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	jumlah desa yang tertib administrasi/ jumlah Desa x100%	Perseri	85,71%	88,88	89	300.000.000	90	240.000.000	92	300.000.000	92	300.000.000	Kecamatan Mauk
PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	jumlah desa yang tertib administrasi/ jumlah Desa x100%	Perseri	59%	60%	65%	350.000.000	70%	400.000.000	75%	350.000.000	75%	350.000.000	Kecamatan Mekar Baru
PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	jumlah desa yang tertib administrasi/ jumlah Desa x100%	Perseri	77%	88%	88,00%	250.000.000	90,00%	300.000.000	95%	350.000.000	95%	350.000.000	Kecamatan Pagadangan
PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	jumlah desa yang tertib administrasi/ jumlah Desa x100%	Perseri	95%	97%	100%	200.000.000	100%	210.000.000	100%	220.000.000	100%	220.000.000	Kecamatan Pakuhaji
PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	jumlah desa yang tertib administrasi/ jumlah Desa x100%	Perseri	100%	100%	100%	190.000.000	100	240.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	Kecamatan Panongan
PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	jumlah desa yang tertib administrasi/ jumlah Desa x100%	Perseri	100%	100%	100%	80.000.000	100%	85.000.000	100%	85.000.000	100%	85.000.000	Kecamatan Pasar Kemis
PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	jumlah desa yang tertib administrasi/ jumlah Desa x100%	Perseri	100%	100%	100%	200.000.000	100%	210.000.000	100%	220.000.000	100%	220.000.000	Kecamatan Rayeg
PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	jumlah desa yang tertib administrasi/ jumlah Desa x100%	Perseri	85,71	42,86	42,86	190.000.000	90	240.000.000	92	300.000.000	92	300.000.000	Kecamatan Sepatan
PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	jumlah desa yang tertib administrasi/ jumlah Desa x100%	Perseri	80	84,25%	85%	236.463.506	87%	255.380.586	88%	300.000.000	88%	300.000.000	Kecamatan Sepatan Timur
PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	jumlah desa yang tertib administrasi/ jumlah Desa x100%	Perseri	85,71	88,88	89	94.824.080	90	99.565.284	92	104.543.549	92	104.543.549	Kecamatan Sindang Jaya
PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	jumlah desa yang tertib administrasi/ jumlah Desa x100%	Perseri	70%	70%	75%	300.000.000	78%	400.000.000	89%	450.000.000	89%	450.000.000	Kecamatan Solekar
PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	jumlah desa yang tertib	Perseri	85,71	88,88%	89	400.000.000	90	240.000.000	92	300.000.000	92	300.000.000	Kecamatan Sukadiri

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pembinaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dibagi jumlah cakupan orang yang tergabung dalam forum kewaspadaan dini masyarakat di Kabupaten Tangerang	Persen	0.33%	0.33%	12,94%	6,000,000,000	12,94%	6,000,000,000	12,94%	6,000,000,000	38,83%	6,000,000,000	Kesatuan Bangsa dan Politik
x.x.xxx														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	71	72	95	488,606,428,698	95.5	491,706,600,801	96	496,956,331,622	96	496,956,331,622	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100%	100%	100	941,903,767,298	100	960,741,842,720	100%	981,878,163,390	100.00%	981,878,163,390	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan Kinerja BLUD Bidang Kesehatan	Jumlah Laporan Kinerja BLUD Bidang Kesehatan dibagi dengan Jumlah BLUD yang Ada dikali 100%	Persen	100	100	100	1,500,000,000	100	1,750,000,000	100	2,000,000,000	100	2,000,000,000	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen											Dinas Bina Marga dan SDA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	100	100	13,940,000,000	100	13,999,000,000	100	14,100,000,000	100	14,100,000,000	Dinas Perumahan,Permukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	100	100	27,315,000,000	100	27,702,500,000	100	28,149,000,000	100	28,149,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	100	100	27,315,000,000	100	27,702,500,000	100	28,149,000,000	100	28,149,000,000	Satuan Pol PP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	100	100	13,039,300,000	100	13,200,300,000	100	12,875,300,000	100	39,114,900,000	Dinas Sosial

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	100	100	14,338,612,000	100	15,111,359,000	100	15,856,162,000	100	15,856,162,000	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen											Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	100	100	24,755,000,000	100	27,085,000,000	100	27,415,000,000	100	27,415,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	100	100	15,603,112,460	100	1,735,069,401	100	1,798,869,401	100	1,798,869,401	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	100	100	12,587,898,196	100	13,207,143,105	100	13,631,700,261	100	13,631,700,261	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen											Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	100	100	4,037,499,800	100	3,397,000,000	100	1,851,118,090	100	1,851,118,090	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen		100	100	2,562,825,620	100	1,076,803,100	100	1,190,525,300	100	1,190,525,300	Dinas Koperasi dan Usaha Menengah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	100	100	20,455,000,000	100	20,930,000,000	100	21,355,000,000	100	21,355,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100%		100%	10,257,746,770	100%	10,827,160,240	100%	11,433,196,997	100%	11,433,196,997	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100%	100%	100.00%	17,505,740,263	100.00%	18,093,009,319	100.00%	18,993,951,476	100%	18,993,951,476	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	100	100	34,574,385,583	100	35,446,720,222	100	36,213,113,228	100	36,213,113,228	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100%	100%	100%	15,350,584,442	100%	14,748,984,442	100%	14,995,484,442	100%	45,095,053,326	Dinas perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan admistrasi umum dan Sarana prasarana	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum dan Sarana prasarana dibagi jumlah total kebutuhan Administrasi umum dan sarana prasarana dikali 100	Persen	100	100	100	64,162,278,206	100	68,516,456,967	100	71,927,279,816	100	71,927,279,816	Sekretariat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu	Rata-rata Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Tepat Waktu	Persen	100	100	100	43,227,486,156	100	45,388,860,463	100	47,603,178,486	100	47,603,178,486	Sekretariat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Pelayanan Pimpinan dibagi Jumlah laporan yg dilaksanakan x 100	Persen	100	100	100	1,609,126,911	100	3,218,253,822	100	3,379,166,513	100	3,379,166,513	Sekretariat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Komponen Pelaporan SAKIP	Komponen Pelaporan SAKIP	Nilai	11,18	11,26	11,34	966,008,301	11,42	1,014,308,716	11,5	1,065,024,152	11,5	1,065,024,152	Sekretariat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	88	100	100	77,604,270,259	100	77,409,270,259	100	77,409,270,259	100	77,409,270,259	Sekretariat DPRD

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2022	2023	Target	2024		2025		2026		Target		Rp
							Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100%	100%	100%	27.180.762.630	100%	29.898.838.893	100%	32.888.722.782	100%	32.888.722.782	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100%	100%	100%	22.505.527.444	100%	25.514.026.384	100%	27.440.535.983	100%	27.440.535.983	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100%	100%	100%	36.431.300.666	100%	41.585.706.901	100%	47.504.878.215	100%	47.504.878.215	Inspektoral	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100%	100%	100%	7.863.442.800	100%	8.475.442.800	100%	8.843.442.800	100%	8.843.442.800	Kecamatan Balaraja	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100%	100%	100%	4.219.692.316	100%	4.383.038.750	100%	5.302.518.063	100%	5.302.518.063	Kecamatan Cikupa	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	90%	90%	90%	10.214.850.000	90%	10.214.850.000	90%	10.214.850.000	90%	10.214.850.000	Kecamatan Cileauk	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100%	100%	100%	7.697.000.000	100%	7.762.500.000	100%	7.847.500.000	100%	7.847.500.000	Kecamatan Cisoka	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100%	100%	100%	14.309.282.976	100%	15.914.252.686	100%	17.708.295.147	100%	47.931.830.808	Kecamatan Curug	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100%	100%	100%	5.800.000.000	100%	5.900.000.000	100%	6.000.000.000	100%	6.000.000.000	Kecamatan Gunung Kalér	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100%	100%	100%	7.060.047.731	100%	8.261.344.795	100%	9.267.992.136	100%	9.267.992.136	Kecamatan Jambé	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100%	100%	100%	6,169,517,201	100%	6,491,568,979	100%	6,673,834,979	100%	6,673,834,979	Kecamatan Jayanti
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100%	100%	100%	16,028,496,800	100%	16,330,645,200	100%	16,028,496,800	100%	16,028,496,800	Kecamatan Kelapa Dua
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100%	100%	100%	8,410,000,000	100%	9,770,000,000	100%	10,955,000,000	100%	10,955,000,000	Kecamatan Kemiri
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100%	100%	100%	15,379,982,625	100%	16,079,072,744	100%	17,686,980,018	100%	17,686,980,018	Kecamatan Kosambi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100%	100%	100%	12,402,309,377	100%	14,919,898,412	100%	17,903,878,095	100%	17,903,878,095	Kecamatan Kresek
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100%	100%	100%	7,223,662,000	100%	7,535,662,000	100%	7,823,942,800	100%	7,823,942,800	Kecamatan Kronjo
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100%	100%	100%	19,000,290,502	100.00%	19,186,656,266	100.00%	19,779,406,266	100%	19,779,406,266	Kecamatan Legok
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100%	100%	100%	9,552,062,000	100%	9,468,862,000	100%	9,771,812,000	100%	9,771,812,000	Kecamatan Mauk
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100%	100%	100%	6,865,228,502	100%	6,840,794,266	100%	6,970,394,266	100%	6,970,394,266	Kecamatan Mekar Baru

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100%	100%	100%	11,861,319,706	100%	12,441,319,706	100%	12,496,319,706	100%	12,496,319,706	Kecamatan Pagedangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100%	100%	100%	7,900,000,000	100%	8,000,000,000	100%	8,100,000,000	100%	8,100,000,000	Kecamatan Pakuhaji
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100%	60%	100%	13,935,250,000	100%	13,556,750,000	100%	13,572,750,000	100%	13,572,750,000	Kecamatan Pasar Kemis
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100%	100%	100%	7,931,330,573	100%	9,770,000,000	100%	10,955,000,000	100%	10,955,000,000	Kecamatan Rajeg
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	100	100.00%	9,175,712,000	100.00%	9,468,862,000	100.00%	9,771,812,000	100%	9,771,812,000	Kecamatan Sepatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	100	100.00%	7,006,852,033	100.00%	7,142,489,897	100.00%	7,298,798,074	100%	7,298,798,074	Kecamatan Sepatan Timur
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	100%	100%	6,666,346,905	100%	7,004,164,251	100%	7,354,622,463	100%	7,354,622,463	Kecamatan Sindang Jaya
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100%	100%	100%	7,000,000,000	100%	7,500,000,000	100%	8,000,000,000	100%	8,000,000,000	Kecamatan Solear
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	100%	100%	6,745,771,000	100%	6,957,721,000	100%	7,181,271,000	100%	7,181,271,000	Kecamatan Sukadiri
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100%	100%	100%	6,845,736,242	100%	7,527,559,865	100%	8,248,147,350	100%	8,248,147,350	Kecamatan Sukamulya

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	100%	100%	10,345,000,000	100%	11,325,000,000	100%	11,725,000,000	100%	11,725,000,000	Kecamatan Teluknaga
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	100	100%	10,617,000,000	100%	10,824,000,000	100%	11,059,000,000	100%	11,059,000,000	Kecamatan Tigaraksa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	100	100%	7,223,662,000	100%	7,535,662,000	100%	7,823,942,800	100%	7,823,942,800	Kecamatan Kronjo
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	100	100%	10,617,000,000	100%	7,050,516,769	100%	7,723,400,944	100%	7,723,400,944	Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja pembangunan setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan (*outcome*) atau kompositnya (*impact*).

Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Indikator kinerja daerah ini merupakan target pemerintah daerah yang harus dicapai yang merupakan target selama tiga tahun dalam RPD Kabupaten Tangerang tahun 2024–2026. Target tersebut ditetapkan dan dicapai secara bertahap setiap tahunnya.

Tabel 8.1 Indikator Kinerja Makro Kabupaten Tangerang
tahun 2024-2026

NO	URAIAN INDIKATOR MAKRO	SATUAN	CAPAIAN		TARGET RPD			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	4,63	5,21*	5,20 - 5,47	5,11 - 5,25	5,20 - 5,33	5,27 - 5,41
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,06	7,88	7,67	7,51	7,36	7,2
3	Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin	Persen	7,12	6,92	6,58	5,94	5,74	5,5
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	72,29	72,97	73,27	73,55	73,82	74,1
5	Index Gini	Poin	0,294	0,290	0,285	0,28	0,275	0,27

8.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai Sasaran serta merupakan ikhtisari hasil berbagai Program untuk penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Lebih jelasnya dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 8.2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tangerang
Tahun 2024-2026

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
1	Indeks Pendidikan	indeks	0,68	0,69	0,7	0,71	0,71
2	Indeks Kesehatan	indeks	0,77	0,78	0,79	0,8	0,8
3	Indeks Pembangunan Pemuda	indeks	50,13	52	53	54	54
4	Indeks Pemberdayaan Gender	indeks	62,17	62,67	63,17	63,67	63,67
5	Laju Pertumbuhan Penduduk	persen	1,47	1,3	1,15	1,05	1,05
6	Indeks Ketentrangan dan Ketertiban	indeks	2,02	2,14	2,26	2,38	2,5
7	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	persen	52,63	53,49	54,35	55,21	55,21
8	Persentase Realisasi Investasi (PMA/ PMDN)	persen	N/A	5,12	5,12	5,12	5,12
9	Persentase Daya Saing Produk Unggulan Lokal	persen	20,45	22,73	26,52	30,30	100
10	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	persen	3,25	3,41	3,57	3,73	3,73
11	Indeks Desa Membangun	indeks	0,7107	0,7307	0,7407	0,7507	0,7507
12	Indeks Ketahanan Pangan	indeks	77,00	77,50	78,00	78,50	78,50
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	67,05	67,45	67,85	68,25	68,65
14	Persentase PPKS yang Berdaya	persen	N/A	1,44	1,69	1,87	1,87
15	Nilai SAKIP	point	72,52	76	78	80,5	80,5
16	Nilai Indeks Kemandirian Fiskal	indeks	0,505	0,520	0,525	0,530	0,530
17	Opini BPK	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
20	Indeks Profesionalitas ASN	indeks	57,45	71	75	81	81
21	Maturitas SPIP	point	31,522	3,35	3,36	3,37	3,37
23	Indeks SPBE	indeks	2,66	3,17	3,19	3,21	3,21
24	Indeks Pelayanan Publik	indeks	4,12	4,2	4,3	4,4	4,4
25	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	indeks	N/A	70	75	80	80
26	Persentase Realisasi Pola Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	persen	8	37	55	55	55

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
27	Rasio Luas Kawasan Permukiman, Perumahan dan Pemakaman yang layak	point	0,9433	0,9439	0,9442	0,9442	0.9442
28	Rasio Konektivitas Kabupaten	point	0,75	0,79	0,83	0,83	0,83
29	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	55,88	56,25	56,89	56,89	56,89
30	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	indeks	130,45	120	115	115	115

Tabel 8.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Pertumbuhan PDRB	Persen	5,21	5,11 - 5,25	5,20 - 5,33	5,27 - 5,41	5,27 - 5,41
2	laju Inflasi	Persen	4,56	4,1	3,9	3,7	3,7
3	PDRB per kapita	Ribu Rp	46.813,25	52.260,82	54.984,60	57.708,38	57.708,38
4	Indeks Gini	Indeks	0,282	0,26	0,26	0,25	0,25
5	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indeks	0,9	0,7	0,6	0,5	0,5
6	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	93,08	94,06	94,26	94,50	94,50
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,97	73,55	73,82	74,1	74,1
8	Angka melek huruf	Persen	96,64	97,85	97,86	97,87	97,87
9	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,92	9,52	9,82	10,12	10,12
10	Angka usia harapan hidup	Tahun	70,28	70,51	70,63		70,74
11	Persentase balita gizi buruk	Persen	0,55	0,37	0,28	0,19	0,19
12	Prevalensi balita gizi kurang	Persen	2,14	1,74	1,54	1,34	1,34
13	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	86,42	87,02	87,32	87,62	87,62
14	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	67,05	67,85	68,25	68,65	68,65
15	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	7,88	7,51	7,36	7,2	7,2
16	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Persen	24,9	24,87	24,85	24,83	24,83
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,45	90,45	91,95	93,45	93,45
18	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	50,5	52	52,5	53	53
19	Opini BPK	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
20	Penguatan cadangan pangan	Ton	25	25	25	25	25
21	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	6,53	6,29	6,21	6,13	6,13
22	Produksi sektor pertanian	Ton	425.913,78	434.447,84	438.765,76	438.765,76	438.765,76
23	Pertumbuhan Industri	Persen	4,1	4,3	4,4	4,5	4,5
II	ASPEK DAYA SAING DAERAH						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	
1	Rasio Ekspor + Impor terhadap PD 3 (indikator keterbukaan ekonomi)	Persen	1285	1,3	1,31	1,32	1,32
2	Rasio ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>)	Persen	40,68	38,59	37,54	38,59	38,59
III	A:ASPEK PELAYANAN UMUM LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR						
A	PENDIDIKAN						
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	46	50,6	52,6	54,6	54,6
2	Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A	Persen	104,8	105	105,1	105,2	105,2
3	Angka partisipasi kasar SMP/MTs, Paket B	Persen	103,56	103,76	103,86	103,96	103,96
4	Angka Partisipasi ditamatkan (APT) SD/MI	Persen	31,57	37,57	40,57	43,57	43,57
5	Angka Partisipasi ditamatkan (APT) SMP/MTs	Persen	12,64	14,64	15,64	16,64	16,64
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	94,61	95,5	96	96,5	96,5
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket E	Persen	74,02	77,3	80	80,5	80,5
8	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	99,85	95,5	96	96,5	96,5
9	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket E	Persen	98,30	77,3	80	80,5	80,5
10	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,03	0,12	0,11	0,10	0,10
11	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0,02	0,05	0,04	0,03	0,03
12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100	100	100	100	100
13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100
14	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	86,33	92,01	92,03	92,04	92,04
15	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	104,61	100	100	100	100
16	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Nilai	26,00	29,82	29,92	29,32	29,32
17	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Nilai	27,33	27,91	28,01	28,11	28,11
18	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Nilai	0,04	0,034	0,032	0,03	0,03
19	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Nilai	0,05	0,037	0,034	0,031	0,031

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	
20	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Nilai	20,03	21,36	22,03	22,69	22,69
21	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	96,88	99,82	99,83	99,84	99,84
22	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	96,64	96,55	96,65	96,75	96,75
23	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	90,93	100	100	100	100
B	KESEHATAN						
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Bayi	229	216	210	204	204
2	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Jiwa	33	28	26	25	25
3	Rasio posyandu per satuan balita	Nilai	0,84	0,85	0,86	0,87	0,87
4	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk	Nilai	18,7	19,37	19,70	20,03	20,03
5	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Nilai	0,87	0,98	1,04	1,10	1,10
6	Rasio dokter per satuan penduduk	Nilai	0,39	0,42	0,43	0,44	0,44
7	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	79	71	67	63	63
8	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	101,4	100	100	100	100
9	Cakupan Desa/keurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	Persen	96	98	99	100	100
10	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	96,6	100	100	100	100
11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100
12	Penderita diare yang ditangani	Persen	83,3	100	100	100	100
13	Angka kejadian Malaria	Kasus	0				
14	Cakupan kunjungan bayi	Persen	99,75	100	100	100	100
15	Cakupan puskesmas	Persen	27,6	32,85	35,47	38,09	38,09
16	Cakupan pembantu puskesmas	Persen	16,8	18,13	18,79	19,45	19,45
17	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	100	100	100	100	100
18	Cakupan pelayanan nifas	Persen	99	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	
19	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	90,48	100	100	100	100
20	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	99,35	100	100	100	100
21	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	96	100	100	100	100
C	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
	PEKERJAAN UMUM						
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	92,59	93,18	93,77	94,36	94,36
2	Persentase rumah tinggal bersantisasi	Persen	100	100	100	100	100
3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	69,94	77,87	84,94	84,94	84,94
4	Persentase areal kawasan kumuh	Persen	28,00	24,00	20,00	18,00	18,00
	PENATAAN RUANG						
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Persen	18,40	21,10	22,45	23,80	23,80
2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Persen	18,40	21,10	22,45	23,80	23,80
3	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	Persen	99,35	99,45	99,50	99,55	99,55
D	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN						
1	Rasio rumah layak huni	Persen	94,48	95,42	95,89	96,36	96,36
E	SOSIAL						
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	99,46	98	99	99	99
IV	LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR						
A	TENAGA KERJA						
1	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	67,69	69,34	70,27	71,35	71,35
2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen	100	100	100	100	100
B	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	59,6	64	66,2	68,4	68,4

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	14	14	18	18	18
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	23,06	23,52	23,75	23,98	23,98
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	40,60	41,96	42,64	43,32	43,32
5	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Persen	99,11	99,59	99,83	100,00	100,00
6	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Persen	98,37	99,58	99,82	100,00	100,00
7	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Persen	97,37	99,31	99,86	100,00	100,00
8	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Persen	100	100	100	100	100
C	PANGAN						
1	Ketersediaan pangan utama	Ton	407.362	405.917	409.957,79	414.030,80	414.030,80
2	Ketersediaan energi kkal/perkapita/hari	Kalori	2.527	2.4	2.4	2.4	2.4
3	Ketersediaan protein gr/perkapita/hari	gram	82	63	63	63	63
4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	100	100	100	100	100
D	PERTANAHAN						
1	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	18	22	24	26	26
2	Penyelesaian izin lokasi	Persen	100	100	100	100	100
E	LINGKUNGAN HIDUP						
1	Timbulan sampah yang ditangani	Persen	44,12	60	62	64	64
F	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Persen	93,10	96,89	98,78	100,00	100,00
G	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
1	Persentase PKK aktif	Persen	100	100	100	100	100
2	Persentase Posyandu aktif	Persen	100	100	100	100	100
H	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BEREKONOMI						
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	1,47	1,36	1,31	1,29	1,29
2	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,13	2,08	2,07	2,05	2,05

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir	
				2024	2025	2026		
3	Persentase sektor yang tersosialisasi konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan alat ukurnya (IPBK/ indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	Persen	54,12	63,46	67,24	71,06	71,06	71,06
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen	78	85	92	100	100	100
5	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Persen	1.8	1.4	1.2	1	1	1
6	Angka pemakaian kontrasepsi/CPF bagi perempuan menikah usia 15 – 49	Persen	70.75	71.25	71.5	71.75	71.75	71.75
7	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Tahun	16	16	16	16	16	16
8	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	6,36	6,34	6,34	6,33	6,33	6,33
9	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	10.4	10.1	10.1	10	10	10
10	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKPJ)	Persen	24,21	24,69	24,93	25,17	25,17	25,17
11	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	16,85	18,57	19,49	20,46	20,46	20,46
12	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	88	92	94	96	96	96
13	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (EKR) ber-KB	Persen	84.5	85.5	86	86.5	86.5	86.5
14	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	97	97.1	98	98.5	98.5	98.5
15	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persen	45	77.5	93.75	94	94	94
16	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persen	92	94	94.5	95	95	95
17	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	100	100	100	100	100	100
18	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (U-PPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	98.48	98.7	98.72	98.78	98.78	98.78
19	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen	44	46	50	50	50	50

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	
20	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	169,35	186,71	196,04	205,85	205,85
21	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes	Persen	160,79	177,27	186,13	195,44	195,44
22	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan		58,92	64,86	67,57	70,27	70,27
23	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	98,42	98,78	99	100	100
24	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persen	56,34	56,75	57	57,25	57,25
25	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Usia Rata- Rata	21	21,6	21,8	22	22
26	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	Persen	42,94	7,5	8	8,5	8,5
I	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
1	Persentase koperasi aktif	Persen	95	96	96,5	97	97
2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	93,99	94,2	94,4	94,6	94,6
J	PENANAMAN MODAL						
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	7.248	9.238	11.775	15.009	15.009
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Miliar Rupiah	18.348,19	19.287,61	20.275,14	21.313,23	21.313,23
3	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Persen	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3
K	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA						
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	83,33	87,72	96,49	100,00	100,00
2	Persentase wirausaha muda	Persen	87,7	92,1	96,5	100,0	100,0
3	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	100	100	100	100	100
4	Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	16	20	23	26	26

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	
5	Jumlah atlet berprestasi	Orang	104	128	144	160	160
L	PERPUSTAKAAN						
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	52.841	53.1	53.200,0	53.400,0	53.400,0
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	buku	112.881	113.2	113.4	113.6	113.6
3	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Buah	57.979	59	60	61	
M	KEARSIPAN						
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	66	68	69	70	70
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	1	1	1	1	1
V	LAYANAN URUSAN PILIHAN						
A	PARIWISATA						
1	Kunjungan wisata	Kunjungan	24.579.434	27.017.377	29.719.114	31.691.025	31.691.025
B	KEBUDAYAAN						
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	12	14	16	18	18
C	PERTANIAN						
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	6,53	6,29	6,21	6,13	6,13
D	PERDAGANGAN						
1	Ekspor Bersih Perdagangan	Miliar Rupiah	25.098,78	27.017.377	29.719.114	31.691.025	31.691.025
E	PERINDUSTRIAN						
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	15	25	30	35	35
F	KELAUTAN DAN PERIKANAN						
1	Produksi perikanan	Ton	42.237,00	42.836,62	43.158,37	43.482,80	43.432,80
2	Konsumsi ikan	Persen	100,05	100	100	100	100
3	Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	29,17	20,83	20,83	20,83	20,83
4	Produksi perikanan budidaya kelompok nelayan	Persen	21,00	11	11	11	11
5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Persen	98,71	99,15	99,15	99,15	99,15
6	Nilai tukar nelayan	Persen	106,45	106,45	106,45	106,45	106,45

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir	
				2024	2025	2026		
VII	PENUNJANG PEMERINTAHAN							
A	PERENCANAAN PEMBANGUNAN							
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	Persen	95,12	100	100	100	100	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD	Persen	95,12	100	100	100	100	100
B	KEUANGAN							
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	11,31					
3	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	Persen	0,4					
4	Belanja pendidikan (20%)	Juta Rupiah	653.110,62	730.947,82	769.866,42	808.785,02	847.703,62	
5	Belanja kesehatan (10%)	Juta Rupiah	326.555,31	365.473,91	384.933,21	404.392,51	423.851,81	
6	Perbandingan antara belanja operasi dengan belanja modal	Rasio	3,25	3,15	3,1	3,1	3,1	
7	Belanja Operasi	Persen	0.73	0.67	0.63	0.6	0.57	
8	Belanja Modal	Persen	0.26	0.31	0.33	0.36	0.39	
9	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Persen	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	
10	Penetapan APBD	n.a	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
C	PENGAWASAN							
1	Persentase tindak lanjut temuan	Persen						
D	SEKRETARIAT DEWAN							

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Cutcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN	TRANSISI	TARGET		OPD PENANGGUNG JAWAB	
					2022	2023	2024	2025		2026
				pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan dikali 100%						
1.b.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan dibagi Jumlah Penduduk di kabupaten/kota dikali 100%	0.099734	0.1	0.1	0.1	0.1	DINKES
1.b.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi dibagi Jumlah RS di kabupaten/kota dikali 100%	66.66567	100%	100%	100%	100%	DINKES
1.b.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota dikali 100%	100	100%	100%	100%	100%	DINKES
1.b.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan dibagi Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota dikali 100%	100	100%	100%	100%	100%	DINKES
1.b.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	99.75315	100%	100%	100%	100%	DINKES

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Cutcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN	TRANSISI	TARGET			OPD PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026	
				kabupaten/kota dikali 100%						
1.b.13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota dikali 100%	99.9159	100%	100%	100%	100%	DINKES
1.b.14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar dibagi Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota dikali 100%	100	100%	100%	100%	100%	DINKES
1.c.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) dibagi Luas kawasan permukiman rawan	0					DPPP

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Cutcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN	TRANSISI	TARGET		OPD PENANGGUNG JAWAB	
					2022	2023	2024	2025	2026	
				banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) x 100%						
1.c.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) dibagi Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) dikali 100%	0					DPPP
1.c.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan danelihara (ha) di tahun eksisting dibagi luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dikali 100%	5.63014	5.63014	6,43	7,64	8,84	DBMSDA

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN	TRANSISI	TARGET			OPD PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023*	2024	2025	2026	
1.c.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota. dibagi Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut. dikali 100%	48.77677					DPPP
1.c.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dibagi Jumlah rumah di Kabupaten A dikali 100%	97.56889					DPPP

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN	TRANSISI	TARGET			OPD PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023*	2024	2025	2026	
1.c.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya dibagi Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku dikali 100%	95%		95%	96%	97%	DTRB
1.c.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = dibagi Jumlahtotal panjang jalan kabupaten/kota dikali 100%	92.59125	92,08	93,18	93,77	94,36	DBMSDA
1.c.8.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis dibagi. Jumlahkebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota dikali 100%	100					DTRB
1.c.8.2	Urusan Pemerintahan Wajib	Pekerjaan Umum dan	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	100					DTRB

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN	TRANSISI	TARGET			OPD PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023*	2024	2025	2026	
				kriteria penerima pelayanan dikali 100%						
1.d.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) dibagi Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha dikali 100%	2.47	4,94	7,41	9,88	12,35	DPPP
1.d.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah unit rumah tidak layak huni dibagi Jumlah total unit rumah kabupaten/kota dikali 100%	3.32	3,43	3,54	3,66	3,77	DPPP
1.d.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU dibagi. Jumlah unit rumah kab/kota dikali 100%	27.56	27,59	27,62	27,66	27,66	DPPP
1.e.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani dibagi Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk dikali 100%	100					SATPOL PP
1.e.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkadayang memuat sanksiyang ditegakkan dibagi Jumlah keseluruhan	90.47619					SATPOL PP

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN	TRANSISI	TARGET			OPD PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023*	2024	2025	2026	
				korban bencana dikali 100%						
1.e.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat dibagi Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota dikali 100%	100	100	100	100	100	BPBD
			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran							
1.e.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan	14.26	13	13	13	13	BPBD

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN	TRANSISI	TARGET			OPD PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023*	2024	2025	2026	
				pemadaman kebakaran						
1.f.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis dikali 100%	89.93058	100	100	100	100	DINSOS
1.f.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran dibagi Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah	85.45648	100	100	100	100	DINSOS

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN	TRANSISI	TARGET			OPD PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023*	2024	2025	2026	
				tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota dikali 100%						
2.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD dibagi Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota dikali 100%	100					DISNAKER
2.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi Jumlah tenaga kerja keseluruhan dikali 100%	4.580316					DISNAKER
2.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) Jumlah tenaga kerja dilai 100	12058.38					DISNAKER
2.a.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dibagi. Jumlah Perusahaan dikali 100%	36.28218					DISNAKER

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN	TRANSISI	TARGET			OPD PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023*	2024	2025	2026	
2.g.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dibagi. Jumlah penduduk perempuan = 1579359	9.62	9,50	9,38	9,26	9,14	DPPPA
2.h.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dibagi Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan dikali 100%	9.050219	9.05	9.05	9.05	9.05	DPKP
2.i.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dibagi seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dikali 100%	100					DPPP
2.i.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum. Dibagi Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum dikali 100%	96,5	100	100	100	100	DPPP

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN	TRANSISI	TARGET			OPD PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023*	2024	2025	2026	
2.i.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dibagi Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan dikali 100%	100					DPPP
2.i.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha dibagi Jumlah penerima tanah obyek landreform dikali 100%	0					DPPP
2.i.5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah dibagi Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan dikali 100%	0					DPPP
2.i.6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak	Pertanahan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani dibagi	0					DPPP

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN	TRANSISI	TARGET			OPD PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023*	2024	2025	2026	
2.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun dibagi Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) dikali 100%	93.70079	8.55	9.35	10.31	11.49	DPMPD
2.m.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)		2.13	2.1	2.08	2.07	2.05	DPPKB
2.m.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur dikali 100%	70.75	71	71.25	71.5	71.75	DPPKB
2.m.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur dikali 100%	10.4	10.2	10.1	10.1	10	DPPKB
2.n.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota		0.95		0.76	0.79	0.83	DISHUB

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN	TRANSISI	TARGET			OPD PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023*	2024	2025	2026	
	Pelayanan Dasar									
				Rasio konektivitas Kabupaten = (IK x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)						
2.n.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota		0.5					DISHUB
2.o.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dibagi Jumlah PD dikali 100%	95.2381	100	100	100	100	DISKOMINFO
2.o.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dibagi Jumlah Layanan Publik dikali 100%	100	100	100	100	100	DISKOMINFO
2.o.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui	92.40443	92.45	92.5	92.75	93	DISKOMINFO

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN	TRANSISI	TARGET			OPD PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023*	2024	2025	2026	
	Pelayanan Dasar		kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota dibagi Jumlah penduduk dikali 100%						
2.p.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yangberkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset dibagi Jumlah seluruh koperasi aktif dikali 100%	11.78571					DKUM
2.p.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha dibagi. Jumlah usaha mikro keseluruhan dikali 100%	100					DKUM
2.q	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota dibagi Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota dikali 100%	67.81779	5,12	5,12	5,12	5,12	DPMPTSP
2.r.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kab/kota dibagi Jumlah pemuda	0.011683	87.7	92.1	96.5	100	DISPORABUDP AR

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN	TRANSISI	TARGET			OPD PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023*	2024	2025	2026	
	Pelayanan Dasar		melakukan evaluasi pembangunan daerah	pembangunan daerah dibagi . jumlah PD dikali 100%						
2.t	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi dibagi Jumlah area penilaian dikali 100%	63.41085	50.39	54.26	58.14	62.02	DISKOMINFO
2.u	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dibagi Jumlah cagar budaya yang terdata dikali 100%	0	2	3	4	4	DISPORABUDPAR
2.v.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	79.65	76.67	79.69	79.71	79.73	DISPERPUSIP
2.v.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat	55.58	55.6	55.62	55.64	55.66	DISPERPUSIP

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN	TRANSISI	TARGET			OPD PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023*	2024	2025	2026	
				(UPLM) dan aspek masyarakat (AM)						
2.w.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	Jumlah total Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip + persentase arsip in aktif yang telah dibuatkan daftar arsip + persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik + persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN dibagi 4	38.5	38.6	38.7	38.8	38.9	DISPERPUSIP
2.w.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Jumlah total Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK + Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK + Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah Provinsi yang digabung dan/atau	33	33.1	33.2	33.3	33.4	DISPERPUSIP

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN	TRANSISI	TARGET			OPD PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023*	2024	2025	2026	
				dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten dengan NSPK + Tingkat kesesuaian autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK + Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dan arsip dengan NSPK + Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK dibagi 6						
3.a	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota dibagi Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan dikali 100%	99.03668% (42.237 ton)	100% (42.659 ton)	100% (43.110 ton)	100% (43.562 ton)	100% (44.022 ton)	DISKAN
3.b.1	Urusan Pilihan	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1)dibagi Jumlah	2.00699	3,25	3,41	3,57	3,73	DISPORABUDPAR

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN	TRANSISI	TARGET			OPD PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023*	2024	2025	2026	
				wisatawan tahun n-1 dikali 100%						
3.b.2	Urusan Pilihan	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) dibagi . Jumlah wisatawan tahun n-1 dikali 100%	1541.126	110%	120%	130%	140%	DISPORABUDPAR
3.b.3	Urusan Pilihan	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual dibagi Jumlah kamar yang tersedia dikali 100%	4.324998	5%	6%	7%	8%	DISPORABUDPAR
3.b.4	Urusan Pilihan	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB. dibagi Total PDRB Berlaku	0					BAPENDA
3.b.5	Urusan Pilihan	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Total realiasi PAD dari sektor pariwisata dibagi. Total realisasi PAD dikali 100%	14.01562					BAPENDA
3.c.1	Urusan Pilihan	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun dibagi luas panen dikali 100%	493.7409	4.94	4.94	4.94	4.94	DPKP
3.c.2	Urusan Pilihan	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun	53.18207	0.53	1	1	1	DPKP

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN	TRANSISI	TARGET			OPD PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023*	2024	2025	2026	
				sebelumnya (t-1) dibagi Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) dikali 100%						
3.d	Urusan Pilihan	Kehutanan			0					
3.e	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin dibagi Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi dikali 100%	0					
3.f.1	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan dibagi. Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota dikali 100%	100					DISPERINDAG
3.f.2	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi dibagi RDKK dikali 100%	35.91782					DISPERINDAG
3.f.3	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase alat & alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan dibagi . jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera	100					DISPERINDAG

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN	TRANSISI	TARGET			OPD PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023*	2024	2025	2026	
				ulang di wilayah kabupaten/kota dikali 100%						
3.g.1	Urusan Pilihan	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n- Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) dibagi Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 dikali 100%	3.076923					DISPERINDAG
3.g.2	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP		100					DISPERINDAG
3.g.3	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan dibagi Jumlah izin yang dikeluarkan dikali 100%	2133.333					DISPERINDAG
3.g.4	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan dibagi	0					DISPERINDAG

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN	TRANSISI	TARGET			OPD PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023*	2024	2025	2026	
			(IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dikeluarkan dikali 100%						
3.g.5	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan dibagi. Jumlah izin yang dikeluarkan dikali 100%	0					DISPERINDAG
3.g.6	Urusan Pilihan	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		100					DISPERINDAG
3.h	Urusan Pilihan	Transmigrasi			0					
4.a.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan dibagi. Jumlah APBD dikali 100%	9.596808	9.291414506	8.995739648	8.709473865	8.432317739	BPKAD
4.a.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	Jumlah PAD dibagi Jumlah Pendapatan pada APBD dikali 100%	55.3314	46,75%	46,79%	46,84%	46,88%	BAPENDA
4.a.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		3		3	3	3	INSPEKTORAT

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN	TRANSISI	TARGET			OPD PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023*	2024	2025	2026	
4.a.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		3		3	3	3	INSPEKTORAT
4.a.5	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures dibagi jumlah belanja APBD dikali 100%	83.07564	83.8	83.9	84.1	84.3	BPKAD
4.a.6	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
4.b.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n dibagi jumlah kontrak keseluruhan tahun n dikali 100%	1.201201					SETDA
										Terkait perencanaan target, bersangkutan dengan OPD BAPPEDA, karena bagian PBJ hanya

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN	TRANSISI	TARGET			OPD PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023*	2024	2025	2026	
										sebagai fasilitator.
4.b.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif dibagi Jumlah seluruh pengadaan dikali 100%	13.50912	7.44758	7.81996	8.2109 54	8.6215	SETDA
4.b.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan dibagi total belanja operasi dan modal dikali 100%	48.33711					SETDA
										Data bersangkutan dengan OPD BPKAD
4.b.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) dibagi Jumlah	595.4265					SETDA

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN	TRANSISI	TARGET			OPD PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023*	2024	2025	2026	
				Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) dikali 100%						
										Data bersangkutan dengan OPD DISPERINDAG
4.c.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas dibagi Jumlah seluruh pegawai (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) dikali 100%	77,091	78,00	79,00	80,00	81,00	BKPSDM
4.c.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) dibagi seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) dikali 100%	13,161	30,00	31,00	32,00	33,00	BKPSDM
4.c.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi seluruh jumlah pegawai Fungsional	82,009	83,00	84,00	85,00	86,00	BKPSDM

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN	TRANSISI	TARGET			OPD PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023*	2024	2025	2026	
			(Information on resources available to frontline service delivery units)	Pemda dibagi. Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda dikali 100%						
4.e.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda dibagi total jumlah dokumen yang telah dirinci dikali 100%	83.33333					SETDA

BAB IX PENUTUP

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 berisikan kebijakan menengah transisi sampai dengan periode perencanaan jangka menengah hasil dari pemilihan kepala daerah serentak pada 2024. RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dokumen RPD ini merupakan penjabaran kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang (2005-2025) untuk terwujudnya *Kabupaten Tangerang Berdaya Saing didukung Masyarakat Madani*. RPD ini memiliki peran strategis karena memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu tahun 2024-2026, sesuai kondisi keuangan daerah dan dinamika lingkungan dengan menggunakan pendekatan perencanaan teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah, dan bawah-atas.

RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 3 (tiga) tahun kedepan. Untuk itu diperlukan komitmen, kesepahaman, kerjasama, transparansi, konsistensi, dan inovasi, serta rasa tanggungjawab yang tinggi demi mencapai target-target yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, setiap unsur pemerintah daerah baik eksekutif dan legislatif, masyarakat hingga dunia usaha diharapkan dapat berkontribusi secara aktif dalam mensukseskan program program pada RPD.

9.1 Kaidah Pelaksanaan

Dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 merupakan pedoman bagi pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menyusun RKPD mulai tahun 2024 sampai dengan 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat pada dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta masyarakat maupun dunia usaha;
- b. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya yang dipedomani dan dijabarkan dalam penyusunan RKPD; dan
- c. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang berkewajiban menyempurnakan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang nantinya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPD Tahun 2024-2026, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah;

9.2 Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun RKPD Tahun 2026. Sebagaimana diketahui, Tahun 2026 adalah tahun terakhir RPD kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 dan bila RPJMD periode berikutnya belum ditetapkan maka RPD 2024-2026 ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)

periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada dokumen RPJPN, RPJPD Kabupaten Tangerang, dan RPJMN.

Proses keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah akan tercermin pada kualitas manusianya, integritas birokrasi yang berkelanjutan dan ekonomi yang maju dan inklusif. Dengan pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah tersebut, diharapkan Kabupaten Tangerang akan semakin dekat dalam pencapaian visi jangka panjangnya yaitu "*Kabupaten Tangerang Berdaya Saing didukung Masyarakat Madani*"

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR